

Laporan Akhir

PENYUSUNAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH TAHUN 2017







KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terpanjat kehadiran Tuhan YME, atas berkat karunia-Nya sehingga Laporan Akhir kegiatan PENYUSUNAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH TAHUN 2017 telah dapat tersusun. Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, pada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah - Badan Koordinasi Penanaman Modal, bekerjasama dengan PT. Abdi Nusa Kreasi selaku Konsultan pelaksana pekerjaan.

Disusunnya Laporan Akhir ini bertujuan untuk menyampaikan hasil akhir dari kajian secara menyeluruh mengenai potensi, prioritas dan peluang investasi yang ada di masing-masing daerah kajian. Laporan Akhir ini secara keseluruhan disajikan dalam 5 (lima) bagian pembahasan yang meliputi: Pendahuluan; Metodologi; Gambaran Umum Daerah Kajian; Potensi dan Peluang Investasi Daerah Kajian; serta Penutup.

Akhir kata, Kami mengharapkan adanya saran, masukan, dan koreksi dari berbagai pihak sehingga Laporan Akhir ini bisa lebih komprehensif, lengkap dan bermanfaat. Disamping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2017

PT. Abdi Nusa Kreasi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN.....	1-3
1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	1-3
1.3.1. Lingkup Wilayah Kajian.....	1-3
1.3.2. Lingkup Kegiatan	1-4
1.3.3. Standar Teknis yang Ditetapkan	1-5
1.3.4. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	1-5
1.4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN	1-6
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	1-6
BAB 2. METODOLOGI.....	2-1
2.1. PENDEKATAN	2-1
2.2. KERANGKA PIKIR	2-3
2.3. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	2-6
2.4. PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI.....	2-14
2.5. METODOLOGI PEMETAAN DAN UPLOAD DATA.....	2-16
BAB 3. GAMBARAN UMUM DAERAH KAJIAN	3-1
3.1. PROVINSI JAWA TIMUR	3-1
3.1.1. Kabupaten Jombang.....	3-10
3.1.2. Kabupaten Tuban.....	3-24
3.2. PROVINSI JAWA TENGAH.....	3-33
3.2.1. Kabupaten Rembang	3-41

3.2.2. Kabupaten Semarang	3-49
3.3. PROVINSI SUMATERA SELATAN	3-58
3.3.1. Kota Palembang.....	3-68
3.3.2. Kabupaten Banyuasin	3-77
3.4. PROVINSI JAMBI.....	3-85
3.4.1. Kabupaten Bungo	3-95
3.4.2. Kabupaten Sarolangun	3-102
BAB 4. PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KAJIAN	4-1
4.1. SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DAERAH.....	4-1
4.1.1. Sektor Unggulan Kabupaten Jombang	4-2
4.1.2. Sektor Unggulan Kabupaten Tuban	4-3
4.1.3. Sektor Unggulan Kabupaten Rembang.....	4-5
4.1.4. Sektor Unggulan Kabupaten Semarang.....	4-6
4.1.5. Sektor Unggulan Kota Palembang	4-7
4.1.6. Sektor Unggulan Kabupaten Banyuasin	4-9
4.1.7. Sektor Unggulan Kabupaten Bungo.....	4-10
4.1.8. Sektor Unggulan Kabupaten Sarolangun	4-12
4.2. KINERJA INVESTASI RIIL DI DAERAH.....	4-13
4.3. PETA POTENSI, PRIORITAS, DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	4-19
4.4. PELUANG INVESTASI DAERAH TAHUN 2017	4-44
4.4.1. Peluang Investasi Kabupaten Jombang.....	4-44
4.4.2. Peluang Investasi Kabupaten Tuban	4-54
4.4.3. Peluang Investasi Kabupaten Rembang	4-66
4.4.4. Peluang Investasi Kabupaten Semarang	4-78
4.4.5. Peluang Investasi Kota Palembang	4-92
4.4.6. Peluang Investasi Kabupaten Banyuasin	4-106
BAB 5. PENUTUP	5-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Kerangka Pikir Kegiatan Pemetaan Investasi Daerah	2-3
Tabel 2-2	Topik, Responden dan Sasaran Data atau Informasi	2-8
Tabel 3-1	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	3-2
Tabel 3-2	Sebaran Ketinggian Tempat di Provinsi Jawa Timur	3-3
Tabel 3-3	Sebaran Kemiringan Tempat di Provinsi Jawa Timur	3-3
Tabel 3-4	Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Timur	3-4
Tabel 3-5	Kondisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	3-5
Tabel 3-6	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015	3-6
Tabel 3-7	PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)	3-6
Tabel 3-8	PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)	3-7
Tabel 3-9	Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jawa Timur	3-9
Tabel 3-10	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang	3-11
Tabel 3-11	Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2015	3-15
Tabel 3-12	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2015	3-16
Tabel 3-13	Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014	3-17
Tabel 3-14	Pertumbuhan Ekonomi Kategorikal Kab. Jombang Tahun 2011-2014	3-20
Tabel 3-15	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Jombang	3-22
Tabel 3-16	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban	3-25
Tabel 3-17	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2011, 2015 dan 2016	3-28
Tabel 3-18	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Tuban Tahun 2015	3-28
Tabel 3-19	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tuban Tahun 2015	3-29
Tabel 3-20	Perkembangan PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016	3-29
Tabel 3-21	Peranan PDRB ADHB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016 (persen)	3-30
Tabel 3-22	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016 (persen)	3-31
Tabel 3-23	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Tuban	3-32
Tabel 3-24	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	3-34

Tabel 3-25	Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah	3-36
Tabel 3-26	Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016	3-37
Tabel 3-27	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.....	3-37
Tabel 3-28	Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016.....	3-38
Tabel 3-29	Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jawa Tengah.....	3-39
Tabel 3-30	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang	3-41
Tabel 3-31	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2010, 2015 dan 2016.....	3-44
Tabel 3-32	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015	3-44
Tabel 3-33	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015	3-45
Tabel 3-34	Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016	3-46
Tabel 3-35	Distribusi PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2016.....	3-47
Tabel 3-36	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Rembang	3-48
Tabel 3-37	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang	3-50
Tabel 3-38	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2016	3-53
Tabel 3-39	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	3-54
Tabel 3-40	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2015	3-55
Tabel 3-41	Perkembangan PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2011-2016	3-55
Tabel 3-42	Distribusi PDRB adhb Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016.....	3-56
Tabel 3-43	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Semarang	3-57
Tabel 3-44	Pembagian Wilayah Administratif di Provinsi Sumatera Selatan.....	3-59
Tabel 3-45	Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan	3-61
Tabel 3-46	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2010, 2014, 2015 dan 2016.....	3-62
Tabel 3-47	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	3-63
Tabel 3-48	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2012-2016	3-64
Tabel 3-49	Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2012-2016	3-65
Tabel 3-50	Infrastruktur Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	3-66
Tabel 3-51	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Palembang	3-69
Tabel 3-52	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2010, 2015, dan 2016	3-71

Tabel 3-53	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Palembang Tahun 2015	3-72
Tabel 3-54	PDRB ADHB Kota Palembang Tahun 2013-2016.....	3-73
Tabel 3-55	PDRB ADHK 2010 Kota Palembang Tahun 2013-2016	3-73
Tabel 3-56	Infrastruktur Wilayah di Kota Palembang	3-75
Tabel 3-57	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Banyuasin	3-78
Tabel 3-58	Kondisi Kependudukan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015.....	3-81
Tabel 3-59	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015.....	3-82
Tabel 3-60	Kondisi Perekonomian di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015.....	3-82
Tabel 3-61	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Banyuasin.....	3-83
Tabel 3-62	Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	3-85
Tabel 3-63	Jenis Tanah di Provinsi Jambi.....	3-87
Tabel 3-64	Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi	3-88
Tabel 3-65	Kondisi Kependudukan di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016	3-89
Tabel 3-66	Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016	3-90
Tabel 3-67	Kondisi Perekonomian di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016	3-91
Tabel 3-68	Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jambi	3-93
Tabel 3-69	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Bungo	3-95
Tabel 3-70	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bungo Tahun 2016	3-98
Tabel 3-71	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bungo Tahun 2014-2015.....	3-99
Tabel 3-72	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bungo Tahun 2015-2016.....	3-99
Tabel 3-73	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2012-2016	3-100
Tabel 3-74	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Bungo	3-101
Tabel 3-75	Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sarolangun.....	3-103
Tabel 3-76	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sarolangun.....	3-106
Tabel 3-77	Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015	3-107
Tabel 3-78	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015	3-107
Tabel 3-79	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2016.....	3-108
Tabel 3-80	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2012-2016	3-109
Tabel 3-81	Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Sarolangun	3-110
Tabel 4-1	Nilai LQ Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	4-2
Tabel 4-2	Nilai LQ Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	4-4
Tabel 4-3	Nilai LQ Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015.....	4-5
Tabel 4-4	Nilai LQ Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015.....	4-6

Tabel 4-5	Nilai LQ Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015.....	4-8
Tabel 4-6	Nilai LQ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015.....	4-9
Tabel 4-7	Nilai LQ Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	4-11
Tabel 4-8	Nilai LQ Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015	4-12
Tabel 4-9	Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$).....	4-14
Tabel 4-10	Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$).....	4-16
Tabel 4-11	Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$)	4-18
Tabel 4-12	Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$).....	4-19
Tabel 4-13	Jenis Kegiatan Investasi Menurut Status Investasi dan Kabupaten/Kota Kajian Tahun 2017	4-30
Tabel 4-14	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Tuban.....	4-34
Tabel 4-15	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Jombang	4-35
Tabel 4-16	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Semarang	4-36
Tabel 4-17	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Rembang	4-37
Tabel 4-18	Analisis Peluang Investasi di Kota Palembang.....	4-38
Tabel 4-19	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Banyuasin	4-39
Tabel 4-20	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Bungo	4-40
Tabel 4-21	Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Sarolangun	4-42
Tabel 4-22	Akomodasi Wisata di Kabupaten Jombang Tahun 2016	4-47
Tabel 4-22	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016.....	4-49
Tabel 4-24	Arahan Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojowarno Tahun 2009-2029.....	4-50
Tabel 4-25	Klasifikasi Tingkat Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Tuban	4-55
Tabel 4-26	Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Tuban	4-55
Tabel 4-27	Sarana Prasarana di Kawasan Industri Tuban.....	4-59
Tabel 4-28	Jumlah Industri Menurut Jenis dan Unit di Kabupaten Tuban	4-60
Tabel 4-29	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis dan Unit di Kabupaten Tuban.....	4-61
Tabel 4-30	Karakteristik Kapal Rencana di Pelabuhan Umum Rembang	4-76
Tabel 4-31	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang	4-79
Tabel 4-32	Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, Tamu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang Tahun 2015.....	4-84
Tabel 4-33	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang Tahun 2015.....	4-85

Tabel 4-34	Daya Tarik Wisata di Kota Palembang.....	4-93
Tabel 4-35	Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur di Kota Palembang Tahun 2016	4-97
Tabel 4-36	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Palembang Tahun 2016	4-98
Tabel 4-37	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2016	4-107
Tabel 4-38	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2016	4-108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Alur Pikir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah.....	2-5
Gambar 2-2	Diagram Alir Pembuatan Peta Pekerjaan Penyusunan peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah	2-17
Gambar 2-3	Diagram Alir Pekerjaan Penyiapan Data Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah	2-18
Gambar 2-4	Pengelolaan SIG Berbasis Desktop	2-19
Gambar 2-5	Contoh Lay-out dan Rancangan Awal Peta Potensi Daerah.....	2-20
Gambar 2-6	Contoh Tampilan Peta Potensi dan peluang investasi Daerah Pada SIPID.....	2-21
Gambar 2-7	Tahap Pembuatan CD Interaktif SIG Potensi dan peluang investasi Daerah..	2-21
Gambar 3-1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur	3-1
Gambar 3-2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	3-8
Gambar 3-3	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang.....	3-12
Gambar 3-4	Perkembangan Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2011-2015.....	3-16
Gambar 3-5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2011-2014.....	3-19
Gambar 3-6	Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014	3-21
Gambar 3-7	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tuban	3-24
Gambar 3-8	Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016.....	3-27
Gambar 3-9	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah	3-34
Gambar 3-10	Distribusi PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	3-38
Gambar 3-11	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang.....	3-42
Gambar 3-12	PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016	3-46
Gambar 3-13	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang.....	3-50
Gambar 3-14	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	3-59
Gambar 3-15	Peta Wilayah Administrasi Kota Palembang	3-69
Gambar 3-16	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palembang Tahun 2011-2016	3-74
Gambar 3-17	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin.....	3-79
Gambar 3-18	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jambi	3-86
Gambar 3-19	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	3-92
Gambar 3-20	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bungo.....	3-96

Gambar 3-21	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bungo	3-97
Gambar 3-22	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun	3-103
Gambar 4-1	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013-2015.....	4-3
Gambar 4-2	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013-2015.....	4-4
Gambar 4-3	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2015.....	4-6
Gambar 4-4	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2015	4-7
Gambar 4-5	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013-2015.....	4-9
Gambar 4-6	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013-2015	4-10
Gambar 4-7	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada Tahun 2013-2015.....	4-12
Gambar 4-8	Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada Tahun 2013-2015	4-13
Gambar 4-9	Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)	4-15
Gambar 4-10	Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)	4-17
Gambar 4-11	Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)	4-18
Gambar 4-12	Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jambi Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)	4-19
Gambar 4-13	Daya Tarik Wisata Panglungan-Wonosalam.....	4-45
Gambar 4-14	Kawasan Agrowisata Panglungan-Wonosalam.....	4-46
Gambar 4-15	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun 2016	4-47
Gambar 4-16	Kondisi Sarana Prasarana Kawasan Wisata Panglungan.....	4-48
Gambar 4-17	Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016	4-49
Gambar 4-18	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029.	4-51
Gambar 4-19	Kondisi Lahan Pengembangan Kawasan Wisata Panglungan.....	4-53
Gambar 4-20	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2017	4-53
Gambar 4-21	Arahan Peruntukan Kawasan Industri di Kabupaten Tuban.....	4-56
Gambar 4-22	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tuban Tahun 2016.....	4-58

Gambar 4-23	Kondisi Sarana Prasarana di Kawasan Industri Tuban	4-59
Gambar 4-24	Perkembangan Jumlah Industri di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015	4-61
Gambar 4-25	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Tuban Tahun 2017	4-64
Gambar 4-26	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Sekitar KIT	4-64
Gambar 4-27	Rencana Zonasi Peruntukan Lahan KIT	4-65
Gambar 4-28	Lahan Siap Bangun di Kawasan Industri Tuban	4-65
Gambar 4-29	Dokumentasi Aktivitas Galangan Kapal di Pelabuhan Lasem	4-67
Gambar 4-30	Lokasi Pelabuhan Rembang Tasik Agung dan Sluke	4-69
Gambar 4-31	Kondisi Pelabuhan Rembang di Kecamatan Sluke	4-69
Gambar 4-32	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2015	4-70
Gambar 4-33	Kondisi Eksisting Sarana Prasarana di Pelabuhan Rembang Sluke	4-71
Gambar 4-34	Kedudukan Pelabuhan Umum Rembang dalam Konstelasi Regional	4-75
Gambar 4-35	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Rembang Tahun 2017	4-75
Gambar 4-36	Kondisi Lahan Eksisting Pelabuhan Umum Rembang	4-77
Gambar 4-37	Potensi Utama Kawasan Wisata Tlogo Wening	4-81
Gambar 4-38	Potensi Pendukung Kawasan Wisata Tlogo Wening	4-82
Gambar 4-39	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2015	4-83
Gambar 4-40	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015	4-86
Gambar 4-41	Rencana Pola Ruang Kabupaten Semarang	4-88
Gambar 4-42	Kawasan Agrowisata Tlogo	4-89
Gambar 4-43	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Semarang Tahun 2017	4-90
Gambar 4-44	Kawasan Wisata Bukit Cinta	4-91
Gambar 4-45	Daya Tarik Wisata di Kota Palembang	4-95
Gambar 4-46	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kota Palembang Tahun 2015	4-96
Gambar 4-47	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Palembang Tahun 2012-2016	4-99
Gambar 4-48	Peta Peluang Investasi di Kota Palembang Tahun 2017	4-101
Gambar 4-48	Lokasi Pulau Kemaro	4-101
Gambar 4-50	Kondisi Eksisting Pulau Kemaro	4-103
Gambar 4-51	Peta Kepemilikan Lahan di Pulau Kemaro	4-104
Gambar 4-52	Rancangan Penataan Kawasan Pulau Kemaro	4-104
Gambar 4-53	Rancangan Penataan Kota Pusaka Pulau Kemaro	4-104
Gambar 4-54	Detail Rancangan Penataan Kota Pusaka Pulau Kemaro	4-105
Gambar 4-55	Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	4-109

Gambar 4-56	Rencana Pola Ruang Kabupaten Banyuasin	4-112
Gambar 4-56	Kluster Kawasan Pengembangan Prioritas di Kabupaten Banyuasin	4-113
Gambar 4-58	Rencana Pengembangan KEK Tanjung Api-Api.....	4-114
Gambar 4-59	Perusahaan/Industri Eksisting di Kawasan Industri Gasing	4-115

BAB 1





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Kondisi perekonomian Indonesia yang makin membaik meningkatkan minat investasi yang masuk baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 3 tahun terakhir terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tercapainya target investasi tersebut merupakan tantangan bagi semua pihak untuk meningkatkan nilai investasi yang pada tahun 2017. Peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari pesatnya kemajuan perkembangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia akibat aktifitas masyarakat yang terus berbenah dan membangun wilayahnya, serta mengelola potensi sumber daya alam dan aset manusia yang dimilikinya.

Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi dimana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan aset manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.

Mengingat potensi sumberdaya alam dan aset manusia merupakan hal yang dinamis, maka data dan informasi terkini yang akurat dan valid tentang potensi dan peluang investasi daerah dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah. Ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya tersebut sangat membantu para calon investor dalam memilih dan memutuskan minat rencana investasinya sesuai dengan bidang investasi dan wilayah/daerah yang diminatinya.

Salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi investasi, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang investasi daerah. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah juga merupakan upaya penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah yang *ready to invest* yang sesuai ketersediaan sumberdaya alamnya, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta

dukungan kebijakan daerah dan pusat. Adanya peta potensi dan peluang investasi daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia.

Arah perencanaan penanaman modal yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 atau yang biasa disebut dengan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) menyatakan bahwa arah kebijakan penanaman modal yang akan dilakukan pemerintah adalah perbaikan iklim dan penyebaran penanaman modal. Pemerintah memberikan kemudahan fasilitas, dan atau insentif penanaman modal serta mempromosikan penanaman modal. RUPM bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga berfungsi mensinergikan seluruh kepentingan sektoral terkait bidang penanaman modal.

Sebagai upaya membantu provinsi dan kabupaten/kota untuk menawarkan sejumlah investasi yang telah dinyatakan siap dan menjadi unggulan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, maka BKPM (bersama dengan Kementerian Dalam Negeri) sepakat membuat program *Regional Champion*. Daerah-daerah yang masuk dalam kelompok *Regional Champion* merupakan daerah yang dianggap telah siap sebagai daerah tujuan investasi. Kriteria yang digunakan antara lain (a) Pertumbuhan ekonomi daerah; (b) Komitmen terhadap reformasi, terutama iklim investasi; (c) Ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia; serta (d) Ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana.

Untuk meningkatkan arus investasi yang masuk ke Indonesia dan membantu daerah dalam meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi daerahnya, BKPM sejak tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah di 32 provinsi di Indonesia secara mendalam. Adapun 1 propinsi lagi yakni DKI Jakarta tidak dilakukan karena pengumpulan data dan informasi tentang investasi telah jauh lebih maju dibandingkan dengan 32 propinsi lainnya.

Selanjutnya untuk melengkapi ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah di tingkat propinsi yang sudah dilakukan, maka sejak tahun 2012 dilaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada potensi dan peluang investasi dengan satuan administratif level kabupaten/kota. Kajian mendalam tersebut dilakukan pada kabupate/kotan terpilih secara mendalam. Selain kajian mendalam, dilakukan pula kajian secara umum yang difokuskan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah kabupaten/kota terkini.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini adalah menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah (utamanya di level kabupaten/kota) pada 4 provinsi yang telah dipilih/ditentukan, serta peluang pengembangan investasi dalam bentuk data peta yang dilengkapi dengan metode analisis kajian yang terpadu, lengkap dan akurat tentang:

1. Potensi investasi unggulan daerah;
2. Peluang-peluang usaha termasuk didalamnya tentang:
 - ❖ Lokasi;
 - ❖ Ketersediaan lahan;
 - ❖ Ketersediaan bahan baku;
 - ❖ Ketersediaan sarana prasarana;
 - ❖ Peluang pasar, serta
 - ❖ Kawasan industri dan Kawasan khusus investasi (KEK, FTZ, Kawasan Berikat, dll).
3. Data terkait lainnya tiap wilayah di Indonesia

Tujuan dari pekerjaan ini adalah memberikan kemudahan bagi publik, khususnya calon investor dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada di suatu daerah dengan berbagai keunggulannya dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di setiap daerah. Data dan informasi dapat berupa buku kajian dan peta secara terpadu, lengkap, akurat dan terkini secara memadai sebagai bahan promosi investasi yang lebih fokus, sehingga mampu meningkatkan keuntungan kompetitif daerah menjadi negara yang menarik untuk tujuan investasi.

1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1. Lingkup Wilayah Kajian

Lingkup wilayah kajian intensif mencakup 8 kabupaten/kota terpilih pada 4 (empat) provinsi terpilih, yaitu

1. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Jombang (Provinsi Jawa Timur);
2. Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah);
3. Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan); dan
4. Kabupaten Bungo dan Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi).

Penentuan Kabupaten/kota yang akan menjadi lokus penyusunan peta potensi dan peluang investasi Daerah TA 2017 berdasarkan usulan dari instansi penanaman modal provinsi (IPMP) yang bersangkutan.

1.3.2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah TA 2017 adalah:

1. Melakukan pengumpulan /inventarisasi data awal dan menganalisa hasil usulan dari Instansi Penanaman Modal Propinsi mengenai potensi dan peluang investasi di Kabupaten/Kota.
2. Melakukan *focus group discussion* (FGD) di Ibukota Provinsi dengan Instansi Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dalam pembahasan peluang usaha/investasi yang akan dipetakan.
3. Pengumpulan data hasil FGD terkait dengan peluang usaha/investasi yang akan dipetakan beserta peta tata ruang berbasis GIS.
4. Melakukan analisis awal hasil pengumpulan data terkait dengan peluang usaha yang akan dipetakan.
5. Melakukan Workshop klarifikasi data dan penyempurnaan analisa terkait peluang usaha yang akan di petakan (di Kantor BKPM).
6. Melakukan Survei lokasi berdasarkan hasil analisis ke 8 (delapan) lokasi Kabupaten/Kota terpilih di 4 (empat) Provinsi menggunakan kamera dan alat GPS untuk mendapatkan foto lokasi dan titik kooordinat yang akurat.
7. Melakukan workshop finalisasi data dan hasil peta peluang usaha (di Kantor BKPM).
8. Penyusunan buku hasil analisa potensi dan peluang investasi yang meliputi:
 - a. Lokasi;
 - b. Ketersediaan bahan baku;
 - c. Ketersediaan lahan;
 - d. Sarana dan prasarana penunjang investasi;
 - e. Analisis kelayakan investasi dengan RTRW provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih
9. Penyusunan peta lokasi wilayah potensi dan peluang investasi berupa peta GIS berdasarkan hasil survei dan workshop finalisasi yang hasil pemetaannya diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

1.3.3. Standar Teknis yang Ditetapkan

Berdasarkan sifat pentingnya pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini, maka ditentukan beberapa standar teknis minimal yang harus dicukupi oleh Konsultan dalam menghasilkan rekomendasi kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan peta dan kajian merujuk pada potensi investasi daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah (c.q. PDPPM-Provinsi atau PDKPM-Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah).
2. Data dan informasi lapangan (data 8 kabupaten/kota terpilih pada 4 provinsi) untuk menentukan potensi investasi unggulan daerah dijangkau melalui FGD dan survai lapangan.
3. Peta, data dan informasi yang disajikan mengacu pada format data dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Peta dasar masing-masing provinsi format DEM (*Digital Elevation Model*) dengan layer administratif wilayah Indonesia terbaru, infrastruktur eksisting di daerah, serta layer-layer lainnya yang relevan terkait pengembangan potensi investasi di daerah bersangkutan.
4. Analisis potensi daerah dan peluang investasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta pertambangan yang dilihat dari data ketersediaan lahan, ketersediaan bibit, jumlah/kapasitas produksi, jumlah ekspor, jumlah produksi terserap, pelaku usaha, peluang pasar dan ketersediaan sumber bahan baku untuk industri pengolahan.
5. Kajian potensi investasi setidaknya mencakup aspek konsepsi investasi, aspek ekonomi dan non-ekonomi yang berpengaruh terhadap investasi di Indonesia, khususnya di daerah kajian intensif (kabupaten/kota pada 4 Provinsi).
6. Kajian setidaknya mampu memproyeksikan kekurangan dan keuntungan yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat (*social benefit*) hingga 5 tahun mendatang.
7. Kajian harus mampu membantu BKPM dan IPMP (Provinsi/kabupaten/kota) mempromosikan potensi investasi kepada calon investor dengan data dan informasi yang terkini, serta merealisasikan alternatif kebijakan pengembangan investasi di pusat/ daerah.

1.3.4. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Konsultan adalah 6 (enam) bulan dengan masa jaminan 3 bulan sejak ditetapkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Kontrak.

1.4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah diharapkan dapat memberikan informasi detail tentang “*potensi investasi daerah yang tepat dan terkini tentang peluang usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang, dan potensi unggulan lainnya kepada para calon investor baik lokal maupun asing*”.

Peta Potensi dan peluang Investasi Daerah akan dibuat dalam bentuk peta, buku kajian dan CD interaktif dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Secara detail keluaran yang diharapkan adalah:

1. Buku sebanyak 5 eksemplar untuk 12 daerah terdiri atas 8 (delapan) kabupaten/kota terpilih di 4 (empat) provinsi terpilih yang dicetak dengan ukuran kertas A4, cetak berwarna, menggunakan *glossy paper* dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
2. Peta potensi dan peluang investasi untuk 12 daerah terdiri atas 8 (delapan) kabupaten/kota terpilih di 4 (empat) provinsi terpilih yang dicetak dengan ukuran kertas A3, cetak berwarna, menggunakan *glossy paper* dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
3. Hasil peta lokasi investasi berbasis GIS di 8 (delapan) Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW dalam bentuk softcopy.
4. CD Interaktif (*autorun flash based interactive*) yang berisi Peta Potensi dan peluang Investasi Daerah dan Kajiannya (8 kabupaten/kota dan 4 provinsi) digandakan sebanyak 100 keping, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk mempermudah pemahaman Laporan Antara, Konsultan menyusun laporan ini dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang dilakukannya kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah, ruang lingkup pekerjaan, dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan.

BAB 2 METODOLOGI

Bab ini menguraikan tentang pendekatan pelaksanaan pekerjaan, kerangka pikir pelaksanaan kegiatan, serta metodologi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM DAERAH KAJIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum terhadap kondisi wilayah serta investasi dan potensi investasi pada kabupaten terpilih di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi yang akan dikaji secara mendalam.

BAB 4 PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KAJIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil kajian *desk study* dan FDG di daerah mengenai peta potensi dan peluang investasi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota kajian disertai dengan analisis pendukungnya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang direkomendasikan terkait dengan implikasi disusunnya peta potensi dan peluang investasi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota kajian agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB 2





BAB 2. METODOLOGI

2.1. PENDEKATAN

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Karena investasi merupakan bentuk penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang, sehingga dukungan pemerintah dan pemerintah daerah bagi investor dalam menanamkan modalnya dalam berbagai bidang usaha. Oleh karena di dalam pendekatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah perlu memperhatikan dengan seksama kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, ketersediaan potensi dan peluang investasi daerah, kesiapan infrastruktur pendukung, dan kesiapan dukungan masyarakatnya.

Secara garis besar, dua pendekatan akan digabungkan dalam rangkaian pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah, yaitu pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *top-down* terhadap usulan investasi.

Pendekatan *bottom-up*, yaitu menampung aspirasi dan permintaan Pemerintah Daerah terkait dengan potensi penanaman modal (investasi) di daerah.

Pendekatan *top down*, yaitu penetapan potensi investasi berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis setiap sektor atau kementerian yang terkait yang terkait dengan investasi daerah, khususnya dari BKPM.

Kedua pendekatan di atas akan dipertemukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan daftar potensi dan peluang investasi daerah yang secara perundangan sah untuk dilakukan, dan secara keekonomian layak untuk dikembangkan.

Pendekatan partisipatif dan multistakeholder juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah untuk menumbuhkan komitmen dan dukungan daerah terhadap investasi yang akan dilakukan.

Pendekatan strategi promosi dilakukan untuk memudahkan calon investor mengidentifikasi dan memilih potensi dan peluang investasi daerah yang sesuai dengan tujuan investor, serta tindakan yang harus dilakukan dari investasi yang dipromosikan.

Strategi promosi dilakukan dengan cara mengelompokkan potensi investasi daerah ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. **Kelompok Investasi yang Potensial untuk Dilakukan (*Potential Investment*).**
Kriteria investasi pada kelompok ini adalah:
 - a. Kesesuaian dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ataupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor-sektor, baik nasional maupun daerah, khususnya bidang pangan, energi dan infrastruktur;
 - c. Kesesuaian lokasi investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Keterkaitan antara sektor pangan, energi dan infrastruktur dengan wilayah kabupaten/ provinsi;
 - e. Berpotensi untuk menutup biaya (*cost recovery*);
 - f. Studi pendahuluan (*preliminary study*).
2. **Kelompok Investasi yang Prioritas untuk Dilakukan (*Priority Investment*).**
Kriteria investasi pada kelompok ini, adalah:
 - a. Usulan penanaman modal berasal dari Pemerintah Daerah atau investor yang benar-benar serius hendak menanamkan investasi di daerah;
 - b. Berdasarkan kajian pra-kelayakan (*pre-feasibility*) yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, kegiatan penanaman modal dinyatakan layak, baik dari segi hukum, teknis, dan finansial;
 - c. Resiko dan pengalokasian resiko telah teridentifikasi;
 - d. Termasuk dalam usulan prioritas program Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dan bentuk KPS telah terdefiniskan;
 - e. Pemerintah membantu pengidentifikasian investasi untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.
3. **Kelompok Investasi yang siap Ditawarkan (*Investment Ready for Offer*).** Kriteria kelompok investasi ini, antara lain:
 - a. Dokumen pendukung investasi sudah lengkap;
 - b. Dukungan pemerintah telah disetujui (jika diperlukan);
 - c. Apabila termasuk dalam program KPS yang ditawarkan oleh pemerintah, setidaknya sudah tersedia dokumen lelang, tim panitia pengadaan sudah terbentuk dan jadwal pelelangan sudah terdefinisi.

2.2. KERANGKA PIKIR

Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah merupakan bagian dari program BKPM dalam mempromosikan penanaman modal di Indonesia. Kegiatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah ini merupakan langkah strategis dalam menyediakan data dan informasi terkini, terutama berkaitan dengan potensi daerah, serta peluang pengembangan investasi, terutama dalam lingkup kabupaten/kota.

Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis, serta dipetakan dalam bentuk spasial dan informasi interaktif (SIPIID dan Promosi Interaktif). Berdasarkan pertimbangan di atas, kerangka pikir yang digunakan Konsultan dalam kegiatan ini adalah mengarah pada *Kerangka Pikir Strategi Promosi Investasi* di BKPM. Tujuannya adalah, agar kegiatan ini tidak terpisah atau berdiri sendiri dengan materi promosi investasi daerah yang telah terlebih dahulu ada.

Konsultan memandang perlu melakukan pengelompokan dalam menampilkan informasi dan promosi investasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah diuraikan sebelumnya. Kelompok promosi investasi tersebut adalah (1) Investasi potensial; (2) Investasi prioritas; dan (3) Investasi yang siap ditawarkan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nilai investasi yang dibutuhkan dari investasi yang siap ditawarkan ataupun prioritas tidak sesuai dengan harapan BKPM Pusat. Guna mengatasi hal ini, menurut Konsultan kewenangan promosi investasi juga perlu dipisahkan berdasarkan tingkat pemerintahan.

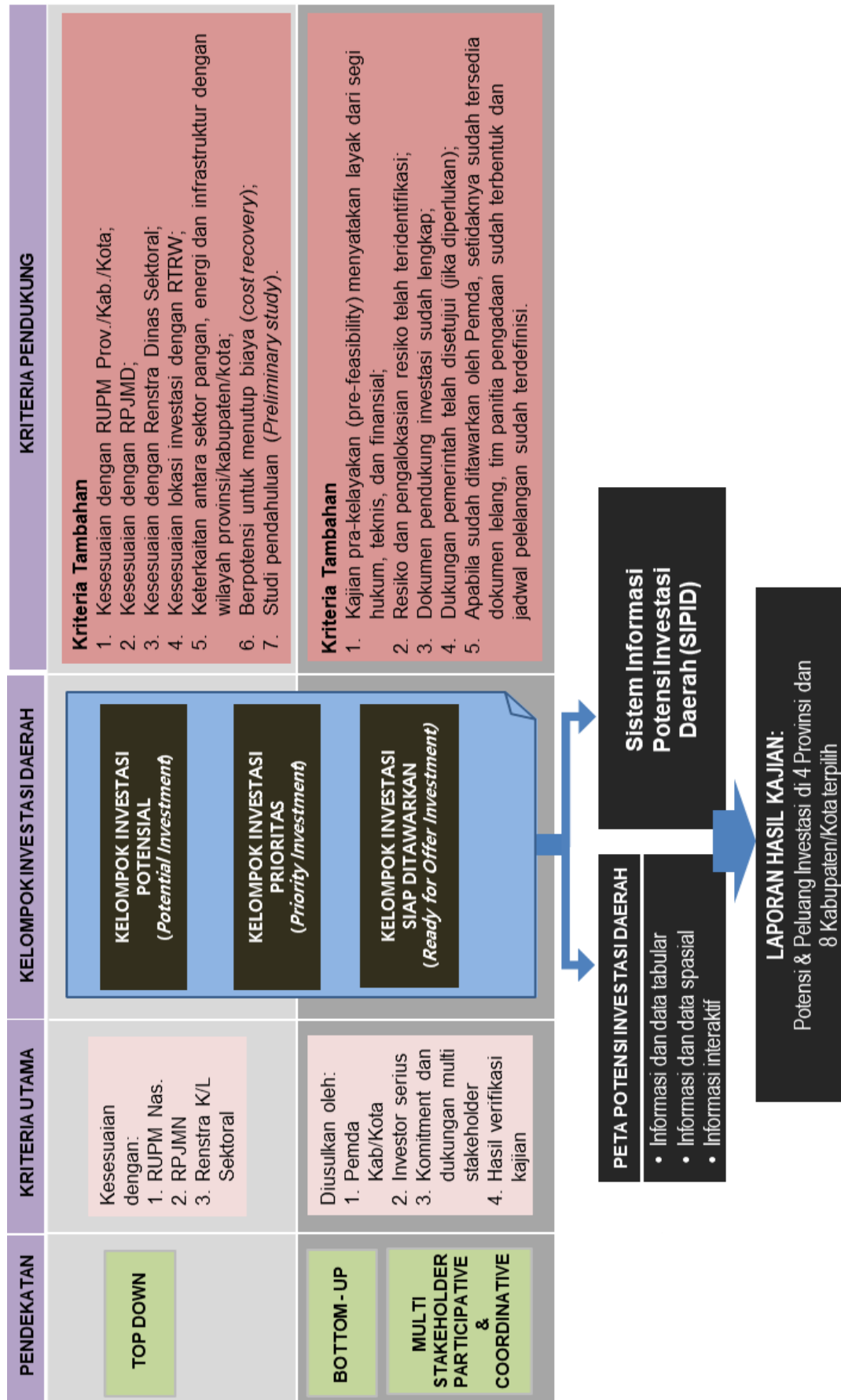
Perlu dipahami bersama, bahwa usulan Pemerintah Daerah biasanya masih acak belum terstruktur skala prioritasnya. Oleh karena itu, Tim Konsultan membantu Pemerintah Daerah merumuskan skala prioritas berdasarkan pertimbangan keahlian dan penilaian portofolio daerah dalam mempertimbangkan prioritas promosi investasi. Konsultan akan menggunakan *Metode Pembobotan dan Skor (weighting and scoring)* dalam menganalisis skala prioritas terhadap usulan daerah ini.

Tabel 2-1 Kerangka Pikir Kegiatan Pemetaan Investasi Daerah

NARASI RINGKAS	INDIKATOR (OVI)	VERIFIKASI (MOV)	ASUMSI PENTING
GOAL <i>Meningkatnya Investasi di Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Investasi (bidang pangan, energi dan infrastruktur) meningkat 15% - 20% dari tahun sebelumnya	Data perijinan dan nilai investasi yang akan ditanamkan	Potensi investasi yang ditawarkan sudah didukung dengan baik oleh hal-hal: • Infrastruktur fisik; • Kondisi sosial politik; • Institusi dan birokrasi daerah; • Peraturan dan kebijakan daerah;

NARASI RINGKAS	INDIKATOR (OVI)	VERIFIKASI (MOV)	ASUMSI PENTING
			- Kondisi ekonomi daerah; dan - Produktivitas tenaga kerja daerah
PURPOSE <i>Calon Investor mudah mendapatkan data yang akurat dan menentukan pilihan investasi</i>	- Data dan informasi tersedia di SKPD terkait dan BKPM Pusat dan Daerah; - Peluang investasi dikelompokkan berdasarkan kesiapan untuk ditawarkan kepada swasta/ publik	Buku Profil Investasi dan Peta Potensi Investasi daerah	- Pemerintah daerah memberikan akses luas terhadap kemungkinan kerjasama; - SKPD dan Kementerian terkait memberikan kemudahan bagi Calon Investor untuk mendalami pilihan investasi.
OUTPUT - Tersedianya Data dan Informasi di 4 Prov dan 8 kab/kota, ttg: - Potensi Daerah - Peluang Investasi - Peta Potensi Investasi - Kajian ttg lokasi, ketersediaan lahan, bahan baku, sarana prasarana, peluang pasar dan data lainnya.	Data terbaru ttg: - Potensi daerah - Peluang investasi bidang Pangan, Energi & Infrastruktur - Peta lokasi potensi investasi - Kajian awal terkait faktor penentu & pendukung investasi	- RPJM Daerah; - RTRW daerah; - Renstra SKPD utama bidang Pangan, Energi & Infrastruktur; - Peta dasar Bakosurtanal; - Data-data pendukung lain (BPS, Litbang, lainnya)	Sumber-sumber data memberikan akses dan kualitas data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
AKTIVITAS <i>Identifikasi & kompilasi data/ informasi potensi daerah; Melakukan Pemetaan Investasi di 4 Provinsi dan 8 Kab/kota.</i>	Kesepakatan kerjasama (Kontrak) antara PA dengan Konsultan untuk pekerjaan Pemetaan	Kontrak kerja dan SPMK	Waktu dan prosedur yang ditentukan disepakati dan dipatuhi bersama

Secara visual kosep pikir penyusunan potensi investasi daerah disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2-1 Alur Pikir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah

2.3. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini Tim Konsultan akan didampingi oleh Tim Teknis dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah melalui beberapa tahapan pekerjaan.

Tahapan Pekerjaan Penting dalam kegiatan ini secara ringkas adalah berikut:

1. **Eksplorasi, verifikasi, seleksi dan formulasi potensi dan peluang investasi daerah**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyebaran kuesioner;
 - b. Kajian dokumen sekunder/*Desk study*;
 - c. Pertemuan Teknis dan Koordinatif dengan BKPM;
 - d. *Focused Group Discussion* (FGD);
 - e. Survei lapangan (termasuk pemetaan).
2. **Formulasi dan organisasi data** yang akurat dan terkini menjadi data potensi dan peluang investasi daerah:
 - a. Penyusunan Draft Dokumen Kajian;
 - b. Konsultasi dan Koordinasi dengan Tim Teknis BKPM;
 - c. Finalisasi Dokumen Kajian.
3. **Pengolahan dan format penyajian data dan peta** potensi dan peluang investasi daerah:
 - a. Sinkronisasi data;
 - b. Pengolahan data ke dalam Peta (tabular dan spasial);
 - c. Integrasi data ke dalam Peta Potensi Investasi.
4. **Presentasi** :
 - a. Pendahuluan
 - b. Hasil-hasil Lapangan
 - c. Akhir.
5. **Penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir** dan keluaran-keluaran kegiatan.

Secara detail langkah atau tahapan kegiatan dalam Penyusunan Peta Potensi dan peluang Investasi adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Kegiatan ini untuk mempersiapkan rencana kerja dan bahan-bahan yang diperlukan untuk implementasi. Kegiatan persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan penunjang seperti:

1. Pembentukan tim.
2. Identifikasi kebutuhan data sekunder.
3. Identifikasi kebutuhan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat kuesioner dalam rangka penentuan potensi investasi unggulan daerah yang nantinya digunakan pada saat survei lapangan. (Kuesioner pada lampiran-1)
5. Finalisasi jadwal personil dan pembagian tugas lapangan

B. Pengumpulan Data Sekunder

Kegiatan ini untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan investasi daerah mengacu pada daftar kebutuhan dokumen yang disusun pada tahap persiapan. Kegiatan penunjang terkait dengan pengumpulan data sekunder meliputi:

1. Browsing data internet
2. Kunjungan kepada kementerian/lembaga/instansi terkait
3. Pengelompokan dokumen
4. Pengiriman kuesioner kepada dinas/instansi daerah terkait

Analisis potensi dan masalah diawali dengan pengkajian data dan informasi yang tersedia dan secara aktual dan masih berlaku secara sah di masing-masing kementerian sektoral yang terkait dengan investasi dan provinsi wilayah kajian. Melalui tahap ini, gambaran awal potensi nasional dan daerah dari provinsi wilayah kajian, serta kebijakan yang ada pada saat ini yang menyangkut investasi (termasuk aspek pasar), sedikit-banyak sudah dapat diperoleh.

Data dan informasi yang ada tersebut pada tahap awal sudah dapat dianalisis dan dikelompokkan, agar dapat diperoleh suatu ekstraksi informasi yang lebih sintesis. Proses yang dapat dikenakan pada data dan informasi untuk mendapat informasi baru antara lain meliputi kompilasi, pemaduan data, pemasukan data, analisis sintetik atau interpretasi data, serta interpretasi kebijakan.

Dalam pengumpulan data ini, koordinasi perlu dilakukan dengan lintas sektor terkait, baik di pusat maupun di daerah, untuk memperoleh data maupun klarifikasi informasi berbagai institusi terkait. Koordinasi terutama dilakukan dengan Institusi Penanaman Modal Provinsi (IPMP) daerah kajian untuk memperoleh data maupun klarifikasi informasi antara lain mengenai potensi, sebaran, waktu, kapasitas bahan baku, ketersediaan lahan dan infrastruktur investasi maupun pelaku usaha di wilayah provinsi setempat.

Menimbang kesulitan mendapatkan data terkini (sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja), maka Konsultan mencoba merumuskan kuesioner dengan topik dan sasaran responden yang terstruktur. Adapun topik dan responden kuesioner/ survai, serta sasaran data/ informasi yang diharapkan adalah berikut:

Tabel 2-2 Topik, Responden dan Sasaran Data atau Informasi

TOPIK	RESPONDEN	SASARAN DATA/ INFORMASI
Kebijakan dan regulasi daerah, termasuk perijinan dan non perijinan	BKPM Daerah atau PDPPM/ PDKPM Bappeda	Kebijakan dan regulasi investasi di daerah RTRW dan RPJMD
Tanah atau lahan	BPN Bappeda	Sertifikat dan ijin penggunaan lahan Ketersediaan lahan dan arahan pemanfaatan kawasan
Pangan	SKPD urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan	Potensi dan peluang pengembangan pangan, keragaan komoditas dan komoditas unggulan daerah, produksi pangan unggulan, pengolahan pangan, investasi bidang pangan, kendala pembangunan, arahan pembangunan sektoral, kajian terkait investasi bidang pangan, data & informasi lainnya
Energi	SKPD urusan ESDM	Potensi energi, kebutuhan energi, kendala pengembangan energi, potensi investasi bidang energi, kajian terkait investasi bidang energi
Infrastruktur	SKPD urusan Infrastruktur Wilayah (PU dan Perhubungan)	Kondisi infrastruktur, potensi pengembangan infrastruktur, kebutuhan dan sasaran pengembangan infrastruktur, kendala yang dihadapi, investasi bidang infrastruktur, kajian terkait bidang infrastruktur
Kemampuan keuangan daerah	Bappeda	Alokasi anggaran untuk bidang pangan, infrastruktur dan energi,

TOPIK	RESPONDEN	SASARAN DATA/ INFORMASI
	SKPD urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	serta sumber-sumber pembiayaan
Ketenagakerjaan	SKPD urusan Tenaga Kerja	Kondisi tenaga kerja lokal, Upah minimum regional, Aturan ketenaga-kerjaan

Melalui penstrukturan di atas, diharapkan pendalaman data dan informasi terkini terkait dengan investasi daerah dapat tercakupi.

Output yang didapatkan dari kegiatan ini adalah dokumen/data sekunder terkait investasi daerah sebagaimana diidentifikasi pada kegiatan persiapan.

C. Kajian Data Sekunder (*Desk Study*)

Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data awal potensi investasi di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian. Dari kajian ini diharapkan dapat tersusun daftar panjang (*long list*) potensi investasi untuk masing-masing daerah.

Kegiatan penunjang terkait dengan kajian data sekunder meliputi:

1. Penyusunan daftar panjang potensi investasi di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian
2. Penyusunan daftar investasi unggulan di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian
3. Output yang dihasilkan dari kajian data sekunder berupa daftar panjang (*long list*) potensi investasi di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian.

Selanjutnya, hasil dari kegiatan butir A hingga butir C di atas dituangkan ke dalam Laporan Pendahuluan yang akan presentasikan/diskusikan sebagai acuan bersama antara Pihak Pemberi Kerja dengan Penerima Pekerjaan (termasuk Tim Konsultan).

D. Presentasi/Diskusi Tahap Pertama di BKPM Pusat

Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan daftar peluang investasi di daerah, yaitu: (1) pendekatan *top-down*; dan (2) pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top-down* dimaksudkan sebagai pendekatan penyusunan potensi dan peluang investasi daerah yang dilakukan oleh tim konsultan dengan melibatkan pihak pusat dalam hal ini BKPM. Sedangkan pendekatan *bottom-up* dimaksudkan sebagai upaya penyusunan daftar peluang investasi yang dilakukan oleh pihak daerah sendiri.

Presentasi/Diskusi ini dimaksudkan sebagai rapat penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah untuk mendapatkan masukan atau identifikasi awal terhadap

peluang usaha, ketersediaan lahan, dan sarana prasarana penunjang investasi, serta program pengembangan yang diunggulkan daerah.

Melalui kegiatan Presentasi/ Diskusi Tahap Pertama ini, daftar potensi dan peluang investasi dari pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dipertemukan untuk mendapatkan titik temu dan hasil akhir yang lebih realistis.

Kegiatan penunjang terkait dengan Presentasi/ Diskusi Tahap Pertama meliputi:

1. Identifikasi waktu, tempat dan peserta presentasi/diskusi
2. Penyusunan daftar acara presentasi/diskusi
3. Persiapan bahan-bahan, peralatan dan logistik presentasi/diskusi.
4. Output yang dihasilkan dari Presentasi/Diskusi Tahap Pertama ini berupa daftar peluang investasi unggulan di 15 kabupaten/kota pada 15 provinsi wilayah kajian.

E. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat dan kesepakatan-kesepakatan secara lebih terfokus dan tematik, terutama dengan *multi stakeholder* pengembangan investasi daerah. Dengan demikian, dalam FGD ini, terdapat dua hal yang dilaksanakan secara sekaligus: (1) pengumpulan pendapat dari peserta FGD tentang investasi daerah, dan (2) pengumpulan data menyangkut potensi.

Topik yang akan digali dalam FGD, antara lain:

1. Faktor politik dan sosial budaya (meliputi sektor yang dominan, lahan/ tanah, keterbukaan masyarakat, kesiapan masyarakat dalam persaingan kerja, dukungan pimpinan/ kepala daerah dan pihak legislatif dalam investasi PMDN/ PMA);
2. Faktor ekonomi daerah (mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan investasi daerah, dan daya beli masyarakat);
3. Faktor infrastruktur fisik (antara lain ketersediaan infrastruktur fisik, dan kondisi infrastruktur fisik);
4. Faktor kelembagaan (meliputi kelembagaan pelayanan investasi PMDN/ PMA, dan pelayanan perijinan);
5. Faktor peraturan dan kebijakan (mencakup peraturan daerah terkait dengan investasi PMDN/ PMA, dan kebijakan daerah terkait dengan investasi PMDN/ PMA, serta dampak peraturan dan kebijakan daerah terhadap investasi PMDN/ PMA);
6. Faktor tenaga kerja (antara lain mencakup ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, serta upah dan keselamatan tenaga kerja)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan FGD akan disajikan di bawah ini:

1. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD). Diskusi ini bertujuan untuk melakukan pemetaan masalah. Dalam kegiatan ini, FGD akan diadakan dengan aparat pemerintah yang terkait dengan investasi dan potensi daerah, investor, tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha/ kamar dagang dan industri, serta perwakilan dari perguruan tinggi.
2. Triangulasi (*crosscheck*). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi riil potensi di tingkat lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara peninjauan lapangan secara langsung terhadap obyek-obyek terkait.
3. Perumusan. Masing-masing kelompok mengajukan rumusan masalah yang terkait dengan potensi daerah dan investasi untuk ditanggapi oleh peserta lain.
4. *Focus Group Discussion* dilakukan di 15 kabupaten/kota pada 15 provinsi wilayah kajian sebagai tindak lanjut atas daftar sementara peluang investasi yang dihasilkan dari Presentasi/ Diskusi tahap Pertama.

Kegiatan penunjang terkait dengan *Focus Group Discussion* meliputi:

1. Identifikasi waktu, tempat dan peserta FGD
2. Penyusunan daftar acara FGD
3. Persiapan bahan-bahan, peralatan dan logistik FGD

Dari kegiatan FGD ini, selain didapatkan masukan dari multi-stakeholder daerah, juga diharapkan tercipta komitmen dan dukungan, baik teknis maupun politis terhadap rencana pengembangan investasi daerah.

F. Survei Lapangan dan Pemetaan

Sebelumnya, perlu terlebih dahulu digarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran dan waktu survei di setiap provinsi, maka cakupan dan kedalaman survei harus menjadi perhatian utama Tim Konsultan.

Setelah didapatkan daftar tetap peluang investasi prioritas untuk masing-masing provinsi, maka selanjutnya dilakukan survei pada 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian pada ruang lingkup peluang usaha, ketersediaan lahan, dan sarana prasarana penunjang investasi serta program pengembangan yang diunggulkan daerah yang akan dibuat peta potensi investasi daerahnya secara mendalam.

Survei dan pemetaan dilakukan untuk mendapatkan data pendukung peluang investasi meliputi:

1. Peta administratif wilayah Indonesia terbaru.

2. Peta infrastruktur eksisting di daerah (terkait pengembangan potensi investasi di daerah bersangkutan)
3. Identifikasi awal terhadap peluang investasi daerah objek kajian dan pemetaan.
4. Komoditi unggulan dan program pengembangan daerah.
5. Ketersediaan lahan (untuk peluang investasi sektor primer)
6. Ketersediaan bibit (untuk peluang investasi sektor primer)
7. Jumlah produksi yang terserap pada saat ini dan potensi pengembangan jika peluang pasar dan industrinya masih potensial (untuk peluang investasi sektor primer)
8. Pemasaran distribusi hasil panen eksisting (untuk peluang investasi sektor primer dan sekunder)
9. Jumlah produksi/bahan baku (untuk peluang investasi sektor sekunder)
10. Jumlah produksi/bahan baku yang terserap saat ini dan potensi pemanfaatannya jika masih ada yang tidak terserap (untuk peluang investasi sektor sekunder)
11. Pendataan terhadap potensi investasi yang ditawarkan pemerintah daerah objek kajian dan pemetaan
12. Pelaku usaha, kapasitas produksi dan peluang pasar
13. Perhitungan keekonomian terhadap peluang investasi yang ditawarkan
14. Sarana dan prasarana penunjang investasi diantaranya infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, kawasan industri, data tenaga kerja dan lain-lain.

Detail teknis metodologi pembuatan peta potensi daerah disajikan pada sub-bab berikutnya.

G. Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah 8 kabupaten/kota terpilih pada 4 provinsi yang ditetapkan

Pada tahap ini setiap tenaga ahli sesuai bidang keahliannya melakukan kajian keekonomian potensi investasi, meliputi (1) aspek ekonomi dan (2) aspek finansial untuk melihat gambaran dampak dan nilai investasi. Kajian keekonomian adalah kajian terhadap investasi yang diusulkan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah (dampak multiplier). Sedangkan kajian finansial pada kegiatan ini terbatas pada analisis perbandingan belanja modal (*capital expenditure*) dan belanja operasional (*operational expenditure*).

Potensi investasi yang secara keekonomian tidak layak sebagai peluang investasi dikeluarkan dari daftar potensi investasi. Dari kegiatan ini dihasilkan daftar pendek (*short-list*) potensi investasi daerah yang masuk dalam kelompok “investasi yang siap ditawarkan ataupun prioritas”, terutama pada 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi kajian.

H. Penyusunan Draft Dokumen Kajian (didalamnya Termasuk Pemetaan)

Sebelum penyusunan draft dokumen kajian dilakukan, terlebih dahulu dibuat *outline* dan desain peta potensi dan peluang investasi daerah (data hasil olahan SIG dalam rangka penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah diserahkan ke Direktorat Pengembangan Potensi Daerah). Dokumen disusun berdasarkan *outline* yang telah disetujui oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.

Kegiatan penunjang terkait dengan Penyusunan Draft Dokumen Kajian meliputi:

1. Penyusunan *outline* dan disain peta potensi investasi daerah.
2. Penyusunan draft dokumen kajian mendetail potensi dan peluang investasi daerah di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: Draft dokumen kajian mendetail peluang investasi daerah di 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian dalam format data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah;

I. Presentasi/ Diskusi Hasil Lapangan

Presentasi/ diskusi pada tahap ini dilakukan untuk mempresentasikan hasil kajian dan pemetaan dari survei yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari BKPM dan instansi teknis terkait lainnya.

Kegiatan penunjang terkait dengan workshop tahap kedua meliputi:

1. Identifikasi waktu, tempat dan peserta presentasi/diskusi.
2. Penyusunan daftar acara presentasi/diskusi.
3. Persiapan bahan-bahan, peralatan dan logistik presentasi/diskusi.

Output yang dihasilkan dari presentasi/diskusi ini berupa tanggapan dan masukan-masukan atas draft dokumen kajian peluang investasi.

J. Finalisasi Dokumen Kajian

Finalisasi hasil kajian dilakukan dengan cara melakukan perubahan dan koreksi atas masukan dari BKPM dan instansi teknis terkait lainnya yang didapatkan selama presentasi/diskusi.

K. Sinkronisasi Dan Integrasi Data

Sinkronisasi data digital dilakukan, agar kajian dan peta dapat dimasukkan sebagai konten pada website SIPID. Uraian detail teknis metodologi sinkronisasi dan integrasi data disajikan pada sub-bab di bawah ini.

L. Presentasi Akhir

Selanjutnya dilakukan presentasi akhir hasil pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah kepada BKPM.

2.4. PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI

Untuk menjangkau data dan informasi yang diinginkan dalam kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah, maka Tim Konsultan menyusun dan merumuskan kuesioner dengan tetap mengacu pada beberapa pertanyaan kunci. Adapun pertanyaan kunci dalam kegiatan ini adalah:

A. Kondisi umum wilayah, antara lain mencakup:

- a. Letak geografis wilayah (lintang, bujur, pembagian wilayah secara administratif, batas-batas wilayah)
- b. Kependudukan (perkembangan jumlah penduduk, klasifikasi menurut umur, klasifikasi menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk)
- c. Pertumbuhan ekonomi wilayah (PDRB per sektor menurut harga konstan dan harga berlaku)
- d. Tata guna lahan menurut jenis penggunaan (prosentase pemanfaatan lahan menurut sektor penggunaan)
- e. Kondisi iklim (curah hujan, kelembaban, wilayah kering/basah)
- f. Basis pertumbuhan ekonomi wilayah (kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, kelautan, industri, jasa dll)
- g. Kondisi tanah/lahan (jenis tanah dominan, marginal/subur, mineral/gambut, rata-rata topografi).

B. Gambaran singkat peluang investasi daerah, antara lain:

- a. Nama proyek/investasi unggulan yang diusulkan
- b. Prakiraan nilai investasi (besar, sedang, kecil)
- c. Site proyek/usulan lokasi kabupaten/kecamatan/desa

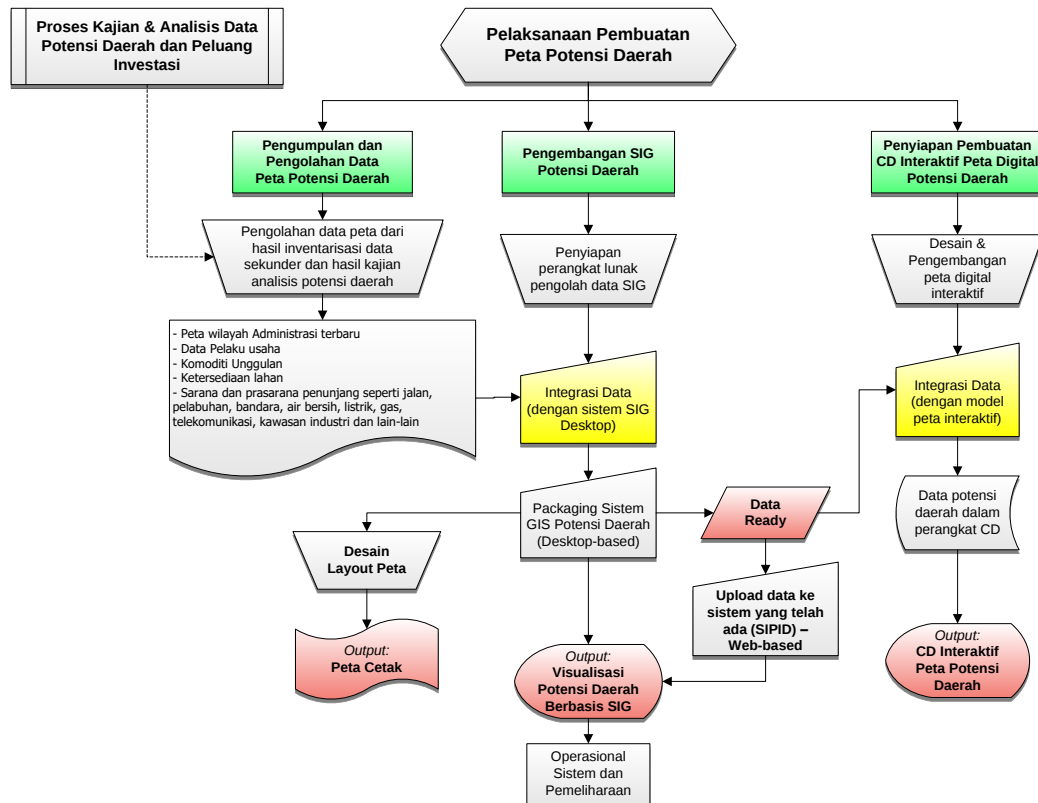
- d. Pola investasi yang diusulkan (investor sendiri, kemitraan dengan investor daerah (perusahaan, koperasi dan lainnya), kemitraan dengan pemerintah daerah)
 - e. Jenis usaha eksisting (perkembangan luas areal usaha, produksi, jumlah perusahaan)
 - f. Keunikan usaha secara geografis (sangat unik, umum)
- C. Ketersediaan lahan pengembangan, mencakup:
- a. Luas lahan yang diperuntukkan/ ditawarkan bagi pengembangan komoditas investasi unggulan
 - b. Luas lahan yang telah diberikan ijin usahanya
 - c. Luas lahan yang masih potensial untuk pengembangan usaha
 - d. Status lahan untuk pengembangan (lahan adat/komunal, HPL, hutan konversi, lainnya)
 - e. Pola pemanfaatan lahan secara adat khas daerah/wilayah
 - f. Skema pengembangan investasi tingkat daerah
 - g. Lokasi peruntukan investasi unggulan
- D. Produksi dan skala investasi yang ditawarkan:
- a. Perkembangan produksi komoditas secara lokal, nasional dan global
 - b. Perkembangan konsumsi komoditas secara nasional dan internasional
 - c. Daya saing pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
 - d. Skala investasi yang ditawarkan, antara lain mencakup kapasitas produksi dan besarnya investasi.
- E. Peluang pasar, mencakup:
- a. Perkembangan harga komoditas di pasar domestik/internasional
 - b. Perkembangan volume dan nilai ekspor komoditas
 - c. Perkembangan volume dan nilai impor komoditas
 - d. Tujuan pasar ekspor utama
- F. Infrastruktur yang tersedia/ disediakan, mencakup:
- a. Infrastruktur fisik yang tersedia atau disediakan
 - b. Sistem pelayanan satu pintu dalam perijinan dan pengurusan investasi di daerah maupun pusat.

- c. Pelayanan penyediaan sistem informasi terpadu bagi investor
- G. Dukungan regulasi daerah, meliputi:
 - a. Identifikasi peraturan daerah yang mendorong jenis investasi ini
 - b. Keterkaitan peraturan daerah dengan regulasi tingkat pusat (sejalan, kontradiksi dll)
 - c. Iklim investasi (insentif yang diberikan pemerintah daerah/pusat untuk menarik minat investor, misalnya kemudahan perijinan, kemudahan perpajakan, pembebasan retribusi di awal investasi)
- H. Industri pendukung, meliputi:
 - a. Industri penyediaan bibit unggul, benih dan bahan tanaman (sumber dalam negeri atau masih impor).
 - b. Ketersediaan bibit unggul, benih dan bahan tanaman di pasaran umum
 - c. Industri penyediaan pupuk/pestisida dan sarana produksi pertanian lainnya
 - d. Industri alat dan mesin atau alat-alat berat untuk *land clearing*
 - e. Industri jasa penyewaan alat-alat berat
- I. Kondisi tenaga kerja dan upah tenaga kerja.
 - a. Ketersediaan tenaga kerja lokal mendukung investasi
 - b. Perkembangan tingkat upah tenaga kerja (UMR, UMK, UM sektoral)
 - c. Industri jasa penyediaan tenaga kerja terampil/operator/manajemen
 - d. Kasus konflik ketenagakerjaan di daerah (frekuensi, penyebab, penanganan)
 - e. Peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

Pertanyaan kunci di atas, selanjutnya dikembangkan menjadi kuesioner untuk mengeksplorasi data/informasi penting untuk disajikan ke dalam laporan kegiatan.

2.5. METODOLOGI PEMETAAN DAN UPLOAD DATA

Output berupa peta potensi daerah, dilakukan beberapa tahap pekerjaan mulai pengumpulan data, pengolahan, sampai cetak peta. Peta potensi daerah berupa peta cetak, merupakan salah satu output dari proses pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) Potensi Daerah tersebut. Berikut diagram alir sub-pekerjaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah:



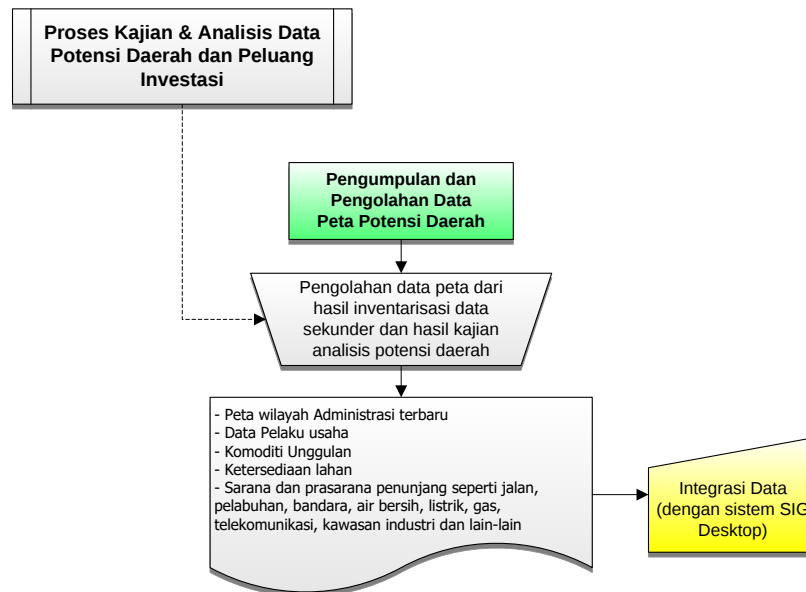
Gambar 2-2 Diagram Alir Pembuatan Peta Pekerjaan Penyusunan peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Dari diagram alir di atas, pekerjaan pembuatan peta potensi dan peluang investasi daerah terdiri dari: pengumpulan dan pengolahan data peta potensi daerah, pengembangan SIG potensi daerah, dan pembuatan CD interaktif peta digital potensi daerah. Sedangkan output/hasil pekerjaan dari pembuatan peta potensi daerah ini antara lain: peta cetak potensi daerah, data siap upload ke SIPID, visualisasi potensi daerah dalam sistem aplikasi, dan CD interaktif peta potensi daerah.

Berikut paparan mengenai tahapan dan hasil dari tiap pekerjaan pembuatan peta potensi daerah yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian pekerjaan:

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Peta Potensi dan peluang investasi Daerah

Peta dasar yang disiapkan merupakan peta batas administrasi dan peta infrastruktur. Spesifikasi minimum dari tema peta tersebut adalah peta batas administrasi provinsi di Indonesia (33 provinsi) beserta kabupaten di dalamnya untuk 8 kabupaten/kota pada 4 provinsi wilayah kajian terpilih. Sedangkan infrastruktur terdiri dari jalan, pelabuhan, bandara, air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, kawasan industri dan sarana lainnya sesuai dengan ketersediaan data.



Gambar 2-3 Diagram Alir Pekerjaan Penyiapan Data Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah

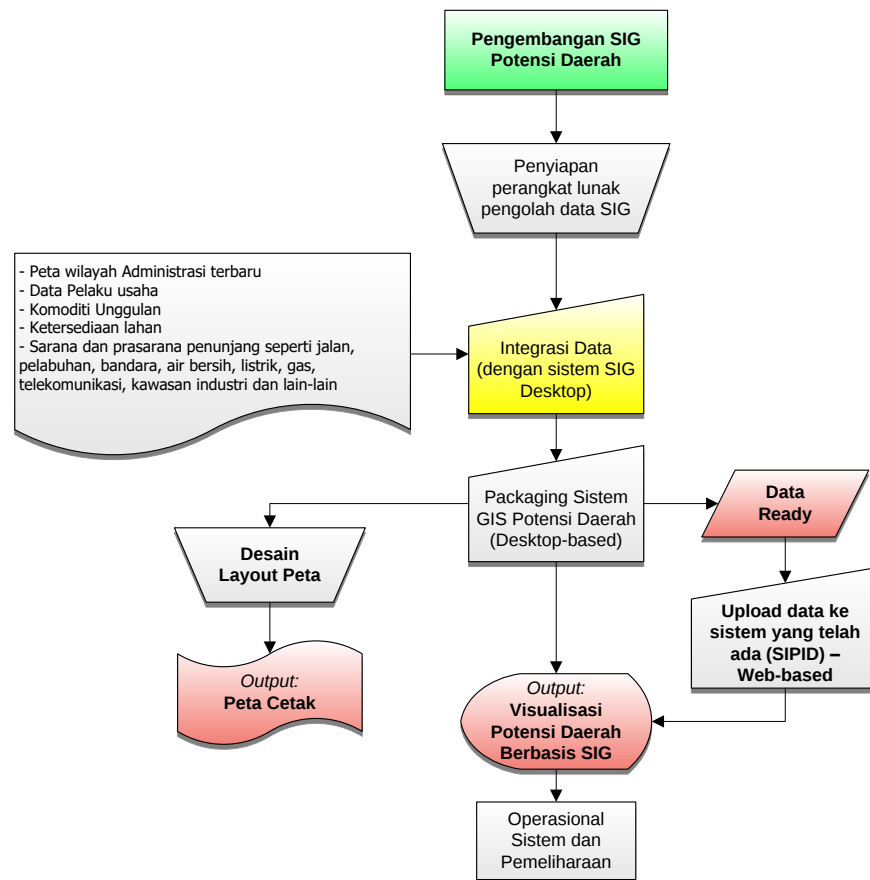
Data yang diproses harus menghasilkan data peta yang memenuhi standar pertukaran data sehingga mendukung program pemetaan nasional yang mengacu pada IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional).

Peta Potensi dan peluang investasi Daerah yang akan dibuat berisi informasi potensi daerah hasil analisis sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya. Informasi potensi daerah tersebut harus merepresentasikan pada kewilayahan atau batas administrasi yang telah diinventarisasi dan diplot pada peta dengan sistem koordinat peta standar, sehingga memudahkan overlay data dengan data spasial lainnya. Untuk data yang tidak memiliki geo-referensi, penyajian pada peta berdasarkan tata letak dan toponimi peta mengikuti PP 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.

Mengingat banyaknya peta yang akan dibuat (per-kabupaten), maka peta akan di buat dalam bentuk atlas. Untuk layout peta, informasi akan disajikan pada tepi peta (legenda/keterangan), diatur sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak mengganggu tampilan peta. Untuk itu, informasi yang akan ditampilkan hanya informasi yang penting/utama. Informasi lain yang merupakan bagian penjelasan dari lembar peta tersebut akan disajikan pada lembar terpisah setelah peta tersebut. Dengan kata lain, Peta Potensi Daerah untuk masing-masing Kabupaten/ Kota atau Provinsi akan terdiri dari 2 lembar yang tidak terpisahkan.

2. Pengembangan SIG potensi dan peluang investasi daerah

Pada pengembangan SIG potensi dan peluang investasi daerah ini selain mengembangkan sistem yang sudah ada (SIPID, berbasis web), juga diusulkan sistem SIG berbasis desktop (*non-web*). Sistem ini dibangun untuk memudahkan dalam hal pengelolaan data SIG oleh administrator, yaitu untuk pengelolaan dan penyiapan data yang akan di-upload ke sistem yang sudah ada (SIPID) dan untuk di-entry ke sistem yang akan dibangun dengan teknologi CD interaktif (diagram alir pada gambar).

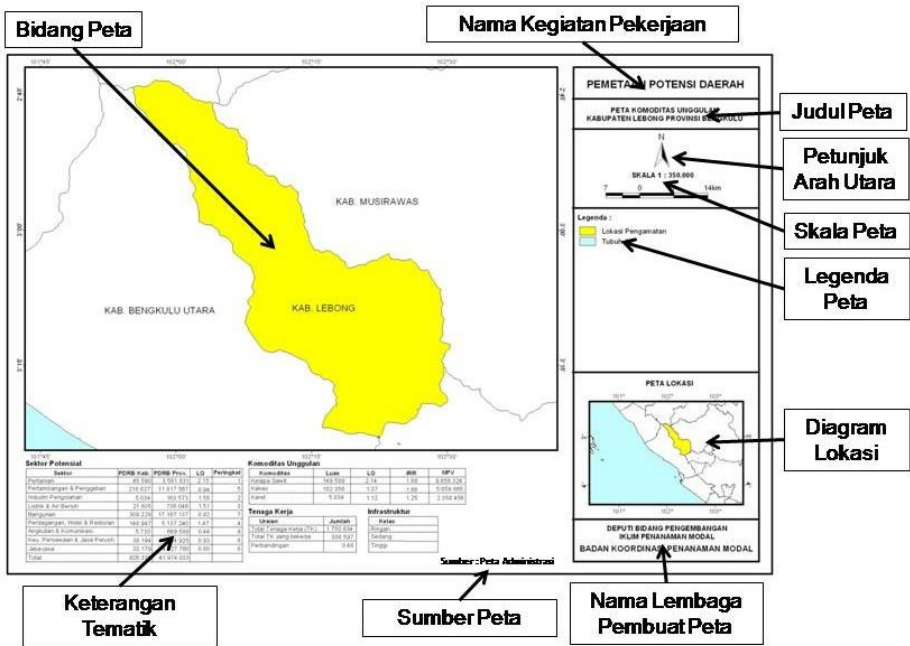


Gambar 2-4 Pengelolaan SIG Berbasis Desktop

Adapun output dari pengembangan SIG potensi daerah ini antara lain:

a. Peta cetak potensi dan peluang investasi daerah.

Peta cetak potensi dan peluang investasi daerah dihasilkan dari pembuatan layout peta pada sistem aplikasi SIG desktop, dengan data yang telah diinput/diintegrasikan dari hasil pengumpulan dan kajian analisis potensi daerah. Dari aplikasi ini, user dapat dengan mudah memodifikasi layout peta yang diinginkan. Gambar berikut merupakan contoh layout peta.



Gambar 2-5 Contoh Lay-out dan Rancangan Awal Peta Potensi Daerah

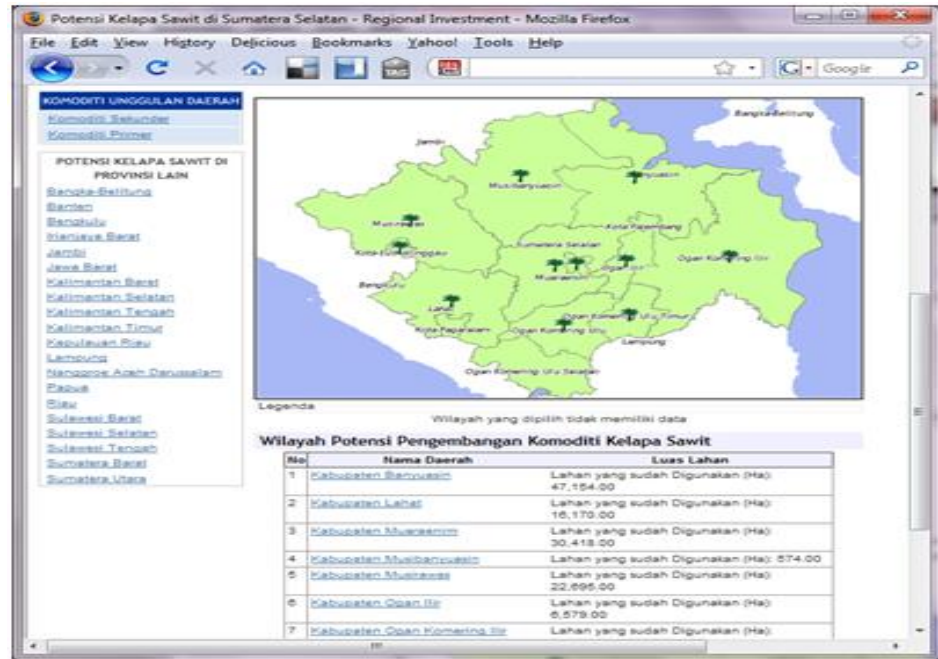
Ilustrasi tampilan tersebut akan disempurnakan selama proses pekerjaan penyusunan peta potensi investasi daerah.

b. Data Siap Upload ke Sistem yang Ada.

Sebelum data potensi daerah di-upload ke sistem aplikasi SIPID, perlu dikelola dan diolah menggunakan perangkat pengolah peta berbasis SIG. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan potensi daerah yang berbasis peta digital.

c. **Visualisasi Potensi dan peluang investasi Daerah dalam Sistem Aplikasi (berbasis desktop dan web/SIPID)**

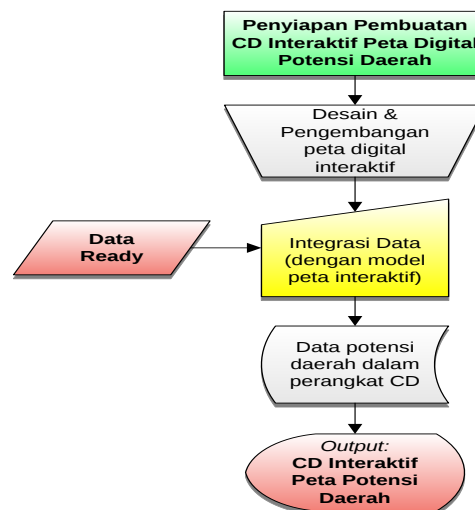
Output berikutnya ialah sistem informasi potensi dan peluang investasi daerah berbasis desktop dan sistem informasi berbasis web (yaitu dengan upload data hasil olahan ke sistem informasi potensi daerah yang telah ada, yaitu SIPID -- Sistem Informasi Potensi dan peluang investasi Investasi Daerah).



Gambar 2-6 Contoh Tampilan Peta Potensi dan peluang investasi Daerah Pada SIPID

3. Pembuatan CD Interaktif peta digital potensi daerah

CD interaktif yang berisi potensi daerah dalam format peta digital dibuat dengan tujuan agar sistem aplikasi mudah dibawa ke mana pun (portable). Tahapan pekerjaan dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2-7 Tahap Pembuatan CD Interaktif SIG Potensi dan peluang investasi Daerah

CD interaktif yang berisi tampilan multimedia peta interaktif yang dioperasikan pada sebuah media sistem komputer dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna untuk mengoperasikan aplikasi tersebut sebagai bahan promosi investasi di daerah. CD interaktif ini mengaplikasikan teknologi multimedia, seperti penggunaan

animasi dan perangkat flash. Untuk pengelolaan dan editing data spasialnya dilakukan pada aplikasi SIG desktop sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Untuk memperluas dan memperkaya fungsi dan interaktivitas konsep tampilan multimedia maka CD interaktif yang dibuat memuat dua pilihan menu *internet offline* dan *online*. Menu pilihan *offline* hanya mampu mengakses data dan informasi yang terdapat di dalam CD interaktif saja, sedangkan menu pilihan *online* akan mengintegrasikan aplikasi multimedia dengan aplikasi Google Earth. *User* dapat membuka peta spasial berformat *Keyhole Markup Language* (KML) di dalam *object internet browser* aplikasi multimedia melalui teknik JavaScript Google Maps API. *User* yang membuka CD interaktif secara online memanfaatkan beberapa fitur penting yang terdapat di dalam Google Earth seperti fitur *Earth Gallery Youtube* untuk tujuan publikasi video. Selain itu akan dipertimbangkan juga kemampuan aplikasi untuk saling mengkomunikasikan data dan informasi dengan beberapa pemakai lain (*multi users*) di dunia maya sehingga meskipun aplikasi multimedia berdiri sendiri (*standalone*) namun memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunitas melalui jejaring sosial yang umum digunakan.

4. Upload data dan peta hasil kegiatan

Hasil pekerjaan Penyusunan Peta Potensi Daerah yang berupa data spasial dan deskriptif akan di-up-load pada sistem informasi dan pengelolaan database yang ada pada website BKPM, yaitu Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Peta Potensi Daerah yang disusun akan dimasukkan ke dalam sistem SIPID, disamping peta yang akan dicetak dalam bentuk analog.

BAB 3





BAB 3. GAMBARAN UMUM DAERAH KAJIAN

3.1. PROVINSI JAWA TIMUR

A. Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km² dan lautan seluas 110.764,28 Km² mempunyai 229 pulau, merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Wilayah ini membentang antara 111°0' BT - 114° 4' BT dan 7° 12' LS - 8° 48' LS, terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan luas 90 persen dan Kepulauan Madura luasnya sekitar 10 persen dari total luas Jawa Timur. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3-1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Pembagian administratif tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Tabel 3-1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA		
		KELURAHAN	DESA	JUMLAH
Kabupaten				
01. Pacitan	12	5	166	171
02. Ponorogo	21	26	281	307
03. Trenggalek	14	5	152	157
04. Tulungagung	19	14	257	271
05. Blitar	22	28	220	248
06. Kediri	26	1	343	344
07. Malang	33	12	378	390
08. Lumajang	21	7	198	205
09. Jember	31	22	226	248
10. Banyuwangi	24	28	189	217
11. Bondowoso	23	10	209	219
12. Situbondo	17	4	132	136
13. Probolinggo	24	5	325	330
14. Pasuruan	24	24	341	365
15. Sidoarjo	18	31	322	353
16. Mojokerto	18	5	299	304
17. Jombang	21	4	302	306
18. Nganjuk	20	20	264	284
19. Madiun	15	8	198	206
20. Magetan	18	28	207	235
21. Ngawi	19	4	213	217
22. Bojonegoro	28	11	419	430
23. Tuban	20	17	311	328
24. Lamongan	27	12	462	474
25. Gresik	18	26	330	356
26. Bangkalan	18	8	273	281
27. Sampang	14	6	180	186
28. Pamekasan	13	11	178	189
29. Sumenep	27	4	328	332
Kota				
30. Kediri	3	46	0	46
31. Blitar	3	21	0	21
32. Malang	5	57	0	57
33. Probolinggo	5	29	0	29
34. Pasuruan	4	34	0	34
35. Mojokerto	2	18	0	18
36. Madiun	3	27	0	27
37. Surabaya	31	160	0	160
38. Batu	3	5	19	24

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2016

B. Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan kondisi fisik kewilayahannya, karakteristik wilayah menurut tinggi tempat diatas permukaan laut (dpl) wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Sebaran Ketinggian Tempat di Provinsi Jawa Timur

KISARAN KETINGGIAN TEMPAT	SEBARAN (HA)
0 – 100 m	1.950.567,16
100 – 500 m	1.723.862,64
500 – 1.000 m	447.043,03
Lebih besar dari 1.000 m	591.541,84

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

Wilayah daratan di Jawa Timur sebagian besar (39,89 %) tergolong berpermukaan datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. Sedangkan ketinggian tanah sebagian besar wilayah pada posisi 0 – 100 M diatas permukaan laut dengan jumlah mencapai 41,39 % dari total wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah berupa dataran rendah.

Tabel 3-3 Sebaran Kemiringan Tempat di Provinsi Jawa Timur

URAIAN	LUAS KEMIRINGAN LAHAN (HA)
Datar (0 – 2 %)	1.797.789,19
Bergelombang (3 – 15 %)	1.292.207,05
Curam (16 – 40 %)	447.043,03
Sangat curam (> 40 %)	969.155,20

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

Wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian wilayah besar wilayahnya (52%) mempunyai iklim tipe D. Keadaan maksimum suhu maksimum rata - rata mencapai 33°C sedangkan suhu minimum rata - rata mencapai 22°C.

Struktur Geologi Jawa Timur di dominasi oleh Alluvium dan bentukan hasil gunung api kwarter muda, keduanya meliputi 44,5 % dari luas wilayah darat , sedangkan bantuan yang relatif juga agak luas persebarannya adalah miosen sekitar 12,33 % dan hasil gunung api kwarter tua sekitar 9,78 % dari luas total wilayah daratan. Sementara itu batuan lain hanya mempunyai proporsi antara 0 - 7% saja. Batuan sedimen Alluvium tersebar disepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur. Batuan hasil gunung api kwater muda tersebar dibagian tengah wilayah Jawa Timur membujur kearah timur yang merupakan daerah relatif subur. Batuan Miosen tersebar disebelah selatan dan utara Jawa Timur membujur kearah Timur yang merupakan daerah kurang subur Bagi kepulauan Madura batuan ini sangat dominan dan utamanya merupakan batuan gamping.

Berdasarkan struktur, sifat, dan persebaran jenis tanah, wilayah Jawa Timur diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jawa Timur bagian Tengah Merupakan daerah subur , mulai dari daerah kabupaten Banyuwangi. Wilayah ini dilalui sungai - sungai Madiun, Brantas, Konto, Sampean.

- Jawa Timur bagian Utara merupakan daerah Relatif tandus dan merupakan daerah yang persebarannya mengikuti alur pegunungan kapur utara mulai dari daerah Bojonegoro, Tuban ke arah Timur sampai dengan pulau Madura.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Jawa Timur, luas lahan sebesar sekitar 4,7 juta Ha terdiri dari tutupan lahan lindung dan lahan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 558.995 Ha atau sekitar 11,69%, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak dimana terdapat cagar alam yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868 Ha serta taman wisata seluas kurang lebih 297 Ha.

Adapun, penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.220.980 Ha atau 88,31% dari luas Jatim. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur cenderung menurunnya luas wilayah pertanian. Berdasarkan data statistik luas lahan pertanian berkurang tiap tahunnya sekitar 1000 ha, maka kondisi yang sekarang ada harus dipertahankan. Bila dilihat sekarang lahan pertanian lahan basah hanya memiliki luas kurang lebih 991.863 ha atau 19,08%. Penggunaan lahan kawasan terbangun diharapkan tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel 3-4 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Timur

NO.	PENGUNAAN LAHAN	EKSISTING (HA)	PERSENTASE (%)
A.	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Lindung	314.720	6,58
2	Rawa/ Danau/Waduk	10.447	0,22
3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam		
	1) Suaka Margasatwa	18.009	0,38
	2) Cagar Alam	10.958	0,23
	3) Taman Nasional	176.696	3,7
	4) Taman Hutan Raya	27.868	0,58
	5) Taman Wisata Alam	297	0,01
B.	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Hutan Produksi	815.851	17,07
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570	7,56
3	Kawasan Pertanian		-
	1) Pertanian Lahan Basah	911.863	19,08
	2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	1.108.628	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481	7,52
5	Kawasan Perikanan	60.928	1,27
6	Kawasan Industri	7.404	0,15
7	Kawasan Pemukiman	595.255	12,45
	TOTAL	4.779.975	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 37,8 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,8 juta jiwa pada tahun 2015. Kapadatan penduduk Jawa Timur juga semakin meningkat, mencapai 810 jiwa per Km² pada tahun 2015. Disisi lain pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,73 persen pada tahun 2011 menjadi 0,61 persen tahun 2015. Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki atau mempunyai sex ratio 97 persen.

Tabel 3-5 Kondisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk (000jiwa)	37.841	38.107	38.363	38.610	38.847
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61
3.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	789	794	800	805	810
4.	Sex Ratio (L/P)(%)	97,49	97,46	97,43	97,4	97,44
5.	Jumlah Rumah Tangga (000RT)	10.511	10.585	10.656	10.725	10.676
6.	Rata-rata ART (Jiwa/RT)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,62
7.	% Penduduk Menurut Kelompok Umur					
	0-14 Tahun (%)	24,32	24,04	23,75	23,47	24,66
	15-64 Tahun (%)	68,64	68,84	69,04	69,20	68,44
	>65 Tahun (%)	7,04	7,12	7,21	7,33	6,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 125 ribu orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2015 tercatat adanya tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.

Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah pengangguran di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan

demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur.

Tabel 3-6 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	TAHUN			
			2012	2013	2014	2015
1.	Angkatan Kerja	Ribu Orang	20.238,06	20.432,45	20.149,99	20.274,68
	> Bekerja	Ribu Orang	19.411,26	19.553,91	19.306,51	19.367,78
	> Pengangguran	Ribu Orang	826,8	878,54	843,49	906,9
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,57	69,78	68,12	67,84
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,3	4,19	4,47
4.	Pekerja Tidak Penuh	Ribu Orang	6.390,92	6.472,06	6.481,52	6.244,39
	> Setengah Pengangguran	Ribu Orang	2.245,22	1.946,38	1.674,50	1.628,96
	> Paruh Waktu	Ribu Orang	4.145,70	4.526,68	4.807,02	4.615,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

E. Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi Jawa Timur didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 60,24 persen pada tahun 2016. Kategori Konstruksi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Jawa Timur, sedangkan kategori lainnya perannya di bawah 5 persen.

PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2010-2015 mempunyai nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2010 PDRB Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp.990,648,844, naik menjadi Rp.1,120,577,157 juta pada tahun 2011, dan kemudian naik lagi menjadi Rp. 1.248,767,293 pada tahun 2012, naik pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.382.501.497 juta, naik pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.539.794.701 juta dan naik pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.689.882.401 juta.

Tabel 3-7 PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	148,768,796	168,232,623	186,038,314	209,538,797	232,349,337
2. Pertambangan dan Penggalian	65,699,265	66,133,846	73,777,251	79,606,927	64,096,049
3. Industri Pengolahan	326,628,776	365,694,761	397,997,723	445,806,446	494,687,374
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5,617,284	6,016,392	5,168,146	5,502,286	5,787,492
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,178,593	1,264,494	1,367,523	1,434,526	1,573,388
6. Konstruksi	101,262,001	114,633,992	127,498,904	145,884,633	160,496,346
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	201,380,808	220,633,024	244,743,874	266,167,439	298,172,717

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
8. Transportasi dan Pergudangan	31,264,153	35,923,748	42,435,217	50,000,707	56,724,425
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,614,082	60,141,261	67,904,453	79,946,812	91,476,258
10. Informasi dan Komunikasi	52,160,607	59,013,462	66,085,763	69,883,096	77,087,449
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	25,503,930	30,517,537	36,441,097	41,204,807	46,447,110
Jasa Perantara Keuangan	16,010,056	19,383,738	23,740,326	26,765,521	30,243,013
12. Real Estate	18,428,343	20,116,881	22,540,310	24,123,308	27,560,767
13. Jasa Perusahaan	8,651,274	9,596,666	10,904,703	12,177,865	13,538,456
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,169,310	33,140,658	34,694,830	35,658,499	39,082,066
15. Jasa Pendidikan	28,004,390	32,880,666	37,680,737	41,970,801	46,022,767
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,492,304	7,455,781	8,431,372	9,682,654	10,640,210
17. Jasa lainnya	16,753,241	17,371,501	18,791,280	21,205,098	24,140,190
PDRB ADHB	1,120,577,157	1,248,767,293	1,382,501,497	1,539,794,701	1,689,882,401

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Demikian halnya PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha dasar harga konstan (ADHK) selama periode 2010-2015 mempunyai nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2010 PDRB Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp.990,648,844, naik menjadi Rp.1,054,401,774 juta pada tahun 2011, dan kemudian naik lagi menjadi Rp. 1.124,464,640 pada tahun 2012, naik pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.192.789.802 juta, naik pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.262.697.065 juta dan naik pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.331.418.242 juta.

Tabel 3-8 PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138,870,090	146,002,574	150,463,722	155,771,135	161,153,985
2. Pertambangan dan Penggalian	58,140,329	58,287,947	59,049,991	60,887,381	65,707,007
3. Industri Pengolahan	306,072,358	326,681,766	345,794,556	372,726,395	392,489,776
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,404,966	4,259,039	4,380,344	4,502,071	4,366,991
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,171,308	1,182,012	1,231,047	1,234,131	1,299,271
6. Konstruksi	95,157,735	102,250,925	110,485,452	116,498,230	120,688,265
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,771,671	206,433,669	219,246,074	229,725,708	243,497,816
8. Transportasi dan Pergudangan	29,399,870	31,528,721	34,241,210	36,453,372	38,844,034
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,667,022	54,601,235	57,684,939	62,807,796	67,773,100
10. Informasi dan Komunikasi	51,881,622	58,299,178	65,313,947	69,155,097	73,639,964
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	24,088,325	26,668,020	30,348,354	32,399,636	34,730,260
Jasa Perantara Keuangan	15,151,001	16,605,006	19,230,773	20,667,536	22,476,890
12. Real Estate	17,737,706	19,153,833	20,565,058	21,998,293	23,092,637
13. Jasa Perusahaan	8,156,662	8,416,878	9,044,150	9,815,001	10,349,052
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27,823,812	28,210,088	28,564,749	28,729,585	30,275,514
15. Jasa Pendidikan	26,494,055	28,789,367	31,265,455	33,306,687	35,392,844
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,353,042	7,033,056	7,592,821	8,212,850	8,743,340
17. Jasa lainnya	16,211,203	16,666,332	17,517,933	18,473,697	19,374,386
PDRB ADHK	1,054,401,774	1,124,464,640	1,192,789,802	1,262,697,065	1,331,418,242

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 tumbuh 5,55 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 5,44 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa

migas mengalami penurunan dari 5,29 persen menjadi 5,07 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2016 didorong oleh pesatnya pertumbuhan di sektor migas.



Gambar 3-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

F. Infrastruktur Wilayah

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki peranan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia, keadaan sarana dan prasarana di Jawa Timur dapat dikatakan sudah cukup memadai.

Transportasi darat di provinsi ini hampir sebagian besar jalan raya di wilayahnya mempunyai permukaan beraspal dan dalam kondisi baik. Bahkan di ruas-ruas penting telah terdapat jalan tol yang akan terus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.

Selain itu, Jawa Timur juga dilalui jalur kereta api yang terbagi menjadi 4 jalur, yaitu utara, selatan, timur dan jalur lingkaran. Untuk transportasi laut, selain terdapat beberapa pelabuhan di wilayah kabupaten dan kota, terdapat juga Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan internasional.

Sedangkan untuk transportasi udara, terdapat Bandara Internasional Juanda yang mampu melayani penerbangan domestik, penerbangan internasional, haji, kargo, dan VVIP, serta penerbangan tidak terjadwal (*charter, medivac, training*).

Disamping transportasi, tersedianya sarana dan prasarana di Jawa Timur juga dipenuhi melalui fasilitas telekomunikasi, air dan gas, pengairan, listrik, dan kawasan industri. Seluruh fasilitas tersebut telah mampu menjangkau hingga ke wilayah-wilayah pedesaan. Adapun fasilitas lain yang tersedia adalah lembaga keuangan dan perbankan, Bursa Efek Surabaya, lembaga pendidikan, rumah sakit, hotel, dan apartemen.

Tabel 3-9 *Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jawa Timur*

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi darat	Jawa Timur dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya jalur pantura (Anyer-Jakarta-Surabaya-Banyuwangi), dan jalan nasional lintas tengah (Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Surabaya). Jaringan jalan tol di Jawa Timur meliputi jalan tol Surabaya-Gempol, jalan tol Surabaya-Manyar, jalan tol Surabaya-Mojokerto-Curahmalang, jalan tol Dupak-Sidotopo, dan jalan tol lingkaran dalam : Waru-Tandes-Tanjung Perak-Waru. Saat ini tengah dikembangkan jalan tol trans-Jawa, di antaranya jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono-Madiun-Mantingan, jalan tol Gempol-Malang-Kepanjen, jalan tol Gempol-Probolinggo-Banyuwangi, serta jalan tol dalam kota Surabaya: tol lingkaran timur, dan tol tengah kota. Keberadaan jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Kota-kota di Jawa Timur dihubungkan dengan jaringan bus antarkota. Bus dengan tujuan Surabaya-Tuban-Semarang, Surabaya-Madiun-Yogyakarta, Surabaya-Malang, Surabaya-Kediri, dan Surabaya-Jember-Banyuwangi, umumnya beroperasi selama 24 jam penuh. Rute dengan jarak menengah dilayani oleh bus antarkota yang berukuran lebih kecil, seperti jurusan Surabaya-Mojokerto atau Madiun-Ponorogo. Rute dengan jarak jauh seperti Jakarta, Sumatera, dan Bali-Lombok umumnya dilayani oleh bus malam antarprovinsi. Terminal Purabaya di Waru, Sidoarjo adalah terminal terbesar di Indonesia. Setiap kabupaten/kota di Jawa Timur juga memiliki sistem internal angkutan kota (angkot) atau angkutan perdesaan (angkudes) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan daerah sekitarnya.
2.	Kereta Api	Sistem perkeretaapian di Jawa Timur telah dibangun sejak era kolonialisme Hindia Belanda. Jalur kereta api di Jawa Timur terdiri atas jalur utara (Surabaya Pasar Turi-Semarang-Cirebon-Jakarta), jalur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta-Bandung-Jakarta), jalur lingkaran selatan (Surabaya Gubeng-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya), dan jalur timur (Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi). Jawa Timur juga terdapat sistem transportasi kereta komuter dengan rute Surabaya-Sidoarjo-Porong, Surabaya-Lamongan, Surabaya-Mojokerto, Madiun-Kertosono, dan Malang-Kepanjen.
3.	Transportasi Udara	Bandar Udara Juanda merupakan pelabuhan udara utama di Jawa Timur. Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia, dan juga luar negeri. Di Malang terdapat bandara nasional yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia yakni Bandara Abdul Rachman Saleh. Selain itu di Jawa Timur terdapat bandara umum lainnya seperti Bandara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara Iswahyudi di Madiun, serta Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
4.	Transportasi Laut	Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Perak adalah pelabuhan utama yang berada di Surabaya dan merupakan salah satu dari empat Pelabuhan Utama di Indonesia. Pelabuhan berskala nasional di Jawa Timur meliputi Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik, Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan, Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo, Pelabuhan Sapeken di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo, Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik, serta Pelabuhan Kangean di Kabupaten Sumenep. Jawa Timur juga memiliki sejumlah pelabuhan penyeberangan, diantaranya Pelabuhan Ujung (Surabaya), Pelabuhan Kamal (Bangkalan, Madura), Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi), Pelabuhan Kalianget (Sumenep), serta Pelabuhan Jangkar (Situbondo). Rute Ujung-Kamal menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya) dengan Madura, Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali, Rute Jangkar-Kalianget menghubungkan antara Pulau Jawa (Situbondo) dengan Pulau Madura, serta Kalianget juga menghubungkan Pulau Madura dengan kepulauan kecil di Laut Jawa (Kangean dan Masalembu).
5.	Energi Listrik	Pembangkit listrik di Jawa Timur dikelola oleh PT PJB, dimana meliputi PLTA (Ir. Sutami, Selorejo, Bening), PLTU, dan PLTGU, yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Beberapa daerah menikmati pembangkit energi mikrohidro dan energi surya.
6.	Telekomunikasi	Kemajuan teknologi di bidang komunikasi di Jawa Timur telah diterapkan dan hampir menjangkau wilayah Provinsi. Sementara itu untuk telex, faximile sudah menyebar pada kota - kota besar dan beberapa kota sedang di Jawa Timur, khususnya untuk kegiatan pemerintahan pengusaha SSB dan telex telah berjalan sangat efektif. Prasarana dan sarana telepon juga telah mudah dijangkau bahkan pada tingkat kelurahan/desa.

3.1.1. Kabupaten Jombang

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan

garis katulistiwa, berada antara 112° 03' 46" sampai 112° 27' 21" Bujur Timur dan 7° 20' 48" sampai 7° 46' 41" Lintang Selatan.

Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah – wilayah berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

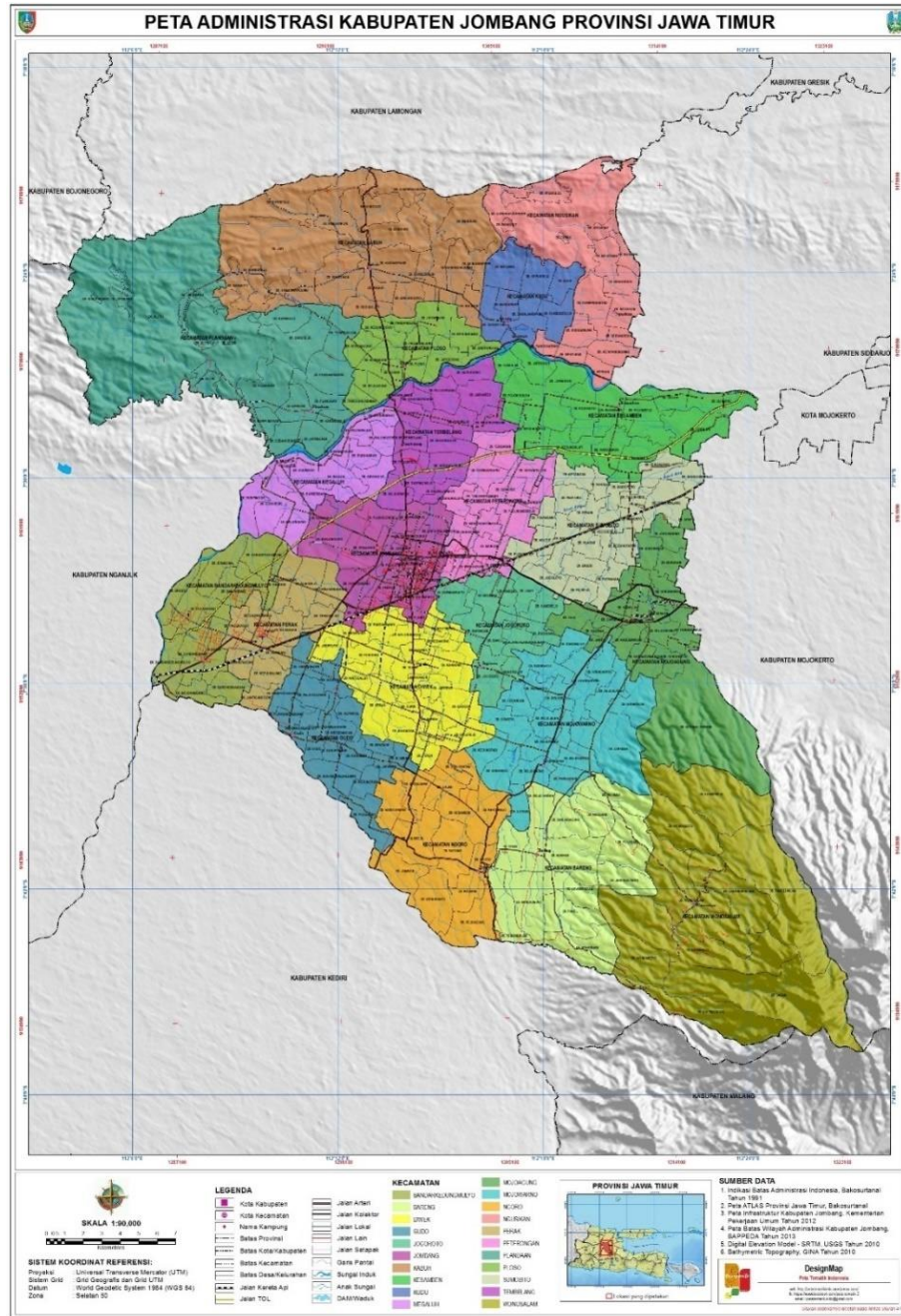
Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 306 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Tabel 3-10 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

KECAMATAN	LUAS (KM2)	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH DUSUN
01. Bandar Kedung Mulyo	32,50	11	42
02. Perak	29,05	13	36
03. Gudo	34,39	18	75
04. Diwek	47,70	20	100
05. Ngoro	49,86	13	82
06. Mojowarno	78,62	19	68
07. Bareng	94,27	13	50
08. Wonosalam	121,63	9	48
09. Mojoagung	60,18	18	60
10. Sumobito	47,64	21	76
11. Jogoroto	28,28	11	46
12. Peterongan	29,47	14	56
13. Jombang	36,40	20	72
14. Megaluh	28,41	13	41
15. Tembelang	32,94	15	65
16. Kesamben	51,72	14	61
17. Kudu	77,75	11	47
18. Ngusikan	34,98	11	39
19. Ploso	25,96	13	50
20. Kabuh	97,35	16	87
21. Plandaan	120,40	13	57
JUMLAH	1.159,50	306	1.258

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.



Gambar 3-3 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

B. Kondisi Fisik Wilayah

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl, sementara 50,76% memiliki ketinggian 500-700 mdpl, dan 0,6% memiliki ketinggian > 700 mdpl yang berada di Kecamatan Wonosalam.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu:

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.
- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok:

1. Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam.
2. Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.
3. Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.
4. Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.

Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20° C – 32° C. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Seperti umumnya di daerah lain, Kabupaten Jombang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, November dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus curah hujan relatif rendah.

Berdasarkan ciri fisik tanah yang ada di Kabupaten Jombang dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kabupaten Jombang bagian utara adalah bagian dari pegunungan kapur yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiografi yang mendatar dan sebagian lagi berbukit-tetapi tidak terlalu tajam, yang terletak di sebelah utara sungai Brantas.
2. Kabupaten Jombang bagian tengah di bagian selatan sungai Brantas sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan sungai-sungai dan daerah irigasi yang tersebar dan cocok untuk pertanian.

3. Kabupaten Jombang bagian selatan merupakan tanah pegunungan yang dimanfaatkan untuk daerah perkebunan.

Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri–Nganjuk dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang masuk dalam daerah aliran Sungai Brantas. Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang yaitu Sungai Brantas, Kali Konto, Kali Gunting, Kali Ngotok Ringkanal, Kali Gudo, Kali Apur Besok, dan Kali Jombang yang sebagian besar berhulu di Pegunungan Arjuno.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (6.514,42 Ha), kawasan sekitar waduk (32,26 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.307,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (33.149,58 Ha), kawasan pertanian lahan kering (4.770,17 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (1.235,77 Ha).

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Hasil proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk di Jombang adalah 1.240.985 jiwa dan jumlah rumahtangga sebesar 330.658 rumah tangga, sehingga rata-rata banyaknya penduduk per rumah tangga adalah 3,75 atau rata-rata 3-4 orang per rumah tangga. Dengan luas wilayah daratan Jombang sebesar 1.159,50 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Jombang tahun 2015 adalah 1.070 jiwa per kilometer persegi. Dalam

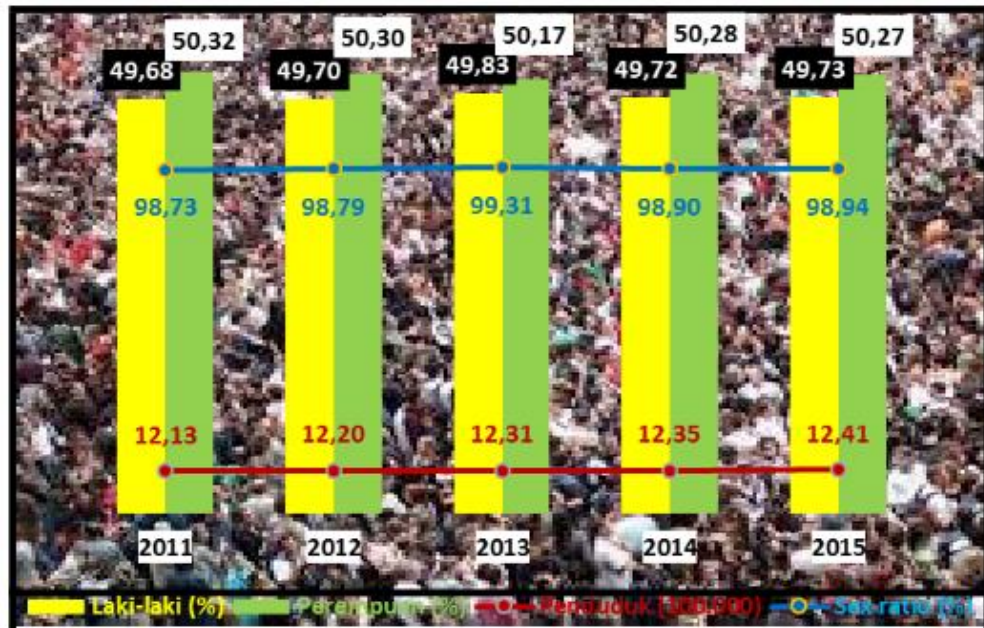
rentang waktu 2011-2015, ada tren peningkatan persentase penduduk laki-laki, yaitu dari 49,68 persen di tahun 2011 menjadi 49,73 persen di tahun 2015.

Tabel 3-11 Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2015

KECAMATAN	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
01. Bandar Kedung Mulyo	43.623	43.892	43.917	44.041
02. Perak	51.551	51.951	52.062	52.290
03. Gudo	50.929	51.222	51.229	51.354
04. Diwek	102.739	103.748	104.175	104.847
05. Ngoro	69.506	69.915	69.932	70.110
06. Mojowarno	86.892	87.636	87.886	88.342
07. Bareng	49.999	50.326	50.371	50.532
08. Wonosalam	31.084	31.360	31.459	31.632
09. Mojoagung	74.415	75.209	75.583	76.134
10. Sumobito	78.560	79.414	79.824	80.422
11. Jogoroto	64.649	65.578	66.144	66.871
12. Peterongan	65.078	65.801	66.158	66.672
13. Jombang	140.178	141.809	142.664	143.848
14. Megaluh	36.911	37.157	37.198	37.324
15. Tembelang	49.969	50.328	50.408	50.603
16. Kesamben	60.667	61.079	61.152	61.365
17. Kudu	28.420	28.546	28.513	28.546
18. Ngusikan	21.131	21.258	21.266	21.323
19. Ploso	39.160	39.393	39.406	39.509
20. Kabuh	39.380	39.571	39.541	39.602
21. Plandaan	35.563	35.688	35.613	35.618
JUMLAH	1.220.404	1.230.881	1.234.501	1.240.985

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

Walaupun ada kecenderungan penurunan, namun persentase penduduk perempuan di Jombang tahun 2015 masih lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 50,27 persen. Sehingga bila dilihat berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Jombang tahun 2015 diperoleh nilai 98,94 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 98-99 penduduk laki-laki. Terdapat beberapa sebab *sex ratio* kurang dari 100 persen, di antaranya angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki serta karena faktor migrasi penduduk laki-laki lebih tinggi terutama pada penduduk usia produktif.



Gambar 3-4 Perkembangan Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2011-2015

Apabila diperhatikan berdasarkan kelompok umur hasil proyeksi penduduk, maka ada sekitar 67,93 persen penduduk di Jombang tahun 2015 masuk di usia produktif (umur 15-64 tahun), sehingga ada sebanyak 32,07 persen berada pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa angka ketergantungan (*age dependency ratio*) penduduk Jombang tahun 2015 sebesar 47,22 persen, ini berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47-48 orang penduduk usia tidak produktif.

Tabel 3-12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2015

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I. Angkatan Kerja	392.099	255.343	647.442
1. Bekerja	368.421	239.435	607.856
2. Pengangguran Terbuka	23.678	15.908	39.586
II. Bukan Angkatan Kerja	71.388	222.341	293.729
JUMLAH	463.487	477.684	941.171
TPAK	84,60	53,45	68,79
TINGKAT PENGANGGURAN	6,04	6,23	6,11

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

Lebih dari setengah penduduk usia kerja di Kabupaten Jombang berstatus memiliki pekerjaan, yakni mencapai angka 68,79 persen. Sebuah angka yang cukup bagus, dimana lebih dari 50% penduduk yang telah memasuki usia kerja telah aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, angka ini perlu ditelaah lebih lanjut karena usia kerja beririsan dengan usia sekolah. Jangan sampai anak-anak usia sekolah yang ikut bekerja terganggu kegiatan belajarnya. Bahkan sangat dimungkinkan apabila ada anak-anak usia sekolah

yang terpaksa harus putus sekolah hanya karena demi menambah penghasilan keluarga mereka.

Jika dicermati lebih dalam lagi, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Jombang yang sedang bekerja adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan diploma, tepatnya dari diploma I sampai dengan diploma III. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan lebih cenderung membuka kesempatan kerja bagi lulusan program diploma karena dalam pendidikannya mereka lebih banyak mengenyam pendidikan secara praktek.

Hal ini dikarenakan lulusan program diploma lebih mampu untuk membuka lapangan usaha sendiri ketika kesempatan kerja tidak tersedia. Dalam lingkup angkatan kerja, ternyata penduduk perempuan di Kabupaten Jombang yang bekerja nilai persentasenya hampir sama besarnya dengan penduduk laki-laki, yakni 93,77 persen. Sedangkan untuk persentase penduduk laki-laki usia kerja yang memiliki pekerjaan mencapai 93,96 persen.

E. Perekonomian Daerah

Berbagai kebijakan pemberdayaan perekonomian rakyat terus dilancarkan guna mendorong kapasitas masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menerapkan beberapa kebijakan antara lain Jamkesmas, Raskin, pemberdayaan UMKM, penguatan lembaga keuangan mikro dan sebagainya, yang kesemuanya bersinergi dengan dukungan rakyat Jombang yang kondusif, sehingga PDRB dapat bertahan bahkan semakin membaik.

Dapat digambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Jombang lima tahun terakhir terus membesar, bahkan pada tahun 2014 meskipun perekonomian nasional kembali lesu, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 23,8 Trilyun menjadi Rp 26,3 Trilyun.

Tabel 3-13 Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014

TAHUN	PDRB (RP. JUTA)		INFLASI (HP) (%)
	ADHB	ADHK	
2010	17.350.780,8	17.350.780,8	-
2011	19.472.181,5	18.384.974,5	5,91
2012	21.580.502,8	19.514.847,2	4,41
2013	23.829.801,4	20.672.304,5	4,24
2014	26.339.071,0	21.793.190,8	4,85

Sumber : PDRB Kab. Jombang Tahun 2010-2015

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang adhb tahun 2014 sebesar 26.339.071,0 juta rupiah, bertambah 10,68 persen dibandingkan tahun 2013. Pertambahan tersebut lebih rendah 0,51 poin dari tahun 2013. Apabila tahun 2013 kategori yang mengalami pertambahan tertinggi adalah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (20,07 persen), maka tahun 2014 yang tertinggi adalah kategori Pertambangan dan

Penggalian, yakni sebesar 17,39 persen. Pertambahan terendah tahun 2013 - 2014 adalah kategori yang sama, yakni kategori Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sekitar 1 persen.

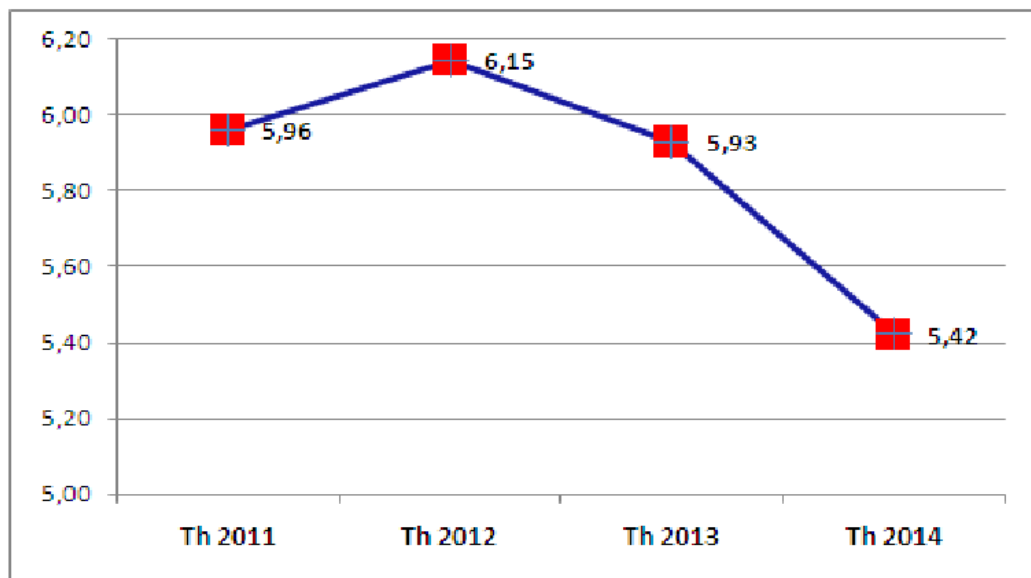
PDRB Kabupaten Jombang adhk tahun 2014 sebesar 21.793.190,8 juta rupiah. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 20.672.304,5 juta rupiah, maka di tahun 2014 mengalami percepatan ekonomi sebesar 5,42 persen. Laju pertumbuhan tersebut sedikit melambat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,93 persen. Berbeda dengan yang terjadi pada ADHB, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,24 persen. Sedangkan kategori yang mengalami kenaikan terkecil adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas, yakni sebesar 0,86 persen.

Walaupun secara total mengalami perlambatan, namun kategori Industri Pengolahan yang merupakan penopang ketiga setelah kategori Perdagangan dan Pertanian, masih mengalami akselerasi sebesar 5,47 persen. Ini berarti, di saat kategori lain mengalami tekanan, kategori Industri masih dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tetap berakselerasi. Sebagai informasi, bahwa mayoritas industri di Kabupaten Jombang adalah Industri menengah, kecil dan Rumah tangga, yang mana komponen input industri-industri ini mayoritas ber kandungan lokal.

Kategori lain yang masih dapat berakselerasi ditengah perlambatan ekonomi Kabupaten Jombang, adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori tersebut berakselerasi 2,05 persen. Di kategori Pertanian, Kabupaten Jombang merupakan daerah potensi Tabama, Hortikultura dan Perkebunan. Tabama di Kabupaten Jombang yang potensial adalah Padi dan Jagung. Dua komoditi ini cukup signifikan dalam membentuk PDRB kabupaten Jombang. Sedang pada sub kategori perkebunan komoditas tebu di Kabupaten Jombang memegang peranan penting. Tebu Kabupaten Jombang diakui telah merambah ke seantero Jawa Timur.

Secara umum total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2014 sedikit melambat jika dibanding tahun sebelumnya, yakni dari sebesar 5,93 menjadi 5,42 persen, atau berkurang 0,51 point. Selama kurun lima tahun hanya pada tahun 2011 pertumbuhan ekonominya cukup bersejarah dan fenomenal karena berhasil mencapai 6,15 persen. Akan tetapi bila melihat pertumbuhan daerah sekitar, regional dan nasional, maka pertumbuhan itu biasa saja. Ini berarti ada hubungan tak langsung antar daerah, daerah dengan regional atau daerah dengan nasional, dimana, masing-masing daerah saling mempengaruhi. Karena memang suatu daerah tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ini juga mengindikasikan adanya ekspor– impor antar wilayah, baik ekspor-impor produk barang/jasa maupun ekspor-impor faktor produksi. Kegiatan ekspor-impor dalam PDRB akan terlihat dengan pendekatan pengeluaran (PDRB Penggunaan).

Akan tetapi, karena kesulitan dan keterbatasan data, PDRB Penggunaanpun akan kesulitan menerangkan wilayah mana saja yang saling melakukan ekspor dan impor.



Gambar 3-5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2011-2014

Apabila dilihat per kategori, maka kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yakni sebesar 9,24 persen. Selanjutnya tertinggi kedua dan ketiga adalah oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,65 persen dan kategori Real Estate sebesar 8,45 persen. Sedangkan kategori yang mempunyai tingkat pertumbuhan terkecil adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas, yakni sebesar 0,86 persen.

Setahun terakhir kategori raksasa, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjalan lebih cepat, dari 0,42 persen menjadi 2,05 persen. subkategori Tanaman Pangan melesat lebih jauh dari -1,93 persen menjadi 2,15 persen. Subkategori Perkebunan Semusim jauh lebih cepat lagi di banding tahun sebelumnya dari 3,30 menjadi 5,91%. Sebaliknya subkategori Peternakan memperlambat langkahnya dari 1,45% (2013) menjadi 0,60% (2014). Subkategori perikanan dari 1,78% menjadi 3,69%. Dan subkategori kehutanan melesu dari 6,33%. Menjadi 1,57%.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan yang tetap menggairahkan meskipun melambat sedikit dari 8,41% (2013) menjadi 7,14% (2014). Pentingnya kategori ini tentu karena mampu memperlihatkan pergerakan daya beli masyarakat dan laju inflasi. Sudah dapat diperkirakan kalau daya beli masyarakat menurun pada tahun 2014.

Kategori Industri Pengolahan justru lebih cepat pada tahun 2014, yaitu dari 1,98% menjadi 2,89%. Perkembangan ini didorong oleh bagusnya bisnis Industri Makanan dan Minuman,

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki serta Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional. Momentum ini harus dipelihara dengan iklim perburuan yang kondusif.

Tabel 3-14 Pertumbuhan Ekonomi Kategorikal Kab. Jombang Tahun 2011-2014

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,62	4,76	0,42	2,05
Pertambangan & Penggalian	3,51	1,23	1,98	2,89
Industri Pengolahan	4,10	3,37	5,56	5,47
Pengadaan Listrik dan Gas	7,13	7,91	3,04	0,86
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,78	3,57	4,40	2,27
Konstruksi	5,18	6,11	6,48	5,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,63	8,76	8,41	7,14
Transportasi dan Pergudangan	3,33	3,20	4,52	4,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,06	7,48	6,34	8,65
Informasi dan Komunikasi	10,31	12,34	13,46	7,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,92	14,32	14,69	7,38
Real Estate	8,55	8,83	9,64	8,46
Jasa Perusahaan	4,79	4,23	6,31	6,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,06	2,54	2,05	1,37
Jasa Pendidikan	4,69	4,16	6,82	6,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,93	12,05	8,35	9,24
Jasa lainnya	5,73	4,57	6,27	6,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,96	6,15	5,93	5,42

Sumber : PDRB Kab. Jombang Tahun 2010- 2015

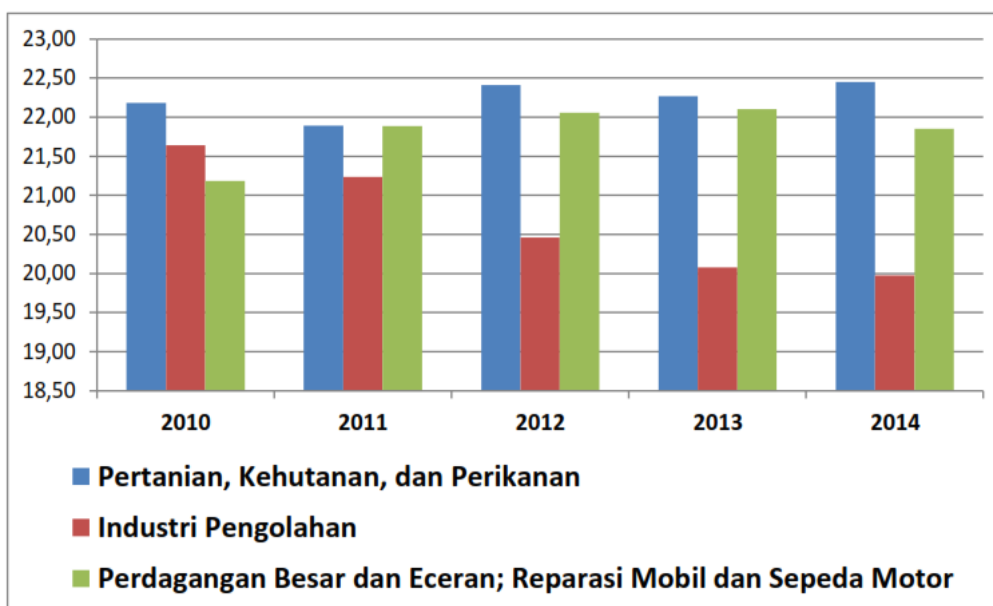
Struktur perekonomian Kabupaten Jombang tahun 2014 masih seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sudah hampir bergeser dari Pertanian menuju Perdagangan dan Industri. Bila menggunakan pendekatan tiga kategori (primer, sekunder dan tersier), maka kategori tersier yang mendominasi. Namun, bila menggunakan 17 kategori, maka tetap kategori Pertanian yang mendominasi. Akan tetapi, sedikit demi sedikit kategori Perdagangan akan menggusurnya. Hal ini dapat dilihat dari *share* kategori Pertanian yang terus menurun dan kategori Perdagangan/Industri yang terus menanjak.

Penurunan *share* kategori Pertanian disebabkan lahan pertanian yang terus menyusut, dan disisi lain produktifitas pertanian juga menurun. Karena kategori Pertanian identik dengan katakahan pangan, maka penurunan kategori Pertanian yang terus menerus, khususnya komoditi Tabama, dikhawatirkan akan menyebabkan ketahanan pangan terganggu sehingga ketergantungan terhadap impor makin meningkat.

Struktur perekonomian Kabupaten Jombang tahun 2014 atas dasar harga berlaku bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Kategori primer (kategori pertanian dan penggalian) sebesar 23,18 persen dari total PDRB. Dan uniknya, ini bertambah 0,23 poin dari tahun sebelumnya, padahal sebelumnya cenderung menurun.
- Kategori sekunder (kategori Industri, LGA dan Konstruksi) sebesar 29,66 persen dari total PDRB, atau meningkat 0,16 poin. Kategori sekunder ini tiga tahun berturut-turut mengalami perlambatan. Tahun lalu berkurang 0,26 poin.
- Kategori tersier (kategori Perdagangan, Transportasi, Akomodasi, Informasi, Keuangan, dan Jasa) 47,17 persen dari total PDRB, atau berkurang 0,38 poin. Kategori Perdagangan dan Jasa-jasa, khususnya Jasa Pendidikan, mendominasi kategori tersier. Kategori ini sebelumnya mengalami penambahan 0,43 poin.

Berkurangnya *share* kategori tersier, diambil alih oleh kategori primer dan sekunder, khususnya komoditi perkebunan tahunan dan peternakan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013, dimana yang berkurang justru kategori Primer dan Sekunder, sehingga secara otomatis diambil oleh kategori Tersier. Dari gambaran 2013 -2014, maka yang mengalami perlambatan terus menerus adalah kategori sekunder, khususnya kategori industri. Namun, untuk kategori konstruksi justru berturut-turut bertambah. Menyikapi Industri Kabupaten Jombang tiga tahun berturut-turut terus melambat, boleh jadi dampak melemahnya rupiah terhadap dolar amerika. Kondisi diatas menjelaskan bahwa ketiga kelompok (kategori primer, sekunder dan tersier) tidak ada yang terus menerus bertambah atau fluktuatif.



Gambar 3-6 Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014

F. Infrastruktur Wilayah

Dalam konstelasi regional Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, yakni berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono. Keberadaan jaringan-jaringan prasarana perhubungan darat tersebut menjadi penunjang utama aksesibilitas antar kawasan di Kabupaten Jombang.

Tabel 3-15 *Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Jombang*

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali). Selain itu, Kabupaten Jombang juga merupakan persimpangan jalur menuju Kediri/Tulungagung, Malang, serta Babat/Pantura. Pusat kota Jombang dapat ditempuh 2½ jam dari ibu kota Provinsi Jawa Timur Surabaya, atau dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Saat ini juga telah tersedia ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, yang melintasi bagian utara Kabupaten Jombang. Panjang jaringan jalan yang berada di Kabupaten Jombang terdiri dari status Jalan Nasional (38,98km), Jalan Provinsi (60,35 Km), serta Jalan Kabupaten (1.193,400 Km). Dari keseluruhan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terbagi atas: 1. Jalan kabupaten sepanjang 664,794, dengan kondisi: a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 55,20% atau 366,942 Km; b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 17,76% atau 118,09 Km; c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 11,62% atau 77,22 Km; d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 15,42% atau 102,54 Km; 2. Jalan desa sepanjang 528,606 Km, dengan kondisi: a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 41,89% atau 221,427 Km; b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 20,73% atau 109,554 Km; c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 16,60% atau 87,755 Km; d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 20,78% atau 109,870 Km. Terminal Kepuhsari, yang terletak di Kecamatan Peterongan, 5 km dari pusat kota Jombang, merupakan terminal utama kabupaten yang menghubungkan Jombang dengan kota-kota

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		lainnya. Jalur bus jurusan Surabaya, Kediri/Tulungagung, dan Solo/Jogja merupakan jalur yang beroperasi 24 jam nonstop. Untuk transportasi intra wilayah kabupaten, terdapat Angkutan Pedesaan dengan 24 trayek, yang menjangkau ke semua kecamatan. Ditambah lagi dengan adanya trayek angkutan antarkota yang menghubungkan kota Jombang dengan wilayah kabupaten di sekitarnya, yakni jurusan Pare, Kandangan, Babat, Kertosono, serta Mojokerto.
2.	Kereta Api	Kabupaten Jombang juga dihubungkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa dengan menggunakan jalur kereta api. Stasiun Jombang merupakan stasiun utama, disamping 4 stasiun lainnya: Sembung, Peterongan, Sumobito, dan Curahmalang. Jalur kereta api yang melintasi Stasiun KA Jombang diantaranya adalah: Surabaya-Jombang-Kertosono PP; Surabaya Gubeng-Yogyakarta PP; Surabaya-Madiun PP; Banyuwangi-Jember-Surabaya-Yogyakarta PP; Surabaya-Yogyakarta-Bandung PP; Surabaya-Yogyakarta-Cirebon-Jakarta PP; Jombang-Solo-Semarang-Tegal-Cirebon-Jakarta PP.
3.	Transportasi Udara	Saat ini di Kabupaten Jombang tidak terdapat bandar udara. Akses transportasi udara dari atau menuju Jombang biasanya memanfaatkan Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, yang selanjutnya dilanjutkan dengan akses transportasi darat.
4.	Transportasi Laut	Kabupaten Jombang tidak memiliki akses transportasi laut karena daerahnya tidak memiliki wilayah pesisir. Akses transportasi laut dari dan menuju Jombang biasanya memanfaatkan Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Perak atau Pelabuhan Penyeberangan Ujung di Surabaya, yang selanjutnya dilanjutkan dengan akses transportasi darat.
5.	Air Bersih	Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Jombang memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil tangki. Di Kabupaten Jombang penduduk dengan akses air minum "Aman" sebesar 73,845% penduduk.
6.	Listrik	Suplai energi listrik di Kabupaten Jombang merupakan bagian dari transmisi sistem Jawa-Bali dengan pembangkit listrik utama PLTA Ir. Sutami, Selorejo, dan Bening.
7.	Telekomunikasi	Jombang memiliki satu kode area dengan Mojokerto, yakni 0321. Operator telepon seluler yang beroperasi di Jombang untuk GSM adalah Telkomsel, Indosat, 3, dan Excelcomindo; sedang untuk CDMA hanyalah Smartfren. Di Jombang terdapat beberapa stasiun radio FM (termasuk dua milik pemerintah), serta sejumlah tabloid, majalah, dan surat kabar nasional dan regional. Di Jombang dapat dengan jelas menangkap saluran TVRI, 13 TV swasta nasional, 1 stasiun televisi lokal Jombang, serta beberapa stasiun televisi lokal di Surabaya dan Kediri.

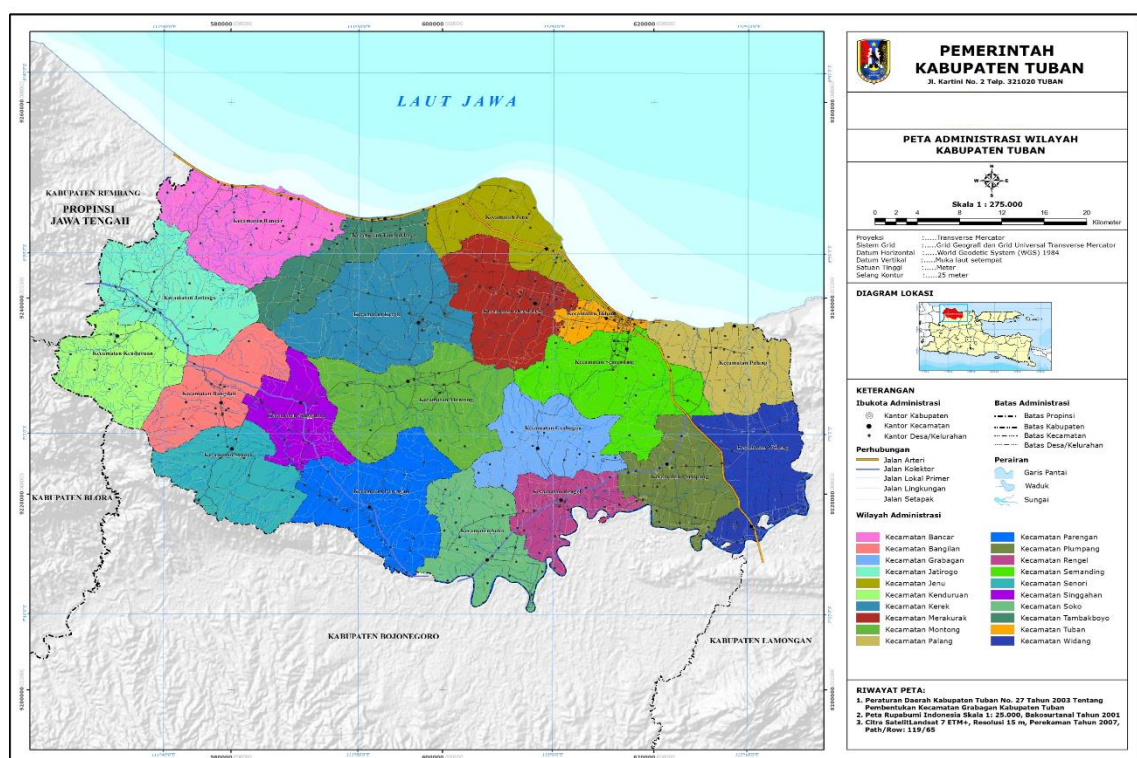
3.1.2. Kabupaten Tuban

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Tuban adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35'BT dan 6°40'-7°18'LS. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah Barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km².

Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dengan jumlah 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan) serta terbagi lagi menjadi 1.733 RW dan 6.469 RT. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Rembang, Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3-7 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tuban

Tabel 3-16 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN /DESA	LUAS WILAYAH			
			ADMINISTRASI		TERBANGUN	
			(HA)	(%) THD TOTAL	(HA)	(%) THD TOTAL
1	Kenduruan	9	8.573	4,7	105	2,5
2	Bangilan	14	7.727	4,2	189	4,5
3	Senori	12	7.839	4,3	140	3,4
4	Singgahan	12	7.905	4,3	136	3,3
5	Montong	13	14.798	8,0	190	4,6
6	Parengan	18	11.445	6,2	195	4,7
7	Soko	23	9.688	5,3	303	7,3
8	Rengel	18	5.852	3,2	249	6,0
9	Grabangan	11	7.379	4,0	159	3,8
10	Plumpang	18	8.652	4,7	280	6,7
11	Widang	16	10.714	5,8	98	2,4
12	Palang	19	7.270	4,0	318	7,6
13	Semanding	17	12.099	6,6	346	8,3
14	Tuban	17	2.129	1,2	302	7,3
15	Jenu	17	8.161	4,4	179	4,3
16	Merakurak	19	10.377	5,6	193	4,6
17	Kerek	17	13.655	7,4	247	5,9
18	Tambakboyo	18	7.297	4,0	141	3,4
19	Jatirogo	18	11.198	6,1	180	4,3
20	Bancar	24	11.236	6,1	210	5,1
	JUMLAH	330	183.994	100	4163	100

Sumber : Kabupaten Tuban Dalam Angka 2017

B. Kondisi Fisik Wilayah

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 20 kecamatan, sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan.

Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian utara Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter di atas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter dpl. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang memiliki ketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong.

Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah barat – timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan, umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban adalah meliputi:

- a. Alluvial: Jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Kenduruan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar.
- b. Regosol: Jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha, yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, Jatirogo dan Bancar.
- c. Grumosol : Jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha, yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Tambakboyo, Jatirogo, dan Bancar.
- d. Komplek Mediteran Litosol : Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Rengel, Grabagan, Widang, Palang, Kerek, dan Tambakboyo dengan luas 19.358,563 Ha.
- e. Komplek Mediteran Litosol/Renzina : Dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

Kabupaten Tuban dilintasi Sungai Bengawan Solo yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Pulau Jawa yang membentang mulai dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Widang. DAS Bengawan Solo mempunyai beberapa Sub DAS salah satunya yang terbesar yang ada di Kabupaten Tuban adalah Sub DAS Kali Kening yang melintas di bagian Selatan Kabupaten Tuban yang membentang mulai dari Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori dan Parengan. Disamping DAS Bengawan Solo juga terdapat 18 DAS kecil-kecil yang semuanya bermuara ke laut.

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.881 Ha. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo dengan luas areal irigasi 5.430 Ha, selanjutnya sungai Kening dengan luas areal irigasi 2.522 Ha. Sedangkan luas terbesar untuk sempadannya terdapat pada sungai Kening dengan luas 1.200 Ha. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten

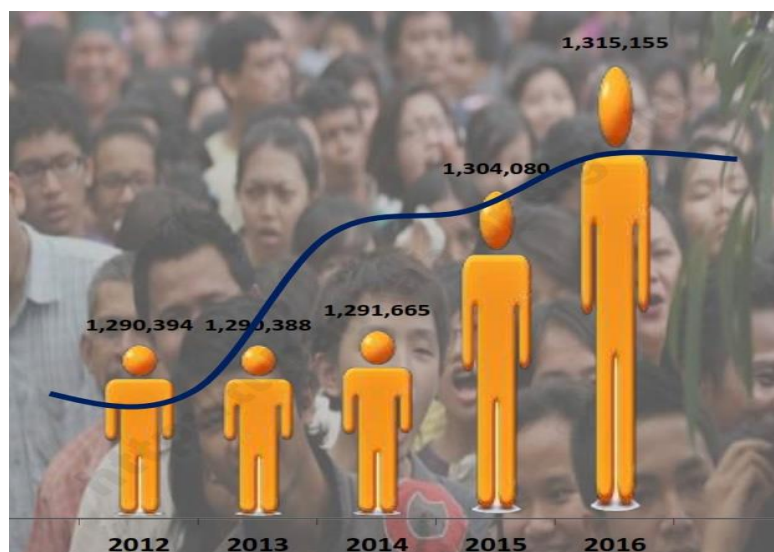
Tuban sebagian besar bermuara di pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung.

C. Penggunaan Lahan

Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (*wetland*) 54.860.530 Ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 129.134,031 Ha. Lahan pertanian di Kabupaten Tuban didominasi oleh lahan kering (ladang/tegalan) dengan luas 57.485,44 Ha atau 30,22 %, sedangkan untuk luasan lahan sawah termasuk di dalamnya sawah tambak adalah sebesar 18.731 Ha.

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Tuban berdasarkan registrasi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.315.155 jiwa yang terdiri atas 658.933 jiwa penduduk laki-laki dan 656.222 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 1.304.080. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,41.



Gambar 3-8 Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2016 mencapai 715 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 20 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tuban dengan kepadatan sebesar 4.452 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kenduruan sebesar 364 jiwa/Km².

Tabel 3-17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2011, 2015 dan 2016

KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN PER TAHUN	
		2011	2015	2016	2011-2016	2015-2016
1	Kenduruan	30.413	30.957	31.206	0,52	0,80
2	Bangilan	52.472	54.125	54.374	0,17	0,46
3	Senori	45.108	46.982	47.135	0,88	0,33
4	Singgahan	44.063	45.642	45.975	0,85	0,73
5	Montong	55.329	58.581	59.185	1,36	1,03
6	Parengan	59.954	61.270	61.498	0,51	0,37
7	Soko	89.641	91.421	92.426	0,61	1,10
8	Rengel	64.337	64.651	64.930	0,18	0,43
9	Grabagan	40.409	42.078	42.540	1,03	1,10
10	Plumpang	84.965	87.143	87.345	0,55	0,23
11	Widang	55.562	56.749	56.783	0,44	0,06
12	Palang	87.631	93.628	94.712	1,57	1,16
13	Semanding	112.703	119.295	120.957	1,42	1,39
14	Tuban	91.483	94.091	94.791	0,71	0,74
15	Jenu	55.008	57.482	58.267	1,16	1,37
16	Merakurak	59.173	61.399	62.352	1,09	1,55
17	Kerek	68.580	72.135	72.986	1,25	1,18
18	Tambakboyo	42.365	44.688	45.087	1,25	0,89
19	Jatirogo	60.492	60.848	61.193	0,23	0,57
20	Bancar	59.228	60.915	61.413	0,73	0,82
TUBAN		1.258.816	1.304.080	1.315.155	0,89	0,85

Sumber : Kabupaten Tuban Dalam Angka 2017

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Tuban Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2016 sebesar 5.151 pekerja dengan kenaikan 3,6 persen. Dari 5.151 pekerja yang terdaftar sebesar 3.879 telah ditempatkan bekerja.

Tabel 3-18 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Tuban Tahun 2015

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I. Angkatan Kerja	369.753	233.286	603.039
1. Bekerja	358.720	226.023	584.743
2. Pengangguran Terbuka	11.033	7.263	18.296
II. Bukan Angkatan Kerja	65.569	225.993	294.562
JUMLAH	438.322	459.279	897.601
TPAK	48,36	50,79	67,18
TINGKAT PENGANGGURAN	2,98	3,11	3,03

Sumber : Kabupaten Tuban Dalam Angka 2017

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 51,52 persen (2.654 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 1.709 pekerja di tahun 2016.

Tabel 3-19 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tuban Tahun 2015

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	181.926	93.798	275.724
Pertambangan dan Penggalian	6.187	-	6.187
Industri Pengolahan	25.742	18.203	43.945
Listrik, Gas dan Air	-	-	-
Bangunan	43.269	1.569	44.828
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	41.634	77.170	118.804
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	17.417	-	17.417
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	5.722	2.296	8.018
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	36.823	32.987	69.810
Jumlah	358.720	226.023	584.743

Sumber : Kabupaten Tuban Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Secara umum pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Tuban didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yaitu lapangan usaha kategori Industri Pengolahan dengan nilai PDRB sebesar 14,391,199.58 juta rupiah, lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai PDRB sebesar 11,089,791.90 juta rupiah dan lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 6,942,155.18 juta rupiah. Sedikit mengalami pergeseran bila dibandingkan dengan penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 dimana sektor dominan yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pergeseran struktur ekonomi ini dikarenakan adanya perubahan dalam penghitungan yaitu menggunakan tahun dasar 2010.

Tabel 3-20 Perkembangan PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

TAHUN	PDRB (RP. JUTA)		PERTUMBUHAN (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2012	35.180.224,74	31.816.253,13	11,82	6,29
2013	39.008.415,37	33.678.762,00	10,88	5,85
2014*	43.801.544,98	35.519.919,36	12,29	5,47
2015*	48.137.740,35	37.256.027,78	9,90	4,89
2016**	52.311.338,24	39.081.755,55	8,67	4,90

Ket.: * Angka Perbaikan

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

Struktur lapangan usaha di Kabupaten Tuban telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Industri

Pengolahan sebesar 27,51 persen, kemudian lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan sebesar 21,20 persen, lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 13,47 persen, lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 14,42 persen; dan lapangan usaha kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,10 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Tabel 3-21 Peranan PDRB ADHB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016 (persen)

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2012	2013	2014*	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,29	20,69	20,74	21,35	21,20
B	Pertambangan dan Penggalian	8,77	8,35	9,37	9,12	9,10
C	Industri Pengolahan	29,19	29,14	28,52	28,36	27,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	14,22	14,10	13,99	13,49	13,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,35	12,74	12,53	12,42	13,09
H	Transportasi dan Pergudangan	0,48	0,51	0,56	0,61	0,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,78	0,83	0,89	0,94
J	Informasi dan Komunikasi	4,84	4,50	4,34	4,33	4,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,95	1,99	2,08	2,17
L	Real Estat	1,27	1,32	1,32	1,39	1,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	2,46	2,23	2,22	2,29
P	Jasa Pendidikan	1,52	1,56	1,61	1,67	1,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,44	0,47	0,49	0,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,12	1,10	1,15	1,21	1,26
PDRB TANPA MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.: * Angka Perbaikan

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2016 sebesar 4,90 persen, meningkat sedikit bila dibanding tahun 2015 mencapai 4,89 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,17 persen. Disusul lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,16 persen, lapangan usaha kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,05 persen dan lapangan usaha kategori Real Estate sebesar 8,22 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 7 persen ialah lapangan usaha kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,17 persen, lapangan usaha kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,16 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,05 persen; Real Estate sebesar 8,22 persen; Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 7,98 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,27 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,05 persen. Sedangkan

besaran lapang usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,03 persen, meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,81 persen.

Tabel 3-22 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016 (persen)

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2012	2013	2014*	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,47	5,20	3,67	4,35	3,76
B	Pertambangan dan Penggalian	3,72	-0,29	13,33	6,71	4,67
C	Industri Pengolahan	6,07	8,05	3,72	5,56	4,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,94	5,09	6,99	0,81	1,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,35	7,20	2,23	2,68	3,99
F	Konstruksi	3,08	3,13	3,36	0,90	1,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	8,69	6,68	3,57	7,98
H	Transportasi dan Pergudangan	9,90	10,68	12,50	8,91	9,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	6,93	9,51	9,18	9,05
J	Informasi dan Komunikasi	10,76	2,95	8,95	8,79	9,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,07	12,97	7,64	7,30	7,05
L	Real Estat	9,12	8,27	9,77	7,99	8,22
M,N	Jasa Perusahaan	6,41	7,71	9,95	8,72	7,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90	1,59	0,33	4,28	6,53
P	Jasa Pendidikan	8,79	8,57	8,96	7,31	6,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,29	8,55	10,77	8,72	6,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,82	6,62	7,12	5,41	6,92
PDRB TANPA MIGAS		6,82	6,04	5,54	5,11	5,06
PDRB MIGAS		6,29	5,85	5,47	4,89	4,90

Ket.: * Angka Perbaikan

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban dari tahun 2013 sampai 2016 agak mengalami perlambatan. Hal ini diduga disamping kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (*BI rate*). Selain itu juga disebabkan oleh faktor pertumbuhan yang cukup significant di masing-masing lapangan usaha dari suatu kategori yang kurang dominan sehingga mengakibatkan pertumbuhan pada kategori yang kurang dominan tersebut menjadi sangat besar.

F. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Hal ini dikarena fungsi strategis infrastruktur khususnya jalan sebagai alat penghubung antar daerah dan juga mempercepat pertumbuhan di bidang lainnya terutama sarana transportasi. Manfaat

langsung dari pembangunan jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu kedaerah lainnya. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Hal tersebut pada akhirnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Tuban.

Tabel 3-23 *Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Tuban*

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Kondisi jalan di Kabupaten Tuban sebagian besar sudah diaspal, hal ini mengingat lokasinya yang berada di jalan lintas pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Panjang jalan raya di Kabupaten Tuban mencapai panjang 925,421 km yang terbagi atas jalan negara 94,051 km, jalan provinsi 81,350 km dan jalan kabupaten 750,020 km. Pada tahun 2015 total panjang jalan di Kabupaten Tuban 747,871 km dalam kategori baik. Kondisi jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan. Panjang jalan negara dengan kondisi baik pada tahun 2013 mencapai 48.671 km dan meningkat menjadi 90.851 km. Begitu juga kondisi jalan Kabupaten pada tahun 2013 mencapai 600.210 km dan meningkat menjadi 647.280 pada tahun 2014. Namun meskipun demikian, jalan dengan kondisi rusak pun masih cukup tinggi terutama jalan provinsi yang mencapai 36.000 km pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 36.640 km pada tahun 2014. Begitu pula pada jalan Kabupaten yang mencapai 46.900 km pada tahun 2013. Terminal Baru Tuban yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu, merupakan terminal penumpang utama di Kabupaten Tuban dengan kategori Type A yang dibangun pada tahun 2012. Simpul transportasi darat di Kabupaten Tuban ini melayani berbagai moda transportasi umum, baik yang menghubungkan antar kota maupun antar provinsi. Untuk transportasi intra wilayah kabupaten, terdapat 2 terminal Type C yang berada di sekitar pusat kota Tuban yang melayani angkutan perkotaan dan perdesaan.
2.	Kereta Api	Di Kabupaten Tuban sedianya telah ada jalur kereta api angkutan penumpang maupun barang dari Bojonegoro ke Tuban PP. yang melewati wilayah Kecamatan Plumpang atau lebih dikenal dengan nama jalur Babat-Tuban. Namun sudah sejak lama jalur tersebut tidak beroperasi, dan bahkan di beberapa lokasi telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk. Beberapa tahun terakhir berkembang wacana bahwa jalur kereta api tersebut akan difungsikan kembali.
3.	Transportasi Udara	Saat ini di Kabupaten Tuban tidak terdapat bandar udara. Akses transportasi udara dari atau menuju Tuban biasanya memanfaatkan Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, yang selanjutnya dilanjutkan dengan akses transportasi darat dengan jarak tempuh ± 110 km atau sekitar 2,5 jam.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
4.	Transportasi Laut	Berdasarkan versi sejarah berdirinya Kabupaten Tuban, pada zaman dahulu Tuban merupakan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit. Namun ironisnya saat ini di Kabupaten Tuban tidak terdapat Pelabuhan Umum. Hanya terdapat sejumlah pelabuhan khusus (Pelsus) milik swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Semen Gresik, Pelabuhan Semen Holcim dan Pelabuhan PT. Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI). Serta satu pelabuhan perikanan yakni Pelabuhan Perikanan Bulu. Untuk menunjang percepatan pembangunan di Kabupaten Tuban, saat ini tengah dikaji suatu rencana pembangunan Pelabuhan Umum di Kabupaten Tuban yang direncanakan akan berlokasi di Kecamatan Jenu.
5.	Air Bersih	Kabupaten Tuban dilintasi Sungai Bengawan Solo yang membentang mulai dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Widang. Keberadaan Sungai tersebut menjadi sumber utama penyediaan air baku bagi Kabupaten Tuban. Namun demikian untuk beberapa kawasan di sekitar Pantai Utara Tuban, penyediaan suplai air baku sedikit terbatas.
6.	Listrik	Suplai energi listrik di Kabupaten Tuban merupakan bagian dari transmisi sistem Jawa-Bali dengan pembangkit listrik utama PLTA Ir. Sutami, Selorejo, dan Bening.
7.	Telekomunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten Tuban telah terakses oleh fasilitas jaringan telekomunikasi, khususnya jaringan nir kabel (telepon seluler). Akses internet dan telepon dari beberapa perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi telah dapat dinikmati di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

3.2. PROVINSI JAWA TENGAH

A. Wilayah Administrasi

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang beribukota Semarang. Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimun Jawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimun Jawa). Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota.



Gambar 3-9 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3-24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS (KM ²)
1	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	20	12/266	1.096,74
2	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	27	30/301	1.329,02
3	Kabupaten Batang	Batang	15	9/239	788
4	Kabupaten Blora	Blora	16	24/271	1.820,59
5	Kabupaten Boyolali	Boyolali	19	6/261	1.015,10
6	Kabupaten Brebes	Brebes	17	5/292	1.902,37
7	Kabupaten Cilacap	Cilacap	24	15/269	2.142,59
8	Kabupaten Demak	Demak	14	6/243	1.149,77
9	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	19	7/273	1.975,865
10	Kabupaten Jepara	Jepara	16	11/184	1.004,16
11	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	17	15/162	800,20
12	Kabupaten Kebumen	Kebumen	26	11/449	1.281,115
13	Kabupaten Kendal	Kendal	20	20/266	1.002,23
14	Kabupaten Klaten	Klaten	26	10/391	655,56
15	Kabupaten Kudus	Kudus	9	9/123	425,17
16	Kabupaten Magelang	Mungkid	21	5/367	1.085,73
17	Kabupaten Pati	Pati	21	5/401	1.419,07
18	Kabupaten Pekalongan	Kajen	19	13/272	836,13
19	Kabupaten Pemalang	Pemalang	14	11/211	996,09
20	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	18	15/224	777,64
21	Kabupaten Purworejo	Purworejo	16	25/469	1.034
22	Kabupaten Rembang	Rembang	14	7/287	1.014
23	Kabupaten Semarang	Ungaran	19	27/208	981
24	Kabupaten Sragen	Sragen	20	12/196	941

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS (KM ²)
25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	12	17/150	466
26	Kabupaten Tegal	Slawi	18	6/281	878
27	Kabupaten Temanggung	Temanggung	20	23/266	870
28	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	25	43/251	1.822
29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	15	29/236	984
30	Kota Magelang	-	3	17/-	18,12
31	Kota Pekalongan	-	4	27/-	45,25
32	Kota Salatiga	-	4	23/-	56
33	Kota Semarang	-	16	177/-	373,87
34	Kota Surakarta	-	5	51/-	44
35	Kota Tegal	-	4	27/-	39

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017

B. Kondisi Fisik Wilayah

Provinsi Jawa Tengah memiliki topografi yang bervariasi, bagian utara merupakan kawasan pantai utara berupa dataran rendah yang sempit. Bagian selatan merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di Timur.

Jenis tanah di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumusol; sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur.

Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21-32 °C. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri.

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa (572 km), memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa di antaranya adalah Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedang sungai-sungai yang bermuara di Samudra Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Luk Ulo dan Kali Progo.

Diantara waduk-waduk yang utama di Jawa Tengah adalah Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Rawa

Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Wadaslintang (perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen) dan Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara).

C. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 tercatat seluas 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Luas yang ada, terdiri dari 992 ribu hektar (30,47%) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53%) bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah dengan pengairan teknis adalah 38,65%, tadah hujan 28,49% dan lainnya dengan pengairan setengah teknis sederhana. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 74,64%. Lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 32,28% dari total bukan lahan sawah. Persentase itu merupakan yang terbesar, dibanding persentase penggunaan bukan lahan sawah lain.

Tabel 3-25 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Sawah	992.000	30,47
	- Sawah Irigasi	383.408	
	- Sawah Tadahan Hujan	282.621	
	- Sawah dengan pengairan lainnya	325.971	
2	Bukan Sawah	2.2600.000	69,53

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 34.019,10 ribu jiwa yang terdiri atas 16.871,19 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.147,90 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,39. Dengan jumlah sebesar itu menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke tiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan tetapi untuk kepadatan penduduk, Jawa Tengah menempati posisi kelima terpadat di Indonesia.

Tabel 3-26 Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk (000 jiwa)	33.522,67	33.774,14	34.019,10
	- Laki-laki	16.627,02	16.750,90	16.871,19
	- Perempuan	16.895,64	17.023,24	17.147,90
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	-	-	0,73
3.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	1.030	1.038	1.045
4.	Sex Ratio (L/P) (%)	98,41	98,40	98,39
5.	Penduduk Menurut Kelompok Umur			
	- 0-14 Tahun (%)	25,30	24,66	24,96
	- 15-64 Tahun (%)	67,23	67,52	67,20
	- >65 Tahun (%)	7,47	7,82	7,84
6.	Angka Beban Ketergantungan	48,74	48,10	48,81

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017

Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 1.045 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.678 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 477 jiwa/Km².

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 17,31 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 67,15 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,63 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebesar 16,51 juta orang. Sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 5,07 juta orang (30,69 persen) pekerja, sementara sektor listrik, gas, dan air paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 0,04 juta orang (0,23 persen) pekerja.

Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2016 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 34,80 persen atau 5,75 juta orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar hanya sebesar 3,03 persen atau 0,50 juta orang.

Tabel 3-27 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I. Angkatan Kerja	10.226.363	7.086.103	17.312.466
1. Bekerja	9.702.567	6.808.569	16.511.136
2. Pengangguran Terbuka	523.796	277.534	801.330
II. Bukan Angkatan Kerja	2.418.476	6.051.957	8.470.433
JUMLAH	12.644.839	13.138.060	25.782.899
TPAK	80,84	53,94	67,15
TINGKAT PENGANGGURAN	5,12	3,92	4,63

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Pada tahun 2016, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah sebesar 1.092,03 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 1.011,85 triliun rupiah.

Peningkatan nilai PDRB mampu mengiringi peningkatan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Hal tersebut tercermin dari jumlah PDRB perkapita yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 PDRB perkapita sebesar 27,52 juta per tahun, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 29,96 juta hingga mencapai 32,10 juta pada tahun 2016.

Tabel 3-28 Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

URAIAN	TAHUN		
	2014	2015*	2016**
PDRB ADHB (Triliun Rp.)	922,47	1.011,85	1.092,03
PDRB ADHK (Triliun Rp.)	764,96	806,78	849,38
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	27,52	29,96	32,10
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,47	5,28

Ket.: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2016 sebesar 5,28 persen, sedikit melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 salah satunya disebabkan oleh penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu struktur ekonomi yang didominasi oleh kategori industri berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Tengah.



Gambar 3-10 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,95 persen pada tahun 2016. Sementara itu, kategori pertanian meskipun menyerap tenaga kerja terbesar namun bukan menjadi kategori yang paling dominan karena kontribusinya masih dibawah kategori industri yakni sebesar 14,68 persen.

Dari sisi pengeluaran, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu 61,05 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 61,30 persen. Penggunaan terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto dengan persentase sebesar 32,57 persen pada tahun 2016. Selain dua komponen tersebut, komponen lainnya memiliki peran kurang dari 10 persen terhadap total PDRB Pengeluaran.

F. Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur wilayah memegang peranan penting bagi perkembangan kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa infrastruktur penunjang pembangunan yang terdapat di Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-29 Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jawa Tengah

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Jawa Tengah dilalui beberapa ruas jalan nasional, yang meliputi jalur pantura (menghubungkan Jakarta-Semarang-Pati-Surabaya-Banyuwangi), jalur Tegal-Purwokerto, jalur lintas selatan (menghubungkan Bandung-Yogyakarta-Surakarta-Madiun-Surabaya), serta jalur Semarang-Solo. Losari, pintu gerbang Jawa Tengah sebelah barat dapat ditempuh 3,5 - 4 jam perjalanan dari Jakarta. Saat ini sedang dibangun ruas Jalan Tol Semarang-Solo yang menghubungkan Kota Semarang dan Solo, melalui Ungaran, Salatiga, Boyolali hingga Solo, sehingga mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan nasional di Jawa Tengah meliputi lintas pantai utara sepanjang 394,412 Km, lintas tengah sepanjang 448,393 Km, lintas selatan sepanjang 266,529 Km dan jalur penghubung lintas sepanjang 281,237 Km, serta belum termasuk jalan non status. Dalam perekonomian Jawa Tengah, kategori transportasi didominasi oleh sub kategori angkutan darat yang memberikan kontribusi hingga 80 persen. Untuk mendukung lancarnya transportasi, saat ini terdapat 1.630 perusahaan otobis yang melayani angkutan bis dalam provinsi dan antar provinsi. Untuk mendukung aktifitas transportasi darat, Jawa Tengah memiliki 21 terminal utama yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Terminal utama tersebut sebanak 16 terminal termasuk terminal kelas A. Terminal kelas B di provinsi ini tercatat sebanyak 49 terminal, serta sejumlah terminal Kelas C.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
2.	Kereta Api	Jawa Tengah merupakan provinsi yang pertama kali mengoperasikan jalur kereta api, yakni pada tahun 1867 di Semarang dengan rute Semarang-Tanggung yang berjarak 26 km, atas permintaan Raja Willem I untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Saat ini jalur kereta api yang melintasi Jawa Tengah adalah lintas utara (Jakarta-Semarang-Surabaya), lintas selatan (Bandung-Yogyakarta-Surabaya), jalur Kroya-Cirebon, dan jalur Solo-Gundih-Semarang. Jalur kereta Solo-Wonogiri yang telah lama mati dihidupkan kembali pada tahun 2005. Jalur lain yang diaktifkan kembali adalah jalur rel Kedungjati - Ambarawa yang menghubungkan stasiun Bringin, stasiun Tuntang dan berakhir di stasiun Ambarawa. Dari stasiun Ambarawa dapat berlanjut sampai stasiun Bedono saat ini. Membaiknya fasilitas dan pelayanan serta harga yang semakin ekonomis membuat angkutan kereta api semakin diminati. Pada tahun 2016, PT KAI Daop IV Semarang mencatat pertumbuhan penumpang sebesar 13,06 persen. Sedangkan pertumbuhan angkutan barang mencapai 78,31 persen.
3.	Transportasi Udara	Untuk transportasi udara, Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali merupakan bandara komersial yang paling penting di Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat Bandara Dewandaru di Jepara (Kec. Karimunjawa), Bandara Tunggulwulung di Cilacap dan Bandara Wirasaba di Purbalingga. Penerbangan Jakarta-Semarang atau Jakarta-Surakarta dapat ditempuh dalam waktu 45-50 menit. Selama 2016, penumpang yang berangkat dari ketiga bandara komersil di Jawa Tengah meningkat sebesar 24,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan pada jumlah penumpang yang datang dan berangkat terjadi pada penerbangan domestik, sementara penerbangan internasional tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Dari tiga bandara komersil yang ada di Jawa Tengah, Ahmad Yani merupakan bandara yang tersibuk. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat di Bandara Ahmad Yani mencapai 60 persen dari seluruh jumlah penumpang angkutan udara di Jawa Tengah.
4.	Transportasi Laut	Jumlah pelabuhan di Jawa Tengah sebanyak 14 pelabuhan. Jawa Tengah memiliki pelabuhan besar yang terkenal sejak jaman kolonial Belanda dan memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi Jawa Tengah, yaitu Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Mas. Sebagai tempat rekreasi pelabuhan yang terletak di jalan Yos Sudarso Arteri Semarang ini memiliki fasilitas: perahu sewa, kolam pancing, danau buatan, arena grass track, dan jogging track yang dibuka setiap hari dan berjarak kurang lebih 5 Km dari Tugumuda.
5.	Listrik	Pembangkit energi listrik yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam sistem distribusi Jawa-Bali diantaranya: PLTA Mrica, PLTA Kedung Ombo, PLTA Sidorejo, PLTA Klambu, dan PLTU Semarang.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik PLN di Jawa Tengah bertambah sekitar 3,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran listrik oleh PLN dibagi menjadi 10 unit PLN yaitu PLN cabang Semarang, Surakarta, Purwokerto, Tegal, Magelang, Kudus, Salatiga, Klaten, Pekalongan, dan Cilacap. Dari total listrik Jawa Tengah yang disalurkan, 47,84 persen dialirkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan industri, usaha, pemerintah dan lain-lain.
6.	Telekomunikasi	Seluruh wilayah perkotaan di Jawa Tengah telah terakses oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel. Akses internet dan telepon dari beberapa operator penyedia jasa telekomunikasi telah dapat dinikmati di seluruh wilayah Jawa Tengah. Beberapa perusahaan operator telekomunikasi yang terdapat di provinsi ini yaitu: PT. Telkom, PT. Bakrie Telekom, PT. Mobile 8, PT. Hutchison CP Telecom (HCPT) Indonesia, Smart, Ceria, PT. Indosat, Axis, dan PT. Excelcomindo Pratama. Selain itu, beberapa kota yakni Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal merupakan kota-kota yang memiliki stasiun relay televisi swasta nasional yang menyebarkan siaran televisi teresterial maupun televisi kabel ke seluruh pelosok Jawa Tengah.

3.2.1. Kabupaten Rembang

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Rembang yang ber-Semboyan “Rembang BANGKIT” (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa), adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111° 00' – 111° 30' Bujur Timur dan 6° 30' – 7° 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

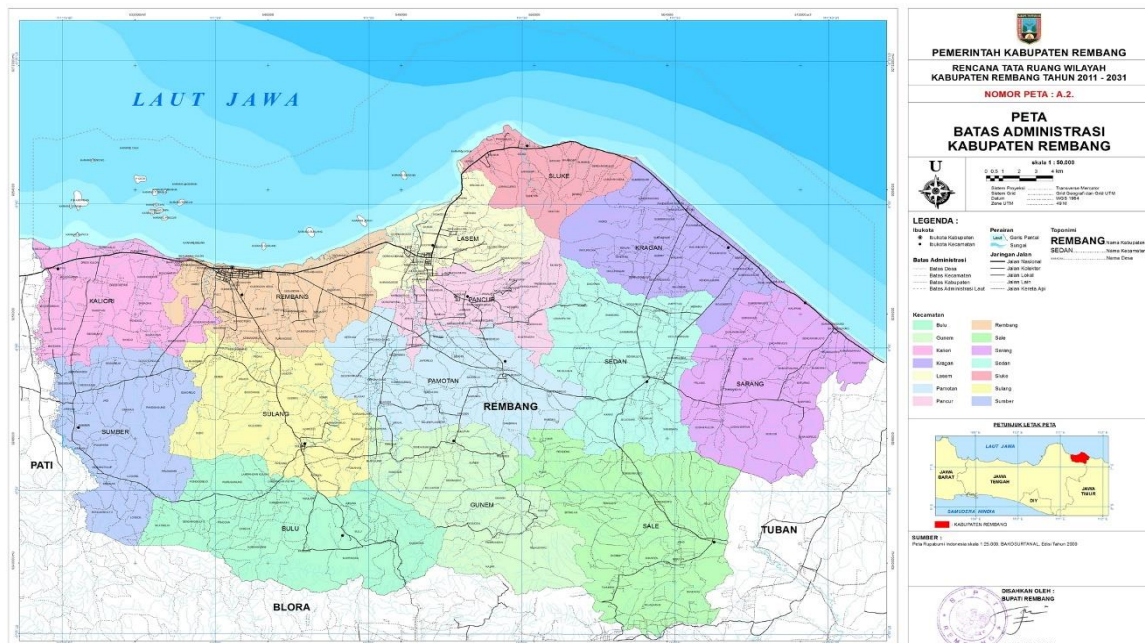
Tabel 3-30 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang

KECAMATAN		LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1	Sumber	76,73	18
2	Bulu	102,4	16

KECAMATAN		LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH DESA/KELURAHAN
3	Gunem	80,2	16
4	Sale	107,15	15
5	Sarang	91,33	23
6	Sedan	79,64	21
7	Pamotan	81,56	23
8	Sulang	84,54	21
9	Kaliori	61,5	23
10	Rembang	58,81	34
11	Pancur	45,93	23
12	Kragan	61,66	27
13	Sluke	37,59	14
14	Lasem	45,04	20
REMBANG		1.014,08	294

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017

Kabupaten Rembang yang beribukota di Rembang, memiliki luas wilayah 101.408 ha atau 3,12% dari luas Jawa Tengah, dengan panjang pantai mencapai 60 km. Wilayah administrasi Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan yang mencakup 287 desa dan 7 kelurahan, serta 959 rukun warga dan 3.390 rukun tetangga. Kecamatan Sale merupakan kecamatan terluas (10,57% dari luas Kabupaten Rembang), dan Kecamatan Sarang merupakan kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh (64 km) dari ibukota Kabupaten Rembang.



Gambar 3-11 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang

B. Kondisi Fisik Wilayah

Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah, yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 dan 500-1.000 mdpl. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46,58%) mempunyai kelerengan sebesar 0 – 2%. Sedangkan 33.233 ha lainnya (43,18%) mempunyai kelerengan sebesar 2-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15 - 40% dan >40% masing-masing seluas 14,38% dan 4,86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 23°C. Dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan. Sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan di Kabupaten Rembang termasuk sedang, yaitu rata-rata 502,36 mm/tahun.

Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumosol, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang, yaitu meliputi 45%. Sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.

C. Penggunaan Lahan

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar penggunaannya terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 626.136 jiwa yang terdiri atas 312.057 jiwa penduduk laki-laki dan 314.079 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun sebelumnya, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 %. Pertumbuhan penduduk terbesar ada

di Kecamatan Rembang, diikuti Kecamatan Sarang masing-masing sebesar 1,09 % dan 1,03 %.

Tabel 3-31 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2010, 2015 dan 2016

KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK (RIBU)			PERTUMBUHAN PERTAHUN (%)	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Sumber	33 695	34 752	34 917	0,59	0,47
2	Bulu	25 731	26 526	26 650	0,58	0,47
3	Gunem	22 833	23 780	23 948	0,79	0,71
4	Sale	35 902	37 423	37 695	0,81	0,73
5	Sarang	60 370	63 748	64 407	1,08	1,03
6	Sedan	51 362	53 695	54 122	0,87	0,8
7	Pamotan	44 105	45 545	45 775	0,62	0,5
8	Sulang	36 914	38 513	38 800	0,83	0,75
9	Kaliori	38 776	40 487	40 797	0,85	0,77
10	Rembang	84 381	89 304	90 274	1,13	1,09
11	Pancur	27 471	28 840	29 098	0,96	0,89
12	Kragan	58 523	61 754	62 380	1,06	1,01
13	Sluke	26 721	27 772	27 953	0,75	0,65
14	Lasem	47 123	48 995	49 320	0,76	0,66
REMBANG		593 907	621 134	626 136	0,88	0,81

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017

Sementara itu besarnya sex ratio tahun 2016 sebesar 99%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2016 mencapai 617 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.535 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 260 jiwa/km².

Sedangkan Angka Kelahiran Kasar (CBR) di Kabupaten Rembang sebesar 14,56 dan Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 5,45. Angka CBR tertinggi ada di kecamatan Pancur sebesar 17,30 dan terendah ada di Kecamatan Sale sebesar 11,39, sementara angka CDR tertinggi ada di Kecamatan Rembang sebesar 9,10 dan terendah ada di Kecamatan Pancur yaitu sebesar 0,66.

Tabel 3-32 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

URAIAN/KEGIATAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	455 225	461 136	467 042	472 756	478 731
I. Angkatan Kerja	345 704	343 985	340 675	322 111	320 584
- Bekerja	320 747	324 204	320 341	305 280	306 110
- Pengangguran Terbuka	24 957	19 781	20 334	16 831	14 474
> Pernah Bekerja	4 577	5 683	6 704	6 405	4 878
> Tidak Pernah Bekerja	20 380	14 098	13 630	10 426	9 596
II. Bukan Angkatan Kerja	109 521	117 151	126 367	150 645	158 147

URAIAN/KEGIATAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
- Sekolah	23 663	30 692	27 193	37 345	32 976
- Mengurus Rumah Tangga	69 214	70 867	81 233	94 117	110 051
- Lainnya	16 644	15 592	17 941	19 183	15 120

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017

Dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 66,97% merupakan angkatan kerja dan 33,03 % bukan angkatan kerja. Dari seluruh angkatan kerja terdapat 95,49 % berstatus bekerja.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Rembang berangsur menurun terutama sepanjang lima tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2015 sebesar 4,51%. Hal tersebut sekaligus menjadi angka pengangguran terendah selama lima tahun terakhir. Sebagian besar penurunan TPT pada masa tersebut disertai dengan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK dalam tiga tahun terakhir menurun dari 74,88% pada tahun 2012 menjadi 66,97% pada tahun 2015. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa jumlah penduduk yang berpotensi terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi di Rembang semakin menyusut pada periode yang sama.

Keterlibatan penduduk usia produktif di Rembang dalam pekerjaan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tampak dari perbandingan TPAK keduanya (TPAK laki-laki 85,18% dan TPAK perempuan 49,26%). Selain penurunan TPAK, tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang juga berupa kualitas SDM tenaga kerja. Sebagian besar penduduk yang bekerja, masih berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah (53,87%) dan SLTP (21,56%). Rendahnya kualitas tenaga kerja tersebut menyebabkan populasi tenaga kerja informal masih cukup tinggi (62,03%).

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada tahun 2015 dari seluruh penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja ada sebanyak 44,70% yang bekerja di sektor pertanian, sementara yang bekerja di sektor industri sebesar 9,46%.

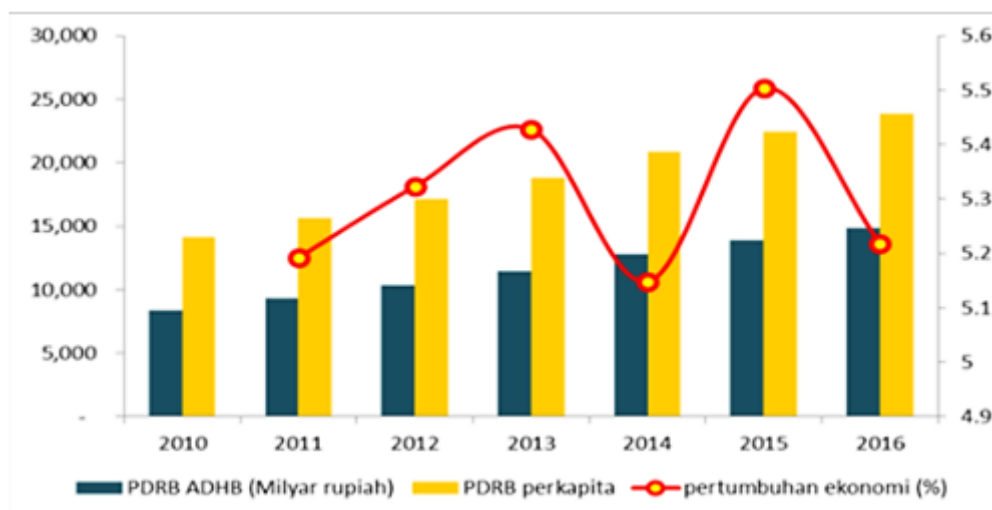
Tabel 3-33 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	154 789	141 031	151 079	150 364	137 048
Industri Pengolahan	30 941	36 322	18 541	22 669	28 967
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan Dan Hotel	57 004	59 481	62 547	54 324	61 299
Jasa Kemasyarakatan	41 968	48 140	56 220	34 530	39 297
Lainnya	36 045	39 230	31 954	43 393	39 499
JUMLAH	320 747	324 204	320 341	305 280	306 110

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Produksi barang dan jasa di Kabupaten Rembang terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp 8,4 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp 14,9 trilyun pada tahun 2016 (PDRB atas dasar harga berlaku). Postur perekonomian Rembang pada tahun 2016 masih mirip dengan tahun sebelumnya. Sumbangan utama berasal dari tiga lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produksi barang dan jasa, yaitu lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Ketiganya secara agregat mampu menyumbang nilai tambah mencapai 63% lebih dari total PDRB Kabupaten Rembang tahun 2016. Pertanian sebagai lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar nilai tambah, pada tahun 2016 mampu tumbuh 1,63%, atau melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pertanian tersebutlah yang menjadi faktor utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2016.



Gambar 3-12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016

Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2013-2016 menunjukkan trend terus meningkat, dan pertumbuhan pada tahun 2015 merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten rembang pada tahun 2016 mencapai 5,23% atau melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja perekonomian Kabupaten Rembang tidak terlepas dari dukungan lapangan usaha yang menyumbang nilai tambah besar.

Tabel 3-34 Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016

TAHUN	PDRB (RP. JUTA)		PERTUMBUHAN (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2010	8.373.546.87	8.373.546.87	-	-
2011	9.352.791.37	8.808.302.78	11,69	5,19
2012	10.323.373.92	9.277.163.23	10,38	5,32
2013	11.441.103.05	9.780.750.39	10,83	5,43

TAHUN	PDRB (RP. JUTA)		PERTUMBUHAN (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2014	12.821.715.64	10.284.274.36	12,07	5,15
2015*	13.897.816.58	10.850.269.20	8,39	5,50
2016**	14.867.075.74	11.418.008.73	6,97	5,23

Ket.: * Angka Perbaikan

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2016 adalah lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23% tersebut, 2,29% nya berasal dari pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kedua lapangan usaha tersebut. Pertumbuhan lapangan usaha industri didorong oleh pertumbuhan produksi industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian Rembang.

Tabel 3-35 Distribusi PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2016

Kategori	Uraian	adhb	adhk	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.295.225,24	3.168.229,36	28,89
B	Pertambangan dan Penggalian	466.388,29	343.653,90	3,14
C	Industri Pengolahan	3.226.027,16	2.488.767,34	21,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.351,25	10.073,49	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.412,17	5.809,15	0,04
F	Konstruksi	1.115.264,32	886.134,34	7,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.912.222,96	1.541.934,41	12,86
H	Transportasi dan Pergudangan	526.759,92	467.117,18	3,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454.579,75	376.930,99	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	153.980,59	168.123,59	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	640.708,20	454.103,43	4,31
L	Real Estate	133.347,74	118.520,31	0,90
M.N	Jasa Perusahaan	41.042,09	33.723,93	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	567.661,05	421.480,84	3,82
P	Jasa Pendidikan	842.605,81	559.128,80	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.707,03	141.779,71	1,26
R.S.T.U	Jasa lainnya	287.792,16	232.497,97	1,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.867.075,74	11.418.008,73	100

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

F. Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur wilayah memegang peranan penting bagi perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Rembang. Beberapa infrastruktur penunjang pembangunan yang terdapat di Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-36 Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Rembang

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total panjang jalan di Kabupaten Rembang mencapai 761.467 km, dengan rincian jalan negara 61.267 km, jalan provinsi 58,4 km dan jalan kabupaten 642,75 km. Status jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rembang sepanjang 642,75 km tersebut, kondisinya 41,51 persen diantaranya sudah diaspal, 52,05 persen masih lapis makadam, 6,37 persen beton/kerikil dan jalan tanah sebesar 0,08 persen. Jika dilihat dari kondisi jalan 49,03 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, jalan dengan kondisi sedang sebesar 24,98 persen, jalan rusak sebesar 13,37 persen. Sementara jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 12,63 persen. Di Kabupaten Rembang terdapat 9 terminal yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Rembang, Lasem, Pamotan, Sulang, Sarang, Sumber dan Gunem. Dari 9 terminal tersebut penerimaan retribusinya mencapai 115,670 juta rupiah. Layanan trayek bus dengan berbagai jurusan dari antar kota dan antar provinsi yang tersedia di Rembang diantaranya: Rembang – Jakarta; Rembang – Semarang; Rembang – Surabaya; Rembang – Kudus; Rembang – Pati; Rembang – Jepara; dan Rembang – Blora. Sedangkan layanan transportasi internal Kabupaten Rembang dilayani oleh angkutan kota dan angkutan desa.
2.	Kereta Api	Dulu, terdapat perusahaan kereta api dan trem <i>Semarang Joana Stroomtram Maatschappij</i> (SJS). Perusahaan tersebut pada tahun 1885 membuka jalur Semarang-Genuk-Demak-Kudus-Pati-Joana (sekarang Juwana). Setelah itu, pada 5 Mei 1895 perusahaan tersebut menambah jalurnya ke timur yakni membuka jalur Kudus-Mayong-Gotri-Pecangaan. Pada 1 Mei 1900 juga menambah jalur kereta api ke barat hingga mencapai Rembang dan Lasem. Pada tahun itu juga, pada 10 November SJS membuka jalur baru lagi yang melayani rute Mayong-Welahan-Demak-Semarang. Tahun 2017 ini rencana akan dioperasikan kembali jalur kereta atau monorel lintas Semarang-Kudus-Lasem.
3.	Transportasi Udara	Di Kabupaten Rembang tidak terdapat bandar udara. Gerbang akses transportasi udara dari atau menuju Rembang adalah melalui Bandara Ahmad Yani di Semarang, yang selanjutnya

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		dilanjutkan dengan akses transportasi darat dengan jarak tempuh ± 137 km atau sekitar 3 jam.
4.	Transportasi Laut	Sejarah berdirinya Kabupaten Rembang erat kaitannya dengan kejayaan transportasi laut di masa lalu. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Sungai Lasem yang di bagian muaranya terdapat pelabuhan dagang (Pelabuhan Lasem). Saat ini telah dibangun pelabuhan umum baru yakni Pelabuhan Tanjung Bonang di Kecamatan Sluke yang direncanakan menjadi pelabuhan Hub Internasional.
5.	Listrik	Suplai energi listrik di Kabupaten Rembang merupakan bagian dari transmisi sistem Jawa-Bali dengan pembangkit listrik utama diantaranya: PLTA Mrica, PLTA Kedung Ombo, PLTA Sidorejo, PLTA Klambu, dan PLTU Semarang.
6.	Telekomunikasi	Salah satu faktor pendorong yang mampu menggerakkan roda perekonomian lebih cepat adalah perkembangan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada pola konsumsi penduduk dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2016, terdapat 1,85% dari total rumah tangga di Kabupaten Rembang yang mempunyai pesawat telepon. Sedangkan yang mempunyai telepon seluler (HP) sebanyak 49,58%. Untuk komputer, hanya 11,04% rumah tangga yang memilikinya. Saat ini wilayah Kabupaten Rembang telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Beberapa perusahaan operator telekomunikasi yang terdapat di Rembang yaitu: PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, PT. Bakrie Telekom, dan lain-lain.

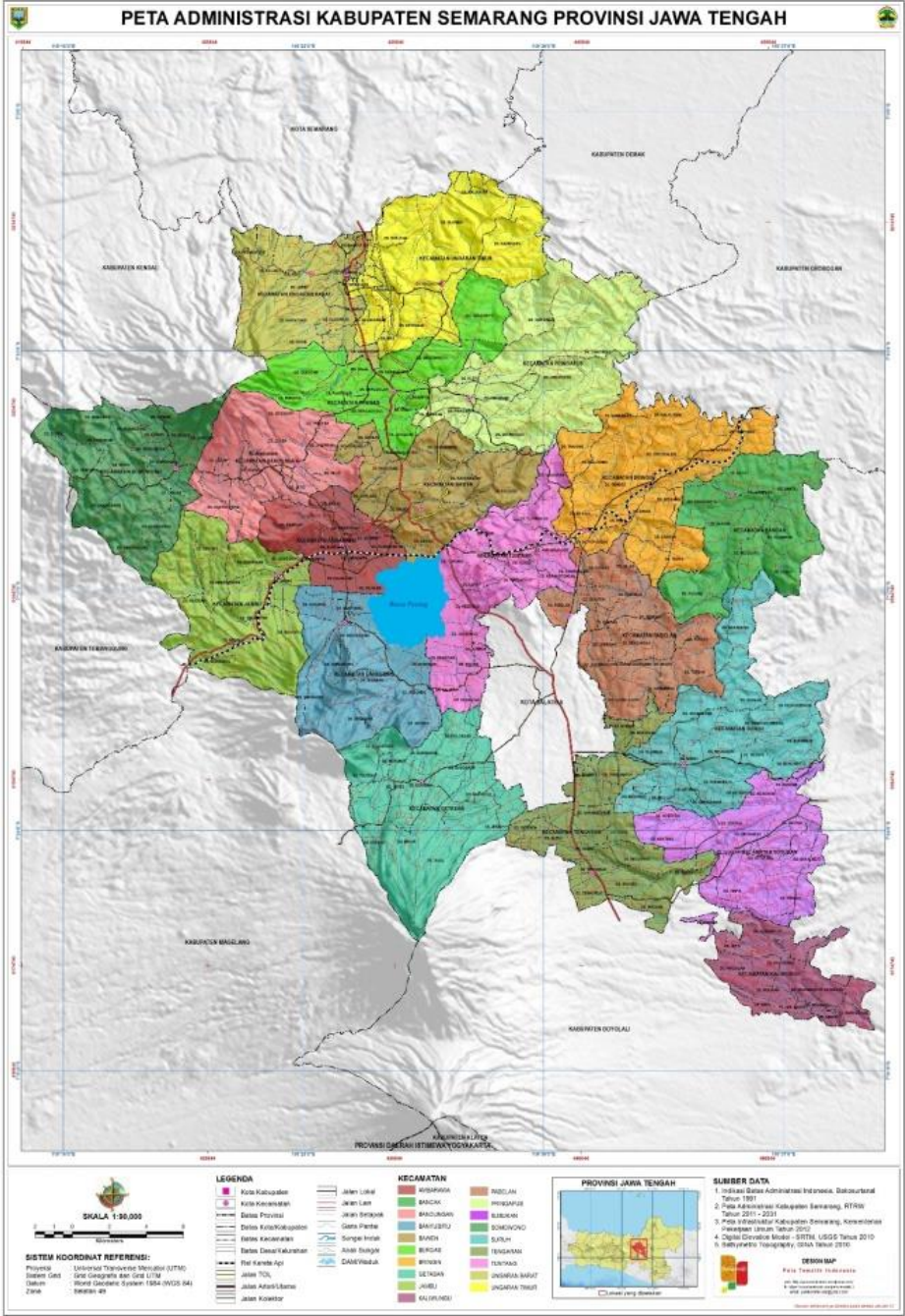
3.2.2. Kabupaten Semarang

A. Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,75''$ – $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ – $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan, dengan batas administratif:

- Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Ditengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (Ha) atau sekitar 2,92 dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan.



Gambar 3-13 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang

Tabel 3-37 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	LUAS WILAYAH			
			ADMINISTRASI		TERBANGUN	
			LUAS (HA)	% THDP LUAS KAB	LUAS (HA)	% THDP LUAS KEC
1	Getasan	13	6.579,55	6,92	858,02	13,04
2	Tengaran	15	4.729,55	4,98	1.828,00	38,65
3	Susukan	13	4.886,60	5,14	1.065,76	21,81

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	LUAS WILAYAH			
			ADMINISTRASI		TERBANGUN	
			LUAS (HA)	% THDP LUAS KAB	LUAS (HA)	% THDP LUAS KEC
4	Kaliwungu	11	2.995,00	3,15	1.013,72	33,85
5	Suruh	17	6.401,52	6,74	1.956,84	30,57
6	Pabelan	17	4.797,60	5,05	1.202,16	25,06
7	Tuntang	16	5.624,20	5,92	1.322,65	23,52
8	Banyubiru	10	5.441,45	5,73	696,20	12,79
9	Jambu	10	5.163,00	5,43	531,66	10,30
10	Sumowono	16	5.563,20	5,85	535,84	9,63
11	Ambarawa	10	2.822,10	2,97	582,04	20,62
12	Bandungan	10	4.823,30	5,08	894,07	18,54
13	Bawen	9	4.657,00	4,90	1.179,88	25,34
14	Bringin	16	6.189,10	6,51	1.172,56	18,95
15	Bancak	9	4.384,55	4,61	858,31	19,58
16	Pringapus	9	7.834,70	8,25	817,23	10,43
17	Bergas	13	4.733,10	4,98	1.821,16	38,48
18	Ungaran Barat	11	3.596,05	3,78	1.144,04	31,81
19	Ungaran Timur	10	3.799,10	4,00	1.049,59	27,63
JUMLAH		235	95.020,67	100,00	20.529,93	21,61

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

B. Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran dibagian tengahnya. Ketinggian wilayahnya berada pada kisaran antara 318-1.450 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaianya, wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Ha; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Ha; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Ha; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Ha.

Struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya cukup kompleks, terutama pensesaran yang cukup intensif. Perlapisan batuan di daerah ini dijumpai pada daerah sebelah Utara mempunyai kemiringan dengan arah bervariasi, dominan ke arah Selatan hingga Barat. Sesar yang terdapat pada daerah ini adalah sesar-sesar geser dengan arah dominan Utara-Selatan. Sesar-sesar tersebut diantaranya adalah Sesar G. Pobongan- Ungaran, Sesar Ungaran, Sesar Ungaran-Ambarawa serta Sesar G. Tungku Jambu. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang dan Peta Geologi Lembar Salatiga, batuan yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, dan alluvial.

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,2°C – 31,6°C. Rata-rata hari hujan per tahun 101 hari dengan curah hujan rata-rata 2.010 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah tertinggi dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan Kecamatan Bancak merupakan daerah dengan curah hujan dan hari hujan rata-rata terendah.

Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Terdapat tiga gunung utama yang terletak di Kabupaten Semarang yaitu: Gunung Ungaran yang meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono, Gunung Telomoyo yang meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru dan Getasan, dan Gunung Merbabu yang meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tenganan. Selain ketiga gunung tersebut juga terdapat delapan wilayah perbukitan di Kabupaten Semarang yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Pabelan, Suruh, Tuntang, Tenganan, Bancak, dan Kecamatan Bergas.

Terdapat tiga sungai utama di Kabupaten Semarang yaitu: Kali Garang yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Ungaran dan Bergas, Kali Tuntang yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen, dan Kali Senjoyo yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tenganan dan Getasan. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air permukaan dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai dan dengan panjang keseluruhan 350 Km serta memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt.

Selain itu terdapat Rawa Pening di wilayah Kabupaten Semarang yang meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan. Rawa Pening merupakan satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang yang memiliki volume air ± 65 juta m³ dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, dan memiliki volume ± 25 juta m³ dengan luas genangan 1.760 Ha pada ketinggian permukaan air minimal.

Di Kabupaten Semarang terdapat beberapa mata air besar, antara lain adalah mata air Muncul, Siwarak dan Nyatnyono. Selain itu terdapat 125 buah mata air dengan kapasitas air 7.331,2 l/dt yang tersebar di 15 Kecamatan; 51 sungai dengan panjang 350 km, debit air 2.668.480 l/dt; dan terdapat cekungan air tanah dengan produktivitas air sedang dan tinggi serta danau dengan volume air 25-65 juta m³, luas genangan 1.760-2.770 Ha.

C. Penggunaan Lahan

Dari keseluruhan luas wilayah kabupaten Semarang sebesar 95.020,67 Hektar (950,21 km²), telah menjadi kawasan terbangun seluas 21,61%. Sementara itu, terdapat lima

kecamatan dengan kawasan terbangun lebih dari 30% yaitu Kecamatan Tengaran, Bergas, Kaliwungu, Ungaran Barat, dan Suruh.

Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang tahun 2014 terdiri dari lahan pertanian: lahan sawah sebesar 23.918,65 Ha (25,17%) dan lahan bukan sawah (tegal, perkebunan, hutan rakyat, kolam/empang, padang, lainnya) sebesar 36.358,45 Ha (38,26%); lahan bukan pertanian (rumah, hutan negara, rawa, lainnya) sebesar 34.743,57 Ha (36,56%).

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2016 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.014.198 orang, jumlah ini meningkat 52.777 orang atau 5,49% dibanding tahun 2015. Peningkatan cukup tinggi ini disebabkan perubahan sumber data, pada tahun sebelumnya data kependudukan berdasarkan data registrasi penduduk.

Tabel 3-38 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2016

Kecamatan		Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
010	Getasan	65,80	50 625	4,99%	769
020	Tengaran	47,30	70 273	6,93%	1 486
030	Susukan	48,87	43 955	4,33%	899
031	Kaliwungu	29,95	26 614	2,62%	889
040	Suruh	64,02	60 286	5,94%	942
050	Pabelan	47,97	39 486	3,89%	823
060	Tuntang	56,24	65 008	6,41%	1 156
070	Banyubiru	54,41	42 681	4,21%	784
080	Jambu	51,63	38 876	3,83%	753
090	Sumowono	55,63	30 625	3,02%	551
100	Ambarawa	28,22	62 025	6,12%	2 198
101	Bandungan	48,23	56 667	5,59%	1 175
110	Bawen	46,57	61 240	6,04%	1 315
120	Bringin	61,89	42 804	4,22%	692
121	Bancak	43,85	20 205	1,99%	461
130	Pringapus	78,35	56 452	5,57%	721
140	Bergas	47,33	82 412	8,13%	1 741
151	Ungaran Barat	35,96	83 875	8,27%	2 332
152	Ungaran Timur	37,99	80 089	7,90%	2 108
Jumlah 2016		950,21	1 014 198	100,00%	1 067
2015		950,21	1 000 887	100,00%	1 012
2014		950,21	987 597	100,00%	1 006
2013		950,21	974 115	100,00%	1 000
2012		950,21	960 497	100,00%	994
2011		950,21	946 708	100,00%	988
2010		950,21	932 702	100,00%	982

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, yakni 515.874 orang penduduk perempuan dan 498.324 orang penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka sex ratio di bawah 100%. Kecamatan dengan angka sex ratio di atas 100% terdapat di 4 kecamatan yakni Kecamatan Tengar, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Sumowono, dan Kecamatan Bandungan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di 4 kecamatan tersebut lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.067 orang/km², kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Ungaran Timur, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.332 orang/km², 2.198 orang/km² dan 2.1083 orang/km².

Tabel 3-39 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Kegiatan	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	536 204	543 129	558 126	532 675	568 870	579 075
Bekerja	502 705	509 650	530 955	511 957	543 980	564 211
Pengangguran Terbuka	33 499	33 479	27 171	20 718	24 890	14 864
- Pernah Bekerja	19 178	17 385	14 996	11 670	17 122	9 651
- Tidak Pernah Bekerja	14 321	16 094	12 175	9 048	7 768	5 213
Bukan Angkatan Kerja	164 907	172 298	170 551	183 578	186 280	189 641
Sekolah	53 885	41 149	40 734	29 128	48 768	52 615
Mengurus Rumah Tangga	84 682	103 878	105 926	116 219	98 338	109 885
Lainnya	26 340	27 271	23 891	38 231	39 174	27 141
Jumlah Penduduk > 15 thn	701 111	715 427	728 677	716 253	755 150	768 716
Persentase (%) Penduduk Yang Bekerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	94	94	95	96	96	97
Persentase (%) Angkatan Kerja Terhadap Penduduk	76	76	77	74	75	75

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

Data BPS Kabupaten Semarang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2015, banyaknya penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 564.211 orang atau 97,43% dari jumlah angkatan kerja. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, berturut-turut yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 35,89%, sektor industri pengolahan sebesar 22,25%, sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 16,04%, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 13,52%, sedangkan ke enam sektor lainnya menyerap tenaga kerja di bawah 10%.

Tabel 3-40 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2015

Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
A Penduduk Belum / tidak bekerja	190 187	257 247	447 434
B Penduduk Bekerja	283 738	230 249	513 987
1 Pertanian, perkebunan, kehutanan & perikanan	108 294	76 198	184 492
2 Pertambangan dan penggalian	1 264	178	1 442
3 Industri pengolahan	38 835	75 548	114 383
4 Listrik, gas dan air minum	1 317	173	1 490
5 Kontruksi	32 431	519	32 950
6 Perdagangan, rumah makan & akomodasi	35 770	46 649	82 419
7 Angkutan, pergudangan dan komunikasi	18 149	528	18 677
8 Lemb. keuangan, real estate, persewaan, jasa prsh	3 124	1 305	4 429
9 Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	41 581	27 885	69 466
10 Lainnya	2 973	1 266	4 239

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 40,100 trilyun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 30,286 trilyun. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp. 3,671 trilyun atau 10,07% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp. 1,516 trilyun atau 5,27% dibanding tahun 2015.

Tabel 3-41 Perkembangan PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2011-2016

TAHUN	PDRB (RP. JUTA)		PERTUMBUHAN (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2011	24 440 560	22 925 457	13,30	6,27
2012	27 024 982	24 306 718	10,57	6,03
2013	29 789 070	25 758 121	10,23	5,97
2014	33 160 762	27 264 113	11,23	5,85
2015*	36 429 158	28 769 678	9,86	5,52
2016**	40 100 266	30 286 381	10,08	5,27

Ket.: * Angka Perbaikan

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2016 ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yakni sebesar 5,27%, menurun 0,25% dibanding tahun 2015. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini menjadi evaluasi untuk terus meningkatkan PDRB pada tahun yang akan datang dengan melakukan berbagai langkah strategis guna mendongkrak nilai PDRB sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Semarang atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 39,68%. Kontributor terbesar kedua adalah sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 12,77%. Kontributor terbesar ke tiga terhadap struktur ekonomi Kabupaten Semarang adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan kontribusi sebesar 12,25%. Komposisi ini tidak menunjukkan banyak perubahan dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Semarang menurut PDRB atas dasar harga konstan didominasi oleh sektor industri pengolahan (39,13%), sektor konstruksi (12,95%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda (11,68%) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (11,27%).

Tabel 3-42 Distribusi PDRB adhb Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,59	12,48	12,29	12,41	12,25
B. Pertambangan dan Penggalian	0,25	0,23	0,25	0,27	0,27
C. Industri Pengolahan	39,25	39,46	39,71	39,79	39,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	13,04	13,14	13,36	13,14	12,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,62	11,41	10,87	10,75	10,86
H. Transportasi dan Pergudangan	1,87	1,87	1,94	1,96	1,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,98	2,95	2,98	3,05	3,13
J. Informasi dan Komunikasi	3,17	3,11	3,09	2,98	3,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,37	3,35	3,32	3,42	3,85
L. Real Estate	2,97	2,90	2,97	3,02	3,04
M, N. Jasa Perusahaan	0,41	0,44	0,45	0,46	0,47
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,09	2,96	2,85	2,84	2,85
P. Jasa Pendidikan	3,48	3,76	3,94	3,93	3,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,66	0,68	0,70	0,71
R, S, T, U. Jasa lainnya	1,06	1,08	1,13	1,11	1,08
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

F. Infrastruktur Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Semarang termasuk dalam kawasan metropolitan KEDUNGSEPUR (Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi). Kawasan ini termasuk salah satu Pusat Kegiatan Nasional yang berfungsi untuk pengembangan Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menunjang fungsi dan peran Kabupaten Semarang tersebut sangat dibutuhkan.

Sarana transportasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan daerah saat ini. Semakin baik kondisi transportasi dan komunikasi di suatu daerah maka akan semakin baik perputaran roda perekonomian daerah tersebut.

Tabel 3-43 Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Semarang

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta dengan Kota Semarang atau lebih dikenal dengan "JOGLO SEMAR". Data dari Dinas Pekerjaan Umum mencatat bahwa tahun 2016 panjang jalan meliputi 54,75 km untuk jalan negara, 82,51 km untuk jalan provinsi, dan 735,52 km untuk jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 504,53 km (69%), dengan kondisi sedang sepanjang 185,83 km (25%), dengan kondisi rusak ringan sepanjang 11,12 km (2%) dan dengan kondisi rusak berat sepanjang 34,04 km (4%). Selain itu, keberadaan Jalan Tol Semarang–Solo yang menghubungkan Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta serta melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo saat ini menjadi urat nadi transportasi darat Kabupaten Semarang. Tol ini mulai dibangun tahun 2009 dengan total lintasan sepanjang 72,64 km dan sampai saat ini pembangunannya masih berlangsung. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol Semarang dengan Jalan Tol Solo–Ngawi yang juga telah mulai konstruksi. Angkutan umum antarkota dan antarprovinsi di Kabupaten Semarang dilayani dengan bus, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Adapun beberapa rute angkutan regional (AKDP) adalah: Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto. Sedangkan rute angkutan lokal (dalam kota) adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga, Salatiga - Ambarawa.
2.	Kereta Api	Jalur kereta api Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, walaupun sempat tidak dioperasikan saat meletusnya Gunung Merapi yang merusak sebagian jalur tersebut, namun saat ini rute tersebut telah beroperasi kembali. Jalur lain yang kini juga tidak beroperasi adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati. Di Ambarawa terdapat Museum Kereta Api. Kereta api uap dengan rel bergerigi kini digunakan sebagai jalur wisata dengan rute Ambarawa-Bedono, di samping itu telah dikembangkan kereta wisata Ambarawa-Tuntang PP dengan menyusuri tepian Rawapening.
3.	Transportasi Udara	Di Kabupaten Semarang tidak terdapat bandar udara. Gerbang akses transportasi udara dari atau menuju Kabupaten Semarang adalah melalui Bandara Ahmad Yani di Semarang atau Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, yang selanjutnya dilanjutkan dengan akses transportasi darat dengan jarak

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		tempuh Ungaran-Kota Semarang ± 30 km (± 30 menit) dan Ungaran-Boyolali ± 78 km ($\pm 1,45$ jam).
4.	Transportasi Laut	Kabupaten Semarang tidak memiliki akses transportasi laut karena daerahnya tidak memiliki wilayah pesisir. Akses transportasi laut dari dan menuju Kabupaten Semarang biasanya memanfaatkan Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Mas di Kota Semarang, yang selanjutnya dilanjutkan dengan akses transportasi darat.
5.	Air Bersih	Suplai sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Semarang meliputi sumber air dangkal/mata air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan dan cekungan air yang merupakan aquifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Sumber air permukaan dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai dan dengan panjang keseluruhan 350 Km serta memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt. Selain itu terdapat Rawa Pening yang merupakan satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang yang memiliki volume air ± 65 juta m^3 dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, dan memiliki volume ± 25 juta m^3 dengan luas genangan 1.760 Ha pada ketinggian permukaan air minimal.
6.	Listrik	Suplai energi listrik di Kabupaten Semarang merupakan bagian dari transmisi sistem Jawa-Bali dengan pembangkit listrik utama diantaranya: PLTA Mrica, PLTA Kedung Ombo, PLTA Sidorejo, PLTA Klambu, dan PLTU Semarang.
7.	Telekomunikasi	Saat ini wilayah Kabupaten Semarang telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Beberapa perusahaan operator telekomunikasi besar yang terdapat di Kabupaten Semarang yaitu: PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, PT. Bakrie Telekom, dan lain-lain.

3.3. PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Selatan yang ber-Ibu Kota di Palembang secara geografis terletak $5^{\circ} 10' - 1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 40' - 106^{\circ} 30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 99.882,28 km^2 . Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Provinsi ini terdiri atas 11 Kabupaten dan 4 Kota yaitu; Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten

Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang meliputi 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3-44 Pembagian Wilayah Administratif di Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai
2	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi
3	Kabupaten Lahat	Lahat
4	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
6	Kabupaten Musi Rawas	Muara Beliti Baru
7	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
12	Kota Lubuklinggau	-
13	Kota Pagar Alam	-
14	Kota Palembang	-
15	Kota Prabumulih	-

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017



Gambar 3-14 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

B. Kondisi Fisik Wilayah

Fisiografi Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Tumbuhan palma dan sejenisnya serta kayu bakau merupakan vegetasi utama kawasan itu. Di bagian tengah dan makin ke Barat merupakan daratan rendah dan lembah-lembah luas. Lebih jauh ke Barat terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang menjadi mata rantai Bukit Barisan yang membentang di pulau Sumatera dimulai dari Aceh sampai ke Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan di antaranya adalah gunung Dempo (3.159 meter), Seminung (1.954 meter), Patah (2.107 meter), gunung Bungkok (2.125 meter) dan lain-lain. Di kaki gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 kilometer persegi dengan panorama alam yang indah, juga ideal untuk olahraga air, seperti ski, menyelam, renang, kano, dll. Kawasan pegunungan dan perbukitan ini yang sebagian besar masih diselimuti hujan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1200 meter dari permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

Bagian daratan Sumatera Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan tinggi serta pegunungan itu secara umum merupakan lahan yang potensial untuk tanaman perkebunan, pertanian dan hortikultura. Di kawasan ini terdapat perkebunan karet, kopi, teh, kulit manis, kelapa sawit, tanaman padi, sayur-mayur, aneka ragam buah-buahan dengan areal yang cukup luas.

Sumatera Selatan beriklim tropis yang hanya dipengaruhi dua musim sepanjang tahun, yakni musim hujan dan musim panas, dengan suhu udara bervariasi 24 sampai 32 derajat celsius dan tingkat kelembaban 73 sampai 89 persen. Musim hujan relatif jatuh pada bulan Oktober sampai April dengan curah hujan berkisar 1.500 mm sampai 3.264 mm. Musim panas atau kemarau biasanya dimulai bulan Juni sampai September setelah masa transisi bulan Mei.

Jenis tanah yang terdapat di daratan Sumatera Selatan dirinci sebagai berikut:

- a) Organosol, di sepanjang Pantai Timur dan dataran rendah.
- b) Litosol, di sepanjang patahan Bukit Barisan dan bentang terjal Danau Ranau.
- c) Aluvial, di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Bukit Barisan.
- d) Hidromorf, di dataran Musi Rawas dan Muara Enim.
- e) Glei Humus, di sepanjang Pantai Timur dan Dataran Rendah.

- f) Regosol, di sekeliling Pantai Timur, di bentang-bentang terjal Danau Ranau dan kerucut Vulkan.
- g) Andosol, di semua kerucut vulkan muda dan pada umumnya jenis tanah ini didapati di wilayah dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut.
- h) Rendzina, di sekitar Kota Baturaja.
- i) Latosol, pada umumnya di wilayah tanpa bulan kering.
- j) Lateritik, di dataran rendah di sekitar Martapura..
- k) Podzolik, di dataran rendah bukit lipatan pegunungan Bukit Barisan.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh hutan (53%) dan lahan pertanian (21,45%). Tabel berikut menyajikan sebaran penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3-45 Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

PENGUNAAN LAHAN	LUAS(HA)	PERSENTASE (%)
Pemukiman	142.064	1,63
Sawah	659.748	7,58
Tegalan	252.338	2,9
Kebun Campuran	297.984	2,28
Kebun Rakyat	1.866.228	21,45
Perkebunan Besar	388.948	4,47
Tambak	5.846	0,07
Pertambangan	9.619	0,11
Semak/Alang-alang	109.236	1,26
Hutan	4.630.717	53,22
Danau/Rawa	293.569	3,37
Lainnya (sungai, jalan, etc.).	145.445	1,67
JUMLAH	8.701.742	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.160.901 jiwa yang terdiri atas 4.147.140 jiwa penduduk laki-laki dan 4.013.761 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,03.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 mencapai 93,35 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.405,17 jiwa/km² dan terendah di Ke Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 31,75 jiwa/Km².

Tabel 3-46 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2010, 2014, 2015 dan 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2016	2010-2015	2010-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Ogan Komering Ulu	324 917	344 932	349 787	354 488	1,49	1,46
2. Ogan Komering Ilir	729 415	776 263	787 513	798 482	1,54	1,52
3. Muara Enim	552 778	590 975	600 398	609 607	1,67	1,64
4. Lahat	370 790	389 034	393 235	397 424	1,18	1,16
5. Musi Rawas	357 112	378 987	384 333	389 239	1,48	1,45
6. Musi Banyuasin	562 979	602 027	611 506	620 738	1,67	1,64
7. Banyuasin	752 193	799 998	811 501	822 575	1,53	1,50
8. OKU Selatan	319 418	339 424	344 074	348 574	1,50	1,47
9. OKU Timur	611 479	642 206	649 394	656 568	1,21	1,19
10. Ogan Ilir	382 014	403 828	409 171	414 504	1,38	1,37
11. Empat Lawang	221 583	234 880	238 118	241 336	1,45	1,43
12. PALI	166 006	176 936	179 529	182 219	1,58	1,57
13. Musi Rawas Utara	169 891	180 266	182 828	185 315	1,48	1,46
Kota						
1. Palembang	1 468 007	1 558 494	1 580 517	1 602 071	1,49	1,47
2. Prabumulih	163 506	174 477	177 078	179 563	1,61	1,57
3. Pagar Alam	126 512	132 498	133 862	135 328	1,14	1,13
4. Lubuk Linggau	203 004	216 270	219 471	222 870	1,57	1,57
Sumatera Selatan	7 481 604	7 941 495	8 052 315	8 160 901	1,48	1,46

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017

Keadaan ketenagakerjaan Sumatera Selatan pada periode tiga tahun terakhir menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada kurun waktu itu diikuti dengan peningkatan penyerapan jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2016 angkatan kerja meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan sebanyak 4.178.794 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2015.

Sementara untuk tingkat pengangguran Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar 4,31 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3-47 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Ogan Komering Ulu	155 208	12 836	168 044	82 945	250 989
2. Ogan Komering Ilir	343 665	25 421	369 086	187 540	556 626
3. Muara Enim	282 665	20 271	302 936	117 995	420 931
4. Lahat	197 591	8 783	206 374	74 749	281 123
5. Musi Rawas	193 051	4 023	197 074	76 644	273 718
6. Musi Banyuasin	269 140	15 983	285 123	141 215	426 338
7. Banyuasin	360 305	21 215	381 520	189 879	571 399
8. OKU Selatan	186 238	3 473	189 711	54 517	244 228
9. OKU Timur	321 099	15 961	337 060	133 183	470 243
10. Ogan Ilir	202 337	11 615	213 952	76 750	290 702
11. Empat Lawang	115 421	6 344	121 765	45 491	167 256
12. PALI	87 253	825	88 078	31 147	119 225
13. Musi Rawas Utara	79 422	2 445	81 867	43 304	125 171
Kota					
1. Palembang	663 315	69 806	733 121	432 210	1 165 331
2. Prabumulih	82 887	5 534	88 421	36 618	125 039
3. Pagar Alam	72 798	2 665	75 463	21 675	97 138
4. Lubuk Linggau	83 471	11 721	95 192	60 659	155 851
Sumatera Selatan	3 695 866	238 921	3 934 787	1 806 521	5 741 308

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Perekonomian Sumatera Selatan masih belum mengalami performa yang baik akibat pengaruh terpuruknya kondisi ekonomi global. Berbagai usaha terus dikerahkan untuk membangkitkan kondisi perekonomian. Harga komoditas ekspor yang merangkak naik sedikit banyak mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Selama empat tahun terakhir, PDRB Sumsel atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai yang terbentuk sebesar 280,35 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga pada tahun 2016, nilainya menjadi sebesar 355,42 triliun rupiah.

Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan peranan cukup besar terhadap PDRB.

Pada tahun 2016, tiga lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar adalah pertambangan diikuti oleh industri pengolahan, serta pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pada tahun 2016 peranan masing-masing lapangan usaha di atas secara berurutan adalah 19,89 persen, 18,86 persen, dan 16,06 persen. Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran industri pengolahan meningkat sebesar 3,06 persen. Sedangkan pertambangan dan penggalan dan pertanian menurun masing-masing sebesar 8,93 persen dan 3,25 persen.

Tabel 3-48 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN (PERSEN)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	6,07	5,26	4,06	3,59	1,54
B. Pertambangan dan Penggalan	4,50	3,21	3,34	3,94	2,88
C. Industri Pengolahan	5,86	4,10	4,57	5,40	6,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,14	6,55	14,95	3,66	17,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8,81	5,09	6,73	6,67	1,51
F. Konstruksi	12,12	9,23	4,29	0,07	8,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,20	6,07	4,45	3,57	8,69
H. Transportasi dan Pergudangan	7,38	7,53	7,18	9,77	7,01
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	8,97	3	5,63	9,87	10,17
J. Informasi dan Komunikasi	8,31	6,12	8,16	8,68	6,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	16,26	10,02	3,88	4,34	7,33
L. Real Estate	9,91	9	7,26	7,10	8,44
M,N. Jasa Perusahaan	8,77	9,40	6,20	4,41	6,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	0,74	7,17	10,49	2,94
P. Jasa Pendidikan	6,57	9,98	16,54	7,90	2,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,26	5,59	9,48	7,29	1,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,10	2,39	3,10	4,05	2,42
LPE	6,83	5,31	4,79	4,42	5,03

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017

Secara umum, laju perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2016 mengalami percepatan, yaitu dari 4,42 persen pada tahun 2015 menjadi 5,03 persen pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang mengalami percepatan pertumbuhan, antara lain industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, real estate, serta jasa perusahaan.

Disisi lain ada beberapa industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Industri tersebut antara lain, pertanian, pertambangan, pengadaan air, pengelolaan sampah dan

daur ulang, transportasi, komunikasi, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 3-49 Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PDRB ADHB (PERSEN)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	18,90	18,60	17,76	16,60	16,06
B. Pertambangan dan Penggalian	25,72	24,98	23,93	21,84	19,89
C. Industri Pengolahan	16,55	17,15	17,35	18,30	18,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,09	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11
F. Konstruksi	12,30	12,68	13,40	13,24	13,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,14	8,99	9,07	10,54	11,80
H. Transportasi dan Pergudangan	1,64	1,77	1,86	2,07	2,20
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1,17	1,18	1,26	1,41	1,56
J. Informasi dan Komunikasi	2,51	2,39	2,42	2,50	2,65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,48	2,59	2,56	2,56	2,66
L. Real Estate	2,43	2,41	2,60	2,80	2,98
M,N. Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,23	3,54	3,77	3,55
P. Jasa Pendidikan	2,29	2,45	2,64	2,69	2,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,58	0,59	0,62	0,61
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,75	0,74	0,74	0,75	0,74
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan lapangan usaha, perekonomian Sumatera Selatan di dominasi tiga lapangan usaha yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sepanjang 2013-2016, kontribusi ketiga sektor tersebut melebihi separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2016, peranan masing-masing lapangan usaha di atas secara berurutan adalah 19,89 persen, 18,86 persen dan 16,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan terutama ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi. Total komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumahtangga, LNPRT, dan konsumsi pemerintah mencapai 76,48 persen terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan. Kenaikan tertinggi pada komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 38,61 persen dari total pengeluaran. Sementara itu meningkatnya konsumsi menjelang hari besar keagamaan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

F. Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah masif dilakukan. Tidak hanya menyelesaikan pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga tengah giat membangun infrastruktur lain, termasuk venue olahraga dan wisma atlet untuk mendukung Event Olahraga Asian Games tahun 2018.

Tidak hanya infrastuktur perhubungan untuk meningkatkan konektivitas yang tengah massif dibangun, berbagai infrastruktur lainnya juga tengah ditingkatkan pembangunannya, seperti infrastruktur jaringan irigasi mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air, infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, serta penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tabel 3-50 Infrastruktur Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Perhubungan Darat di Sumatera Selatan melalui jalan raya dan Kereta Api. Pada tahun 2016, panjang jalan di Sumatera Selatan mencapai 1.513,653 km. Dari seluruh panjang jalan tersebut 88,29 persen telah diaspal dan sisanya memiliki beraneka jenis permukaan. Kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebanyak 1.482.625 yang didominasi oleh sepeda motor dengan total 1.119.444 sepeda motor atau 75,50 persen dari total kendaraan bermotor yang ada. Konektivitas di Provinsi Sumatera Selatan tengah digenjot Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebanyak lima ruas Tol Trans Sumatera tengah dibangun di Sumatera Selatan, yakni Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km), Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (85,6 km), Tol Palembang-Tanjung Api-API (70 km), dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (112 km). Jalan Tol Palembang-Indralaya Seksi 1 (ruas Palembang-Pamulutan) sepanjang 7,75 km, belum lama ini baru diresmikan operasionalnya dan ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun 2017.
2.	Kereta Api	Divisi Regional III Palembang (Divre III PG) adalah Divre KAI dengan wilayah kerja sebagian Provinsi Sumatera Selatan. Moda transportasi kereta api di Sumatera Selatan sangat memberikan sumbangan terhadap angkutan barang dan penumpang. Jalur rel kereta api di Sumatera bagian selatan dimulai dari stasiun Panjang, Lampung (KM 0), dari pelabuhan tersebut ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih (Sumatera Selatan) km 332+705. Setelah itu jalur bercabang dua, ke arah barat jalur berakhir di Lubuklinggau (Sumatera Selatan) di km 549+448, sedangkan ke arah timur jalur berakhir di Kertapati (Palembang, Sumatera Selatan) di km 400+102. Salah satu keunikan di Divre III ini ialah stasiun pada kota besar satu-satunya di wilayah kerjanya yaitu Palembang tidak terletak

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		di pusat kota seperti halnya di wilayah lain yang biasanya tepat berada di pusat kota. Kertapati yang tepat berada di tepian sungai Musi menjadi stasiun ujung (rel spoor badug), dimana jalurnya tak terhubung ke pusat kota sebab kemungkinan kesulitan untuk membangun jembatan KA melintasi Sungai Musi pada masa lalu. Berdasarkan rencana, jalur kereta api di Muaraenim akan dikembangkan hingga terhubung sampai Provinsi Bengkulu.
3.	Transportasi Udara	Pelabuhan Udara (Bandara) di Sumatera Selatan terdapat di tiga tempat yaitu: Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandara Silampari di Lubuk Linggau, dan Bandara Danau Ranau di Ranau Ogan Komering Ilir. Hingga tahun 2016 laju pertumbuhan angkutan udara mencapai 8,12 persen. Tahun 2016, lalu lintas di bandara SMB II dipadati oleh 3,86 juta penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara SMB II. Jumlah ini meningkat sekitar 17,18 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Jumlah kedatangan penerbangan di bandara SMB II pada tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 30,98 persen dibandingkan tahun 2015. Momen liburan akhir tahun, libur lebaran dan libur sekolah menjadi penyebab meningkatnya jumlah penerbangan pada bulan Juli dan Desember. Pada bulan Desember terdapat sebanyak 1.641 penerbangan, sementara bulan Juli sebanyak 1.409 penerbangan.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Sungai–sungai di Sumatera Selatan berfungsi ganda baik sebagai sumber air dan pengairan di daerah–daerah maupun sebagai penghubung bagi desa/kota yang terletak di sepanjang sungai, jenis alat angkutan sungai yang dipakai terdiri dari : perahu jukung, kapal gandeng, motor ketek stempel dan perahu. Jumlah kunjungan kapal pada pelabuhan Boom Baru Palembang sepanjang tahun 2016 sebanyak 2.424 unit kapal. Jumlah kunjungan kapal ini mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 43,14 persen dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan hasil Survei SIMOPEL 2016, jumlah arus muat barang mengalami penurunan drastis, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekspor turut mengalami penurunan. Pada tahun 2016, volume barang yang dimuat mengalami penurunan hingga 57,33 persen. Sedangkan barang yang dibongkar justru mengalami kenaikan sekitar 2,27 persen dibanding tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan sub sektor angkutan laut juga tercermin dari drastisnya penurunan jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi ini. Tahun 2016 tercatat hanya sekitar 58 ribu penumpang dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 97 ribu penumpang atau turun hampir 40 persen.
5.	Air Bersih	Sungai–sungai di Sumatera Selatan berfungsi ganda baik sebagai sumber air dan pengairan di daerah–daerah maupun sebagai penghubung bagi wilayah–wilayah yang terletak di sepanjang sungai.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		Untuk kawasan-kawasan perkotaan, penyediaan air bersih telah dilayani dengan sistem perpipaan oleh perusahaan air minum milik Pemda di masing-masing daerah.
6.	Listrik	PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga dikenal sebagai PT. PLN (Persero) WS2JB, memainkan peran yang besar bagi percepatan pertumbuhan perekonomian di ketiga provinsi. Melalui potensi jasa tenaga listriknya PT. PLN (Persero) mencoba memberikan semangat pembangunan berkelanjutan yang mampu membuka isolasi wilayah-wilayah tertinggal di dalam pembangunan dan perekonomian masyarakat dan industrinya.
7.	Telekomunikasi	Sarana telekomunikasi di Sumatera Selatan, khususnya sinyal telepon seluler, sudah menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mempermudah untuk mendapatkan informasi Wilayah Sumatera Selatan telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Beberapa operator besar penyedia layanan telekomunikasi telah beroperasi di Sumatera Selatan. Pada 2016, persentase penduduk Sumatera Selatan yang memiliki telepon seluler adalah 56,48 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, lebih dari 30 persen penduduk di Sumatera Selatan telah memiliki telepon seluler atau <i>handphone</i> . Berbeda dengan kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer di rumah tangga ternyata masih sangat kecil. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki komputer hanya sebesar 15,10 persen.

3.3.1. Kota Palembang

A. Wilayah Administrasi

Kota Palembang adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatra Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Pulau Sumatra setelah Medan. Kota ini dahulu merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya sebelum dihancurkan oleh Majapahit. Sampai sekarang bekas area Kerajaan Sriwijaya masih ada di Bukit Siguntang, di Palembang Barat.

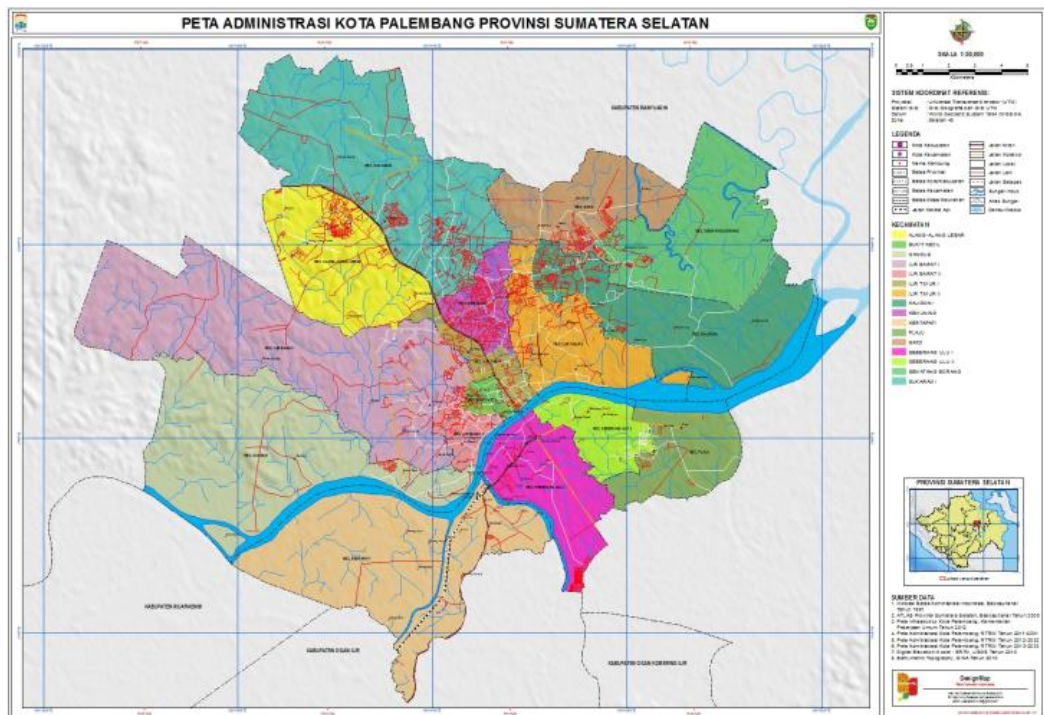
Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59'27.99"LS dan 104°45'24.24"BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km² atau 40.061 Ha. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, Kota Palembang juga memiliki Sungai Musi yang dilintasi oleh Jembatan Ampera. Sungai ini berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antarwilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kota Palembang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin

Tabel 3-51 Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Palembang

KECAMATAN	LUAS		JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
	KM ²	%			
1 Ilir Barat II	6.220	1,55	7	51	208
2 Gandus	68.780	17,17	5	38	174
3 Seberang Ulu I	17.440	4,35	10	100	454
4 Kertapati	42.560	10,62	6	51	263
5 Seberang Ulu II	10.690	2,67	7	62	258
6 Plaju	15.170	3,79	7	62	229
7 Ilir Barat I	19.770	4,93	6	60	302
8 Bukit Kecil	9.920	2,48	6	39	155
9 Ilir Timur I	6.500	1,62	11	68	264
10 Kemuning	9.000	2,25	6	52	201
11 Ilir Timur II	25.580	6,39	12	89	372
12 Kalidoni	27.920	6,97	5	41	237
13 Sako	18.040	4,50	4	74	250
14 Sematang Borang	36.980	9,23	4	24	107
15 Sukarami	51.459	12,85	7	69	376
16 Alang-alang Lebar	34.581	8,63	4	49	225
JUMLAH	400.610	100,00	107	929	4075

Sumber : Palembang Dalam Angka 2017



Gambar 3-15 Peta Wilayah Administrasi Kota Palembang

B. Kondisi Fisik Wilayah

Iklim Kota Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam - 4,5 km/jam. Suhu Kota berkisar antara 23,4°C - 31,7°C. Curah hujan pertahun berkisar antara 2.000 mm - 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75% - 89% dengan rata - rata penyinaran matahari 45%.

Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi yaitu pada bagian Utara kota. Ketinggian rata-rata 0 - 20 mdpl. Pengaruh pasang surut antara 3-5 meter, dan Ketinggian tanah rata-rata 12 meter di atas permukaan laut.

Ada karakter topografi yang agak berbeda antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Bagian wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar, dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi (+ 3,75 m di atas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun (dan akan dibangun) dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan (dan reklamasi). Di bagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m di atas permukaan laut dan ditemui adanya penggunaan-penggunaan mikro dan lembah-lembah yang "kontinyu" dan tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai jarak sekitar 5 km ke arah utara Sungai Musi kondisi topografinya relatif menaik sampai punggung dan setelah itu semakin ke utara menurun kembali. Dengan demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, yaitu berupa kemiringan atau kelerengan yang besar.

Jenis tanah Kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah Palembang - Jambi. Sebagian besar kondisi tanah adalah rawa sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Tanah dataran tidak tergenang air: 49%, Tanah tergenang musiman: 15%, Tanah tergenang terus menerus: 37%.

Jumlah sungai yang masih berfungsi di Kota Palembang sebanyak 60 sungai (dari jumlah sebelumnya 108), sisanya berfungsi sebagai saluran pembuangan primer.

C. Penggunaan Lahan

Di Kota Palembang pemanfaatan ruang diluar pemanfaatan untuk kawasan lindung, merupakan ruang untuk kegiatan budidaya. Ditinjau dari karakteristik kegiatan budidaya yang ada, Kota Palembang masih memiliki beberapa kawasan kegiatan budidaya non-perkotaan. Determinasi ini penting karena akan terkait dengan pengelolaan dan penanganan kawasannya.

Secara umum berikut ini merupakan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di Kota Palembang, yang meliputi berbagai kegiatan budidaya perkotaan dan budidaya non perkotaan.

1. Perumahan dan Permukiman Perkotaan;
2. Pemerintah dan Perkantoran;
3. Perdagangan dan Jasa;
4. Industri dan Pergudangan;
5. Pariwisata;
6. Pemanfaatan Khusus;
7. Ruang Terbuka Hijau.

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.602.071 jiwa yang terdiri atas 802.990 jiwa penduduk laki-laki dan 799.081 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,49 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk Kota Palembang tahun 2016 mencapai 3.999 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 16 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.137 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 916 jiwa/Km².

Tabel 3-52 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2010, 2015, dan 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			LPP PER TAHUN	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Ilir Barat II	64.440	65.991	66.891	0,62	1,36
2	Gandus	57.887	62.146	62.994	1,42	1,36
3	Seberang Ulu I	165.236	176.749	179.160	1,36	1,36
4	Kertapati	81.014	84.698	85.853	0,97	1,36
5	Seberang Ulu II	94.227	99.222	100.575	1,09	1,36
6	Plaju	79.809	81.891	83.008	0,66	1,36
7	Ilir Barat I	125.315	135.385	137.231	1,53	1,36
8	Bukit Kecil	43.892	43.967	44.567	0,25	1,36
9	Ilir Timur I	69.716	71.418	72.391	0,63	1,36
10	Kemuning	82.495	85.002	86.161	0,73	1,36
11	Ilir Timur II	160.037	165.238	167.491	0,76	1,36

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			LPP PER TAHUN	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
12	Kalidoni	100.394	110.982	112.495	1,91	1,36
13	Sako	82.964	91.087	92.329	1,80	1,36
14	Sematang Borang	32.290	37.434	37.945	2,73	1,36
15	Sukarami	140.686	164.139	166.378	2,83	1,36
16	Alang-alang Lebar	87.605	105.168	106.602	3,33	1,36
	Kota Palembang	1.468.007	1.580.517	1.602.071	1,47	1,36

Sumber : Palembang Dalam Angka 2017

Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 733.121 orang. Sementara untuk tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2015 sebesar 9,52 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3-53 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Palembang Tahun 2015

URAIAN/KEGIATAN	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I. Angkatan Kerja	448.428	284.693	733.121
- Bekerja	403.217	260.098	663.315
- Pengangguran Terbuka	45.211	24.595	69.806
II. Bukan Angkatan Kerja	129.556	302.654	432.210
- Sekolah	64.466	65.442	129.888
- Mengurus Rumah Tangga	9.795	222.222	232.017
- Lainnya	55.295	15.010	70.305
TPAK	77,56	48,47	62,91
TPT	10,08	8,64	9,52

Sumber : Palembang Dalam Angka 2017

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Palembang Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada tahun 2016 sebesar 5.234 pekerja. Dari 5.234 pekerja yang terdaftar sebesar 1.329 telah ditempatkan bekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 42,93 persen (2.247 pekerja).

E. Perekonomian Daerah

Selama empat tahun terakhir, PDRB Kota Palembang dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai tambah yang terbentuk sebesar 85.193.317,4 juta rupiah. Pada tahun 2014, angka ini sebesar 95.072.888 juta rupiah dan tahun 2015 sebesar 108.243.946 juta rupiah. Pada tahun 2016, nilainya menjadi sebesar 118.769.860 juta rupiah.

Tabel 3-54 PDRB ADHB Kota Palembang Tahun 2013-2016

LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)			
	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	482.984,80	531.206,40	577.020,30	624.851,00
B. Pertambangan dan Penggalan	4.123,10	4.864,30	5.825,90	6.539,40
C. Industri Pengolahan	30.636.666,10	33.293.445,90	37.486.061,80	39.401.406,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101.115,20	116.606,30	141.287,00	193.740,40
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	214.226,20	259.084,70	302.129,90	340.282,40
F. Konstruksi	15.919.918,30	18.396.966,60	19.748.669,20	21.626.436,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.223.272,00	12.215.705,60	15.245.999,70	18.366.359,00
H. Transportasi dan Pergudangan	3.497.477,90	3.948.785,90	4.774.378,00	5.425.477,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.921.301,70	2.235.079,70	2.717.003,70	3.218.188,20
J. Informasi dan Komunikasi	5.778.608,90	6.382.551,70	7.155.364,30	7.846.937,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.663.825,20	4.895.342,20	5.486.286,30	6.116.731,30
L. Real Estate	3.487.180,60	4.101.198,10	4.814.075,40	5.647.207,80
M,N. Jasa Perusahaan	144.132,80	163.110,80	181.650,00	205.073,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.619.208,30	3.078.619,10	3.558.768,20	3.494.798,30
P. Jasa Pendidikan	2.902.613,90	3.683.309,30	4.081.160,60	4.206.753,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	614.954,20	696.713,70	782.733,90	817.142,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	981.708,20	1.070.297,70	1.185.531,90	1.231.935,20
PDRB ADHB	85.193.317,40	95.072.888,00	108.243.946,00	118.769.860,00

Sumber : Palembang Dalam Angka 2017

Tabel 3-55 PDRB ADHK 2010 Kota Palembang Tahun 2013-2016

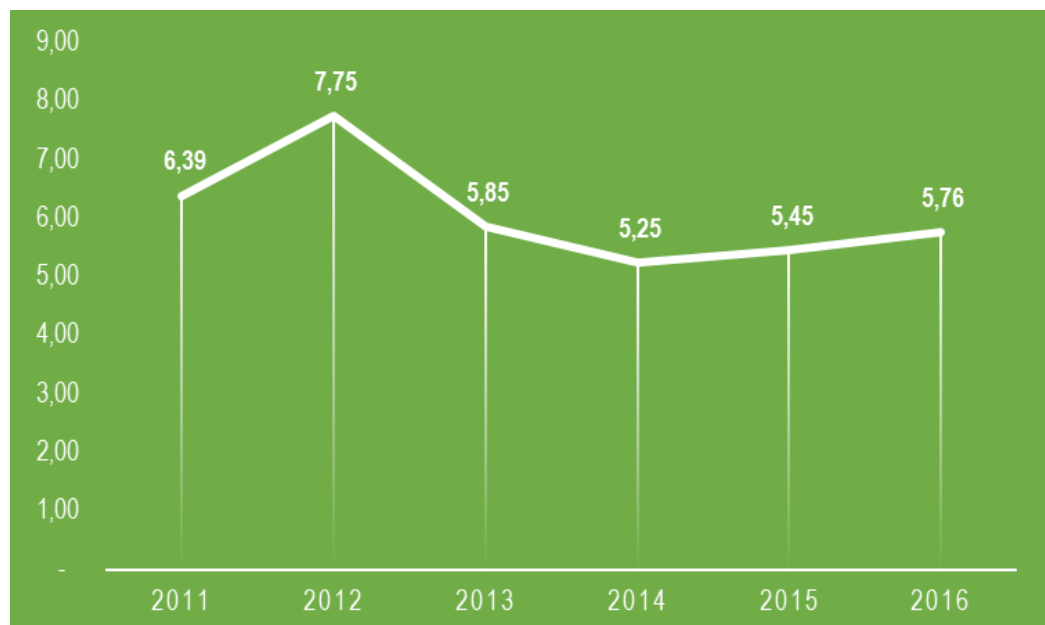
LAPANGAN USAHA	PDRB ADHK 2010 (JUTA RUPIAH)			
	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	392.558,70	427.538,60	440.049,40	461.451,00
B. Pertambangan dan Penggalan	3.289,40	3.546,60	3.997,10	4.212,20
C. Industri Pengolahan	27.783.387,20	28.942.138,30	30.718.656,30	31.646.904,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	97.944,30	109.874,70	112.242,60	130.140,50
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	208.013,10	218.688,40	233.276,20	235.798,70
F. Konstruksi	12.189.089,60	12.711.817,30	12.715.280,80	13.846.945,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.039.580,20	10.478.595,40	10.837.703,00	11.809.499,40
H. Transportasi dan Pergudangan	2.823.395,50	2.998.984,90	3.255.003,60	3.458.566,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.511.445,60	1.597.439,70	1.754.431,30	1.934.857,00
J. Informasi dan Komunikasi	5.876.250,10	6.355.817,30	6.907.617,70	7.382.171,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.701.411,90	3.890.027,60	4.208.465,10	4.556.845,70
L. Real Estate	3.304.428,00	3.544.387,80	3.795.933,40	4.105.312,20
M,N. Jasa Perusahaan	118.362,20	125.695,90	131.242,20	138.773,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.269.707,20	2.352.272,60	2.593.941,20	2.620.203,00
P. Jasa Pendidikan	2.405.947,70	2.783.905,20	3.003.856,50	3.090.664,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	569.087,60	623.036,80	668.471,50	676.760,60
R,S,T,U. Jasa Lainnya	899.471,90	927.324,30	964.898,70	989.249,30
PDRB ADHK	74.193.370,10	78.091.091,40	82.345.066,50	87.088.353,90

Sumber : Palembang Dalam Angka 2017

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat tiga sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2016, tiga sektor yang memberikan

sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2016 kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 33,17 persen, 18,21 persen dan 15,46 persen. Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meningkat sebesar 1,38 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan dan konstruksi menurun masing-masing 1,46 persen dan 0,04 persen.

Perekonomian Kota Palembang pada tahun 2016 telah kembali pada tren jangka panjangnya, hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan migas meningkat dibanding tahun 2015 dari sebesar 5,45 persen tahun 2015 menjadi 5,76 persen tahun 2016.



Gambar 3-16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palembang Tahun 2011-2016

Tiga sektor besar yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pengadaan Listrik dan Gas meningkat dari sebesar 2,16 persen tahun 2015 menjadi 15,95 persen tahun 2016, konstruksi meningkat dari sebesar 0,03 persen tahun 2015 menjadi 8,90 persen tahun 2016, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meningkat dari sebesar 3,43 persen tahun 2015 menjadi 8,97 persen tahun 2016. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah administrasi pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari sebesar 10,27 persen tahun 2015 menjadi 1,01 persen tahun 2016 atau menurun sebesar 90 persen.

F. Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur di Kota Palembang saat ini tengah masif dilakukan. Tidak hanya menyelesaikan pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera, pemerintah juga tengah giat membangun infrastruktur lain, termasuk venue olahraga dan wisma atlet untuk mendukung Event Olahraga Asian Games tahun 2018.

Tidak hanya infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan konektivitas yang tengah dibangun, berbagai infrastruktur lainnya juga tengah ditingkatkan pembangunannya.

Tabel 3-56 Infrastruktur Wilayah di Kota Palembang

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Perhubungan darat di Kota Palembang melalui jalan raya dan kereta api. Panjang jalan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang mencapai 745,19 km. Dari seluruh panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Palembang 58,26 persen telah diaspal, 37,30 persen tidak diaspal dan 4,44 persen untuk lainnya. Ditinjau dari volume kendaraan bermotor yang ada di Kota Palembang, sepeda motor merupakan kendaraan terbanyak yaitu ada 922.756 unit, kemudian disusul mobil penumpang 162.055 unit, mobil barang 67.374 unit dan bus 3.859 unit. Konektivitas perhubungan darat di Kota Palembang saat ini tengah digenjut Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebanyak tiga ruas Tol Trans Sumatera tengah dibangun di sekitaran Kota Palembang, yakni Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Palembang-Tanjung Api-API (70 km), dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (112 km). Jalan Tol Palembang-Indralaya Seksi 1 (ruas Palembang-Pamulutan) sepanjang 7,75 km, belum lama ini baru diresmikan operasionalnya dan ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun 2017. Sejak Desember 2015, di Kota Palembang juga sedang dibangun trek kereta api ringan (LRT) sepanjang 22,5 Km dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018.
2.	Kereta Api	Angkutan kereta api di Kota Palembang yang dikelola oleh Divisi Regional III Palembang (Divre III PG) merupakan moda angkutan yang sangat penting bagi pergerakan angkutan barang dan penumpang di Kota Palembang. Jalur rel kereta api di Kota Palembang dimulai dari stasiun Kertapati di km 400+102 menuju Stasiun Prabumulih di km 332+705 hingga ke Stasiun Panjang (Lampung) di km 0. Uniknya stasiun Kertapati Palembang tidak terletak di pusat kota seperti halnya di wilayah lain yang biasanya tepat berada di pusat kota. Kertapati yang tepat berada di tepian sungai Musi menjadi stasiun ujung (rel spoor badug), dimana jalurnya tak terhubung ke pusat kota sebab kemungkinan kesulitan untuk membangun jembatan KA melintasi Sungai Musi pada masa lalu.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
3.	Transportasi Udara	Palembang memiliki sebuah Bandar Udara Internasional yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II). Bandara ini terletak di barat laut Palembang, melayani baik penerbangan domestik maupun internasional. Bandara ini juga menjadi embarkasi haji bagi warga Sumatera Selatan. Penerbangan domestik melayani jalur Palembang ke Jakarta, Bandung, Batam, Pangkal Pinang dan kota-kota lainnya, sedangkan penerbangan internasional melayani Singapura, Kuala Lumpur, Malaka, Hongkong, China dan Thailand. Hingga tahun 2016 laju pertumbuhan angkutan udara di bandara SMB II mencapai 8,12 persen. Lalu lintas di bandara SMB II dipadati oleh 3,86 juta penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara SMB II pada 2016. Jumlah ini meningkat sekitar 17,18 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Jumlah kedatangan penerbangan di bandara SMB II pada tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 30,98 persen dibandingkan tahun 2015. Momen liburan akhir tahun, libur lebaran dan libur sekolah menjadi penyebab meningkatnya jumlah penerbangan.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Keberadaan Sungai Musi yang membelah Kota Palembang merupakan objek vital transportasi sungai yang menghubungkan beberapa kawasan di sekitaran Kota Palembang dan juga keluar wilayah Kota Palembang. Di Kota Palembang terdapat dua pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan 36 Ilir. Kedua pelabuhan tersebut melayani pengangkutan penumpang dan barang menggunakan ferry menuju Muntok (Bangka) dan Batam (Kep. Riau). Jumlah kunjungan kapal pada pelabuhan Boom Baru sepanjang tahun 2016 sebanyak 2.424 unit kapal. Jumlah kunjungan kapal ini mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 43,14 persen dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016, volume barang yang dimuat juga mengalami penurunan hingga 57,33 persen. Sedangkan barang yang dibongkar justru mengalami kenaikan sekitar 2,27 persen dibanding tahun 2015. Jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi ini juga mengalami penurunan. Tahun 2016 tercatat hanya sekitar 58 ribu penumpang dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 97 ribu penumpang atau turun hampir 40 persen.
5.	Air Bersih	Air bersih yang digunakan masyarakat Kota Palembang disediakan oleh PDAM Tirta Musi (melayani wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Sako) dan Perusahaan swasta PT. Adhitya Tirta Sriwijaya (ATS) yang menyediakan untuk wilayah Kecamatan Sukarami. Sedangkan untuk beberapa perumahan dan kompleks perusahaan, kebutuhan air bersih dipenuhi oleh masing-masing perusahaan sendiri, seperti PT. TPO/OPI dan PUSRI/PERTAMINA.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Musi berasal dari Hulu Sungai Musi untuk memenuhi intake di Karang Jaya/ Karang Anyar, Hulu Sungai Ogan untuk memenuhi intake 15 Ulu di Seberang Ulu dan intake Sako/Borang. Sistem jaringan pipa transmisi air bersih PDAM Tirta Musi yang tersedia adalah pipa transmisi yang berasal dari transmisi air baku; pipa distribusi primer dan sekunder yang terletak di jalan-jalan utama, serta pipa distribusi tersier untuk permukiman di daerah potensial. PDAM Tirta Musi saat ini memiliki 6 unit instalasi pengolahan air bersih dengan kapasitas terpasang sebesar 3.570 liter/detik. Sedangkan PT. ATS mempunyai kapasitas produksi hanya sebesar 80 liter/detik.
6.	Listrik	Pelayanan pasokan energi listrik Kota Palembang masuk dalam lingkup pelayanan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (PT. PLN WS2JB). Untuk listrik di wilayah Kota Palembang dipasok dari GI Talang Ratu, GI Siguntang, GI IPP Musi 2, GI Keramasan, GI Kedukan, dan GI Bungaran. Untuk mendukung event Asian Games 2018, sejak 2016 telah dibangun dua GI baru yaitu GI New Jakabaring dan GI Gandus, dalam rangka memasok listrik Palembang dan untuk mendukung proyek Light Rail Train (LRT) sebagai alat transportasi yang menghubungkan jalur dari Bandara Internasional SMB II ke Jakabaring Sport Center.
7.	Telekomunikasi	Sarana telekomunikasi di Kota Palembang, khususnya sinyal telepon seluler, sudah menjangkau seluruh kawasan Kota Palembang. Layanan fasilitas telekomunikasi ini berupa kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Berbagai operator penyedia layanan telekomunikasi telah beroperasi di Kota Palembang. Selain layanan telekomunikasi, Kota Palembang juga dilayani oleh layanan Pos. Hingga tahun 2016 jumlah kantor pos di Kota Palembang sebanyak 20 kantor.

3.3.2. Kabupaten Banyuasin

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Letak Geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1°30' – 4°0' Lintang Selatan dan 104°00' - 105°35' Bujur Timur yang terbentang mulai dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur.

Batas wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah Kota Palembang, sehingga Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Banyak

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah Banyuasin persis berbatasan dengan wilayah Kota Palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di Palembang, seperti sarana LRT, sekolah, dermaga pelabuhan Tanjung Api-Api dan sarana lainnya.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,69 Km² dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah kabupaten. Jumlah desa di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sebanyak 304 desa/kelurahan, terdiri atas 288 desa dan 16 kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.

Sebelah Timur : Kab. Ogan Komering Ilir.

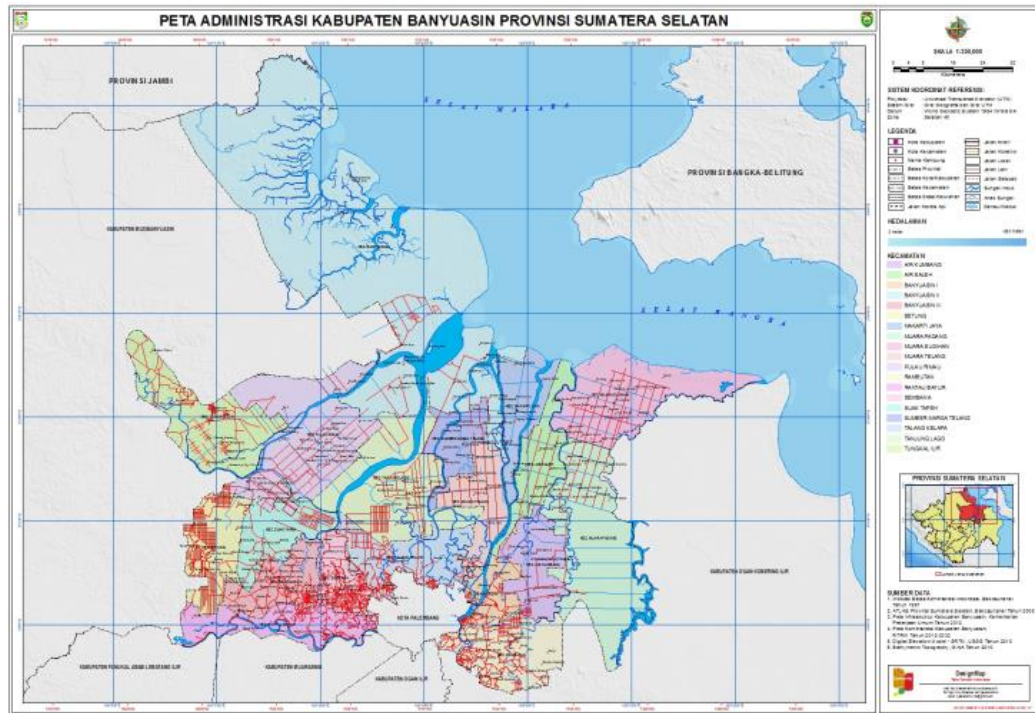
Sebelah Selatan : Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kab. Muara Enim.

Sebelah Barat : Kab. Musi Banyuasin.

Tabel 3-57 Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Banyuasin

KECAMATAN		LUAS	
		KM ²	%
1	Rantau Bayur	556,91	4,71
2	Betung	354,41	3,00
3	Suak Tapeh	312,70	2,64
4	Pulau Rimau	888,64	7,51
5	Tungkal Ilir	648,14	5,48
6	Banyuasin III	294,20	2,49
7	Sembawa	196,14	1,66
8	Talang Kelapa	439,43	3,71
9	Tanjung Lago	802,42	6,78
10	Banyuasin I	186,69	1,58
11	Air Kumbang	328,56	2,78
12	Rambutan	450,04	3,80
13	Muara Padang	917,60	7,75
14	Muara Sugihan	696,40	5,89
15	Makarti Jaya	300,28	2,54
16	Air Saleh	311,57	2,63
17	Banyuasin II	632,40	30,70
18	Muara Telang	341,57	2,89
19	Sumber Marga Telang	174,89	1,48
JUMLAH		11.832,69	100,00

Sumber : Banyuasin Dalam Angka 2017



Gambar 3-17 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin

Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian menempatkannya pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor perekonomian baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas Timur, menjadikannya sangat vital dalam konstelasi pembangunan regional Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Banyuasin terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam Bumi Sedulang Sedulang ini, seperti sawit, minyak, karet serta kandungan mineral lainnya sebagai potensi sumber kekayaan alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara optimal. Disamping sumber daya alam yang melimpah, potensi daya tarik wisata, seperti danau yang sangat indah, Taman Nasional Sembilang, perkebunan karet dan sawit yang membentang luas, serta adat budaya lokal, juga merupakan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Banyuasin.

B. Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut.

Lahan rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II,

Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir. Lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan.

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai.

Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya *rectangular* dan di daerah dataran kering pola alirannya *dendritik*. Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 Km. Pola aliran di wilayah ini, terutama di daerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya *rectangular*.

Sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah disetiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemond dengan suhu rata-rata $26^{\circ} - 27^{\circ}$ Celcius dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4 % - 85,5 % dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun.

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- a) Organosol: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
- b) Klei Humus: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
- c) Alluvial: terdapat di sepanjang sungai.
- d) Polzoik: terdapat di daerah berbukit-bukit.

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

Piramida penduduk sebagai cerminan distribusi kelompok umur penduduk Banyuasin dapat dikategorikan tipe ekspansive yang mempunyai ciri masih dominannya penduduk muda serta masih tingginya angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran di Banyuasin relatif meningkat yang ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia 0-4 tahun dibanding penduduk usia 5-9 tahun. Angka kematian juga masih terbilang tinggi yang terlihat dari sangat sedikitnya penduduk pada kelompok umur tua (usia 65 tahun keatas).

Komposisi penduduk Banyuasin didominasi oleh penduduk muda, ini perlu menjadi perhatian serius terutama kebutuhan lapangan kerja dimasa mendatang. Hal menarik

yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih besar dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah atau lebih rendah dibanding sebelumnya, seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk usia 5-9 tahun.

Tabel 3-58 Kondisi Kependudukan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015

URAIAN		TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	788.286	799.998	811.501
2	Pertumbuhan penduduk (%)	0,78	1,49	1,43
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	63,41	67,61	68,58
4	Sex Rasio (L/P) (%)	104,33	104,29	104,25
5	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	193.194	197.452	198.808
6	Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4,08	4,05	4,08

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2016

Berdasarkan data penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banyuasin mengalami pertumbuhan 1,43 persen menjadi 811.501 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Banyuasin juga meningkat menjadi 68,58 jiwa/km², dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4,08 jiwa/ruta.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Pada tahun 2015 terdapat 414.201 jiwa laki-laki dan 397.300 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin adalah 104. Artinya, dari setiap 100 perempuan terdapat 104 lakilaki.

Tingkat kelahiran dan kematian ikut mempengaruhi angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan di Banyuasin tahun 2015 sebesar 52,28 yang berarti setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 52 orang usia tidak produktif, yang terdiri dari 46 penduduk usia muda dan 6 penduduk usia tua. Semakin kecil DR maka semakin kecil pula beban kelompok usia produktif untuk menanggung beban usia tidak produktif, yang bisa dikelompokkan menjadi Beban Ketergantungan Penduduk Muda (YDR) dan Penduduk Tua (ODR).

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun 2015 sebanyak 381.520 orang. Dari angkatan kerja tersebut, jumlah orang yang bekerja sebanyak 360.305 orang dan menganggur sebanyak 21.215 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di tahun 2015 sebesar 66,77 persen. Artinya sebanyak 66,77 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masuk ke angkatan kerja (sudah siap untuk bekerja). Dari jumlah tersebut sebanyak 94,44 persen sudah berhasil memiliki pekerjaan (yang bisa dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja) dan sebanyak 5,56 persen masih menjadi pengangguran (TKK-Tingkat Pengangguran Terbuka).

Tabel 3-59 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015

URAIAN		TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	69,80	67,48	66,77
2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,94	2,96	5,56
3	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (%)	96,06	97,04	94,44
4	Upah Minimum Regional/UMR (Rp.)	1.630.000	1.825.600	2.241.936

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2016

Selama tahun 2015, sebanyak 58,9 persen dari penduduk yang bekerja di Banyuasin status pekerjaan utamanya adalah Berusaha sendiri/dibantu buruh/art lain; 28,8 persen sebagai buruh/karyawan; 9,7 persen sebagai pekerja bebas; dan 2,6 persen sebagai penerima pendapatan. Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2015 di Banyuasin mencapai Rp.2.241.936,-, mengalami peningkatan 12 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.825.600,-.

D. Perekonomian Daerah

Pada tahun 2015, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Banyuasin dengan migas sebesar Rp. 20.794 milyar, meningkat 8,68 persen dibanding tahun 2014. Sedangkan angka PDRB ADHB tanpa migas meningkat 10,12 persen menjadi Rp. 18.028 milyar di tahun 2015.

Tabel 3-60 Kondisi Perekonomian di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2015

URAIAN		TAHUN		
		2013	2014	2015
1	PDRB ADHB (Juta Rp.)			
	- Dengan Migas	17.526.287	19.137.046	20.794.405
	- Tanpa Migas	15.090.074	16.374.740	18.028.250
2	PDRB ADHK (Juta Rp.)			
	- Dengan Migas	14.628.959	15.380.588	16.236.002
	- Tanpa Migas	12.376.876	12.972.568	13.833.940
3	Pendapatan Perkapita ADHB (Rp.)			
	- Dengan Migas	22.233.412	23.921.368	25.624.620
	- Tanpa Migas	19.142.893	20.468.476	22.215.931
4	Pendapatan Perkapita ADHK (Rp.)			
	- Dengan Migas	18.557.934	19.225.784	20.007.372
	- Tanpa Migas	15.700.997	16.215.751	17.047.348
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	- Dengan Migas	6,18	5,14	5,56
	- Tanpa Migas	6,57	4,81	6,64
6	Laju Inflasi (%)			
	- Dengan Migas	5,57	3,85	2,95
	- Tanpa Migas	5,53	3,53	3,26

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2016

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, digunakan angka PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK). Dari tahun 2014-2015, perekonomian Kabupaten Banyuasin tumbuh sebesar 5,56 persen (dengan migas) dan 6,64 persen (tanpa migas).

Lebih lanjut, struktur ekonomi Banyuasin dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Sektor pertanian mencapai 35,26 persen di posisi pertama disusul oleh sektor industri pengolahan 23,93 persen dan sektor konstruksi 12,70 persen. Selanjutnya Sektor perdagangan 10,94 persen dan pertambangan dan penggalian 7,12 persen.

E. Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan termasuk didalamnya Kabupaten Banyuasin saat ini tengah masif dilakukan. Tidak hanya menyelesaikan pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga tengah giat membangun infrastruktur lain. Tidak hanya infrastuktur perhubungan untuk meningkatkan konektivitas yang tengah masif dibangun, berbagai infrastruktur lainnya juga tengah ditingkatkan pembangunannya, seperti infrastruktur jaringan irigasi mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air, infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, serta penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tabel 3-61 Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Banyuasin

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Jalan raya merupakan sarana perhubungan darat yang sangat menunjang transportasi. Pada tahun 2014, panjang jalan di Kabupaten Banyuasin mencapai 1.341,6 km, terdiri atas: 1) Jalan Nasional/Negara sepanjang 61 Km. 2) Jalan Provinsi sepanjang 82 Km, 3) Jalan Kabupaten sepanjang 1.198,6 Km, bertambah 108,22 km dari tahun 2013. Jumlah sarana angkutan darat yang tercatat di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014 berjumlah 4.660 kendaraan atau bertambah 811 kendaraan dibanding data tahun 2013. Beberapa wilayah Banyuasin terletak di aliran sungai dimana transportasi sungai merupakan sarana yang penting untuk kelancaran di daerah ini. Jumlah angkutan sungai bertambah 27 armada selama tahun 2014 dibanding data tahun 2013. Berdasarkan rencana, konektivitas di Banyuasin akan diperkuat dengan dibangunnya Tol Trans Sumatera yakni Tol Palembang-Tanjung Api-Api sepanjang 70 km. Saat ini rencana tol tersebut masuk dalam tahap pembebasan lahan.
2.	Kereta Api	Berdasarkan rencana, di Kabupaten Banyuasin akan segera dibangun jaringan rel Kereta Api (KA) Trans Sumatera yang menghubungkan antara Kota Palembang-Betung di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin di

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		Provinsi Sumatera Selatan hingga ke daerah Kabupaten Muaro Jambi dan wilayah Kota Jambi di Provinsi Jambi. Koridor trase jaringan rel KA Trans Sumatera Palembang-Betung-Jambi, masing-masing yaitu Palembang-Betung mencapai 69 kilometer. Lalu berikutnya, adalah Betung-Jambi panjangnya mencapai 163 kilometer. Moda angkutan kereta api yang akan dibangun ini rencananya diperuntukkan untuk angkutan barang, dan lambat laun sesuai dengan dinamika dan perkembangan, di masa mendatang bisa digunakan untuk angkutan penumpang.
3.	Transportasi Udara	Di Kabupaten Banyuasin tidak terdapat bandar udara. Selama ini akses angkutan udara dari dan ke luar Banyuasin memanfaatkan Bandara SMB II di Kota Palembang. Hal tersebut dikarenakan dekatnya akses pencapaian menuju bandara tersebut dari Kabupaten Banyuasin, mengingat Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang merupakan dua daerah yang berbatasan langsung.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Sungai-sungai di Kabupaten Banyuasin berfungsi ganda baik sebagai sumber air dan pengairan maupun sebagai penghubung bagi wilayah-wilayah yang terletak di sepanjang sungai. Jenis alat angkutan sungai yang banyak dipakai terdiri dari: perahu jukung, kapal gandeng, motor ketek stempel dan perahu. Pelabuhan Tanjung Api-Api merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Tanjung Api-Api. Pelabuhan ini direncanakan terintegrasi dengan jalur kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, serta Jalan Tol dari Palembang menuju Tanjung Api-Api. Beberapa industri seperti rubber, CPO, mie instant dan pergudangan sudah berdiri di kawasan industri Tanjung Api-Api. Rencananya Pelabuhan Tanjung Api-Api akan memiliki Dermaga kapal feri, Dermaga peti kemas, dan Lapangan Container. Dalam jangka panjang, pelabuhan ini diproyeksikan sebagai pengganti Pelabuhan Bom Baru Palembang.
5.	Air Bersih	Untuk kawasan-kawasan perkotaan Banyuasin, penyediaan air bersih telah dilayani dengan sistem perpipaan oleh perusahaan air minum milik Pemda. Pada tahun 2014, PDAM Kabupaten Banyuasin telah menyalurkan sebanyak 4.493.047 m ³ air bersih. Sebanyak 90% disalurkan ke rumah tangga, dan sisanya disalurkan ke instansi pemerintah, pertokoan, industri, perusahaan, perkantoran, dan fasilitas umum.
6.	Listrik	Pelayanan pasokan energi listrik Kabupaten Banyuasin masuk dalam lingkup pelayanan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (PT. PLN WS2JB). Listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian besar masyarakat. Akan tetapi pasokan listrik di Banyuasin masih memiliki keterbatasan. Data Dinas Pertambangan dan Energi per Oktober 2015 menunjukkan bahwa terdapat 287 dari 304 desa/kelurahan di Kabupaten Banyuasin yang sudah terjangkau listrik, artinya masih ada sekitar 6% desa/kelurahan yang belum terjangkau listrik.

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
7.	Telekomunikasi	Sarana telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin, khususnya sinyal telepon seluler, sudah menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mempermudah untuk mendapatkan informasi. Wilayah Kabupaten Banyuasin telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Beberapa operator besar penyedia layanan telekomunikasi telah beroperasi di Kabupaten Banyuasin. Akses informasi di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memadai, ada sebanyak 88,7 persen rumah tangga yang sudah memiliki telepon selular. Selain itu, sudah ada rumah tangga yang memanfaatkan PC/desktop dan laptop/notebook sebagai sarana informasi meskipun baru ada sebagian kecil.

3.4. PROVINSI JAMBI

A. Wilayah Administrasi

Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*). Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 0° 45' 2° 45' LS dan 101° 0' - 104° 55 BT. Luas wilayah provinsi ini adalah 53.435.72 Km² dengan luas daratan 51.000 Km², luas lautan 425,5 Km², dan panjang pantai 185 Km. Batas-batas Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan

Administratif Provinsi Jambi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2008 terbagi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota yaitu:

Tabel 3-62 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1	Kabupaten Batanghari	Muara Bulian
2	Kabupaten Bungo	Muara Bungo
3	Kabupaten Kerinci	Sungaipenuh
4	Kabupaten Merangin	Bangko
5	Kabupaten Muaro Jambi	Sengeti
6	Kabupaten Sarolangun	Sarolangun
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak

NO.	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
9	Kabupaten Tebo	Muara Tebo
10	Kota Jambi	Jambi
11	Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2016



Gambar 3-18 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jambi

B. Kondisi Fisik Wilayah

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu:

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan

3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Provinsi Jambi pada umumnya beriklim tipe B. Bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Rata-rata curah hujan 116-154 hari per tahun. rata-rata curah hujan bulanan sebesar 179-79 mm pada bulan basah dan 68-106 mm pada bulan kering. Musim hujan di Provinsi Jambi dari bulan November sampai Maret dan musim kemarau dari bulan Mei sampai Oktober.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di temui jenis tanah aluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas.

Tabel 3-63 Jenis Tanah di Provinsi Jambi

JENIS TANAH	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Podzolik Merah Kuning	2.036.386	39,93
Latosol	952.386	18,67
Gley Humus Rendah	547.830	10,74
Andosol	354.406	6,95
Organosol	308.338	6,05
Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik	275.652	5,40
Podzolik Merah Kuning	236.343	4,63
Alluvial	199.553	3,91
Hidromorfik Kelabu	83.743	1,64
Latosol + Andosol	60.032	1,18
Rawa Laut	42.951	0,84
Komplek Latosol + Litosol	2.380	0,05

Sumber : Bappeda Prov. Jambi 2017

C. Penggunaan Lahan

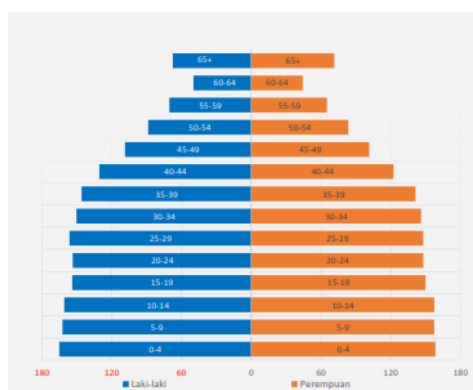
Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 43.631 Ha; 2) Sawah Tadah Hujan tercatat 136.662 Ha; 3) Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5) Kebun Sawit tercatat 936.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat 93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat 1.634.492 Ha; 10) Hutan Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha.

Tabel 3-64 Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
1.	Pemukiman	43.631
2.	Sawah Tadah Hujan	136.332
3.	Tegalan/Ladang	117.516
4.	Kebun Campuran	112.787
5.	Kebun Karet	1.284.003
6.	Kebun Sawit	936.565
7.	Kebun Kulit Manis	93.609
8.	Kebun Teh	4.691
9.	Semak dan Alang-alang	87.177
10.	Hutan Lebat	1.634.492
11.	Hutan Belukar	413.406
12.	Hutan Homogen	187.704
13.	Penggunaan Lain	47.757

Sumber : Bappeda Prov. Jambi 2017

D. Penduduk dan Tenaga Kerja



Komposisi penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk ini adalah jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang lebih kecil dibanding penduduk usia yang lebih muda maupun penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 1990-an, laju pertumbuhan penduduk relatif rendah. Namun pada akhir

tahun 1990 hingga kini laju pertumbuhan lebih tinggi sehingga penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia dewasa (15-24 tahun). Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk usia di atasnya.

Laju pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk (SP-2010) selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,56 persen, lebih tinggi dibanding tahun 1990/2000 yang hanya sebesar 1,77 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,80 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,39 persen. Sedangkan laju penduduk Provinsi Jambi hasil proyeksi tahun 2016 mencapai 1,67 persen, dengan jumlah penduduk sebesar 3,46 juta penduduk.

Tabel 3-65 Kondisi Kependudukan di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016

URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	3.344	3.402	3.458
	- Laki-laki	1.707	1.736	1.764
	- Perempuan	1.637	1.666	1.694
2	Pertumbuhan penduduk (% thd 2010)	7,62	9,47	11,30
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	66,67	67,82	68,96
4	Sex Rasio (L/P) (%)	104,2	104,2	104,2
5	Jumlah Rumah Tangga (ribu rta)	883	847	861
6	Rata-rata ART (jiwa/rta)	4,01	4,02	4,02
7	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,43	70,56	70,71

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jambi 2017

Dengan luas wilayah sekitar 50.160 km² (daratan), setiap km² ditempati penduduk sebanyak 68 orang pada tahun 2016. Angka ini selalu meningkat karena tingginya laju pertumbuhan penduduk sementara luas wilayah tidak mengalami pertambahan. Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi meningkat relatif kecil pada tahun 2016 yaitu sebesar 70,71 tahun. Angka ini merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dan merupakan salah satu indikator penting dalam penghitungan IPM.

Di Provinsi Jambi terdapat Suku Anak Dalam yang merupakan suku yang masuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT). Suku Anak Dalam disebut juga Suku Kubu atau Orang Rimba. Suku ini hidup secara nomaden atau tidak menetap dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun di antara mereka sudah banyak yang telah memiliki lahan karet, sawit ataupun pertanian lainnya. Sebagian dari mereka masih berpaham animisme, meskipun sudah ada yang mengenal agama. Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda, yaitu wilayah Utara Provinsi Jambi (Sekitar Taman Nasional Bukit 30), Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah Selatan Provinsi Jambi. Populasi Suku Anak Dalam hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 berjumlah 3.205 orang yang hidup di wilayah administrasi Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Bungo.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 67 persen penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15

tahun dan lebih yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pada tahun 2016, angkatan kerja di Provinsi Jambi meningkat sebesar 4,41 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu dari 66,14 persen menjadi 67,54 persen. Angka tersebut mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang secara aktif secara ekonomi. Meningkatnya nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Jambi.

Tabel 3-66 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016

URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
1	TPAK (%)	66,14	66,14	67,70
2	Tingkat Pengangguran (%)	4,34	4,34	4,00
3	Penduduk Bekerja (%)	95,66	95,66	96,00
4	UMP (Rp. 000)	1.710	1.710	1.906

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jambi 2017

Pasar tenaga kerja Provinsi Jambi ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, besarnya mencapai 96 persen. Kesempatan kerja terus meningkat pada periode tahun 2014 – 2016. Meningkatnya kesempatan kerja pada periode tersebut selaras dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Selama periode 2014 – 2016 UMP Provinsi Jambi selalu meningkat hingga pada tahun 2016 sebesar 1,9 juta rupiah.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor Pertanian masih mendominasi pasar kerja di Jambi dengan persentase sebesar 49 persen pada tahun 2016, yang diikuti dengan sektor Perdagangan dengan persentase sebesar 18 persen, serta sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 15 persen.

E. Perekonomian Daerah

PDRB merupakan nilai tambah bruto yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 171,71 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp. 130,50 miliar atas dasar harga konstan, meningkat dibandingkan PDRB tahun sebelumnya. Secara nominal meningkat Rp. 16,60 miliar, dan secara riil meningkat Rp. 5,46 miliar.

Pada sisi produksi, PDRB disumbang oleh 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha. Sumbangan nilai tambah terbesar dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 29,79 persen. Sektor Perkebunan Tahunan seperti karet dan sawit mendominasi perolehan nilai tambah di Provinsi Jambi yang sebagian besar penduduknya merupakan petani kedua komoditas tersebut. Pada posisi berikutnya, lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian memberi kontribusi 16,59 persen, sebagai dampak adanya pertambangan minyak dan gas bumi yang cukup potensial di Jambi. Selain migas, pertambangan batubara juga cukup marak, terutama setelah adanya peningkatan harga di pasar global yang mendorong produksi secara signifikan. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi kontribusi yang cukup besar pula (12,15 persen) karena aktivitas ekspor-impor baik ke/dari luar negeri maupun antar provinsi. Industri Pengolahan menyumbang sebesar 10,47 persen dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Jika dikaji lebih dalam, industri pengolahan tersebut masih bersifat industri hulu yang menghasilkan barang setengah jadi seperti *crude palm oil* (CPO), *crumb rubber*, minyak mentah, dan lain-lain yang sebetulnya masih dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan pengembangan industri hilir.

Tabel 3-67 Kondisi Perekonomian di Provinsi Jambi Tahun 2014-2016

URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
1	PDRB ADHK 2010 (Rp. Miliar)	119.984,72	125.038,71	130.499,63
2	PDRB ADHB (Rp. Miliar)	144.807,64	155.110,35	171.711,45
3	PDRB Perkapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	35.880,59	36.753,91	37.734,81
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	43.303,72	45.593,17	49.642,99
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,35	4,21	4,37

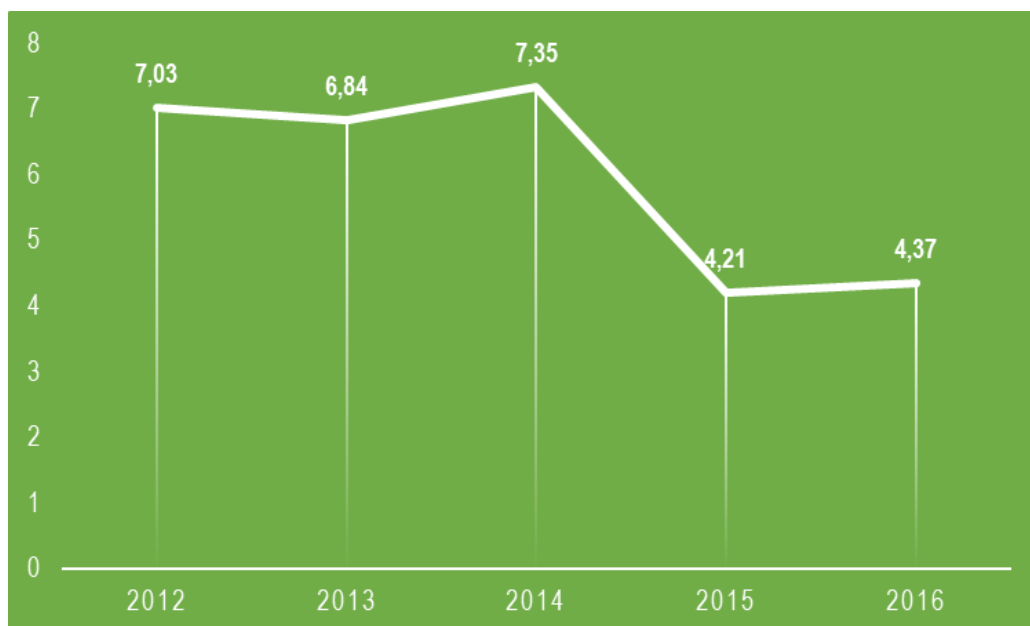
Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jambi 2017

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 secara riil mencapai 4,37 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,21 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disumbang oleh sektor pertanian sebesar 1,73 persen; sektor perdagangan 0,59 persen; sektor informasi dan komunikasi 0,29 persen; sektor industri pengolahan dan sektor transportasi masing-masing 0,26 persen; sektor konstruksi 0,25 persen; dan sisanya oleh sektor-sektor lainnya. Potensi sektor pertanian yang sangat besar terutama dari tanaman perkebunan tahunan memberi andil yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, meskipun banyak kendala seperti tekanan harga di pasar global dan isu klasik adanya *over supply*. Di samping itu, ketergantungan pada iklim sangat tinggi, sehingga perlu adanya inovasi agar persoalan tersebut dapat ditanggulangi.

Sektor perdagangan diperkirakan akan terus terdongkrak naik sebagai dampak kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir tahun 2015. Kebijakan ini akan memberi dampak positif manakala masyarakat mampu menyikapinya dengan mendiversifikasi produk yang mampu bersaing di pasar ASEAN maupun global.

Sektor informasi dan komunikasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, prospek informasi dan komunikasi ke depan sangat optimis. Peningkatan produksi sektor ini akan memberi *multiplier effect* bagi peningkatan sektor-

sektor lainnya seperti industri pengolahan dan transportasi. Kendati demikian, teknologi informasi yang semakin maju harus diikuti peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya.



Gambar 3-19 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Pendapatan per kapita penduduk direpresentasikan oleh indikator PDRB per kapita, yakni nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Provinsi Jambi mencapai Rp. 49,64 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 37,73 juta atas dasar harga konstan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan 2,65 persen secara riil (atas dasar harga konstan).

Jika dikonversi per hari diperkirakan sekitar Rp. 137,85 ribu per kapita atas dasar harga berlaku, dan Rp. 104,80 ribu per kapita atas dasar harga konstan. Artinya, secara nominal produktivitas penduduk di Provinsi Jambi rata-rata mencapai Rp. 137,85 ribu per hari, dan secara riil sebesar Rp. 104,80 ribu per hari. Dalam nilai US Dollar, PDRB per kapita Provinsi Jambi mencapai 3.71 ribu US\$ atas dasar harga berlaku dan 2.82 ribu US\$ atas dasar harga konstan. Atau secara nominal 10.31 US\$ per kapita per hari, dan secara riil 7.84 US\$ per kapita per hari.

F. Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan sarana dan prasana memegang peranan penting bagi perkembangan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Sebagai sarana penunjang berbagai kegiatan perekonomian, transportasi memiliki peran penting dan vital bagi Provinsi Jambi khususnya moda transportasi darat.

Tabel 3-68 Infrastruktur Wilayah di Provinsi Jambi

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Untuk mendukung kegiatan transportasi darat, Pemprov. Jambi telah membangun jalan sepanjang 1.129,91 km, sementara jalan nasional yang tersedia sepanjang 1.317,93 km. Dari total panjang jalan yang ada, 92,04 persen sudah diaspal sementara sisanya (7,96 persen) belum diaspal. Jalan sepanjang 2.447,83 km yang ada di Provinsi Jambi, 56,81 persen dalam kondisi bagus, 26,28 persen keadaannya sedang, 10,78 persen kondisi rusak dan sisanya (6,13 persen) rusak berat. Batanghari merupakan kabupaten dengan kondisi jalan rusak berat paling panjang yaitu mencapai 44,68 km. Selain kondisi jalan, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi pada tahun 2016 tercatat sebanyak 621.696 kendaraan bermotor yang terdiri dari 477.387 unit kendaraan roda dua dan 144.309 unit kendaraan roda empat. Dari sebanyak itu, paling banyak kendaraan beredar di Kota Jambi dengan persentase 49,28 persen kendaraan roda dan 55,85 persen kendaraan roda empat.
2.	Kereta Api	Saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat jalur rel kereta api. Namun berdasarkan rencana pengembangan PT. KAI akan membangun jaringan rel kereta api (KA) Trans Sumatera yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi. Koridor trase jaringan rel KA Trans Sumatera Palembang-Betung-Jambi, masing-masing yaitu Palembang-Betung mencapai 69 kilometer, lalu berikutnya Betung-Jambi sepanjang 163 kilometer. Trase KA Trans Sumatera tersebut akan melewati beberapa daerah yaitu Kota Palembang- Kab. Banyuasin-Kab. Musi Banyuasin (di Provinsi Sumatera Selatan) hingga ke Kab. Muaro Jambi-Kota Jambi (di Provinsi Jambi). Moda angkutan kereta api yang akan dibangun ini rencananya diperuntukan untuk angkutan barang, dan lambat laun sesuai dengan dinamika dan perkembangan, di masa mendatang bisa digunakan untuk angkutan penumpang.
3.	Transportasi Udara	Di Provinsi Jambi telah terdapat tiga bandar udara yang beroperasi. Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin adalah bandar udara utama yang terletak di Kota Jambi. Selain bandara tersebut terdapat Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Bungo. Belakangan ini Provinsi Jambi terus berbenah dengan membangun infrastruktur baru berupa perluasan bandara Sulthan Thaha menjadi bandara internasional. Mulai 2016 telah resmi dibuka dengan data jumlah penerbangan 7.382 pesawat datang dan 7.393 pesawat berangkat. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya, dimana pergerakan penumpang datang mencapai 808.476 orang dan penumpang berangkat 827.994 orang.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Pelabuhan di Provinsi Jambi sebanyak 14 pelabuhan, kesemuanya merupakan pelabuhan sungai. Pelabuhan Jambi yang terletak di Kota Jambi adalah pelabuhan terbesar di

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		Provinsi Jambi. Selain pelabuhan tersebut, terdapat Pelabuhan Ka. Mendahara, Pelabuhan Kampung laut, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Bulian, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Muara Tebo, Pelabuhan Nipah Panjang, Pelabuhan Rantau Rasau, Pelabuhan Sungai Lokan, Pelabuhan Sungai Rengas, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Tanjung Jabung, dan Pelabuhan Teluk Buan.
5.	Air Bersih	Hampir seluruh pusat perkotaan di Provinsi Jambi telah terlayani oleh penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum milik pemda di masing-masing daerah. Adapun kawasan-kawasan/daerah-daerah yang belum terlayani sistem perpipaan umumnya memperoleh air bersih secara mandiri melalui sumur gali, pompa air tanah, dan sumber air lainnya (sungai, danau, dll). Pada tahun 2016, total pelanggan air bersih sistem perpipaan di Provinsi Jambi mencapai 132.350 pelanggan, dengan jumlah kubikasi air bersih yang disalurkan sebesar 26,607 juta m ³ .
6.	Listrik	Pelayanan pasokan energi listrik di Provinsi Jambi masuk dalam lingkup pelayanan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (PT. PLN WS2JB). Kapasitas listrik terpasang di Provinsi Jambi sebesar 95,52 Megawatt, sedangkan Daya Mampu Listrik di Provinsi Jambi sebesar 55,38 Megawatt. Daya Mampu dipenuhi dari PLTD sebesar 10,88 Megawatt, Sewa sebesar 6,5 Megawatt dan beli sebesar 38 Megawatt. Jumlah pelanggan PLN tahun 2016 menurut kelompok pelanggan meliputi Rumah Tangga 91 persen, Industri/Bisnis 6 persen, dan sisanya lain-lain 3 persen. Kelompok industri dan bisnis meskipun berdasarkan jumlah pelanggan hanya 6 persen, namun penggunaan daya tersambung mencapai 28 persen atau sebesar 197,76 MVA sedangkan pelanggan rumah tangga daya tersambung mencapai 64 persen atau 451,87 MVA.
7.	Telekomunikasi	Sektor telekomunikasi di Provinsi Jambi secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rentang 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pengguna telpon, telpon seluler dan internet. Pengguna telpon rumah meningkat dari 58.381 unit pada tahun 2012 menjadi 66.520 tahun 2015. Pengguna telpon seluler tahun 2016 persentasenya mencapai 58,68 persen. Pengguna laptop/komputer pada tahun 2016 juga meningkat dari 14,48 persen menjadi 14,83 persen. Pengguna internet juga semakin dimanjakan dengan kemudahan aksesnya, tahun 2015 penduduk 10 tahun ke atas yang bisa mengakses internet baru 19,93 persen meningkat pada 2016 menjadi 21,70 persen. Provinsi Jambi telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Berbagai operator layanan telekomunikasi telah beroperasi di Provinsi Jambi.

3.4.1. Kabupaten Bungo

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang secara geografis terletak antara 101° 27' sampai 102° 30' Bujur Timur dan antara 01° 08' sampai 01° 55' Lintang Selatan, yang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0 – 25 meter diatas permukaan laut. Kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

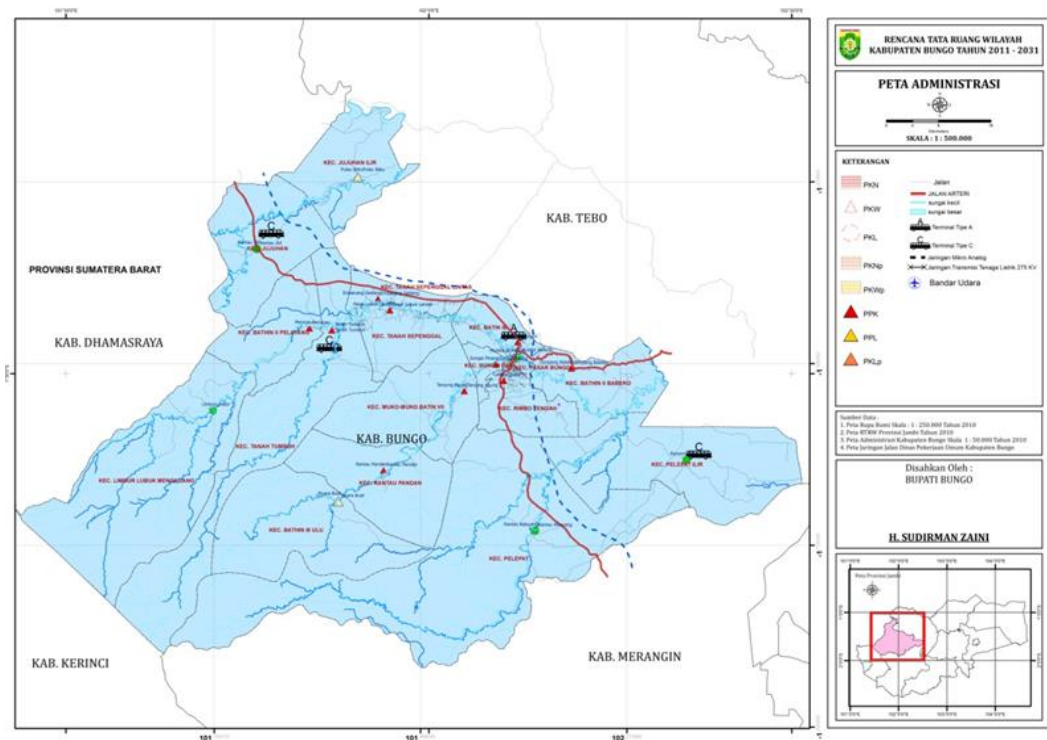
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Tebo dan Kab. Darmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Merangin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kerinci dan Kab. Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Tebo.

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi 141 desa dan 12 kelurahan dengan luas wilayah 4.659 km², Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Bungo sebagai daerah lintasan antar wilayah barat, timur dan selatan trans Sumatera.

Tabel 3-69 Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Bungo

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	BANYAKNYA DESA/KEL.
Pelepat	1.069,07	15
Pelepat Ilir	410,29	17
Bathin II Babeko	176,29	6
Rimbo Tengah	96,90	4
Bungo Dani	35,97	5
Pasar Muara Bungo	9,21	5
Bathin III	80,46	8
Rantau Pandan	239,61	6
Muko-Muko Bathin VII	186,73	9
Bathin III Ulu	373,83	9
Tanah Sepenggal	106,92	10
Tanah Sepenggal Lintas	77,51	12
Tanah Tumbuh	236,55	11
Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	14
Bathin II Pelayang	179,84	5
Jujuhan	254,12	10
Jujuhan Ilir	193,04	7
KAB. BUNGO	4.659,00	153

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka 2017



Gambar 3-20 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bungo

B. Kondisi Fisik Wilayah

Luas Kabupaten Bungo adalah 4.659 km² dengan topografi datar, berbukit bukit dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 mdpl. Kabupaten Bungo adalah daerah beriklim tropis dengan curah hujan 13.126 mm/tahun (138 hari/tahun). Jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, kompleks latosol dan andosol. Kondisi lahan yang dimiliki Kabupaten Bungo secara umum berupa morfologi datar, bertesktur agak kasar dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40 % yang mencapai 80% dari luas wilayah. Kondisi daerah ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Sisanya sebanyak 20% luas wilayah berupa kemiringan lebih dari 40% termasuk dalam kawasan lindung.

Sekitar 43,23% lahan yang ada di Kabupaten Bungo memiliki kemiringan lahan antara 0 – 15%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 36,55% kemiringan lahannya 16 – 40%. Karakteristik fisik dengan kemiringan yang cukup bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula. Namun secara umum merupakan wilayah yang relatif landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari luas lahan secara keseluruhan.

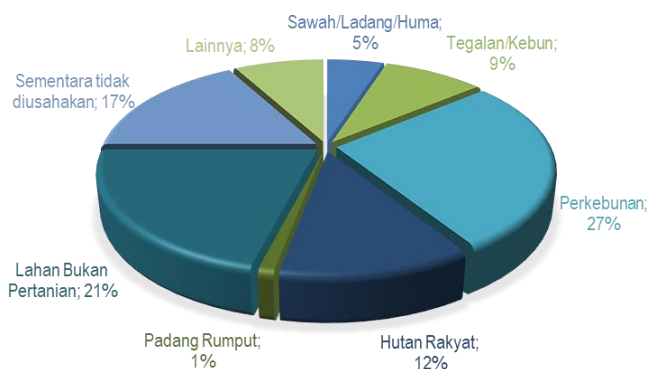
Kabupaten Bungo adalah daerah beriklim tropika basah dengan temperatur 25,8° C -26,7° C. Kondisi iklim Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak suatu tempat. Jumlah curah hujan di Kabupaten Bungo adalah 13.126 mm/tahun (138 hari/tahun).

Potensi air bawah tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Saat ini pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Bungo selain sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari juga dipakai untuk keperluan industri. Salah satu cara pengembangan potensi air air bawah tanah dapat dilakukan melalui kegiatan pengeboran dengan menggunakan metode geolistrik. Berdasarkan metode ini, dari beberapa sampel pengukuran yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa lapisan batuan yang mengandung air bawah tanah atau akuifer di Kabupaten Bungo sama pada tiap tempat tergantung pada penyebaran litologi lapisan batuan, penyebaran akuifer dan luas daerah imbuhnya kedalam potensi air tanah. Penyebaran akuifer air tanah di Kabupaten Bungo berkisar pada kedalaman antara 50 – 150 meter yang berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Muara Bungo.

C. Penggunaan Lahan

Sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia sebagai negara agraris, penggunaan lahan di Kabupaten Bungo ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan merupakan dua subsektor pada sektor pertanian yang paling besar penggunaan lahannya di Kabupaten Bungo.

Di Kabupaten Bungo, sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk perkebunan yang luasnya lebih dari 100 ribu hektar. Areal perkebunan lebih banyak digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2014 adalah 98.220 hektar, sementara itu, luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 10.542 hektar.



Gambar 3-21 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bungo

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan proyeksi data penduduk hasil SP 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Bungo pada tahun 2016 adalah sebanyak 351.878 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo yang mencapai 3,80% termasuk kategori cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bungo sehingga menarik orang datang (migrasi masuk) ke Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo merespon pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dengan melakukan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan pada tahun 2000 menjadi 17 kecamatan pada tahun 2008, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Bungo sebesar 6,36%, selanjutnya Kecamatan Pasar Muara Bungo sebesar 5,19%, dan Bathin II Babeko sebesar 5,17%. Kecamatan yang paling rendah laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Jujuhan Ilir sebesar 1,02%.

Tabel 3-70 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bungo Tahun 2016

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
Pelepat	1 069,07	31 609	29,57
Pelepat Ilir	410,29	50 879	124,01
Bathin II Babeko	176,29	12 595	71,44
Rimbo Tengah	96,90	26 909	277,70
Bungo Dani	35,97	29 007	806,42
Pasar Muara Bungo	9,21	25 393	2 757,11
Bathin III	80,46	23 435	291,26
Rantau Pandan	239,61	10 316	43,05
Muko-Muko Bathin VII	186,73	14 676	78,59
Bathin III Ulu	373,83	8 524	22,80
Tanah Sepenggal	106,92	22 190	207,54
Tanah Sepenggal Lintas	77,51	23 407	301,99
Tanah Tumbuh	236,55	14 166	59,89
Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	15 197	16,30
Bathin II Pelayang	179,84	9 591	53,33
Jujuhan	254,12	15 985	62,90
Jujuhan Ilir	193,04	10 221	52,95
2015	4 658,75	344 100	73,86
2014	4 658,75	336 320	72,19
2013	4 658,75	328 375	70,49
2012	4 658,75	320 627	68,82

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka 2017

Berdasarkan komposisi umur penduduk, penduduk tua yaitu penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas minimal 10 persen dari penduduk pada suatu daerah. Sementara, penduduk muda adalah penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5 persen.

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2016 kepadatan penduduk di Kabupaten Bungo rata-rata mencapai 73,86 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo sebesar 2.757 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah yakni Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang sebesar 16 jiwa/km².

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bungo pada tahun 2015 mencapai 63,8 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,98 persen. Adapun jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2016 berjumlah 1.496 orang terdiri dari 911 orang laki-laki dan 585 orang perempuan.

Tabel 3-71 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bungo Tahun 2014-2015

URAIAN/KEGIATAN	TAHUN	
	2014	2015
I. Angkatan Kerja	156.008	154.992
- Bekerja	146.111	150.375
- Pengangguran Terbuka	9.897	4.617
II. Bukan Angkatan Kerja	80.037	87.930
- Sekolah	16.929	22.903
- Mengurus Rumah Tangga	55.691	55.375
- Lainnya	7.417	9.652
TPAK (%)	66,09	63,80
TPT (%)	6,34	2,98

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka 2017

E. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Penghitungan PDRB setiap tahun selalu mengalami perbaikan. Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan situasi, Badan Pusat Statistik telah melakukan perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Di Kabupaten Bungo, pada tahun 2016 total nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 14,351 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar 10,871 triliun rupiah.

Tabel 3-72 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bungo Tahun 2015-2016

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB (RP. JUTA)		PDRB ADHK (RP. JUTA)	
	2015	2016	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	2.607.879,5	3.130.257,9	1.995.056,8	2.151.590,9
B. Pertambangan dan Penggalan	2.597.547,5	2.434.623,3	2.639.459,3	2.642.219,6
C. Industri Pengolahan	844.157,5	917.353,4	690.742,4	729.546,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.258,5	6.787,0	4.306,0	4.375,8

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB (RP. JUTA)		PDRB ADHK (RP. JUTA)	
	2015	2016	2015	2016
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.938,7	28.928,6	21.478,6	22.597,6
F. Konstruksi	1.656.890,2	1.806.040,8	1.212.230,8	1.291.393,8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.885.893,8	2.205.271,5	1.226.282,5	1.315.141,4
H. Transportasi dan Pergudangan	304.689,8	349.768,5	242.437,8	262.933,1
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	344.190,4	384.483,0	247.497,9	263.457,3
J. Informasi dan Komunikasi	568.669,1	679.062,5	456.809,6	501.967,6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	547.502,2	589.263,7	404.084,0	415.463,5
L. Real Estate	320.668,2	369.555,4	238.727,1	250.395,6
M,N. Jasa Perusahaan	28.139,7	31.735,3	21.019,6	21.815,7
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496.349,2	570.064,0	316.091,6	332.033,2
P. Jasa Pendidikan	594.832,5	674.159,2	483.404,3	520.602,0
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.378,1	87.415,3	66.775,6	74.280,8
R,S,T,U. Jasa lainnya	79.954,0	86.369,2	67.404,3	71.223,5
PDRB	12.985.938,9	14.351.138,4	10.333.808,1	10.871.038,4

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka 2017

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada tahun 2016 sebesar 5,20 persen, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,13 persen.

Tabel 3-73 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2012-2016

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,89	9,02	7,30	7,85
B. Pertambangan dan Penggalian	14,48	10,92	-2,70	-0,26	0,10
C. Industri Pengolahan	8,60	8,65	9,40	5,70	5,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,98	13,95	13,14	7,65	1,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,80	1,91	4,25	4,48	5,21
F. Konstruksi	14,38	18,91	22,02	6,52	6,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,05	4,33	11,65	9,06	7,25
H. Transportasi dan Pergudangan	5,64	10,99	8,62	7,95	8,45
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,50	8,10	15,32	6,91	6,45
J. Informasi dan Komunikasi	12,57	7,70	10,57	9,40	9,89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,91	12,86	3,55	2,47	2,82
L. Real Estate	7,55	5,06	2,99	4,04	4,89
M,N. Jasa Perusahaan	2,71	2,68	5,19	4,20	3,79
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	6,83	10,91	5,15	5,04
P. Jasa Pendidikan	8,55	4,52	2,09	8,80	7,69
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,55	9,32	17,35	15,40	11,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,05	5,35	6,33	6,78	5,67
LPE	9,65	9,02	6,74	5,13	5,20

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka 2017

Struktur perekonomian Kabupaten Bungo pada tahun 2016 masih didominasi oleh tiga sektor utama, sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,81%); Pertambangan dan Penggalian

(16,96%); serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,37%).

F. Infrastruktur Wilayah

Sebagai daerah yang menjadi perlintasan jalur antara wilayah barat, timur dan selatan trans Sumatera, ketersediaan sarana dan prasana memegang peranan penting bagi perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bungo. Sebagai sarana penunjang berbagai kegiatan perekonomian, transportasi memiliki peran penting dan vital bagi Kabupaten Bungo khususnya moda transportasi darat.

Tabel 3-74 Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Bungo

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Bungo tahun 2016 adalah 802,19 km, dimana yang telah diaspal sebesar 74,10 persen, meningkat 0,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagai daerah jalur perlintasan darat Trans Sumatera, Kabupaten Bungo didukung oleh keberadaan Terminal Type A Muaro Bungo. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah kedatangan dan keberangkatan Bus di terminal ini mencapai 32.473, dengan jumlah penumpang mencapai 870.141 penumpang.
2.	Kereta Api	Di Kabupaten Bungo belum terdapat jalur rel kereta api.
3.	Transportasi Udara	Kabupaten Bungo memiliki pelabuhan udara aktif yakni Bandara Muara Bungo. Berlokasi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah atau sekitar 20 menit dari pusat Kota Muara Bungo. Bandara ini mulai beroperasi terhitung sejak November 2012. Maskapai Sriwijaya Air dengan rute tujuan Jakarta (Soekarno Hatta)-PP, beroperasi di bandara ini dengan frekuensi 4 kali seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, Jum'at dan Minggu. Rencananya pada 2017 frekuensi akan ditambah menjadi setiap hari. Maskapai Garuda Indonesia dan Wings Air juga menurut informasi tertarik membuka rute ke Muara Bungo. Pada tahun 2015 jumlah penerbangan pesawat yang datang dan berangkat melalui bandara ini mencapai 171 pesawat. Jumlah penumpang datang mencapai 5.568 orang dan penumpang berangkat 5.542 orang.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Kabupaten Bungo dilewati oleh sungai besar antara lain Batang Bungo, Batang Tebo, Sungai Mengkuang, Sungai baru Pelepat, Sungai Kuamang dan Sungai Batang Jujuhan yang berpotensi sebagai wisata dan transportasi namun sayangnya

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
		keberadaan sungai tersebut belum termanfaatkan secara optimal.
5.	Air Bersih	Kawasan disekitar pusat kota Kabupaten Bungo telah terlayani oleh layanan air bersih sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM Pancuran Telag. Pada tahun 2015, total pelanggan air bersih sistem perpipaan di Kabupaten Bungo mencapai 8.479 pelanggan, dengan jumlah kubikasi air bersih yang disalurkan sebesar 2.547.045 m ³ . Adapun kawasan-kawasan/daerah-daerah yang belum terlayani sistem perpipaan umumnya memperoleh air bersih secara mandiri melalui sumur gali, pompa air tanah, dan sumber air lainnya (sungai, danau, dll).
6.	Listrik	Pelayanan pasokan energi listrik di Kabupaten Bungo masuk dalam lingkup pelayanan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (PT. PLN WS2JB), Regional S2JB Area Muara Bungo. Kapasitas daya tersambung pada tahun 2015 mencapai 91,84 MVA, yang melayani 64.302 pelanggan.
7.	Telekomunikasi	Layanan telekomunikasi di Kabupaten Bungo secara umum mengalami perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kabupaten Bungo telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Berbagai operator layanan telekomunikasi telah beroperasi di kabupaten ini.

3.4.2. Kabupaten Sarolangun

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102° 03'39" sampai 103° 13'17" Bujur Timur dan antara 01° 53'39" sampai 02° 46'24" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km², dengan luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858 km² (13,90%), Kecamatan Limun 799 km² (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km² (5,18%), Kecamatan Pelawan 330 km² (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km² (2,80%), Kecamatan Sarolangun 319 km² (5,17%), Kecamatan Batin VIII 498 km² (8,07%), Kecamatan Pauh 1.770 km² (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km² (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km² (10,30%), dimana Kecamatan Pauh merupakan kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Singkut merupakan kecamatan dengan luas paling kecil.

Tabel 3-75 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sarolangun

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JARAK KE PUSAT KAB. (KM)
Batang Asai	Pekan Gedang	97
Limun	Pulau Pandan	22
Cermin Nan Gedang	Lubuk Resam	24
Pelawan	Pelawan	14
Singkut	Sungai Benteng	23
Sarolangun	Sarolangun	0
Batin VIII	Limbur Tembesi	25
Pauh	Pauh	27
Air Hitam	Jernih	50
Mandiingin	Mandiingin	59

Sumber : Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016



Gambar 3-22 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun

B. Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Sarolangun seluas 5.248 Km² atau (85%) dan dataran tinggi : 926 Km² (15%), didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49%), datar (23,32%), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah bergelombang yang mencapai 18,29% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90%, berbukit kecil sekitar 6,62% dan cekung sekitar 5% sisanya 11,38% merupakan daerah

dengan bentuk wilayah bergunung. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah Kabupaten Sarolangun potensial untuk pertanian.

Bentuk wilayah berombak dengan lereng 3–8% merupakan bentuk wilayah dominan daerah penelitian dengan luas 145.039 Ha atau 23,49% dari luas kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di sekitar Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, Lubuk Jering, Jernih dan Desa Lubuk Kepyang. Di wilayah Kecamatan Mandiingin dapat dijumpai di Desa Kertopati, Mandiingin Tuo, Gurun Tuo, Gurun Tuo Simpang, Mandiingin, Taman Dewa dan Petiduran Baru. Di wilayah Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa Semaran, Lubuk Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Di wilayah Kecamatan Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk kecimbung, Batu Penyabung dan Pulau Buayo. Di Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau Tenang, Desa Pelawan, Desa Batu Putih. Di Kecamatan Singkut dapat dijumpai di Desa Bukit Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang, Perdamaian dan Sungai Merah. Di wilayah Kecamatan Limun terdapat di Desa Tanjung Raden, Desa Monti, Tanjung Raden sampai Desa Temenggung Dusun Mengkada. Di Kecamatan Cermin Nang Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di Desa Kasiro, Desa Bukit Kalimau Ulu dan Desa Muara Cuban.

Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8–15% menyebar sekitar 18,29% atau 112.917 Ha. Di Kecamatan Air Hitam dijumpai di kaki Bt. Subanpunaibanyak (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua Belas. Di Kecamatan Mandiingin dijumpai di sekitar Desa Bukit Peranginan, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa Karang Mendapo. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai di sekitar Dusun Kampung Pondok. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Desa Sungai Bemban.

Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15–25% menyebar sekitar 40.847 Ha dijumpai di sekitar Bt. Subanpunaibanyak (164 m) dan Pegunungan Dua Belas wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di Kecamatan Mandiingin, Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai, Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B. Rebah dan B. Kutur di Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo, Desa Pulau Salak Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung.

Bentuk wilayah berbukit, lereng 25–40% menyebar sekitar 73.487 Ha atau 11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di Kecamatan Limun. Berdasarkan hasil analisis hampir 50% dari Kecamatan Limun mempunyai bentuk wilayah berbukit, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Bt. Tinjaulimun (667 m) sampai Dusun Kampung Manggis dan Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai bentuk

wilayah berbukit dijumpai di Desa Batu Empang, Simpang Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah Pisang Kemali dan Dusun Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk wilayah berbukit merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m) dan Bt. Kuaran (328 m).

Lebih dari 50% bentuk wilayah Kecamatan Batang Asai adalah bergunung, lereng > 40%. Bentuk wilayah ini dijumpai di sekitar Bt. Huluseluro (964 m), Bt. Bujang (1.957 m), Bt. Gedang, dan Bt. Legaitinggi (1.015 m).

Secara geohidrologi, Kabupaten Sarolangun merupakan daerah dataran rendah sampai tinggi dengan tata guna lahan berupa : sawah, tegalan dan kebun campuran sehingga tingkat infiltrasinya tinggi dengan muka air tanah pada umumnya terdapat di kedalaman hingga belasan meter di bawah permukaan laut.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sarolangun ditandai dengan terdapatnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), Dalam pengelolaan sungai dikenal Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Sarolangun relatif luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Sarolangun memiliki lebar yang kecil-besar (lebar kurang dari 50-100 m) dan panjang (mengikuti DAS Batanghari). Selain itu di Kabupaten Sarolangun terdapat 5(Lima) wilayah DAS yaitu DAS Batang Tembesi, DAS Merangin, DAS Batang Asai dan DAS Limun.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Sarolangun dikelompokkan menjadi 10 satuan penggunaan lahan, yaitu sawah, kebun campuran, kebun karet rakyat, kebun kelapa sawit, belukar, hutan, rumput alang-alang, permukiman dan genangan.

Penggunaan lahan sawah di daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Penggunaan lahan ini menyebar sepanjang B. Tembesi dan di wilayah Kecamatan Batang Asai, yaitu Desa Sungai Baung, Kasiro, Muaro Air Duo dan sekitar Desa Meribung dan Mersip. Secara keseluruhan penggunaan lahan sawah adalah 3.819 Ha atau 0,62% dari luas Kabupaten Sarolangun.

Kebun campuran adalah penggunaan lahan yang pengusahaan lahannya terdiri atas tanaman tahunan dan tanaman semusim. Secara keseluruhan luas penggunaan lahan ini mencapai 36.026 Ha atau 5,84% dari luas Kabupaten Sarolangun.

Potensi perkebunan di Kabupaten Sarolangun cukup menjanjikan dan pada umumnya adalah perkebunan rakyat. Karet merupakan komoditas perkebunan utama yang diusahakan masyarakat di daerah Kabupaten Sarolangun. Penggunaan lahan ini mencapai 80.762 Ha atau 13,08% dari luas Kabupaten Sarolangun. Kebun karet

menyebar luas di Kecamatan Pelawan, Singkut, Bathin VIII, Air Hitam dan Mandiangin, Kebun karet umumnya berasosiasi dengan belukar.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan kedua setelah karet. Penggunaan lahan ini menyebar seluas 33.416 Ha atau 5,41% dari luas kabupaten. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun adalah perkebunan milik perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Penggunaan lahan ini dapat dijumpai di Kecamatan Air Hitam, Mandiangin, Sarolangun, Pelawan dan Singkut.

Belukar adalah tutupan lahan yang vegetasinya berupa tanaman perdu sebagai bentuk suksesi menuju hutan kembali, bertajuk tinggi bercampur dengan pohon-pohonan berdiameter antara 10-15 cm pada tahap-tahap pertumbuhan tertentu serta tanaman kelompok perdu lainnya. Penutupan canopy rapat seperti hutan sekunder. Tutupan lahan ini menyebar di seluruh wilayah kecamatan, yaitu 32,17% dari luas Kabupaten Sarolangun.

Hutan di Kabupaten Sarolangun, berdasarkan fungsinya dibedakan atas hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam serta hutan konversi. Berdasarkan hasil interpretasi dan verifikasi lapang, total luas hutan tersebut mencapai 250.325,81 Ha atau 40,54% dari luas kabupaten.

Rumput Alang-alang merupakan lahan terlantar yang ditinggalkan pengelolanya. Pada umumnya rumput alang-alang berasal dari hutan yang ditebang secara liar (*illegal logging*) atau bekas penebangan liar atau praktek perladangan yang berpindah-pindah. Lahan ini umumnya terdapat di Kecamatan Mandiangin. Rumput alang-alang ini mencapai luas 2.827 Ha atau 0,48% dari luas kabupaten.

Pemukiman meliputi perkampungan atau perkotaan, setempat di lahan pekarangan dijumpai tanaman buah-buahan dan tanaman palawija. Luas pemukiman ini mencapai 24.016 Ha atau 3,89%.

Lahan tergenang di Kabupaten Sarolangun merupakan lahan bekas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang dijumpai di wilayah Kecamatan Bathin VIII dan Limun. Luas genangan ini mencapai 708 Ha atau 0,11% dari luas kabupaten.

Tabel 3-76 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sarolangun

TYPE PENGGUNAAN	LUAS	
	HA	%
Sawah	3.819	0,62
Kebun Campuran	36.026	5,84
Kebun Karet	80.762	13,08
Kebun Kelapa Sawit	33.416	5,41
Belukar	198.614	32,17
Hutan	259.789	42,08
Rumput Alang-alang	2.827	0,48
Pemukiman	1.441	0,23

TYPE PENGGUNAAN	LUAS	
	HA	%
Genangan	708	0,11
TOTAL	617.400	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Sarolangun

D. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan proyeksi data penduduk hasil SP 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2015 adalah sebanyak 278.222 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sarolangun yang mencapai 2,47% termasuk kategori cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun sehingga menarik orang datang (migrasi masuk) ke kabupaten ini.

Tabel 3-77 Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1. Batang Asai	8 151	8 841	16 992
2. Limun	8 651	8 561	17 212
3. Cermin Nan Gedang	6 054	5 991	12 045
4. Pelawan	15 611	15 416	31 027
5. Singkut	20 659	19 763	40 422
6. Sarolangun	27 780	26 948	54 728
7. Batin VIII	9 921	9 486	19 407
8. Pauh	12 092	11 349	23 441
9. Air Hitam	14 593	13 306	27 899
10. Mandiingin	18 167	16 882	35 049
Jumlah	2015	141 679	136 543
	2014	138 692	133 511
	2013	135 588	130 538
	2012	132 474	127 518
	2011	129 403	124 426

Sumber : Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2015 kepadatan penduduk di Kabupaten Sarolangun rata-rata mencapai 45 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni berada di Kecamatan Singkut sebesar 234 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah yakni Kecamatan Pauh sebesar 13 jiwa/km².

Tabel 3-78 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
1. Batang Asai	858	16 992	20
2. Limun	799	17 212	22
3. Cermin Nan Gedang	320	12 045	38
4. Pelawan	330	31 027	94

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
5. Singkut	173	40 422	234
6. Sarolangun	319	54 728	172
7. Batin VIII	498	19 407	39
8. Pauh	1770	23 441	13
9. Air Hitam	471	27 899	59
10. Mandiangin	636	35 049	55
KAB. SAROLANGUN	6174	278 222	45

Sumber : Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016

Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun tahun 2015 berjumlah 978 orang terdiri dari 581 orang laki-laki dan 397 orang perempuan. Adapun banyaknya tenaga kerja yang dilatih di LKK-UKM Disosnakertran Kabupaten Sarolangun tahun 2015 berjumlah 252 orang terdiri dari 144 orang laki-laki dan 108 orang perempuan.

E. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Penghitungan PDRB setiap tahun selalu mengalami perbaikan. Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan situasi, Badan Pusat Statistik telah melakukan perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Di Kabupaten Sarolangun, pada tahun 2016 total nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 12,245 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar 9,369 triliun rupiah.

Tabel 3-79 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2016

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB (RP. JUTA)		PDRB ADHK (RP. JUTA)	
	2015	2016	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	3.121.840,1	3.584.012,1	2.479.149,2	2.610.426,6
B. Pertambangan dan Penggalian	2.478.522,9	2.429.549,1	2.560.074,0	2.594.277,7
C. Industri Pengolahan	469.665,0	500.499,8	371.177,8	383.370,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2.591,1	3.276,1	2.409,7	2.627,2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.988,4	16.237,8	11.593,8	12.073,5
F. Konstruksi	1.640.458,0	1.802.480,9	1.198.030,2	1.257.931,8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	875.849,4	1.013.641,9	508.588,8	535.918,2
H. Transportasi dan Pergudangan	223.565,9	250.914,2	168.150,6	181.338,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	224.542,4	254.769,5	166.662,1	178.895,2
J. Informasi dan Komunikasi	382.087,7	454.592,0	305.277,9	329.541,8
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	306.943,4	339.149,5	221.098,6	231.650,5
L. Real Estate	149.626,5	167.007,9	117.235,1	121.096,9
M,N. Jasa Perusahaan	27.942,6	32.239,7	20.920,3	22.166,4

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB (RP. JUTA)		PDRB ADHK (RP. JUTA)	
	2015	2016	2015	2016
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	649.430,6	714.902,1	338.895,1	359.839,9
P. Jasa Pendidikan	312.434,4	345.856,2	269.442,2	280.914,3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.215,7	162.026,5	114.731,9	124.868,5
R,S,T,U. Jasa lainnya	155.739,9	174.526,8	133.239,7	142.401,6
PDRB	11.176.443,8	12.245.682,0	8.986.677,2	9.369.339,2

Sumber : Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 sebesar 4,26 persen, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,59 persen.

Tabel 3-80 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2012-2016

KATEGORI/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	5,45	5,66	3,84	3,25	5,30
B. Pertambangan dan Penggalian	12,18	6,85	1,83	-0,04	1,34
C. Industri Pengolahan	12,64	7,43	4,42	2,62	3,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,48	13,32	14,96	11,70	9,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,32	1,78	2,22	5,84	4,14
F. Konstruksi	11,77	17,90	12,99	6,75	5,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,38	8,07	6,99	7,06	5,37
H. Transportasi dan Pergudangan	4,54	8,50	7,67	7,51	7,84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	4,67	13,00	6,86	7,34
J. Informasi dan Komunikasi	5,96	4,09	7,59	7,11	7,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,12	9,16	6,50	5,66	4,77
L. Real Estate	4,30	3,56	3,16	3,66	3,29
M,N. Jasa Perusahaan	4,87	3,54	4,35	6,77	5,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	5,09	7,66	7,51	6,18
P. Jasa Pendidikan	5,23	6,38	4,11	4,35	4,26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	9,16	14,08	12,13	8,84
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,82	3,68	5,91	6,08	6,88
LPE	8,49	7,61	5,20	3,59	4,26

Sumber : Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016

Struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 masih didominasi oleh tiga sektor utama, sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,27%); Pertambangan dan Penggalian (19,84%); serta Konstruksi (14,72%).

F. Infrastruktur Wilayah

Sebagai daerah yang menjadi perlintasan jalur trans Sumatera, ketersediaan sarana dan prasana memegang peranan penting bagi perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Sebagai sarana penunjang berbagai kegiatan perekonomian,

transportasi memiliki peran penting dan vital bagi Kabupaten Sarolangun khususnya moda transportasi darat.

Tabel 3-81 *Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Sarolangun*

NO	INFRASTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Transportasi Darat	Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Sarolangun tahun 2015 adalah 1.473,97 km, terdiri dari jalan dengan kondisi baik 767,81 km, jalan dengan kondisi sedang 650,11 km, kondisi rusak ringan 35,7 km dan jalan dengan kondisi rusak berat 20,35 km.
2.	Kereta Api	Di Kabupaten Sarolangun belum terdapat jalur rel kereta api.
3.	Transportasi Udara	Di Kabupaten Sarolangun belum terdapat bandar udara. Akses transportasi udara di Kabupaten Sarolangun biasanya menggunakan Bandara Sulthan Thaha di Kota Jambi dan Bandara Muara Bungo di Kabupaten Bungo.
4.	Transportasi Laut/Sungai	Kabupaten Sarolangun dilewati oleh 4 sungai besar, yaitu Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Asai dan Batang Limun yang berpotensi sebagai wisata dan transportasi, namun sayangnya keberadaan sungai tersebut belum termanfaatkan secara optimal.
5.	Air Bersih	Kawasan disekitar pusat kota Kabupaten Sarolangun telah terlayani oleh layanan air bersih sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Sako Batuah. Pada tahun 2015, total pelanggan air bersih sistem perpipaan di Kabupaten Sarolangun mencapai 8.587 pelanggan, dengan jumlah kubikasi air bersih yang disalurkan sebesar 2.139.415,20 m ³ . Adapun kawasan-kawasan/daerah-daerah yang belum terlayani sistem perpipaan umumnya memperoleh air bersih secara mandiri melalui sumur gali, pompa air tanah, dan sumber air lainnya (sungai, danau, dll).
6.	Listrik	Pelayanan pasokan energi listrik di Kabupaten Sarolangun masuk dalam lingkup pelayanan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (PT. PLN WS2JB), Ranting Sarolangun. Kapasitas daya tersambung pada tahun 2015 mencapai 56,58 MVA, yang melayani 48.169 pelanggan.
7.	Telekomunikasi	Layanan telekomunikasi di Kabupaten Sarolangun secara umum mengalami perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kabupaten Sarolangun telah terlayani oleh fasilitas telekomunikasi kabel maupun nir kabel, baik untuk layanan akses internet dan juga telepon. Berbagai operator layanan telekomunikasi telah beroperasi di kabupaten ini.

BAB 4





BAB 4. PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KAJIAN

4.1. SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DAERAH

Penentuan sektor ekonomi unggulan pada suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah. Sehingga dengan demikian, fokus investasi pembangunan di daerah nantinya dapat lebih diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut.

Berbagai pendekatan dan alat analisis telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan daerah, baik menggunakan beberapa kriteria teknis maupun non teknis. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dalam memilih metode analisis untuk menentukan sektor unggulan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menganalisis sektor unggulan adalah metode *Location Quotient* (LQ).

Perhitungan LQ pada prinsipnya merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan atau keunggulan suatu daerah dalam sektor ekonomi tertentu (sektor basis). Satuan yang dapat digunakan antara lain dengan tenaga kerja atau nilai hasil produksi (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). Bentuk umum model analisis LQ ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut.

$$LQ_i = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana :

S_i	=	nilai produksi lapangan usaha i di bagian wilayah yang diamati
S	=	nilai total produksi lapangan usaha di seluruh bagian wilayah
N_i	=	nilai produksi lapangan usaha i di seluruh wilayah
N	=	nilai total produksi lapangan usaha di seluruh wilayah

Struktur perumusan hasil perhitungan LQ memberikan beberapa klasifikasi nilai yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- ◆ $LQ > 1$: menunjukkan sub wilayah yang diamati memiliki potensi surplus
- ◆ $LQ < 1$: menunjukkan sub wilayah yang diamati memiliki kecenderungan impor dari wilayah lain
- ◆ $LQ = 1$: menunjukkan sub wilayah yang diamati telah mencukupi dalam lapangan usaha tertentu

Dalam kajian Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini, perhitungan LQ dianalisa berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2010 pada masing-masing kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dan diolah adalah Angka Badan Pusat Statistik (BPS) baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

4.1.1. Sektor Unggulan Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertanian, perdagangan, komunikasi, real estate, pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

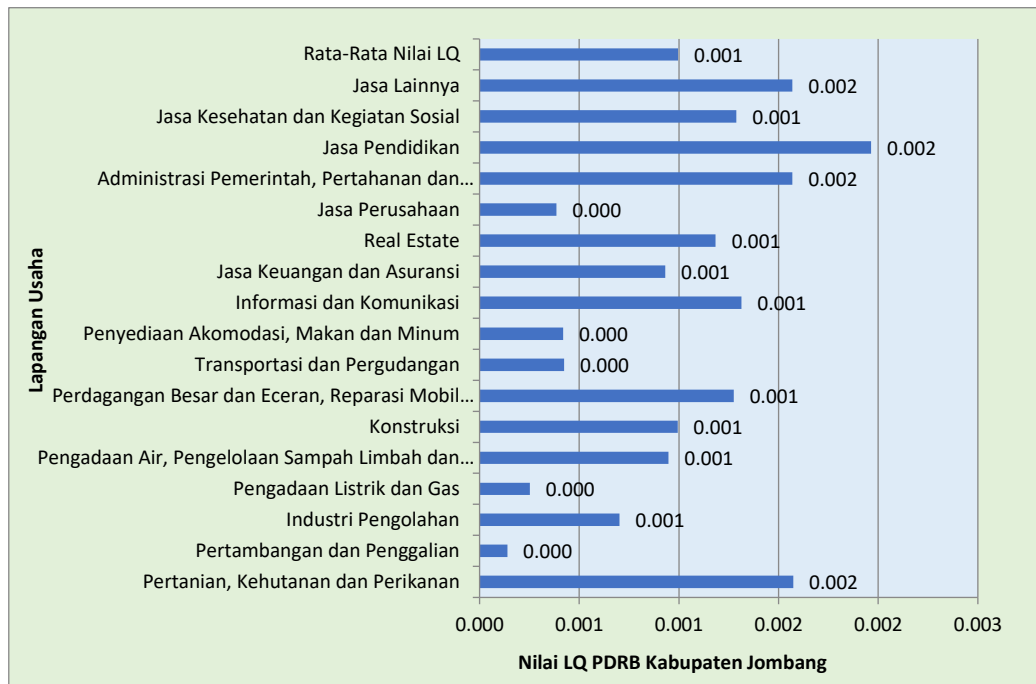
Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Jasa Pendidikan; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial; sektor Jasa Lainnya; serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada pada angka di atas 1,50.

Tabel 4-1 Nilai LQ Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.60	1.57	1.54	1.573
2	Pertambangan dan Penggalian	0.14	0.14	0.13	0.139
3	Industri Pengolahan	0.72	0.70	0.69	0.702
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.25	0.25	0.26	0.252
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.95	0.96	0.93	0.948
6	Konstruksi	0.90	0.99	1.09	0.993
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.26	1.28	1.28	1.275
8	Transportasi dan Pergudangan	0.44	0.42	0.41	0.424
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0.42	0.42	0.42	0.419
10	Informasi dan Komunikasi	1.30	1.32	1.32	1.314
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.93	0.93	0.93	0.931
12	Real Estate	1.17	1.18	1.21	1.185
13	Jasa Perusahaan	0.39	0.38	0.38	0.385

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.58	1.59	1.54	1.570
15	Jasa Pendidikan	1.97	1.97	1.95	1.965
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.28	1.28	1.31	1.289
17	Jasa Lainnya	1.58	1.59	1.54	1.570
	Rata-Rata Nilai LQ	0.993	0.998	0.996	0.996

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-1 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013-2015

4.1.2. Sektor Unggulan Kabupaten Tuban

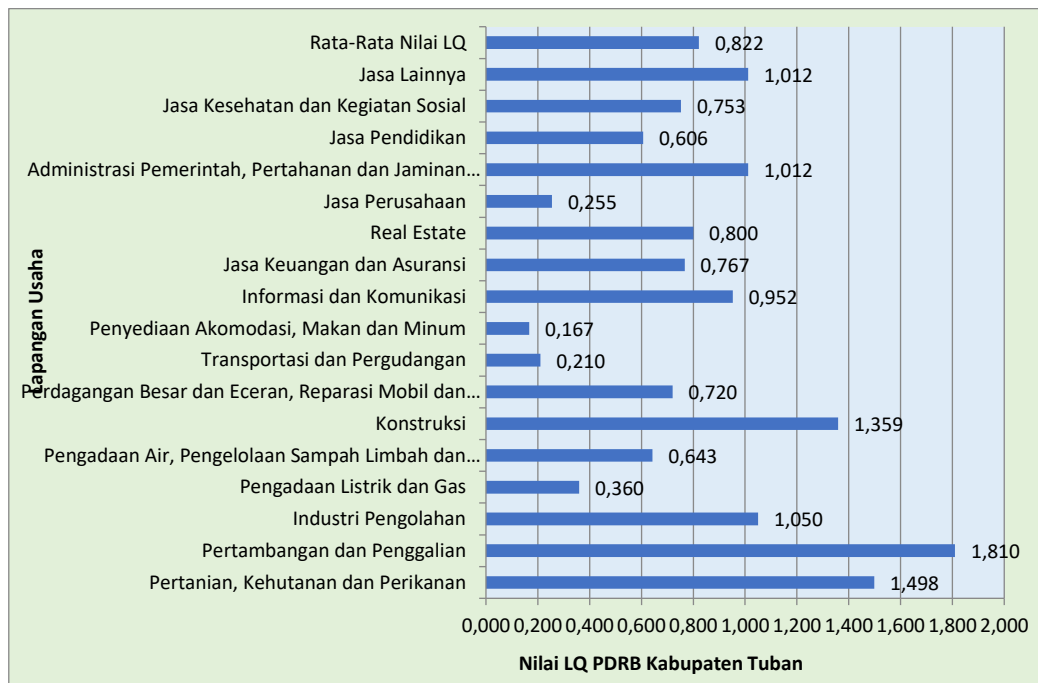
Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial; serta sektor Jasa Lainnya. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas angka 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan dua sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada pada kisaran angka 1,50 lebih.

Tabel 4-2 Nilai LQ Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.50	1.49	1.50	1.498
2	Pertambangan dan Penggalian	1.71	1.87	1.85	1.810
3	Industri Pengolahan	1.08	1.04	1.04	1.050
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.36	0.36	0.37	0.360
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.64	0.65	0.63	0.643
6	Konstruksi	1.28	1.36	1.44	1.359
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	0.72	0.73	0.71	0.720
8	Transportasi dan Pergudangan	0.20	0.21	0.22	0.210
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0.17	0.17	0.17	0.167
10	Informasi dan Komunikasi	0.93	0.95	0.97	0.952
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.77	0.77	0.77	0.767
12	Real Estate	0.78	0.80	0.82	0.800
13	Jasa Perusahaan	0.25	0.25	0.26	0.255
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.02	1.01	1.00	1.012
15	Jasa Pendidikan	0.60	0.61	0.61	0.606
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.75	0.77	0.753
17	Jasa Lainnya	1.02	1.01	1.00	1.012
Rata-Rata Nilai LQ		0.809	0.826	0.831	0.822

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-2 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013-2015

4.1.3. Sektor Unggulan Kabupaten Rembang

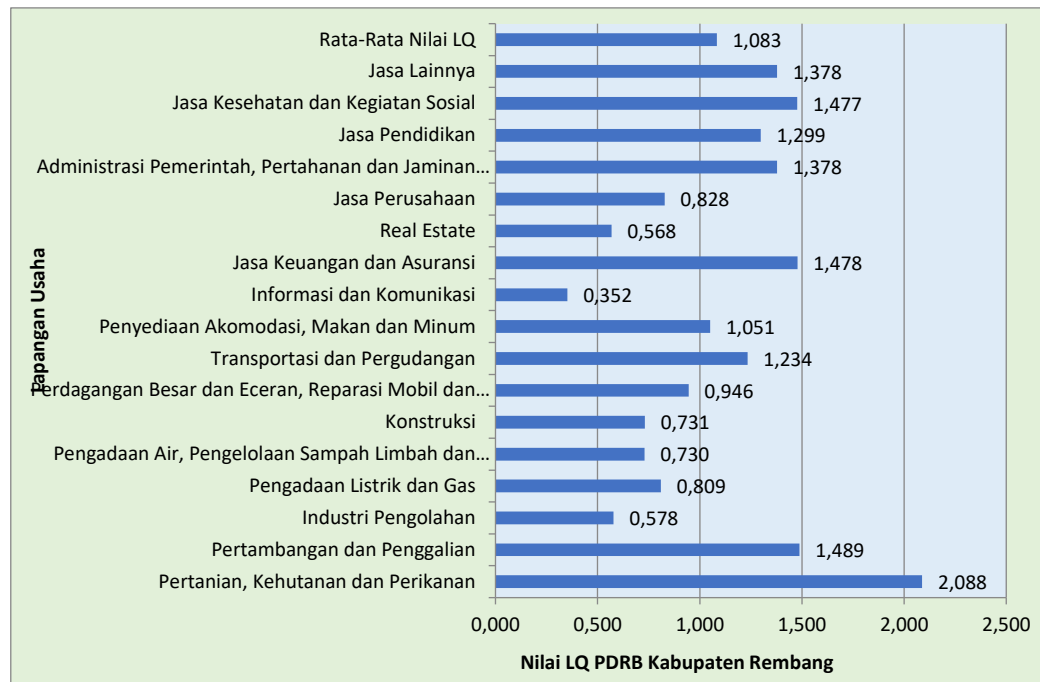
Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertanian, pertambangan, transportasi, jasa keuangan, pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada pada kisaran angka 1,50 lebih. Bahkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan rata-rata nilai LQ-nya berada pada angka di atas 2,00.

Tabel 4-3 Nilai LQ Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.16	2.06	2.04	2.088
2	Pertambangan dan Penggalian	1.49	1.49	1.49	1.489
3	Industri Pengolahan	0.54	0.59	0.60	0.578
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.80	0.81	0.82	0.809
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.74	0.73	0.73	0.730
6	Konstruksi	0.69	0.75	0.75	0.731
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	0.95	0.94	0.94	0.946
8	Transportasi dan Pergudangan	1.23	1.24	1.23	1.234
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1.03	1.07	1.06	1.051
10	Informasi dan Komunikasi	0.35	0.36	0.35	0.352
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	1.51	1.45	1.478
12	Real Estate	0.57	0.57	0.56	0.568
13	Jasa Perusahaan	0.84	0.83	0.82	0.828
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.38	1.38	1.37	1.378
15	Jasa Pendidikan	1.26	1.32	1.31	1.299
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.43	1.48	1.52	1.477
17	Jasa Lainnya	1.38	1.38	1.37	1.378
	Rata-Rata Nilai LQ	1.076	1.089	1.084	1.083

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-3 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2015

4.1.4. Sektor Unggulan Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, pemerintahan, serta jasa lainnya. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

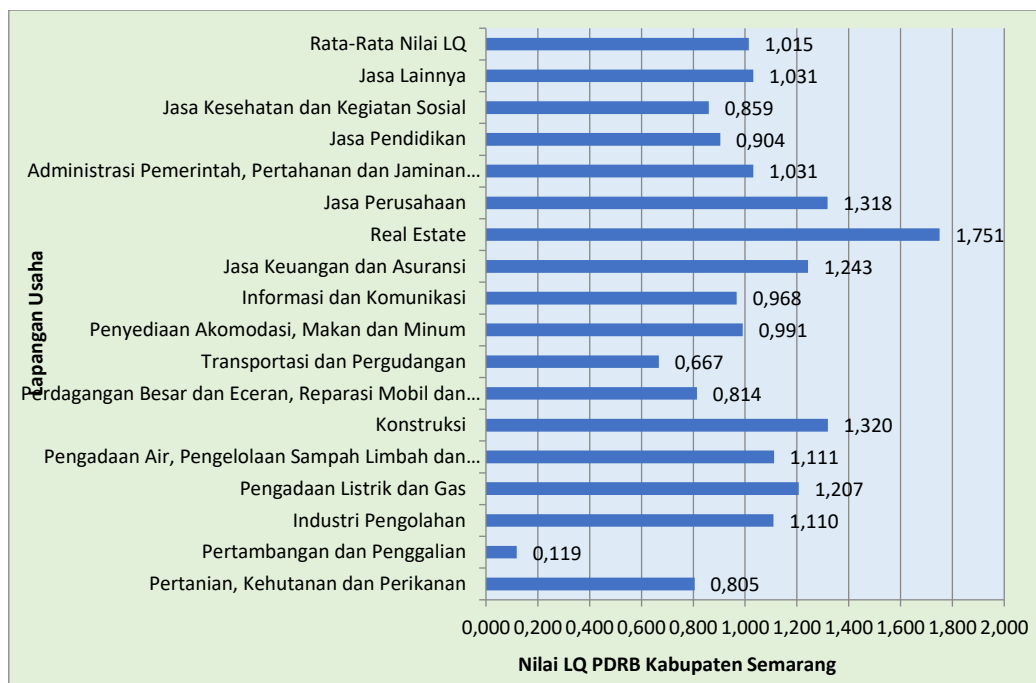
Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Konstruksi; sektor Real Estate; serta sektor Jasa Perusahaan merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada pada kisaran angka 1,30 lebih. Bahkan sektor Real Estate rata-rata nilai LQ-nya berada pada angka 1,75 lebih.

Tabel 4-4 Nilai LQ Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.80	0.81	0.81	0.805
2	Pertambangan dan Penggalian	0.12	0.12	0.12	0.119
3	Industri Pengolahan	1.11	1.11	1.12	1.110
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.21	1.20	1.21	1.207
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	1.12	1.10	1.11	1.111
6	Konstruksi	1.33	1.33	1.30	1.320

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	0.82	0.81	0.81	0.814
8	Transportasi dan Pergudangan	0.67	0.67	0.66	0.667
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1.00	0.99	0.98	0.991
10	Informasi dan Komunikasi	0.96	0.98	0.96	0.968
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.24	1.25	1.24	1.243
12	Real Estate	1.76	1.75	1.74	1.751
13	Jasa Perusahaan	1.33	1.32	1.30	1.318
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.03	1.03	1.03	1.031
15	Jasa Pendidikan	0.90	0.90	0.91	0.904
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.85	0.85	0.859
17	Jasa Lainnya	1.03	1.03	1.03	1.031
	Rata-Rata Nilai LQ	1.018	1.015	1.011	1.015

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-4 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2015

4.1.5. Sektor Unggulan Kota Palembang

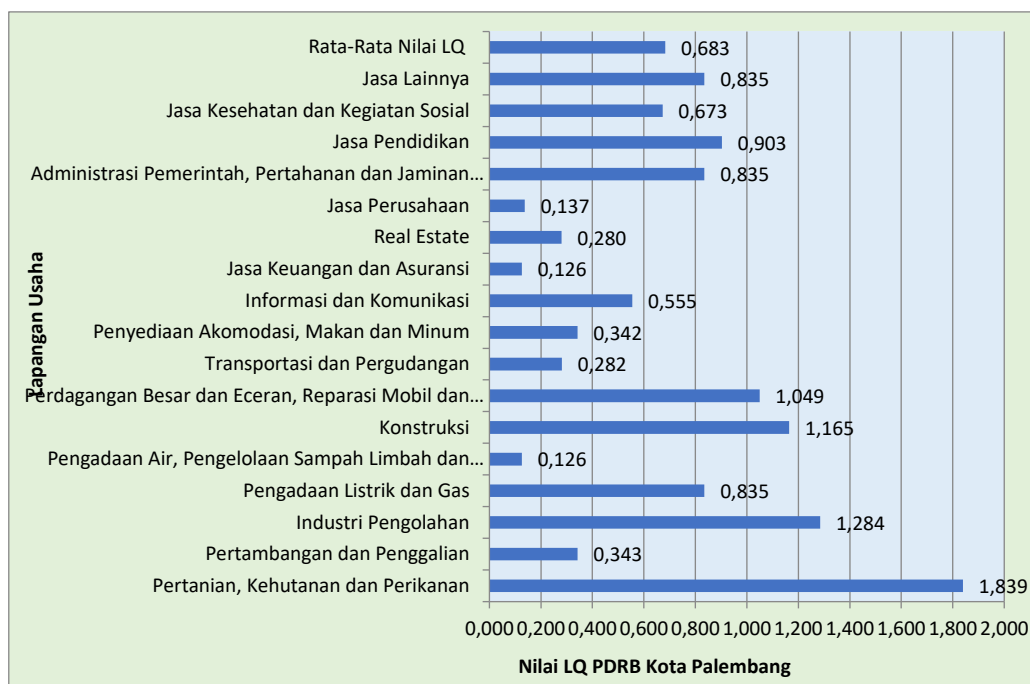
Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kota Palembang memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor industri pengolahan, listrik dan gas, air dan pengolahan sampah, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; sektor Transportasi dan Pergudangan; serta sektor Informasi dan Komunikasi merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada pada kisaran angka 2,00 lebih, jauh di atas rata-rata sektor lainnya.

Tabel 4-5 Nilai LQ Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.03	0.03	0.03	0.028
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.000
3	Industri Pengolahan	2.12	2.02	2.01	2.051
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.64	1.50	1.48	1.537
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2.61	2.45	2.43	2.495
6	Konstruksi	1.46	1.39	1.38	1.413
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.44	1.38	1.36	1.395
8	Transportasi dan Pergudangan	2.25	2.13	2.07	2.150
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1.89	1.81	1.79	1.830
10	Informasi dan Komunikasi	1.37	2.68	2.66	2.238
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.97	1.90	1.95	1.940
12	Real Estate	1.68	1.61	1.59	1.626
13	Jasa Perusahaan	1.61	1.54	1.97	1.710
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.02	0.94	0.93	0.966
15	Jasa Pendidikan	1.33	1.26	1.24	1.277
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.24	1.18	1.17	1.200
17	Jasa Lainnya	1.02	0.94	0.93	0.966
	Rata-Rata Nilai LQ	1.453	1.456	1.471	1.460

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-5 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013-2015

4.1.6. Sektor Unggulan Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Banyuasin memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertanian, industri pengolahan, serta konstruksi. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

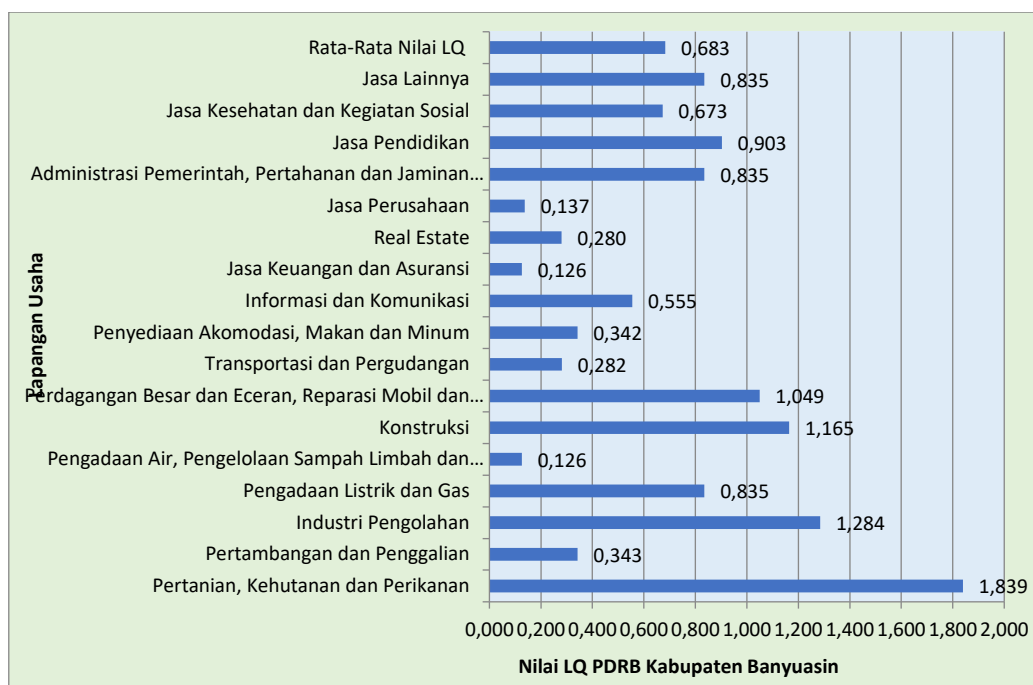
Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada di atas angka 1,00 lebih. Bahkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan angkanya jauh di atas rata-rata sektor lainnya yakni sebesar 1,84.

Tabel 4-6 Nilai LQ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.86	1.84	1.82	1.839
2	Pertambangan dan Penggalian	0.32	0.34	0.37	0.343
3	Industri Pengolahan	1.30	1.28	1.28	1.284
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.82	0.84	0.84	0.835
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.13	0.13	0.12	0.126
6	Konstruksi	1.16	1.17	1.16	1.165

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.06	1.05	1.04	1.049
8	Transportasi dan Pergudangan	0.28	0.28	0.28	0.282
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0.35	0.34	0.34	0.342
10	Informasi dan Komunikasi	0.56	0.55	0.55	0.555
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.13	0.12	0.12	0.126
12	Real Estate	0.28	0.28	0.28	0.280
13	Jasa Perusahaan	0.14	0.14	0.14	0.137
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.82	0.85	0.84	0.835
15	Jasa Pendidikan	0.92	0.90	0.89	0.903
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.67	0.67	0.673
17	Jasa Lainnya	0.82	0.85	0.84	0.835
	Rata-Rata Nilai LQ	0.683	0.685	0.681	0.683

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-6 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013-2015

4.1.7. Sektor Unggulan Kabupaten Bungo

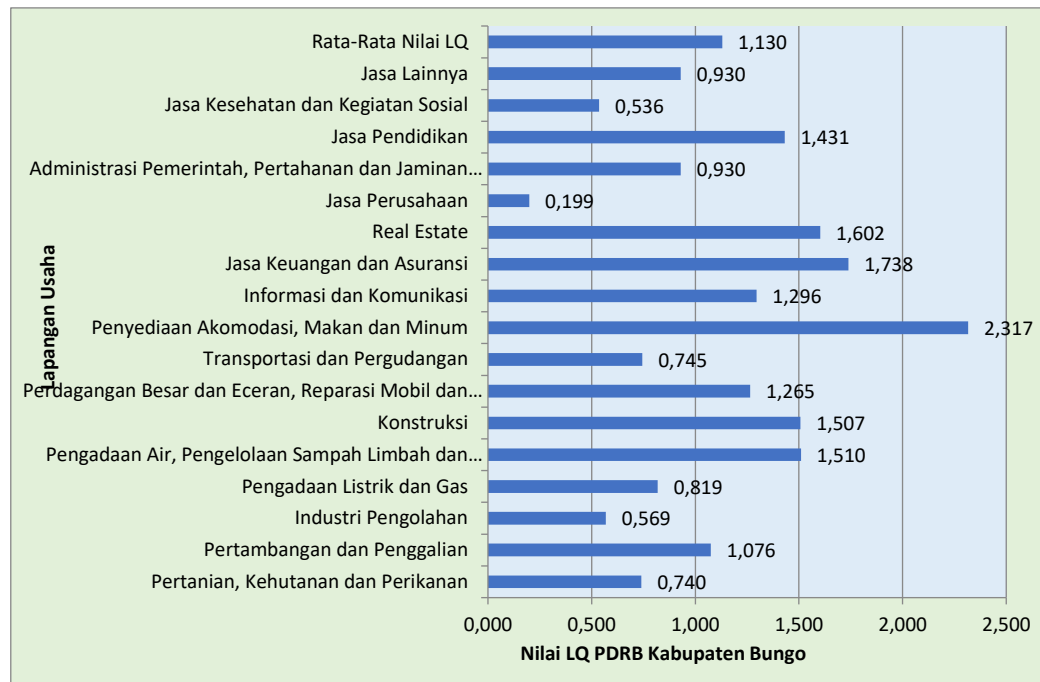
Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bungo memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertambangan, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, akomodasi, komunikasi, jasa keuangan, real estate, serta jasa pendidikan. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; serta sektor Real Estate merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada di atas angka 1,00 lebih.

Tabel 4-7 Nilai LQ Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.74	0.74	0.00	0.740
2	Pertambangan dan Penggalian	1.13	1.02	0.00	1.076
3	Industri Pengolahan	0.56	0.58	0.00	0.569
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.82	0.81	0.00	0.819
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	1.52	1.50	0.00	1.510
6	Konstruksi	1.39	1.62	0.00	1.507
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.24	1.29	0.00	1.265
8	Transportasi dan Pergudangan	0.74	0.75	0.00	0.745
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	2.35	2.28	0.00	2.317
10	Informasi dan Komunikasi	1.28	1.31	0.00	1.296
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.73	1.74	0.00	1.738
12	Real Estate	1.59	1.62	0.00	1.602
13	Jasa Perusahaan	0.20	0.20	0.00	0.199
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.90	0.96	0.00	0.930
15	Jasa Pendidikan	1.42	1.44	0.00	1.431
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.54	0.53	0.00	0.536
17	Jasa Lainnya	0.90	0.96	0.00	0.930
	Rata-Rata Nilai LQ	1.120	1.140	0.000	1.130

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-7 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada Tahun 2013-2015

4.1.8. Sektor Unggulan Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, akomodasi, jasa keuangan, pemerintahan, jasa kesehatan, serta jasa lainnya. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun 2013-2015.

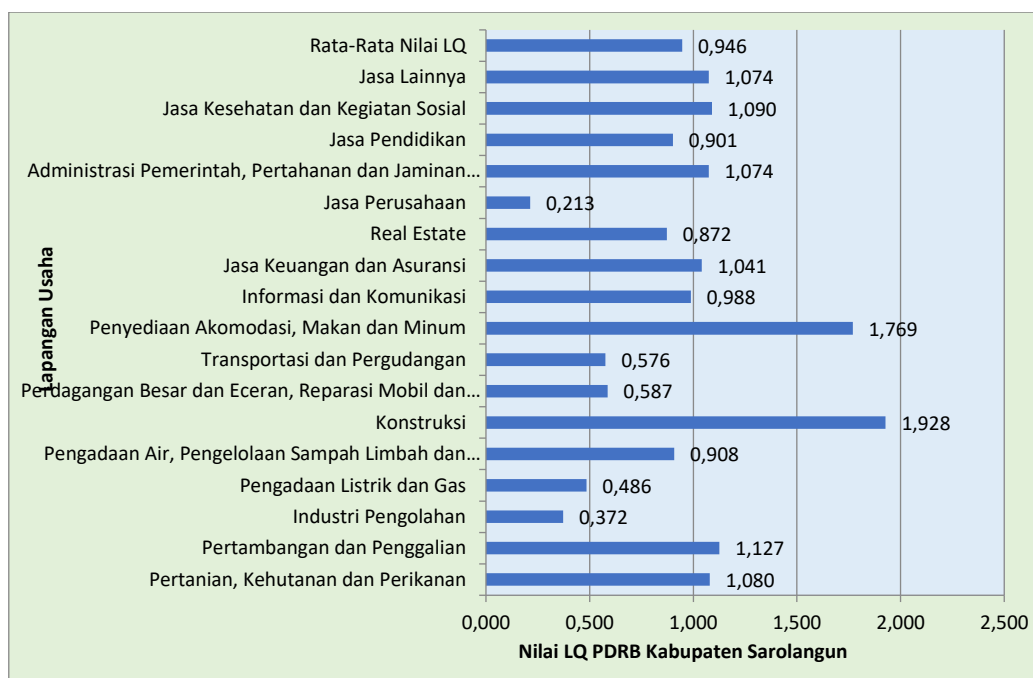
Dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta sektor Jasa Lainnya merupakan beberapa sektor yang cukup unggul dibandingkan sektor lainnya, dimana secara rata-rata dalam periode tahun 2013-2015 nilai LQ-nya berada di atas angka 1,00 lebih.

Tabel 4-8 Nilai LQ Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.09	1.07	0.00	1.080
2	Pertambangan dan Penggalian	1.15	1.10	0.00	1.127
3	Industri Pengolahan	0.37	0.37	0.00	0.372

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN			RATA-RATA
		2013	2014	2015	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.49	0.48	0.00	0.486
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.92	0.89	0.00	0.908
6	Konstruksi	1.79	2.06	0.00	1.928
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	0.60	0.57	0.00	0.587
8	Transportasi dan Pergudangan	0.58	0.57	0.00	0.576
9	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1.77	1.76	0.00	1.769
10	Informasi dan Komunikasi	0.99	0.99	0.00	0.988
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.04	1.04	0.00	1.041
12	Real Estate	0.87	0.87	0.00	0.872
13	Jasa Perusahaan	0.22	0.21	0.00	0.213
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.08	1.07	0.00	1.074
15	Jasa Pendidikan	0.90	0.90	0.00	0.901
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.10	1.08	0.00	1.090
17	Jasa Lainnya	1.08	1.07	0.00	1.074
	Rata-Rata Nilai LQ	0.945	0.948	0.000	0.946

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-8 Sebaran Rataan Nilai LQ Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada Tahun 2013-2015

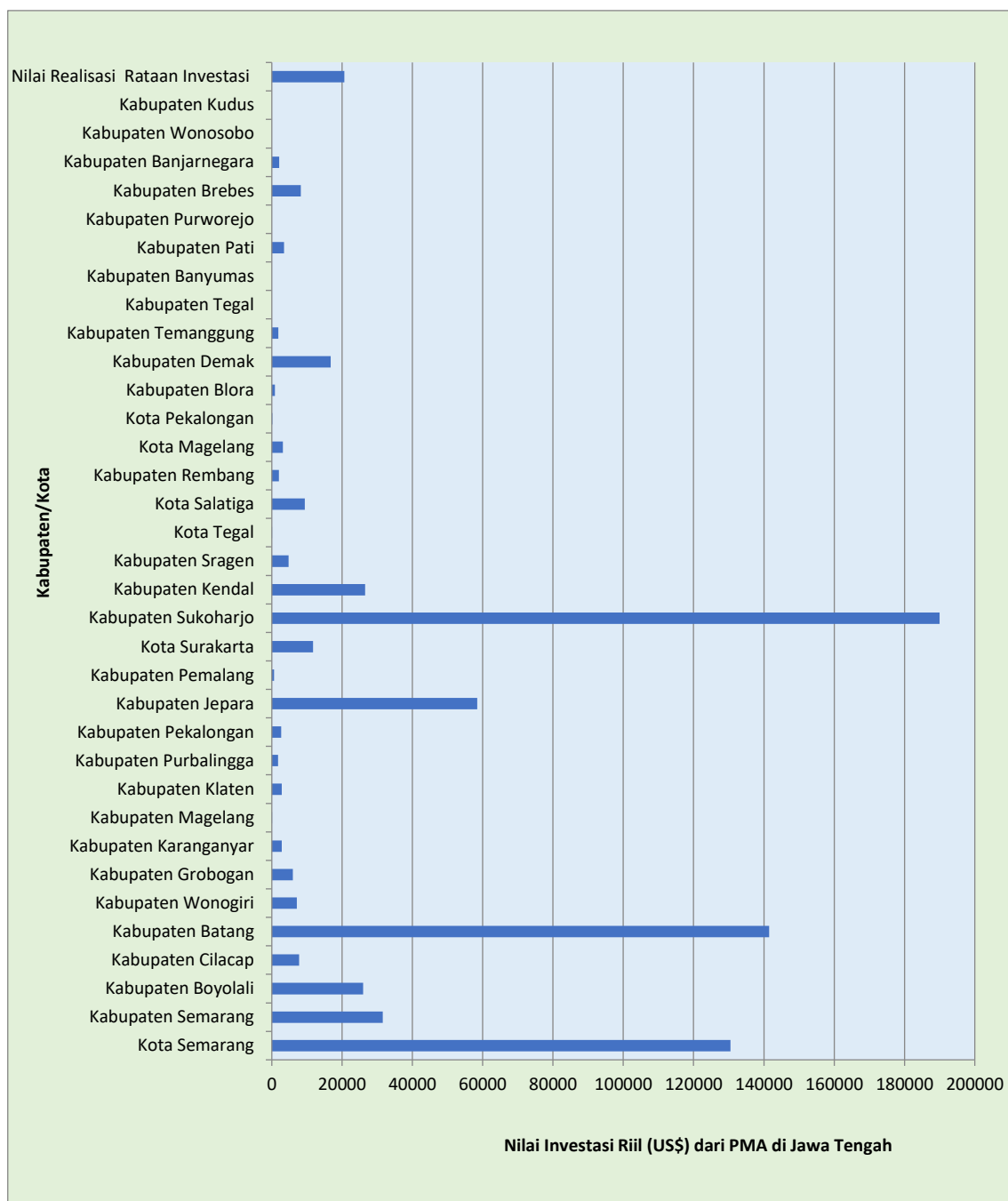
4.2. KINERJA INVESTASI RIIL DI DAERAH

Sebagai gambaran awal mengenai perkembangan nilai investasi riil PMA di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dalam periode tahun 2013-2016, secara umum perkembangannya mengalami fluktuatif serta dengan besaran nilai yang cukup variatif untuk masing-masing kabupaten/kota. Secara spesifik kinerja investasi riil tersebut disampaikan dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 4-9 Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$)

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRI	TAHUN				RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	
Kota Semarang	34819.1	71983.7	313570.5	101726.9	130525.1
Kabupaten Semarang	5958.3	52711.5	38605.8	28988	31565.9
Kabupaten Boyolali	1,729	49,017	34,748	18,538	26008.23
Kabupaten Cilacap	7566.9	0	20506.4	3119.3	7798.15
Kabupaten Batang	110,401	12,757	31,644	411,211	141503.3
Kabupaten Wonogiri	850	8,886	12,533	6,063	7082.925
Kabupaten Grobogan	4,380	11,867	31	7,732	6002.575
Kabupaten Karanganyar	0	6,470	1,431	3,479	2845.05
Kabupaten Magelang	0	0	60	261	80.325
Kabupaten Klaten	1460.3	3090.3	420.7	6372.7	2836
Kabupaten Purbalingga	407.9	1086.3	4046.2	1620.8	1790.3
Kabupaten Pekalongan	0	0	10,552	7	2639.775
Kabupaten Jepara	5870.8	68967.9	34706.5	124256.1	58450.33
Kabupaten Pemalang	0	0	1037	1496.8	633.45
Kota Surakarta	16318.6	12934.8	6842.8	10949.9	11761.53
Kabupaten Sukoharjo	229508.3	138190.9	231390.8	160729	189954.8
Kabupaten Kendal	14993.8	14.1	40542.6	50722.1	26568.15
Kabupaten Sragen	5576.8	5584.7	4892	3051.5	4776.25
Kota Tegal	0	0	0	106	26.4
Kota Salatiga	0	0	737	36,709	9361.45
Kabupaten Rembang	5927.8	1000	418.1	741.6	2021.875
Kota Magelang	0	11,776	782	57	3153.825
Kota Pekalongan	0	55	501	0	138.925
Kabupaten Blora	2,500	1,050	0	15	891.2
Kabupaten Demak	9,722	410	39,239	17,738	16777.4
Kabupaten Temanggung	0	0	1,000	6,407	1851.7
Kabupaten Tegal	0	0	0	2,239	0
Kabupaten Banyumas	0	0	2,300	918	0
Kabupaten Pati	2118.4	6486.8	5407.2	0	3503.1
Kabupaten Purworejo	0	0	0	0	0
Kabupaten Brebes	0	3,390	11,373	18,133	8224.15
Kabupaten Banjarnegara	6308.4	0	0	2000	2077.1
Kabupaten Wonosobo	0	0	0	0	0
Kabupaten Kudus	0	0	0	0	0
Nilai Rataan Investasi PMA	13718.18	13756.74	24979.94	30158.49	20613.21

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

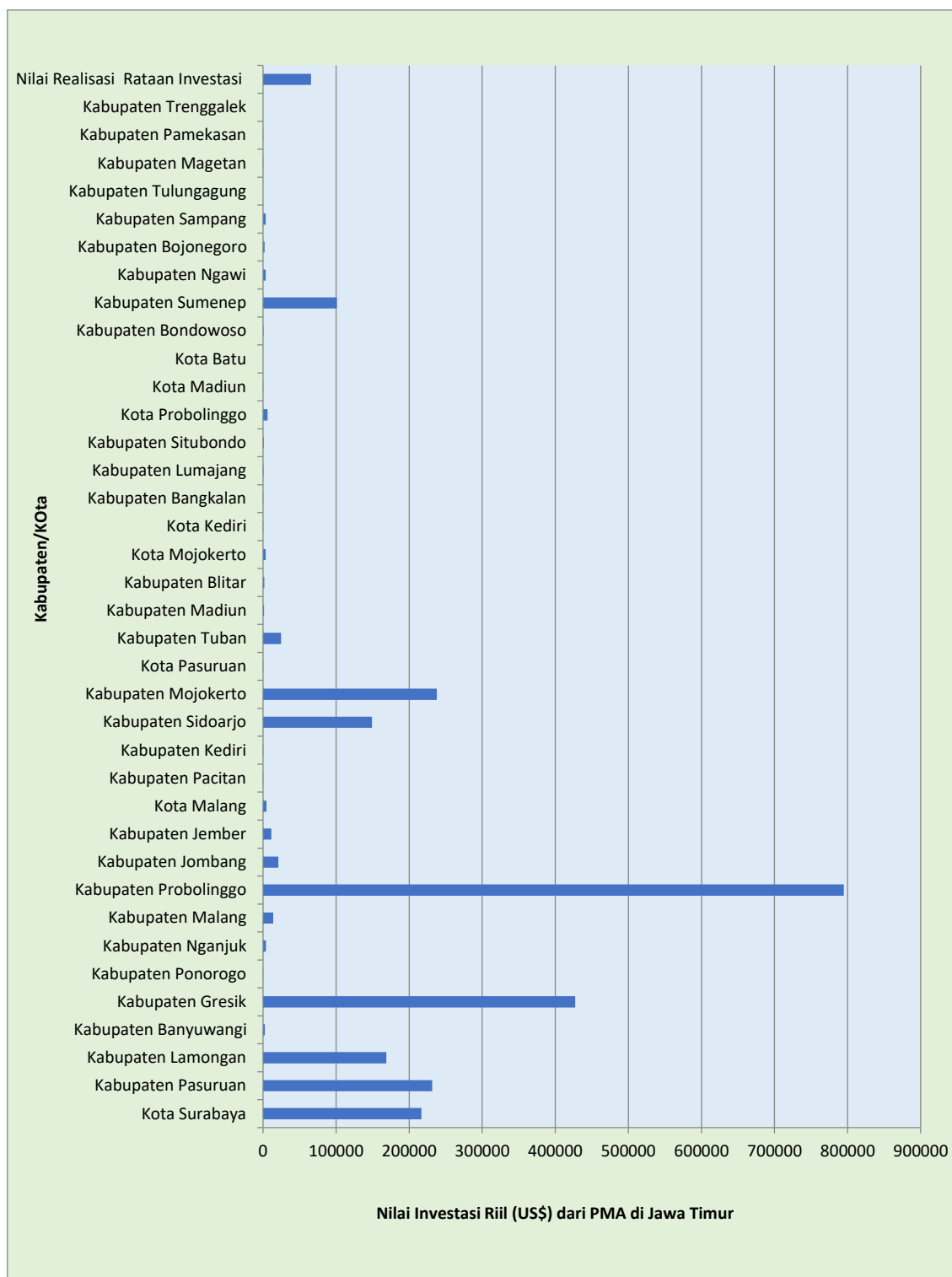


Gambar 4-9 Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)

Tabel 4-10 Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$)

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRI	TAHUN				RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	
Kota Surabaya	113529.4	28043.6	404584.8	320560	216679.5
Kabupaten Pasuruan	374609.5	82240.6	76229.2	393291.5	231592.7
Kabupaten Lamongan	25115.2	429921.2	205698.9	14094.6	168707.5
Kabupaten Banyuwangi	4151.3	0	498.8	5445.1	2523.8
Kabupaten Gresik	842750.3	316562.5	128676.9	420928.9	427229.7
Kabupaten Ponorogo	0	850	696	0	386.5
Kabupaten Nganjuk	3,494	0	12,550	0	4011.1
Kabupaten Malang	518.8	23962.9	3202.9	28154.3	13959.73
Kabupaten Probolinggo	1504338	6693.2	1366470	302294.4	794949
Kabupaten Jombang	46319.3	17388	3529.3	16336.4	20893.25
Kabupaten Jember	33338.5	1969.4	1521.9	8714.8	11386.15
Kota Malang	1,200	6,100	2,377	9,242	4729.825
Kabupaten Pacitan	982.7	0	0	34.5	254.3
Kabupaten Kediri	27.5	0	0	0	6.875
Kabupaten Sidoarjo	158390.1	141609.2	80669.8	215777.8	149111.7
Kabupaten Mojokerto	267635.8	359722.8	171810.9	152038.4	237802
Kota Pasuruan	2.6	450	0	135.7	147.075
Kabupaten Tuban	9158.1	80311.2	2340.4	6737.4	24636.78
Kabupaten Madiun	0	0	4,046	778	1206.025
Kabupaten Blitar	0	0	4482.7	2008.6	1622.825
Kota Mojokerto	1318.9	0	2875.5	9534.5	3432.225
Kota Kediri	0	0	371	145	129.025
Kabupaten Bangkalan	30	0	0	1,250	320
Kabupaten Lumajang	1,450	500	266	20	558.975
Kabupaten Situbondo	56	0	1,556	2,614	1056.55
Kota Probolinggo	0	130	2,316	22,942	6346.825
Kota Madiun	0	286	0	175	115.225
Kota Batu	0	0	0	0	0
Kabupaten Bondowoso	0	0	470.8	2151.1	655.475
Kabupaten Sumenep	0	309,569	95,431	0	101250
Kabupaten Ngawi	6,647	470	6,196	679	3497.875
Kabupaten Bojonegoro	1180.7	1800	30	4939.6	1987.575
Kabupaten Sampang	0	20.4	14479.6	0	3625
Kabupaten Tulungagung	0	0	0	0	0
Kabupaten Magetan	10	0	0	0	2.5
Kabupaten Pamekasan	0	0	0	12	3
Kabupaten Trenggalek	0	0	0	0	0
Nilai Rataan Investasi PMA	91790.65	48881.08	70091.28	52460.39	65805.85

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

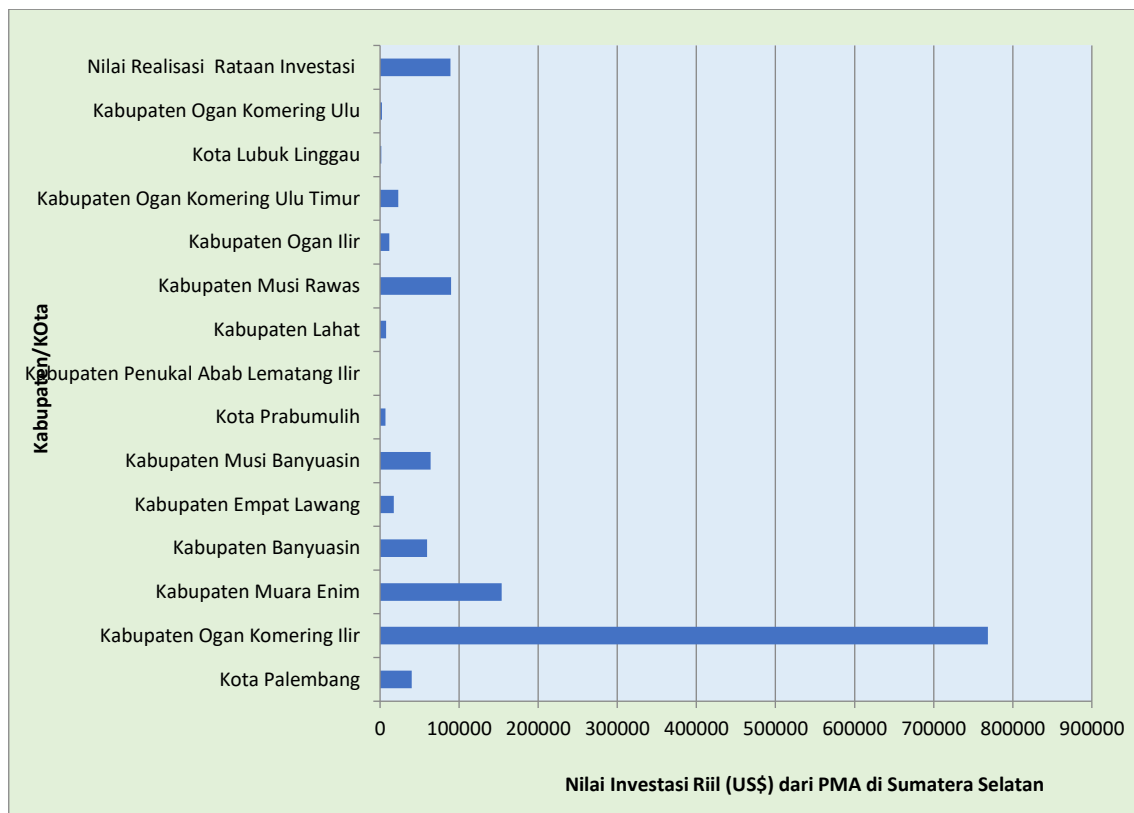


Gambar 4-10 Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)

Tabel 4-11 Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$)

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRI	TAHUN				RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	
Kota Palembang	15,536	35,063	34,298	74,953	39962.48
Kabupaten Ogan Komering Ilir	108225.5	94034.1	446481.1	2424791	768382.9
Kabupaten Muara Enim	49421.1	456336.2	46295.5	63368.8	153855.4
Kabupaten Banyuasin	71448.9	71367.3	30459.1	64340.3	59403.9
Kabupaten Empat Lawang	26663.4	3227.8	5073.1	34578.1	17385.6
Kabupaten Musi Banyuasin	111580	88420.9	13253.9	42065.7	63830.13
Kota Prabumulih	22,210	5,091	0	3	6825.975
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0
Kabupaten Lahat	20983.9	7897.1	561	331.8	7443.45
Kabupaten Musi Rawas	48007.1	170302.4	58016.6	82132.9	89614.75
Kabupaten Ogan Ilir	1062.2	36745	2346	6950	11775.8
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	10,721	81,053	0	0	22943.58
Kota Lubuk Linggau	0	6331.1	0	0	1582.775
Kabupaten Ogan Komering Ulu	0	0	8835.8	0	2208.95
Nilai Rataan Investasi PMA	34704.27	75419.2	46115.71	199536.7	88943.98

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

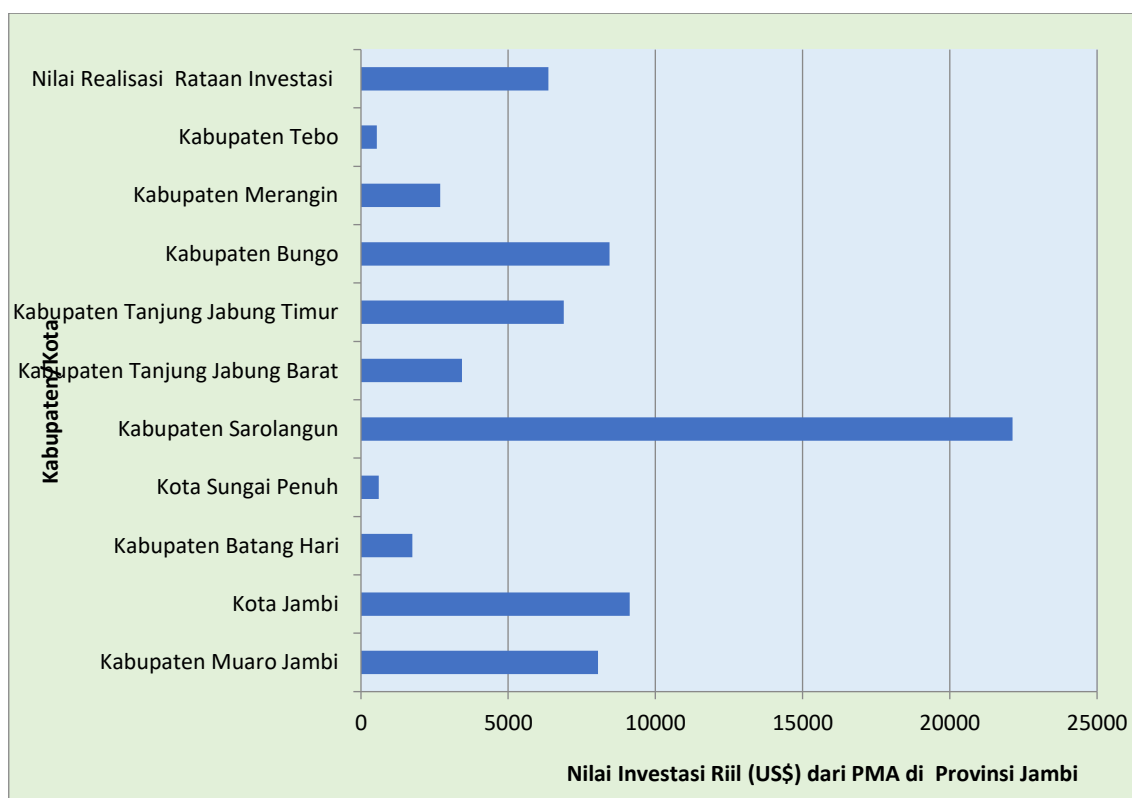


Gambar 4-11 Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)

Tabel 4-12 Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (US\$)

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRI	TAHUN				RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	
Kabupaten Muaro Jambi	43.7	0.4	32008.8	137.9	8047.7
Kota Jambi	7983.3	23869.1	193.6	4447.2	9123.3
Kabupaten Batang Hari	3,447	684	2,812	23	1741.375
Kota Sungai Penuh	1626.9	0	0	780.7	601.9
Kabupaten Sarolangun	13,880	15,550	57,325	1,742	22124.18
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,453	1,821	749	9,678	3425
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5,729	369	13,317	8,134	6887.175
Kabupaten Bungo	0	1,250	132	32,395	8444.175
Kabupaten Merangin	131	7,903	1,195	1,525	2688.35
Kabupaten Tebo	0	0	0	2,154	538.475
Nilai Rataan Investasi PMA	3429.33	5144.64	10773.17	6101.51	6362.163

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017



Gambar 4-12 Sebaran Rataan Nilai Investasi Riil di Provinsi Jambi Berdasarkan Kabupaten Kota pada Tahun 2013-2016 (US\$)

4.3. POTENSI, PRIORITAS, DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

Sebagai salah satu upaya menjangring informasi, masukan, dan tanggapan dari daerah dalam rangka perumusan peta potensi dan peluang investasi daerah sesuai dengan konsep pendekatan *bottom up*, maka dilaksanakan kegiatan *Focuss Group Discussion*

(FGD)/Diskusi Kelompok Terarah di daerah. FGD adalah suatu metode riset kualitatif, yang didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok” (Irwanto, 1988:1). Dengan perkataan lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik.

Kegiatan FGD dalam rangka perumusan peta potensi dan peluang investasi daerah diselenggarakan di masing-masing provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi) dengan fokus masing-masing kabupaten/kota yang menjadi daerah kajian di masing-masing provinsi. Kegiatan diskusi terarah ini dihadiri oleh beberapa stakeholders terkait yakni: unsur BKPM; unsur DPM-PTSP Provinsi, unsur DPM-PTSP Kabupaten/Kota kajian; unsur SKPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota kajian; serta pihak Konsultan selaku tim pelaksana pekerjaan.

Adapun uraian topik bahasan yang dapat dirumuskan dan disimpulkan dari hasil diskusi terarah di masing-masing daerah adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. FGD Kabupaten Tuban

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan dan beribukota di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara.

Sebagai daerah yang wilayahnya berada di Pesisir Utara Jawa Timur, Kabupaten Tuban tentunya memiliki potensi di sektor sumberdaya laut dan pertanian yang cukup menjanjikan. Selain itu, karena posisi geografis daerahnya yang sangat strategis di lintasan jalur Pantai Utara Pulau Jawa, maka menjadikan Kabupaten Tuban memiliki keunggulan tersendiri khususnya dari sisi kemudahan aksesibilitasnya. Potensi-potensi tersebut tentunya perlu untuk dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan tentunya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagaimana disampaikan dalam diskusi terfokus, potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Tuban sedianya cukup beragam, meliputi: Energi (Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan Energi panas bumi); Pariwisata (Pantai Boom, pantai Mangrove, Goa Ngerong, Goa Akbar dan Goa Putri Asih); Industri (Kawasan Industri Tuban); Pertanian dan Perkebunan (jenis tanaman: padi, jagung, kacang, bakau dan di Kecamatan Palang terdapat komoditas andalan daerah yaitu buah belimbing dan siwalan); Pengolahan Makanan (Pengolahan ikan asap, krupuk ikan, terasi, petis);

serta Perdagangan dan Jasa (Tuban pada tahun 2014 pernah menjadi pemasok sapi terbesar di Jawa Timur dengan 315.000 ekor/th).

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Tuban

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Tuban, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor industri “Kawasan Industri Tuban/KIT (Pembangunan Industri Pengolahan Pertanian dan Perikanan)”. Peluang investasi untuk pengembangan industri di Kawasan Industri Tuban/KIT ini telah sesuai pula dengan kebijakan *Grand Design* Investasi Jawa Timur yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

B. FGD Kabupaten Jombang

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono.

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.

Sebagai daerah yang wilayahnya berada di sekitar sentra Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang memiliki beberapa kecamatan yang berada di daerah ketinggian (pegunungan) yang sangat potensial bagi pengembangan komoditas pertanian, khususnya komoditas perkebunan. Disamping itu, potensi di sektor pariwisata juga merupakan keunggulan tersendiri yang juga dimiliki oleh Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki berbagai keindahan alam dan potensi pariwisata yang menarik. Sangat disayangkan, potensi tersebut banyak yang belum terkelola optimal karena umumnya kurang memiliki pendukung sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, sehingga menunggu adanya investasi untuk menggarapnya. Beberapa destinasi pariwisata yang menarik di Jombang diantaranya yaitu: Pemandian Sumberboto di Mojowarno, Candi Arimbi di Bareng, Sendang Made di Kudu, Kedung

Cinet di Plandaan, Kedung Sewu di Kabuh, perkebunan teh, cengkeh dan durian serta air terjun Tretes dan arung jeram (rafting) di desa Panglungan, Wonosalam. Selain itu juga terdapat wisata religi yaitu makam Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), KH. Wahid Hasyim dan KH. Hasyim Asyari di Tebuireng, Diwek, serta bangunan gereja tertua di Jawa Timur yaitu GKJW Mojowarno.

Dua sektor unggulan daerah tersebut merupakan prioritas yang saat ini tengah dikembangkan oleh Pemda Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Jombang

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Jombang, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Kawasan Panglungan-Wonosalam. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa daerah Panglungan-Wonosalam ini merupakan kawasan wisata yang memiliki keindahan alam dan atraksi wisata yang sangat beragam yang dapat dinikmati oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

C. FGD Kabupaten Semarang

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang yang dilintasi jalan negara yang menghubungkan kawasan Yogyakarta dan Surakarta dengan Kota Semarang atau lebih dikenal dengan akronim "JOGLO SEMAR", merupakan daerah yang memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian dan pariwisata.

Sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Semarang, sektor Industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang paling diandalkan Kabupaten Semarang sebagai penggerak perekonomian daerah ini. Berbagai jenis industri mulai dari skala kecil hingga besar terdapat di Kabupaten Semarang. Tercatat sejumlah 1.439 buah industri kecil dan 183 unit industri besar beroperasi di Kabupaten Semarang.

Bagian timur wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan dataran tinggi dan perbukitan, serta bagian barat wilayahnya yang berupa pegunungan (dengan puncaknya Gunung Ungaran serta Gunung Merbabu), merupakan kawasan subur yang menjadi lahan pertanian yang sangat produktif di Kabupaten Semarang. Oleh karenanya maka tidak mengherankan jika sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan oleh Kabupaten Semarang. Pertanian tanaman pangan

khususnya padi dan palawija serta tanaman hortikultura merupakan andalan utama daerah ini.

Sektor pariwisata yang juga merupakan salah satu sektor andalan disamping industri dan pertanian, menawarkan berbagai pilihan obyek wisata yang memperkaya khazanah dunia wisata regional di Jawa Tengah bahkan nasional. Tagline “Surganya Jawa Tengah” terasa sangat pas untuk menggambarkan besarnya potensi pariwisata Kabupaten Semarang. Potensi Sumber daya alam Kabupaten Semarang sangat menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepariwisataan daerah yang secara kompetitif unggul dibandingkan daerah lain.

Tercatat ada 19 obyek wisata utama yang siap untuk memanjakan wisatawan yang datang ke Kabupaten Semarang. Diantaranya lokawisata Bandungan, umbul Senjoyo Tenganan, sentra pemancingan Blater Jimbaran, pemandian dan pemancingan Muncul Banyubiru, Bukit Cinta Banyubiru, Rawa Pening, Museum Kereta Api Ambarawa, Museum Palagan Ambarawa, air terjun tujuh bidadari Sumowono, pemandian dan arena bermain alam Umbul Songo Kopeng. Selain itu ada kolam renang Sidomukti yang berada di ketinggian bukit serta air terjun Semirang yang terletak di kaki Gunung Ungaran.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Semarang

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Semarang, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Kawasan Rawa/Telogo Wening.

Danau Rawa Pening merupakan salah satu obyek wisata sekaligus sumber air penting di Kabupaten Semarang. Secara administratif dan geografis, Rawa Pening terletak di Kecamatan Banyubiru, Tuntang dan Kecamatan Bawen. Rawa Pening juga memiliki peranan penting dalam peta pertanian Kabupaten Semarang. Hal ini karena terdapat paling tidak 9 sungai yang bermuara di Rawa Pening. Banyak masyarakat memanfaatkan Rawa Pening sebagai sumber kehidupan, khususnya untuk sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.

D. FGD Kabupaten Rembang

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan daerah yang memiliki potensi di sektor perikanan, industri, pertanian, dan perkebunan. Komoditi utama sektor tersebut meliputi perikanan tangkap, jagung, tebu, dan industri gula tumbu. Karena terletak di sepanjang pesisir pantai, dan tersedianya Pelabuhan Lasem dan Pelabuhan

Rembang, sektor perikanan tangkap Kabupaten Rembang sangat berkembang. Sejak tahun 2004, Rembang telah menjadi salah satu pusat perikanan tangkap di Jawa Tengah. Sementara komoditi jagung dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar dari lahan seluas 23,343.00 ha. Rembang juga merupakan salah satu sentra tebu terbesar di Jawa Tengah. Hasil panen tebu tersebut didatangkan dari perkebunan rakyat yang mencapai luas lahan 3,871.00 ha. Pembangunan pabrik gula tumbu Kabupaten Rembang yang berlokasi di Kecamatan Pamotan, dengan hasil produksi tebu yang mendukung Industri Gula Tumbu di kabupaten ini juga menjadi salah satu komoditi unggulan Rembang.

Belakangan ini industri garam mulai banyak dilirik masyarakat, terbukti dengan adanya beberapa mitra bisnis di sektor ini, seperti UD. Sukamaju dan UD. Ndat Ndat Ria di Kecamatan Kaliori. Dalam konteks yang lebih luas, industri pengolahan air laut yang salah satu produknya adalah berupa garam serta mineral-mineral lainnya, merupakan jenis industri yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Rembang, mengingat kabupaten ini berada di wilayah pesisir.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Rembang

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Rembang, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor industri khususnya pengembangan industri pengolahan air laut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kabupaten Rembang merupakan daerah yang berada di kawasan pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 63,5 km. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika potensi pengolahan air laut sebagai bahan baku utama industri pengolahan sangat melimpah di kabupaten ini.

E. FGD Kota Palembang

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kota Palembang

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan. Kota yang dihuni sekitar 1,8 juta orang ini, belakangan tengah menggeliat pembangunannya diantaranya seperti pembangunan LRT (kereta api layang), dan rencana pembangunan sirkuit Motor GP di Kawasan Jakabaring dan sirkuit F1 di Kawasan Tanjung Api-Api.

Secara kewilayahan, pada dasarnya Kota Palembang memiliki beragam potensi daerah yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan optimal. Selain sektor jasa, sektor industri dan sektor pariwisata merupakan sektor-sektor ekonomi utama daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Kawasan Industri Gandus, Sebrang Ulu I, dan Sukarami adalah kawasan-kawasan industri terpadu yang dimiliki oleh Kota Palembang dan telah ada dan berkembang cukup lama. Berbagai jenis industri pengolahan skala besar beroperasi di kawasan-kawasan tersebut.

Sejak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVI pada tahun 2004, Kota Palembang membangun suatu kawasan pusat olahraga terpadu (*Sport Center*) di daerah Jakabaring. Di Kawasan Jakabaring Sport Center ini berdiri Stadion Gelora Sriwijaya dengan kapasitas 40.000 tempat duduk. Berbagai even nasional dan internasional pernah diselenggarakan di stadion ini. Selain Stadion Sriwijaya, saat ini di kawasan Jakabaring telah tersedia pula fasilitas-fasilitas lainnya seperti: Wisma Atlet, Venue tambahan seperti lapangan Atletik, Aquatic Center, Volley Beach, Ski Air, Panjat Tebing dan Lapangan Tembak terbesar se-Asia.

Di sektor pariwisata, Kota Palembang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kota Air (*Waterfront City*). Hal ini mengingat posisi geografis Kota Palembang yang dibelah oleh sungai terpanjang di Pulau Sumatera yaitu Sungai Musi. Kawasan-kawasan yang berada di sekitar pinggiran Sungai Musi merupakan kawasan yang sangat potensial untuk ditata dan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Selain pengembangan *Waterfront City*, pengembangan pariwisata juga potensial dilakukan dengan pengembangan wisata Pulau Kemaro, Hutan Kota Puntikayu, Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kota Palembang

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kota Palembang, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Kawasan Pulau Kemaro. Pulau Kemaro merupakan sebuah Delta kecil di Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemaro adalah tempat rekreasi yg terkenal karena di pulau ini terdapat sebuah vihara cina (klenteng Hok Tjing Rio). Di Pulau Kemaro ini juga terdapat kuil Buddha yang sering dikunjungi umat Buddha untuk berdoa atau berziarah. Di sana juga sering diselenggarakan even Cap Go Meh setiap Tahun Baru Imlek. Selain itu di Pulau Kemaro juga terdapat makam dari putri Palembang, Siti Fatimah. Bangunan bersejarah serta even-even budaya yang ada di Pulau Kemaro tersebut merupakan atraksi wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.

F. FGD Kabupaten Banyuasin

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Banyuasin

Batas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mengelilingi 2/3 wilayah Kota Palembang, menjadikan Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Banyak kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah Banyuasin persis berbatasan dengan wilayah Kota Palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan kota tersebut, seperti sarana LRT, sekolah, dermaga pelabuhan tanjung api-api, dan sarana lainnya.

Secara umum sektor pertanian di Banyuasin merupakan sektor yang sangat potensial karena kabupaten ini merupakan lumbung padi Sumatera Selatan dan penyumbang sekitar 2 juta ton beras untuk Sumatera Selatan pada tahun 2016. Selain pertanian, sektor perkebunan juga merupakan sektor andalan daerah ini. Komoditi perkebunan yang banyak dimanfaatkan berupa perkebunan kelapa sawit, karet dan di beberapa tempat oleh penduduk ditanami komoditi kelapa. Areal pemanfaatan perkebunan besar di Banyuasin tercatat seluas 127.215,63 Ha atau 8,92 % dari total luas wilayah kabupaten.

Disamping sumber daya alam yang melimpah dan dapat ditumbuhkembangkan ada pula sektor yang sangat potensial untuk mendapat perhatian dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin yaitu objek dan daya tarik wisata, dimulai dari danau yang sangat indah, perkebunan karet dan sawit yang membentang luas, kawasan Taman Nasional Sembilang, dan atraksi budaya khas daerah ini. Namun disayangkan potensi sektor pariwisata ini belum termanfaatkan secara optimal karena belum didukung dengan ketersediaan sarana-prasarana penunjang pariwisata yang memadai.

Di Kabupaten Banyuasin terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api – Api yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Tanjung Api-Api difokuskan untuk kegiatan utama industri karet, kelapa sawit, dan petrokimia. Saat ini KEK Tanjung Api-Api dalam tahap pengadaan lahan tahap I. Pada tahun ini, dilakukan penyusunan DED untuk infrastruktur dalam kawasan. Adapun dukungan dari pemerintah adalah peningkatan status jalan Palembang-Tanjung Api-Api menjadi Jalan Nasional, Pembangunan Jalur Kereta Api dan Double Track, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat, serta perencanaan untuk Jalan Tol Tanjung Api-Api Palembang. Keberadaan KEK Tanjung Api-Api ini merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Banyuasin

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Banyuasin, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor infrastruktur yaitu pembangunan Pelabuhan Logistik Tanjung Api-Api. Pelabuhan Logistik Tanjung Api-Api ini direncanakan berfungsi sebagai Pelabuhan Logistik Skala Internasional dengan kapasitas daya tampung kapal logistik hingga 5.000 DWT (melayani kapal-kapal kargo Internasional). Dalam jangka panjang pelabuhan ini direncanakan sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru Palembang (Estimasi volume bongkar-muat sebesar 7,2 juta ton/th).

G. FGD Kabupaten Bungo

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo yang berada di bagian barat Provinsi Jambi, memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu potensi wisata alam terutama water boom didukung dengan pengembangan potensi air terjun Tagan Kiri, Tujuh Tingkat, sumber air panas, serta Pulau Cinto juga merupakan potensi daerah yang menjanjikan.

Potensi daerah yang menjadi andalan dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo adalah potensi sumber daya pertanian dan perkebunan. Komoditas tanaman pangan berupa padi dan palawija telah dikenal sejak lama dan terus berkembang dengan baik. Rata rata produksi padi per tahun mencapai 35.290 ton, kedelai 292,2 ton, kacang tanah 776,5 ton dan jagung 4.436,8 ton. Dengan penambahan lahan yang mencukupi dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai, maka produksi masing-masing komoditas tersebut masih dapat ditingkatkan.

Pada sisi lain perkebunan yang menjadi primadona adalah karet. Selain karet, tanaman kelapa sawit juga menjadi jenis yang diminati pengembangannya. Perkebunan sejak lama menjadi salah satu sektor penghasil utama masyarakat, kurang lebih 55% penggunaan wilayah Kabupaten Bungo dijadikan perkebunan, baik perkebunan karet maupun kelapa sawit. Kehadiran perkebunan besar mempunyai manfaat yang cukup berarti dalam memacu produksi perkebunan.

Kabupaten Bungo memiliki potensi sumber daya pertambangan yang meliputi batu bara, emas, minyak bumi, bijih besi, granit dan pasir kuarsa. Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki kualitas cukup baik dengan kandungan kalori antara 5.000-7.300 kalori. Saat ini bahan tambang batu bara sudah diusahakan oleh

beberapa perusahaan, selain itu masih ada perusahaan lain yang tengah dalam proses perizinan.

Potensi emas di Kabupaten Bungo terdiri dari dua sumber yaitu emas primer dan emas sekunder. Potensi ini tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Rantau Pandan yang memiliki cadangan emas sebesar 14.400 kg, Pelepat 87.000 kg, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 25.000 kg, Kecamatan Tanah Sepenggal 10.000 kg, Kecamatan Pelepat Ilir 13.000 kg, serta Kecamatan Jujuhan 11.000 kg.

Kabupaten Bungo juga memiliki indikasi cadangan minyak bumi yang tersimpan di kedalaman 500-800 meter pada beberapa kecamatan. Kecamatan–Kecamatan tersebut antara lain Jujuhan memiliki 4 titik bor, Rantau Pandan 4 titik bor, Tanah Sepenggal 2 titik bor, Tanah Tumbuh 3 titik bor dan Pasar Muara Bungo 2 titik bor yang merupakan potensi untuk dieksploitasi.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Bungo

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Bungo, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor industri dan sektor pariwisata. Peluang investasi di sektor industri adalah berupa Pengembangan Industri Pengolahan Hilirisasi Karet dan Sawit. Sedangkan peluang investasi di sektor pariwisata adalah berupa pengelolaan destinasi wisata alam dan pembangunan homestay.

H. FGD Kabupaten Sarolangun

Gambaran Umum Potensi Unggulan Kabupaten Sarolangun

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Sarolangun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Struktur perekonomian Sarolangun didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Kontributor terbesar selanjutnya adalah sektor migas, pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Sektor-sektor tersebutlah yang menjadi potensi utama perekonomian di Kabupaten Sarolangun.

Di sektor perkebunan, Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas areal perkebunan dan jumlah produksi yang cukup besar. Usaha perkebunan lain yang juga berkembang di Kabupaten Sarolangun adalah Kopi, Lada, kelapa, Cassiavera, Pinang, Kemiri, Aren dan tebu. Dengan besarnya potensi perkebunan, ditunjang dengan tersedianya bahan baku yang berkelanjutan, infrastruktur dengan kondisi baik serta lokasi yang strategis diharapkan khususnya untuk komoditi karet dan kelapa

sawit dapat mendorong minat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan kawasan industri pengolahan sampai dengan produk hasil turunannya (industri hulu sampai industri hilir) di Kabupaten Sarolangun.

Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Sarolangun terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai dan danau). Bidang usaha perikanan yang berkembang di Kabupaten Sarolangun meliputi jenis usaha perikanan darat terdiri dari usaha kolam dan keramba dan perairan umum memiliki prospek ekonomis.

Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Sarolangun diantaranya adalah Minyak Bumi (Bahan tambang minyak bumi di Kecamatan Sarolangun yang telah dieksploitasi oleh PT. Bina Wahana Petrindo (BWP) meruap sebanyak 4 (empat) sumur dengan jumlah produksi 1.000-2.000 barel/hari. Sedangkan di Kecamatan Limun saat ini sedang dieksploitasi oleh PT. Petro China dengan kapasitas produksi sebesar 120 juta barel), Batu Bara (potensi tersebar di Kecamatan Mandiangin, Pauh, Limun dan Batang Asai), Emas (terdapat disepanjang alur sungai di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun), Biji Besi (terdapat di Kecamatan Batang Asai yang beralokasi di Sungai Salak Bukit Rayo dan di Kecamatan Limun yang beralokasi di Sungai Tuboh), Seng (*Zinc*) (terdapat disungai Tuboh Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai).

Kabupaten Sarolangun juga memiliki potensi objek wisata yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Sebagian kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terdapat objek wisata yang menunggu pembenahan. Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun sangat beragam dan menjanjikan. Saat ini, Kabupaten Sarolangun telah mempunyai 7 *site plan* objek wisata.

Hasil FGD Mengenai Peluang Investasi Kabupaten Sarolangun

Dari hasil pelaksanaan diskusi terarah untuk merumuskan peluang investasi daerah di Kabupaten Sarolangun, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang paling prospektif dan siap untuk ditawarkan kepada investor adalah investasi di sektor industri dan sektor pariwisata. Peluang investasi di sektor industri adalah berupa Pengembangan industri pengolahan Karet dan Kelapa Sawit. Sedangkan peluang investasi di sektor pariwisata adalah Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort.

Secara singkat uraian hasil identifikasi dan pembahasan melalui forum FGD di masing-masing daerah mengenai potensi, prioritas, dan peluang investasi daerah adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4-13 Jenis Kegiatan Investasi Menurut Status Investasi dan Kabupaten/Kota Kajian Tahun 2017

NO	STATUS INVESTASI	PROVINSI JAWA TIMUR		PROVINSI JAWA TENGAH		PROVINSI SUMATERA SELATAN		PROVINSI JAMBI	
		KAB. TUBAN	KAB. JOMBANG	KAB. SEMARANG	KAB. REMBANG	KOTA PALEMBANG	KAB. BANYUASIN	KAB. BUNGO	KAB. SAROLANGUN
A.	Potensi	1. Energi (Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan energi panas bumi)	1. Pariwisata (Pengembangan destinasi wisata alam (air terjun, goa, taman kehati, outbound) wisata budaya (Kampung Djawi), dan wisata religi (Kawasan makam Gusdur))	1. Kawasan Industri (Bawen, Susukan, Kaliwungu)	1. Industri Pengolahan Air Laut	1. Pariwisata (40 obyek wisata meliputi: obyek wisata alam, wisata sejarah/budaya, wisata minat khusus, dan wisata baru)	1. KEK Tanjung Api-Api (Pengembangan kawasan industri, pergudangan, dan pembangunan pelabuhan logistik)	1. Pengembangan industri pengolahan Kelapa Sawit	1. Pengembangan industri pengolahan Karet
		2. Pariwisata (Pantai Boom, pantai Mangrove, Goa Ngerong, Goa Akbar dan Goa Putri Asih)	2. Pengembangan komoditas Kopi Jombang (Ekselsa)	2. Pariwisata (Tlogo Wening, Senjoyo, Jateng Park)	2. Industri Pengolahan Garam	2. Pengembangan Kawasan Sport Center Jakabaring	2. Pariwisata (TN Sembilang, Perkampungan Nelayan Sungsang, Pulau Gemampo, Bom Berlian, Hutan Lindung Lebong Hitam, Pulau Pejaye, Tugu Sejarah Silk Air)	2. Pengembangan industri pengolahan Karet	2. Pengembangan industri pengolahan Kelapa Sawit
		3. Industri Perikanan (Kawasan Industri Tuban)	3. Pengolahan kayu meubel		3. Pergudangan	3. Kawasan Industri (Gandus, Sebrang Ulu I, Sukarami)	3. Pertambangan (Minyak dan Gas Bumi, Batubara, Gambut, Lempung, Kaolin, Pasir Kuarsa)	3. Pabrik pengolahan kayu	3. Pertanian tanaman pangan (sawah)
		4. Pertanian dan Perkebunan (jenis tanaman :	4. Industri kerajinan manik-manik dan kaca				4. Infrastruktur (Pembangunan Rel Kereta double	4. Pariwisata (Pengelolaan destinasi wisata	4. Pertambangan dan pengolahan

NO	STATUS INVESTASI	PROVINSI JAWA TIMUR		PROVINSI JAWA TENGAH		PROVINSI SUMATERA SELATAN		PROVINSI JAMBI	
		KAB. TUBAN	KAB. JOMBANG	KAB. SEMARANG	KAB. REMBANG	KOTA PALEMBANG	KAB. BANYUASIN	KAB. BUNGO	KAB. SAROLANGUN
		padi, jagung, kacang, bakau dan komoditas andalan daerah yaitu buah belimbing dan siwalan)					track Palembang-Tj. Api-Api)	alam dan pembangunan homestay)	Batu Kapur (Semen)
	5.	Pengolahan Makanan (Pengolahan ikan asap, krupuk ikan, terasi, petis)					5. Pengembangan perikanan (Pembangunan tambak ikan dan TPI)	5. Pengembangan kawasan industri	5. Industri kerajinan Batu mulia (Batu alam)
	6.	Perdagangan dan Jasa					6. Reklamasi Tj. Carat	6. Bidang pendidikan	6. Pengembangan pariwisata (Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort)
							7. Pembangunan pabrik pengolahan CPO	7. Pengembangan perkebunan Coklat	7. Pembangunan PLTA/PLTU
							8. Pembangunan kawasan permukiman di sekitar Tj. Api-Api	8. Budidaya ternak Sapi	8. Perkebunan Buah Naga
								9. Budidaya perikanan unggulan	
								10. Pertambangan emas dan batubara	

NO	STATUS INVESTASI	PROVINSI JAWA TIMUR KAB. TUBAN	PROVINSI JAWA TIMUR KAB. JOMBANG	PROVINSI JAWA TENGAH KAB. SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH KAB. REMBANG	PROVINSI SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	PROVINSI SUMATERA SELATAN KAB. BANYUASIN	PROVINSI JAMBI KAB. BUNGO	PROVINSI JAMBI KAB. SAROLANGUN
B.	Prioritas								
		1. Industri Perikanan (Kawasan Industri Tuban)	1. Pariwisata (Pengembangan destinasi wisata alam (air terjun, goa, taman kehati, outbound) wisata budaya (Kampung Djawi), dan wisata religi (Kawasan makam Gusdur))	1. Kawasan Industri (Bawen, Susukan, Kaliwungu)	1. Industri Pengolahan Air Laut	1. Pariwisata (Pengembangan destinasi wisata sekitar Sungai Musi dan Pulau Kemaro)	1. KEK Tanjung Api-Api (Pengembangan kawasan industri, pergudangan, dan pembangunan pelabuhan logistik)	1. Pengembangan industri pengolahan Karet	1. Pengembangan industri pengolahan Karet
		2. Pengolahan Makanan (Pengolahan ikan asap, krupuk ikan, terasi, petis)	2. Pengembangan komoditas Kopi Jombang	2. Pariwisata (Tlogo Wening, Senjoyo, Jateng Park)	2. Industri Pengolahan Garam	2. Pengembangan Kawasan Sport Center Jakabaring	2. Pariwisata (TN Sembilang, Perkampungan Nelayan Sungsang, Pulau Gemampo, Bom Berlian, Hutan Lindung Lebong Hitam, Pulau Pejaye, Tugu Sejarah Silk Air)	2. Pengembangan industri pengolahan Kelapa Sawit	2. Pengembangan industri pengolahan Kelapa Sawit
								3. Pariwisata (Pengelolaan destinasi wisata alam dan pembangunan homestay)	3. Pengembangan pariwisata (Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort)
									4. Pertambangan dan pengolahan

NO	STATUS INVESTASI	PROVINSI JAWA TIMUR KAB. TUBAN	KAB. JOMBANG	PROVINSI JAWA TENGAH KAB. SEMARANG	KAB. REMBANG	PROVINSI SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	KAB. BANYUASIN	PROVINSI JAMBI KAB. BUNGO	KAB. SAROLANGUN
									Batu Kapur (Semen)
C.	Peluang								
		1. Pengembangan Industri Perikanan	1. Pengembangan komoditas Kopi Jombang	1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening	1. Industri Pengolahan Garam	1. Pengembangan Kawasan Sport Center Jakabaring	1. KEK Tanjung Api-Api (Pengembangan kawasan industri, pergudangan, dan pembangunan pelabuhan logistik)	1. Pengembangan Industri Pengolahan Hilirisasi Karet dan Sawit	1. Pengembangan industri pengolahan Karet dan Kelapa Sawit
								2. Pariwisata (Pengelolaan destinasi wisata alam dan pembangunan homestay)	2. Pengembangan pariwisata (Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort)

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-14 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Tuban

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Kawasan Industri Tuban/ KIT	Ada di Tuban dan sekitar Tuban	Ada banyak lulusan SMU/ SMK dan adanya kebijakan afirmatif dari Bupati untuk menggunkan SDM lokal	Prasarana dan sarana di dalam dan sekitar KIT sudah tersedia (listrik, air bersih, telekomunikasi, gas, jalan, pelabuhan, bandara, dll)	Adanya captive market bagi produk yang diproduksi oleh industri di KIT	Adanya captive market bagi produk yang diproduksi oleh industri di KIT baik untuk pasar domestik maupun luar negeri	Di dalam KIT sudah disediakan kawasan untuk UKM	- Sudah memiliki izin prinsip dan izin usaha kawasan industri (IUKI) - Masterplan pengembangan (zonasi kawasan) - Sudah ada aturan tentang ketenagakerjaan	Sudah ada kajian AMDAL	Sudah dikuasai oleh pengelola kawasan dng total luas kaw. 233 Ha (lahan tersedia 140 Ha)	 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Kawasan Industri Tuban/ KIT	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-15 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Jombang

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan Kawasan wisata Panglungan	Sudah tersedia amenity resources berupa alam pegunungan yang indah dan sejuk dan dekat dengan obyek wisata lainnya	SDM yang berkompeten perlu diperbanyak terutama lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan	Sarana dan prasarana sudah ada sampai di lokasi, hanya jalan dari dan menuju lokasi relative sempit (hanya untuk bus ¾)	Wisata terpadu masih diminati baik saat ini maupun jangka panjang	Daerah-daerah di sekitar Jombang yang merupakan daerah perindustrian menjadi target pasar domestik, sedangkan pasar luar negeri perlu promosi yang gencar	Banyak melibatkan UKM mulai dari homestay, kuliner, souvenir dan oleh-oleh, dll.	Kawasan Panglungan merupakan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk wisata (sesuai ketentuan RTRW Kab.)	Hotel, resort, restoran yang akan dibangun perlu memperhatikan ketentuan KDB juga aspek-aspek konservasi lingkungan. Disarankan untuk dibangun arboretum	Tersedia lahan milik PEMDA/ BUMD seluas 97 Ha, yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga/dunia usaha	 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan Kawasan wisata Panglungan	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-16 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Semarang

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria									Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan		Perkiraan Investasi (Milyar Rp)
1.	Pengembangan kawasan wisata Tlogo Wening (Bukit Cinta)	Sudah tersedia amenity resources berupa alam bukit yang indah, sejuk & dekat dengan obyek wisata lainnya seperti Rawa Pening dan Banaran.	SDM yang berkompeten dari lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan sudah banyak di Kabupaten Semarang	Sarana dan prasarana sudah ada sampai di lokasi bahkan dilalui dan dibelah jalan tol. Akses dari bandara dan pelabuhan Semarang juga dekat.	Saat ini wisata alam, apalagi mudah aksesnya dan amenity resource yang sangat baik banyak diminati wisatawan lokal maupun mancanegara	Saat ini kaw. wisata Tlogo Wening sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara	Banyak melibatkan UKM mulai dari homestay, kuliner, souvenir dan oleh-oleh, dll.	Kawasan Tlogo Wening saat ini sudah merupakan kawasan wisata (sesuai ketentuan RTRW Kab.)	Hotel, resort, restoran yang akan dibangun perlu memperhatikan ketentuan KDB juga aspek-aspek konservasi lingkungan	Tersedia lahan milik PEMDA/ BUMD seluas 45 hektar berada di pinggir tebing dan menghadap Rawa Pening yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga/dunia usaha	 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria									Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan		Perkiraan Investasi (Milyar Rp)
1.	Pengembangan kawasan wisata Tlogo Wening (Bukit Cinta)	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-17 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Rembang

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan Stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Industri Pengolahan Air Laut	Berdasarkan hasil analisis sementara, peluang investasi bagi pengembangan industri pengolahan air laut belum layak untuk ditawarkan										Kurang layak untuk ditawarkan, karena nilai investasi terlalu besar dan pipa BBG untuk pemasok energi belum ada

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL (USULAN BARU)												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang	Tersedia di Rembang dan sekitarnya	Ada banyak lulusan SMU/ SMK dan adanya kebijakan afirmatif dari Gubernur dan Bupati untuk menggunkan SDM lokal	Sarana dan prasarana berupa jalan menuju lokasi dan dermaga sudah ada, namun prasarana penunjang lainnya sedang dan akan dibangun	Dalam jangka panjang direncanakan sebagai pelabuhan penunjang bagi Pelab. Tj. Emas dan Tj. Perak (Estimasi vol. bongkar-muat 40 ribu ton/bln)	Direncanakan sebagai Pelabuhan Logistik skala Internasional kapasitas 3000 DWT (Melayani kapal-kapal kargo Internasional)	Sedikit keterlibatan UKM pada tahap konstruksi	Lokasi saat ini masuk dalam kawasan peruntukan pelabuhan (sesuai RTRW Kab.) Sudah ada kajian Masterplan pengembangan	Pelabuhan yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan standar konstruksi bangunan dan aspek lingkungan.	Luas lahan kaw. pelabuhan ± 400 Ha, memanjang ± 8 km. siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga/dunia usaha	± 190 M (tahap awal konstruksi)	Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-18 Analisis Peluang Investasi di Kota Palembang

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan kawasan wisata Pulau Kemaro	Sudah tersedia amenity resources berupa pulau kecil di tengah Sungai Musi yang dekat dengan pusat kota dan obyek wisata lainnya	SDM yang berkompeten dari lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan sudah banyak di Kota Palembang	Sarana dan prasarana sudah ada sampai di lokasi. Akses dari Pelabuhan Palembang dekat. Namun akses berupa perahu/kapal pesiar dari dan ke pulau saat ini belum banyak.	Saat ini wisata alam dan budaya, apalagi mudah aksesnya dan amenity resource yang sangat baik, banyak diminati wisatawan lokal & mancanegara. Pulau Kemaro adalah obyek wisata yang unik di tengah Sungai Musi	Saat ini Pulau Kemaro sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Didukung oleh penerbangan dari dan ke Palembang, baik domestik maupun luar negeri sudah banyak.	Banyak melibatkan UKM mulai dari homestay, kuliner, souvenir dan oleh-oleh, dll.	Kawasan Pulau Kemaro saat ini sudah merupakan kawasan wisata (sesuai RTRW Kota) dan sudah ada kajian Masterplan dan DED.	Hotel, resort, restoran yang akan dibangun perlu memperhatikan ketentuan KDB juga aspek-aspek konservasi lingkungan.	Tersedia lahan milik PEMDA/BUMD seluas 10 Ha, berada di pulau tersebut yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga/dunia usaha	200 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan kawasan wisata Pulau Kemaro	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-19 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Banyuasin

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pembangunan Industri Pakan Ternak	Ada di Banyuasin dan sekitarnya (Banyuasin merupakan lumbung padi dan palawija di Sumsel)	SDM lokal yang kompeten level buruh dan manajer cukup tersedia	Sarana dan prasarana listrik, telekomunikasi sudah ada (dilalui oleh jalan nasional, provinsi dan kabupaten)	Saat ini peluang pasar bagi produk pakan ternak masih cukup terbuka hingga jangka panjang	Captive market produk pakan ternak untuk pasar nasional maupun internasional masih cukup besar	Kerjasama dan pelibatan UKM dan pengusaha besar sudah diafirmasi dalam kebijakan Pemda	Kawasan bagi pengembangan industri tersedia dalam dokumen tata ruang.	Industri yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan standar aspek lingkungan	Luas dan status lahan belum terkonfirmasi	 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pembangunan Industri Pakan Ternak	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Tidak Mendukung	-	Belum Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-20 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Bungo

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan Industri Pengolahan Hilirisasi Karet dan Sawit	Tersedia di Bungo dan sekitarnya	SDM lokal yang kompeten level buruh dan manajer cukup tersedia	Sarana dan prasarana sudah ada sampai di lokasi (dilalui jalan Nasional dan kabupaten)	Saat ini peluang pasar bagi produk olahan Karet dan Sawit masih cukup terbuka hingga jangka panjang	Captive market produk olahan Karet dan Sawit baik untuk pasar nasional maupun internasional masih cukup besar	Kerjasama dan pelibatan UKM dan pengusaha besar sudah diafirmasi dalam kebijakan Pemda	Kawasan merupakan kawasan budidaya yang diperuntukan perkebunan	Industri yang akan dibangun harus sesuai dengan ketentuan standar aspek lingkungan	Tersedia lahan seluas ± 25 Ha, di Kec. Jujuhan, status milik masyarakat	Industri sawit 300 M Industri karet 200 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan Industri Pengolahan Hilirisasi Karet dan Sawit	Kapasitas dan kontinuitas suplay bahan baku olahan belum terkonfirmasi	Mendukung	Tidak tersedia fasilitas pelabuhan skala besar sebagai terminal logistik	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Belum terkonfirmasi	Mendukung	Belum Layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
2.	Pariwisata (Pengelolaan destinasi wisata alam dan pembangunan homestay)	Sudah tersedia amenity resources berupa panorama alam dan sungai	SDM yang berkompeten dari lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan kurang tersedia di Kab. Bungo	Sarana dan prasarana sudah ada jalan aspal hingga menuju lokasi, namun fasilitas penunjang masih terbatas	Saat ini wisata alam, apalagi mudah aksesnya dan amenity resource yang sangat baik, banyak diminati.	Saat ini objek wisata Lubuk Beringin sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik, kedepan diharapkan dapat menarik wisman.	Banyak melibatkan UKM mulai dari kuliner, souvenir dan oleh-oleh, dll.	Kawasan Lubuk Beringin saat ini sudah merupakan kawasan wisata (sesuai RTRW)	Fasilitas yang akan dibangun perlu memperhatikan ketentuan KDB juga aspek-aspek konservasi lingkungan.	Tersedia lahan seluas ± 25.000 m ² , di Ds. Lubuk Beringin, status milik Desa (Siap Dikerjasamakan dengan phak ketiga)	20 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
2.	Pariwisata (Pengelolaan destinasi wisata alam dan pembangunan homestay)	Perlu pengembangan keragaman dan keunikan daya tarik wisata	kurang mendukung	Walaupun jalan telah tersedia hingga lokasi namun jaraknya sangat jauh dari pusat kota	Masih mengandalkan wisnus lokal dan sifat kunjungannya musiman	Kunjungan wisatawan hanya pada momen tertentu (wisnus lokal)	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Belum layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Tabel 4-21 Analisis Peluang Investasi di Kabupaten Sarolangun

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan industri pengolahan Karet dan Kelapa Sawit	Tersedia di Sarolangun dan sekitarnya	SDM lokal yang kompeten masih terbatas namun dari sisi kebijakan afirmatif dari Pemda untuk menggunkan SDM lokal sudah ada	Sarana dan prasarana sudah ada sampai di Lokasi (dilalui jalan Nasional)	Saat ini peluang pasar bagi produk olahan Karet dan Sawit masih cukup terbuka hingga jangka panjang	Captive market produk olahan Karet dan Sawit baik untuk pasar nasional maupun internasional masih cukup besar	Kerjasama dan pelibatan UKM dan Pengusaha besar sudah diafirmasi dalam kebijakan Pemda	Kawasan merupakan kawasan budidaya yang diperuntukan perkebunan (sesuai RTRW).	Industri yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan standar aspek lingkungan	Lahan tersedia di 2 Kecamatan, (Pauh dan Mandiangin), status milik masyarakat	Industri karet ± 50 M Industri sawit ± 50 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersediaan bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersediaan dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
1.	Pengembangan industri pengolahan Karet dan Kelapa Sawit	Kapasitas dan kontinuitas suplay bahan baku olahan belum terkonfirmasi	Mendukung	Tidak tersedia fasilitas pelabuhan skala besar sebagai terminal logistik	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Belum terkonfirmasi	Mendukung	Belum layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

HASIL ANALISIS SEMENTARA												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
2.	Pengembangan pariwisata (Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort)	Daya tarik wisata berupa keindahan panorama alam, khususnya fenomena Goa Karst yang cukup panjang	SDM yang Berkompeten dari lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan masih terbatas di Kab. Sarolangun	Sarana dan prasarana khususnya akses jalan menuju lokasi dan fasilitas penunjang masih sangat minim	Saat ini wisata alam banyak Diminati wisatawan lokal maupun mancanegara.	Saat ini objek wisata Batang Asai baru dikunjungi oleh wisatawan domestik saja, dan kunjungannya masih minim.	Banyak melibatkan UKM mulai dari kuliner, souvenir dan oleh-oleh, dll.	Kawasan Batang Asai saat ini sudah merupakan kawasan wisata (sesuai RTRW)	Fasilitas yang akan dibangun perlu memperhatikan ketentuan KDB juga aspek-aspek konservasi lingkungan.	Belum ada kejelasan luas lahan, (Lahan berada di kawasan Hutan Adat)	 M	-

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL												
No	Obyek yang Ditawarkan	Kriteria										Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor
		Ketersedian bahan baku	Ketersediaan SDM yang kompeten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Pasar Dalam Negeri dan Luar negeri	Keterlibatan stakeholder UKM dan Pengusaha Besar	Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan	Aspek lingkungan	Ketersedian dan status dan kepemilikan lahan	Perkiraan Investasi (Milyar Rp)	
2.	Pengembangan pariwisata (Pengelolaan destinasi Goa Alam dan pembangunan resort)	Mendukung	Kurang mendukung	Kurang mendukung	Masih mengandalkan wisnus lokal dan sifat kunjungannya musiman	Kunjungan wisatawan hanya pada momen tertentu (wisnus lokal)	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Belum terkonfirmasi	-	Belum layak untuk ditawarkan kepada investor

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

4.4. PELUANG INVESTASI DAERAH TAHUN 2017

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa penentuan peluang investasi tahun 2017 ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dari proses FGD di masing-masing daerah kajian yang ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk melihat kesiapan peluang investasi yang ditetapkan berdasarkan 9 (sembilan) kriteria penilaian kelayakan investasi. Berikut diuraikan masing-masing peluang investasi yang siap ditawarkan di setiap daerah berdasarkan hasil analisis dan verifikasi faktual lapangan.

4.4.1. Peluang Investasi Kabupaten Jombang

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Jombang adalah berupa kegiatan **Pengembangan Kawasan Wisata Panglungan di Kecamatan Wonosalam**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Jombang ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Kabupaten Jombang merupakan daerah yang terkenal dengan julukan kota santri dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang berdiri di kabupaten ini. Kabupaten yang memiliki moto “Jombang Beriman” dengan artian Jombang Bersih Indah dan Nyaman ini juga banyak digadangkan dengan semboyan “*The Heart of East Java*” serta *branding* wisata “*Jombang Friendly and Religious*”.

Kabupaten Jombang pada dasarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Jombang sangat bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan serta perkebunan. Kabupaten Jombang juga memiliki panorama alam yang indah dan berbagai potensi objek wisata yang menarik.

Wonosalam adalah salah satu kecamatan yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Jombang. Daerah Kecamatan Wonosalam berada di dataran tinggi dengan ketinggian 300-700 mdpl. Kecamatan Wonosalam berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Berada di daerah dataran tinggi, Kecamatan Wonosalam kaya akan keanekaragaman hayati dan terkenal dengan buah Durian Bido-nya. Kecamatan Wonosalam memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya dan masih tergolong alami.

Dalam bidang pertanian dan perkebunan, Kecamatan Wonosalam yang terletak di lereng Gunung Anjasmara kaya akan produk unggulan hasil bumi seperti cengkeh, salak, pisang, kakao dan durian bido yang terkenal cita rasanya. Pada akhir tahun dan awal tahun biasanya adalah puncak panen raya untuk beberapa produk unggulan seperti durian dan rambutan. Dalam bidang peternakan Kecamatan Wonosalam juga terkenal dengan potensi kambing etawa, sapi perah dan madu Wonosalam.



Gambar 4-13 Daya Tarik Wisata Panglungan-Wonosalam

Kecamatan Wonosalam memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa berupa potensi wisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan produk unggulan hasil kreativitas warga masyarakat. Selain menyimpan keanekaragaman hayati, Kecamatan Wonosalam juga menyimpan 48 titik mata air yang sangat penting bagi Kali Brantas. Beberapa potensi wisata yang ada di Kecamatan Wonosalam, antara lain:

- 1) Wisata Agro Perkebunan Panglungan. Kawasan perkebunan dengan topografi pegunungan yang berada di Desa Panglungan ini berfungsi sebagai daerah resapan air dan kawasan konservasi lahan. Saat ini Panglungan tengah dikembangkan sebagai agrowisata dengan tanaman utama kakao, cengkeh, melinjo, dan kopi;
- 2) Air Terjun Tretes merupakan air terjun dengan ketinggian 158 meter, dan terletak di ketinggian 1250 meter di atas permukaan air laut. Lokasinya berada di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo;
- 3) Makam Pangeran Benowo: makam ini terletak di Desa Wonomerto;
- 4) Goa Sigolo-golo, terletak di Dusun Sranten, Desa Panglungan. Merupakan Goa di wilayah Jombang yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah;
- 5) Goa Sriti, terletak di Desa Sumberejo. Untuk mencapai goa ini pengunjung harus melalui jalan setapak yang sangat panjang berliku, namun memiliki pemandangan kawasan hutan yang hijau alami;
- 6) Makam Gunung Kuncung, terletak di lereng gunung di Desa Wonorejo yakni di perbatasan dengan Kabupaten Kediri.

Kecamatan Wonosalam memiliki potensi dalam pengembangan agrowisata, hal ini disebabkan daerahnya berupa perbukitan serta memiliki berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan seperti kakao, cengkeh, melinjo, dan durian. Sebagaimana di atur dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/189/415.10.10/2010 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan pada Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) I Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan.

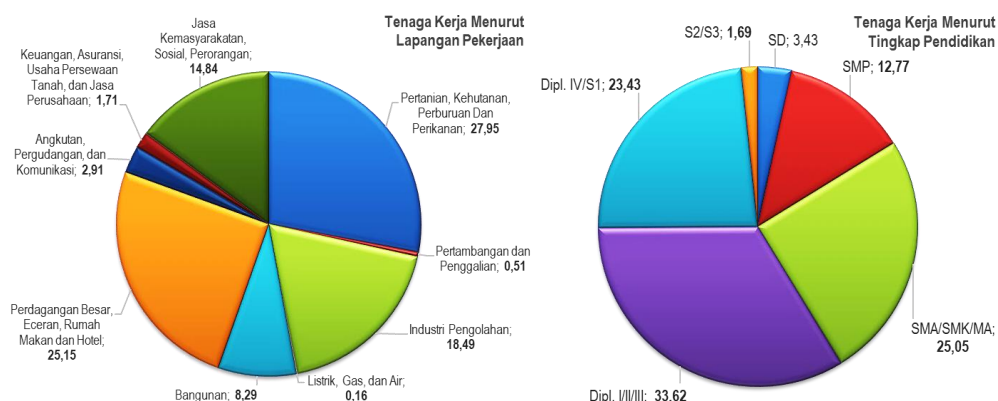


Gambar 4-14 Kawasan Agrowisata Panglungan-Wonosalam

Dalam mengembangkan pariwisata, Kecamatan Wonosalam masih menghadapi kendala. Masalah yang paling utama adalah infrastruktur (termasuk didalamnya sarana prasarana penunjang pariwisata), promosi/pemasaran, dan sarana transportasi. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata diduga menjadi salah satu penyebab pengembangan pariwisata di Wonosalam belum maksimal.

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

Dalam pengembangan kawasan wisata Panglungan perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten terutama suplay tenaga kerja lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan. Permasalahan yang berhubungan dengan SDM tenaga kerja dalam pengembangan pariwisata adalah pemahaman akan manfaat bidang kepariwisataan masih kurang dikarenakan latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang kepariwisataan. Disamping itu keterampilan SDM juga masih terbatas secara kualitas. Mereka pada umumnya kurang mampu mencari peluang untuk memanfaatkan potensi kepariwisataan sebagai lahan perekonomian, dengan di didukung SDM yang berkualitas akan sangat membantu dalam peningkatan produk wisata yang ada.



Gambar 4-15 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun 2016

Kurang adanya relevansi antara kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dengan lingkup bidang pekerjaan menjadikan salah satu permasalahan, walaupun belakangan upaya peningkatan kualitas SDM tersebut telah dilaksanakan secara bertahap oleh pihak Pemda Kabupaten Jombang. Pembinaan dan pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan di bidang kepariwisataan kepada masyarakat Desa Panglungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan yang ada. Potensi kawasan Panglungan-Wonosalam sebagai tujuan wisata sangat besar, akan tetapi akan sangat disayangkan jika SDM lokal tidak diberdayakan dan terserap dalam industri pariwisata tersebut.

Belakangan upaya peningkatan dan penyiapan tenaga kerja di bidang pariwisata di Kabupaten Jombang secara umum, juga sudah mulai diinisiasi dengan adanya kerjasama antara Universitas Pesantren Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang dengan pihak Kementerian Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja. Melalui kerjasama tersebut diharapkan nantinya akan terbangun *link and match* antara kebutuhan tenaga kerja industri pariwisata dengan suplay tenaga kerja yang kompeten di bidang tersebut.

C. Aspek Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata jika dilihat secara umum dalam lingkup Kabupaten Jombang, jumlahnya memang relatif cukup banyak. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa di Kabupaten Jombang terdapat sejumlah 15 Biro Perjalanan Wisata, 18 Restoran/Rumah Makan dengan total kapasitas 817 kursi, serta 21 Akomodasi Hotel/Penginapan/Homestay dengan total 556 kamar dan 995 tempat tidur tersedia.

Tabel 4-22 Akomodasi Wisata di Kabupaten Jombang Tahun 2016

NO	SARANA PENUNJANG PARIWISATA	JUMLAH	
		2015	2016
1	Biro Perjalanan Wisata	15	15
2	Restoran/Rumah Makan	18	18
	- Jumlah Kursi	817	817

NO	SARANA PENUNJANG PARIWISATA	JUMLAH	
		2015	2016
3	Hotel/Penginapan/Homestay	20	21
	- Jumlah Kamar	535	556
	- Jumlah Tempat Tidur	967	995
	- Tingkat Penghunian Kamar	-	25,48%
	- Rata-rata Lama Menginap	-	1,58 hari

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2017

Namun demikian jika dilihat secara spesifik dalam lingkup Kecamatan Wonosalam, ketersediaan sarana prasarana dalam mengembangkan pariwisata di Desa Panglungan terlihat masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur, media promosi/informasi dan transportasi.

Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang lokasinya berada paling jauh dari pusat Kabupaten Jombang, yakni sekitar 30 km atau dapat ditempuh dalam $\pm$ 30-45 menit dari pusat kabupaten. Walaupun sarana jalan sudah tersedia sampai ke lokasi wisata dan kondisinya pun cukup baik karena sudah beraspal, namun jalan tersebut lebarnya relatif kecil karena maksimal hanya dapat dilalui oleh kendaraan bus ukuran sedang. Selain itu, belum tersedianya moda angkutan transportasi umum menuju lokasi wisata Panglungan menjadi kendala tersendiri karena para wisatawan harus membawa kendaraan pribadi jika menuju ke kawasan ini.



Gambar 4-16 Kondisi Sarana Prasarana Kawasan Wisata Panglungan

Demikian pula ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata keberadaannya masih terbatas. Beberapa fasilitas yang sudah tersedia di kawasan ini diantaranya adalah kantor pengelola, wisma penginapan/home stay, aula/ruang pertemuan, gazebo, serta lapangan terbuka bagi aktifitas luar ruang/outbound.

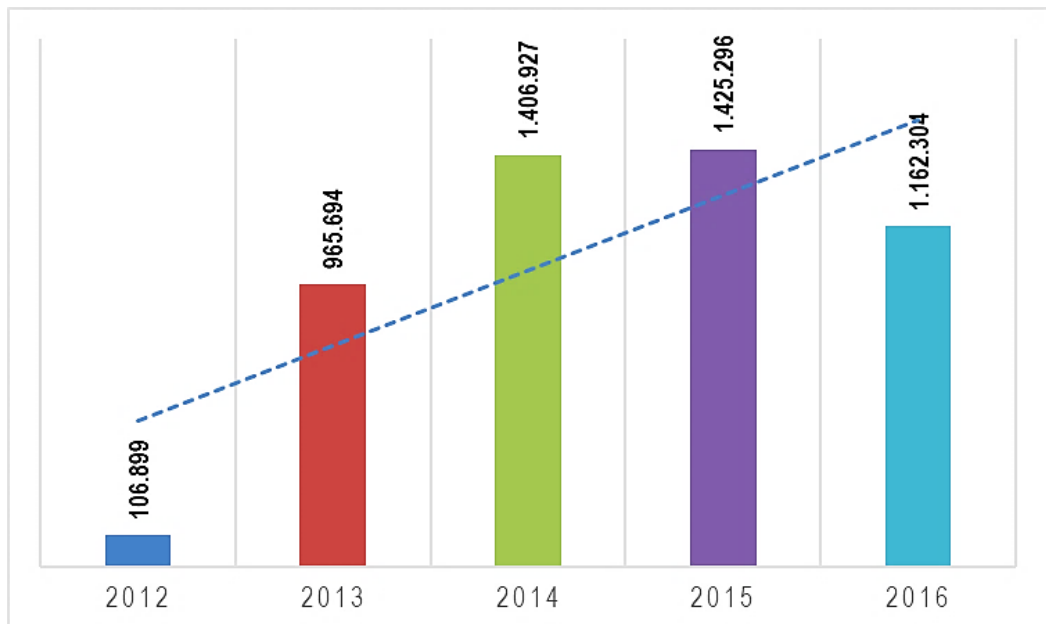
D. Aspek Pasar

Kondisi pasar pariwisata di Kabupaten Jombang secara umum dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jombang, perkembangan kunjungan wisatawan di beberapa tempat wisata mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Berikut gambaran kunjungan wisatawan di Kabupaten Jombang mulai dari tahun 2012-2016.

Tabel 4-23 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016

NO	DAYA TARIK WISATA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Wanawisata Sumber Boto	11.955	42.233	38.079	31.068	27.935
2	Tirta Wisata	12.358	49.040	33.635	21.269	17.742
3	Candi Rimbi	5.019	2.319	6.700	2.735	1.423
4	Yoni Gambar	-	-	-	217	233
5	Sendang Made	4.052	5.008	6.158	4.860	5.989
6	Prasasti Gurit	6.822	124	217	231	259
7	Situs Gunung Pucangan	-	-	-	2.377	3.539
8	Tirta Winata	-	-	-	8.213	9.166
9	Petilasan Damar Wulan	-	-	-	289	181
10	Kolam Renang Tirta Satria	-	-	-	9.032	7.562
11	Makam Sayid Sulaiman	61.928	95.674	339.086	108.862	47.562
12	Prasasti Tenganan	4.765	192	403	397	823
13	Makam Gus Dur	-	771.104	982.649	1.235.746	1.039.890
JUMLAH		106.899	965.694	1.406.927	1.425.296	1.162.304

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2013-2017



Gambar 4-17 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016

Secara linier, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir terlihat mengalami pertumbuhan yang sangat drastis. Jika pada tahun 2012 jumlah wisatawan tercatat hanya sebesar 106.899 jiwa, maka pada tahun 2016 jumlahnya meningkat tajam menjadi 1.162.304 jiwa, artinya dalam lima tahun terjadi pertumbuhan sebesar 987,29% atau rata-rata sebesar 207,98% per tahun. Angka pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya potensi pariwisata di Kabupaten Jombang memang sangat menjanjikan.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Keterlibatan stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata tidak dapat berkembang optimal secara sendiri tanpa didukung oleh keterlibatan sektor terkait lainnya, seperti perhubungan, perdagangan, industri kecil-UKM, dan lain-lain.

Dalam konteks peran serta masyarakat, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Jombang umumnya dan kawasan Panglungan-Wonosalam khususnya, sejauh ini terlihat telah cukup baik. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Jombang pengelolaannya bahkan cukup banyak yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat di sekitar lokasi daya tarik wisata. Lebih jauh lagi, masyarakat sekitar tidak hanya sekedar terlibat dalam pengelolaan semata tetapi lebih dari itu mereka turut serta terlibat dalam menghidupkan industri wisata di sekitarnya. Hal tersebut terlihat dari adanya aktifitas masyarakat yang terlibat seperti dalam penyediaan penginapan, kios/toko, warung makan/kuliner, oleh-oleh/souvenir, dan lain-lain. Peran masyarakat tersebut begitu penting karena pengembangan pariwisata sejatinya diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, Kecamatan Wonosalam yang masuk dalam lingkup Wilayah Pengembangan (WP) Mojowarno, pengembangannya diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya alam dan pengembangan pariwisata di wilayah Selatan Kabupaten Jombang. Dengan arahan fungsi tersebut, prioritas kegiatan utamanya yakni pada pengembangan agroindustri, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan agrowisata.

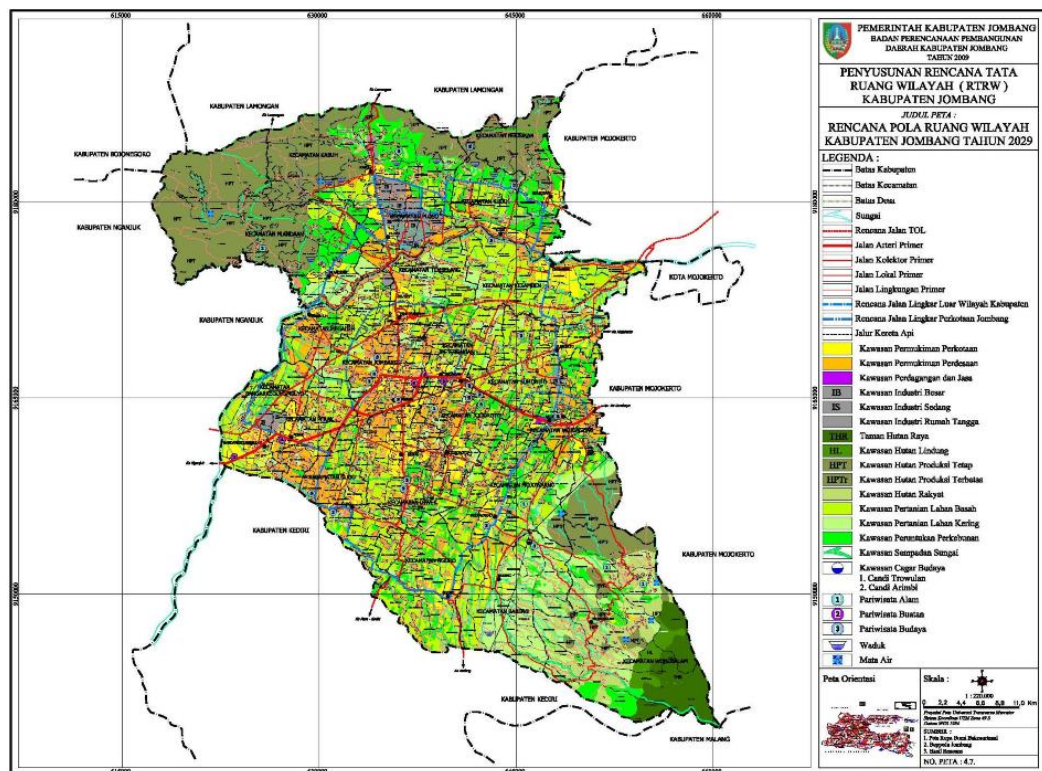
Tabel 4-24 Arahan Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojowarno Tahun 2009-2029

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN
Mojowarno	Pusat agribisnis wilayah Jombang. Sebagai pusat pengembangan	Perkebunan, Pariwisata, Kehutanan, Pertanian, Agribisnis, Agroindustri

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN
	agropolitan Kabupaten Jombang (agropolitan center)	
Bareng	Pengembangan pertanian, perkebunan, industri kecil dan peternakan	Pendidikan, Pariwisata
Ngoro	Pengembangan pertanian khususnya kawasan peternakan	Pertanian, Perdagangan
Wonosalam	Wilayah yang diarahkan sebagai wilayah konservasi sumberdaya alam dan pengembangan pariwisata daerah	Pariwisata, Kehutanan, Perkebunan

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

Selain itu, sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Bupati No: 188.4.45/189/415.10.10/2010 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan pada Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) I Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam juga ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, yang salah satu arahan fungsi pengembangannya yakni sebagai Kawasan Agrowisata.



Gambar 4-18 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

Dengan demikian pengembangan Kawasan Panglungan-Wonosalam sebagai kawasan pariwisata pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pembagunan di Kabupaten Jombang, terutama sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 dan Kep. Bupati No: 188.4.45/189/415.10.10/2010.

G. Aspek Lingkungan

Kecamatan Wonosalam lokasinya berada pada kawasan dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan dingin. Selain memiliki keanekaragaman hayati, Kecamatan Wonosalam juga menyimpan 48 titik mata air yang sangat penting karena merupakan hulu sumber mata air yang alirannya mengalir hingga ke Kali Brantas. Dengan fungsi kawasan yang demikian strategis sebagai kawasan resapan air, maka segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di kawasan ini hendaknya dilakukan dengan sangat mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan sekitar.

Konsep pembangunan yang ramah lingkungan (*sustainable development*) harus menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Panglungan-Wonosalam. Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada fungsi kawasan yang pada akhirnya justru akan sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga masyarakat di Kabupaten Jombang secara umumnya.

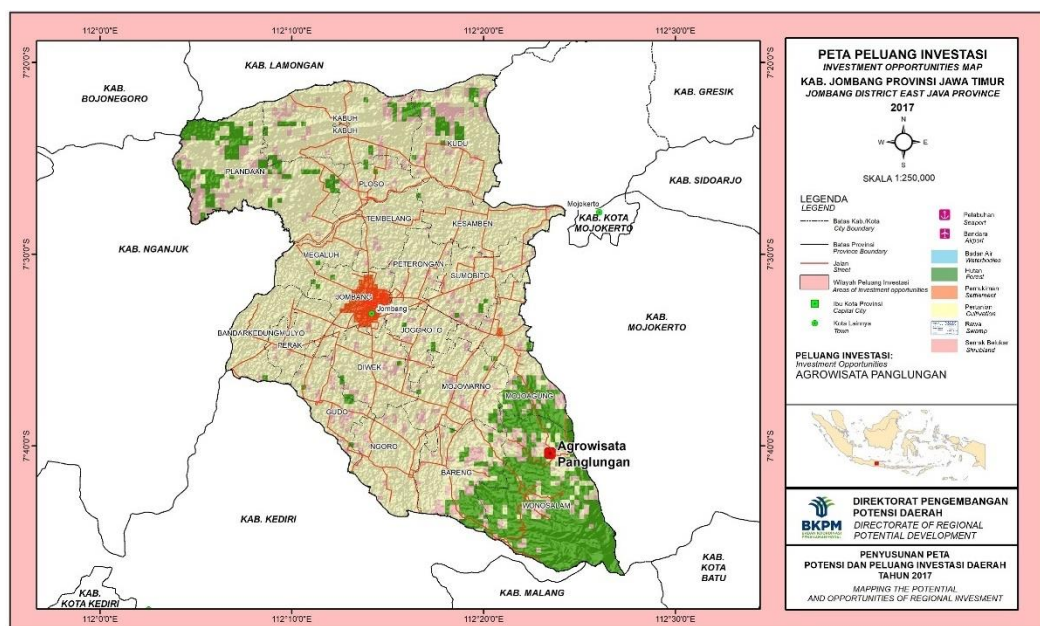
Beberapa upaya dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Panglungan-Wonosalam ini diantaranya adalah: 1. Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan energi; 2. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dan wisatawan di lokasi daya tarik wisata; 3. Peningkatan dan pemantapan konservasi kawasan-kawasan rentan terhadap perubahan; serta 4. Pembatasan secara ketat ketentuan KDB dan KLB struktur bangunan.

H. Aspek Lahan

Lahan yang siap ditawarkan kepada investor untuk dikerjasamakan dalam kegiatan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Jombang yakni seluas 97,772 Ha yang berada di Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam. Saat ini lahan tersebut dikuasai oleh pihak Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jombang, dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Sebagaimana digambarkan sebelumnya, lahan tersebut berada di kawasan perbukitan di Kabupaten Jombang bagian selatan pada ketinggian 800-1.200 mdpl. Di atas lahan tersebut saat ini telah digunakan untuk bangunan kantor pengelola, rumah dinas, wisma/homestay, lapangan terbuka, kebun, taman Kehati, serta semak belukar.



Gambar 4-19 Kondisi Lahan Pengembangan Kawasan Wisata Panglungan



Gambar 4-20 Peta Peluang Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2017

Peluang Investasi : **PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANGLUNGAN-WONOSALAM**

Lokasi :
- Desa : Panglungan

- Kecamatan : Wonosalam
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Jombang
- Provinsi : Provinsi Jawa Timur

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal :
- Luas : 97,772 Ha
- Status : HGU
- Kuasa Lahan : Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan

- Kegiatan Investasi :
- Pembangunan resort/penginapan/homestay
 - Penataan kawasan daya tarik wisata
 - Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata lainnya

Perkiraan Nilai Investasi (Rp.) : Rp. 120 Milyar

4.4.2. Peluang Investasi Kabupaten Tuban

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Tuban adalah berupa kegiatan **Pengembangan Kawasan Industri Tuban (KIT)**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Tuban ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Kabupaten Tuban yang besar karena sejarahnya di masa lampau, saat ini telah berubah menjadi wilayah yang lebih maju dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu bisa dilihat dari kondisi wilayah dan produktifitas warganya yang bisa dikatakan cukup tinggi. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang besar, Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi sumber daya yang mendukung pembangunan daerah. Investasi juga berkembang seiring dengan tumbuhnya Kabupaten Tuban sebagai kabupaten yang kompetitif.

Kabupaten Tuban memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang melimpah, kawasan utara Kabupaten Tuban memiliki potensi sumber daya laut serta dilalui jalan arteri penghubung antar kota besar di Indonesia, lokasi tersebut potensial untuk kegiatan investasi baik industri maupun perdagangan. Kawasan tengah kaya akan bahan galian tambang antara lain dolomit, pasir kwarsa, tanah liat, clay, nikel, minyak dan gas bumi. Sedangkan kawasan selatan merupakan lahan pertanian yang subur dengan jaringan irigasi yang memadai yang berfungsi sebagai penyangga pangan dengan jenis komoditas

produksi padi. Potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut harus diupayakan dan perlu terus dipacu pemanfaatannya dalam rangka mendorong perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan dokumen Grand Design Investasi Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2025, disampaikan bahwa klasifikasi tingkat potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tuban berdasarkan sektor atau lapangan usaha adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4-25 Klasifikasi Tingkat Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Tuban

NO	SEKTOR	TINGKAT POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	tinggi
2	Pertambangan & Penggalian	tinggi
3	Industri Pengolahan	tinggi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	sedang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	sedang
6	Konstruksi	tinggi
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	tinggi
8	Transportasi dan Pergudangan	sedang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	sedang
10	Informasi dan Komunikasi	tinggi
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	sedang
12	Real Estate	sedang
13	Jasa Perusahaan	sedang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	tinggi
15	Jasa Pendidikan	sedang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	sedang
17	Jasa lainnya	sedang

Sumber : Grand Design Investasi Provinsi Jawa Timur sd. Tahun 2025

Selanjutnya potensi dan peluang investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tuban berdasarkan sektor unggulan dan komoditasnya antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4-26 Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Tuban

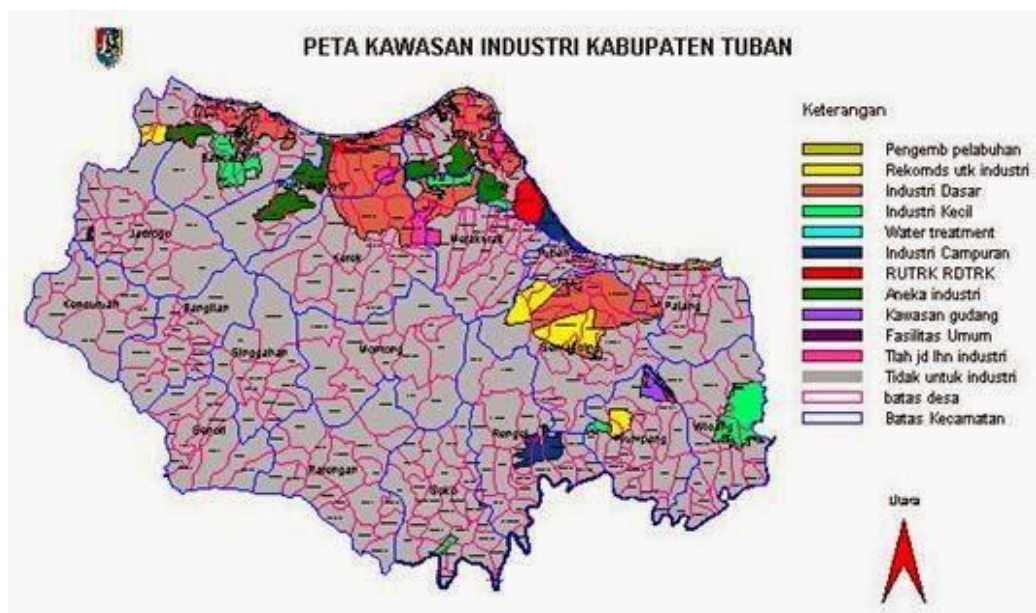
BIDANG/SEKTOR UNGGULAN	JENIS BIDANG USAHA	KOMODITAS	LOKASI
Perikanan	Bidang Usaha Budidaya Perikanan	ikan bandeng, udang, kepiting dan jenis ikan lainnya.	Bancar, Palang, Tambakboyo, Jenu
Perikanan	Bidang Usaha Penangkapan Perikanan Laut	ikan laut dan rajungan.	Bancar, Palang, Tambakboyo, Jenu
Peternakan	Bidang Usaha Peternakan	Sapi Potong	Kec. Bancur

BIDANG/SEKTOR UNGGULAN	JENIS BIDANG USAHA	KOMODITAS	LOKASI
Konstruksi	Bidang Usaha Pengembangan Residensial dan Perkantoran	Rumah tinggal, Kavling perumahan	Tuban, Jenu, Merakurak, Semanding
Konstruksi	Bidang Usaha Pengembangan Kawasan Industri	Kawasan industri (kavling industri siap bangun, bangunan gedung pabrik, bangunan gudang, IPAL)	Kerek, Jenu, Merakurak, Tambakboyo
Konstruksi	Investasi Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan	Pembangunan pelabuhan laut nusantara/umum, pembangunan khusus industri/komersil	Bancar, Jenu, Palang

Sumber : Grand Design Investasi Provinsi Jawa Timur sd. Tahun 2025

Kegiatan industri di Kabupaten Tuban berkembang pesat selama dua dekade terakhir, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai fasilitas pendukung investasi yang memadai di Kabupaten Tuban. Salah satu komponen utama pendukung investasi adalah tersedianya lahan atau kawasan yang sesuai arahan perencanaan tata ruang yang diperuntukan bagi kawasan industri.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032, kawasan industri di Kabupaten Tuban direncanakan seluas 49.210,65 Ha yang tersebar di Kecamatan Kerek, Jenu, Tambakboyo, Bancar, Merakurak, Palang, Semanding, Widang, Plumpang dan Rengel.



Gambar 4-21 Arahan Peruntukan Kawasan Industri di Kabupaten Tuban

Dari kawasan Industri yang direncanakan tersebut terbagi dalam zona-zona pengembangan industri, yaitu:

Zona I

Dipusatkan di Kecamatan Bancar dengan luas lahan 5.802,01 Ha. Potensi industri yang dapat dikembangkan meliputi industri keramik, pecah belah, pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Zona II

Dipusatkan di Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Merakurak dan Kerek dengan luas lahan seluas 34.182,67 Ha. Potensi Industri yang dapat dikembangkan yaitu industri berat seperti industri genteng, gypsum dan eternit, semen, industri pecah belah, keramik, pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Zona III

Dipusatkan di Kecamatan Palang, Semanding, Widang, Plumpang dan Rengel dengan luas lahan seluas 9.225,27 Ha Potensi Industri yang dapat dikembangkan meliputi industri batu kapur, keramik dan pupuk.

Jenu adalah kecamatan di Kabupaten Tuban yang letaknya paling utara dan dekat dengan pusat Kabupaten Tuban, tepatnya 10 km arah barat dari pusat kabupaten dengan luas wilayah mencapai 81,61 km² dan meliputi 17 desa. Hampir seluruh wilayah Kecamatan Jenu berada di sekitar pesisir Tanjung Awar-Awar, dimana kecamatan ini adalah salah satu kecamatan penting di Kabupaten Tuban. Hal tersebut dikarenakan kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang arahan peruntukannya yakni sebagai kawasan pengembangan industri berat, dimana salah satunya yaitu Kawasan Industri Tuban (KIT).

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

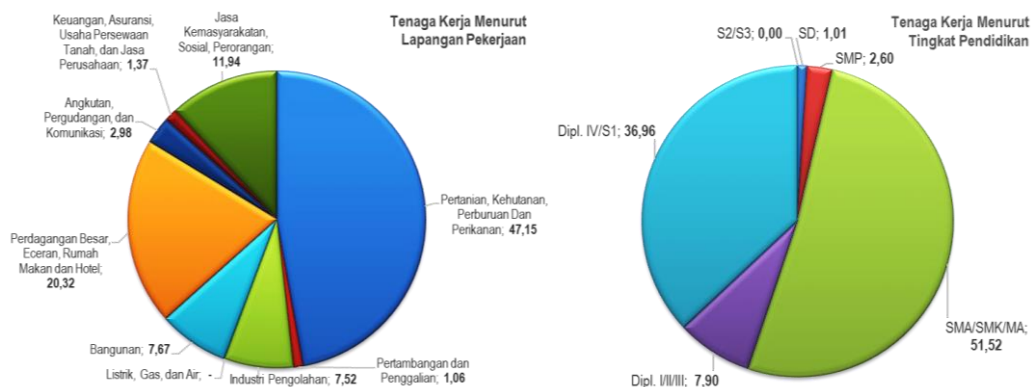
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan syarat penting untuk menunjang pengembangan industri di suatu daerah. Hal ini dikarenakan sektor industri umumnya memerlukan asupan tenaga kerja yang kualitasnya relatif lebih baik dengan skill atau keterampilan khusus dan spesifik.

Berdasarkan data jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tuban pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, pada Tahun 2016 tercatat sejumlah 5.151 pekerja dengan kenaikan 3,6 % dibanding tahun sebelumnya. Dari 5.151 pekerja yang terdaftar tersebut, sebesar 3.879 atau 75,31 % telah ditempatkan bekerja.

Komposisi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha yang digeluti pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor primer (Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan) masih menjadi lapangan pekerjaan utama masyarakat di Kabupaten Tuban, dengan

proporsi mencapai 47,15 %. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Kabupaten Tuban yang memang masih bertumpu pada sektor primer tersebut. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di sektor Industri Pengolahan komposisinya masih relatif sedikit yakni hanya sebesar 7,52 % atau 43.945 jiwa.

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dari sejumlah 5.151 pekerja yang terdaftar tahun 2016, proporsi terbesar pencari kerja adalah berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 51,52 % (2.654 pekerja) dan selanjutnya diikuti oleh pencari kerja yang berpendidikan terakhir Dipl. IV/Sarjana sebesar 36,96 % (1.904 pekerja).



Gambar 4-22 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tuban Tahun 2016

Gambaran proporsi tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Tuban tersebut secara relatif menunjukkan kualitas yang cukup baik karena didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMA/Sederajat dan Sarjana.

C. Aspek Sarana Prasarana

Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui oleh jalur utama jaringan jalan lintas pantai utara (Pantura), Kabupaten Tuban memiliki posisi yang strategis dalam konstelasi pengembangan wilayah di Pulau Jawa bagian Utara. Kondisi ini juga dipertegas dengan posisi Kabupaten Tuban sebagai kabupaten perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga menjadikannya kawasan perlintasan yang sangat strategis.

Kawasan Industri Tuban (KIT) yang berlokasi di jalur perlintasan jalan raya Surabaya-Semarang, merupakan kawasan industri yang dipersiapkan dan dikelola secara profesional oleh pengembangnya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para investornya. Oleh karenanya berbagai fasilitas serta sarana prasarana penunjang kegiatan di kawasan tersebut telah dibangun secara memadai.



Gambar 4-23 Kondisi Sarana Prasarana di Kawasan Industri Tuban

Tabel 4-27 Sarana Prasarana di Kawasan Industri Tuban

FASILITAS	KET.
Fasilitas utama di dalam kawasan	
• Jalan	Jalan Utama lebar 2 x 7 meter (dua jalur) Jalan Sekunder lebar 8 meter (satu jalur)
• Listrik	PT. PLN kapasitas 80 MW
• Gas Alam	PT. PGN
• Telekomunikasi	PT. Telkom
• Internet	PT. Telkom
• Air Bersih	Instalasi terpusat, kapasitas 15 liter/detik
• Pengolahan limbah cair	Instalasi terpadu dan terpusat
• Pengolahan limbah padat	Instalasi terpadu dan terpusat
• Sistem Drainase	
• Tempat Ibadah	
• Online Banking	
• Kantor Pengelola	
• Pusat Kesehatan	
• Restoran	
Fasilitas penunjang di luar kawasan	
• Pelabuhan	- Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya (130 km), 6 terminal dengan kapasitas: Panjang : 140 - 227 meter Lebar : 15 - 50 meter Alur : 2,5 - 10,5 LWS

FASILITAS	KET.
	- Pelabuhan Teluk Lamong-Surabaya (117 km), 1 terminal dengan kapasitas: Panjang : 450 - 500 meter Lebar : 30 - 50 meter Alur : 12 - 14 LWS
• Bandara	Bandara Internasional Juanda-Sidoarjo (150 km)

D. Aspek Pasar

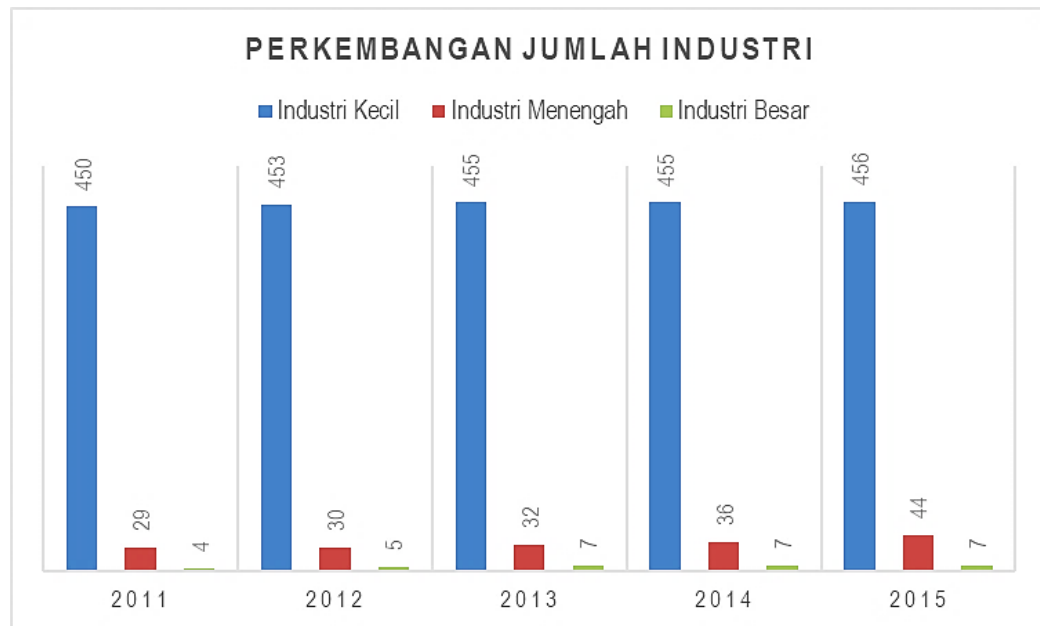
Perkembangan dan prospek pasar di Kabupaten Tuban dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah industri yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015, jumlah industri di Kabupaten Tuban berdasarkan jenis dan unitnya terus mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4-28 Jumlah Industri Menurut Jenis dan Unit di Kabupaten Tuban

JENIS/UNIT	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
IHPK	342	345	348	348	356
Industri Kecil	333	336	337	337	338
Industri Menengah	9	9	10	10	17
Industri Besar	0	0	1	1	1
ILMK	137	139	142	146	147
Industri Kecil	114	114	115	115	115
Industri Menengah	19	20	21	25	26
Industri Besar	4	5	6	6	6
IA	4	4	4	4	4
Industri Kecil	3	3	3	3	3
Industri Menengah	1	1	1	1	1
Industri Besar	0	0	0	0	0
JUMLAH	483	488	494	498	507
Industri Kecil	450	453	455	455	456
Industri Menengah	29	30	32	36	44
Industri Besar	4	5	7	7	7

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Industri di Kabupaten Tuban terdiri atas tiga jenis yaitu IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan), ILMK (Industri Logam, Mesin dan Kimia), dan IA (Industri Aneka). Ketiga industri tersebut masing-masing terbagi atas tiga unit yaitu industri kecil, menengah dan besar. Dalam lima tahun terakhir jumlah ketiga jenis industri tersebut mengalami kenaikan sebanyak 34 industri. Selain itu data diatas menunjukkan bahwa sektor industri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri hasil pertanian dan kehutanan, karena jenis industri ini memiliki jumlah terbanyak dibanding jenis industri lainnya.



Gambar 4-24 Perkembangan Jumlah Industri di Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015

Adapun perkembangan jumlah tenaga kerja industri formal yang terserap dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4-29 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis dan Unit di Kabupaten Tuban

JENIS/UNIT	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
IHPK	16.498	16.512	18.452	18.452	20.386
Industri Kecil	16.155	16.169	16.177	16.177	16.178
Industri Menengah	343	343	365	365	2.298
Industri Besar	-	-	1.910	1.910	1.910
ILMK	5.157	5.387	5.495	5.732	5.752
Industri Kecil	1.470	1.470	1.472	1.472	1.472
Industri Menengah	608	615	642	879	899
Industri Besar	3.079	3.302	3.381	3.381	3.381
IA	399	399	399	399	399
Industri Kecil	203	203	203	203	203
Industri Menengah	196	196	196	196	196
Industri Besar	-	-	-	-	-
JUMLAH	22.054	22.298	24.346	24.583	26.537
Industri Kecil	17.828	17.842	17.852	17.852	17.853
Industri Menengah	1.147	1.154	1.203	1.440	3.393
Industri Besar	3.079	3.302	5.291	5.291	5.291

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada industri kecil yang bergerak di bidang IHPK, dimana pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 18.452 orang tenaga kerja, pada tahun 2015 penyerapannya tenaga kerja menjadi 20.386 orang. Penyerapan tenaga kerja industri kecil pada kelompok Industri Logam, Kimia dan

Mineral pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 5.732 orang, sedangkan di tahun 2015 penyerapan tenaga kerja 5.752 orang. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada industri kecil dan industri menengah pada kelompok industri aneka di mana pada tahun 2014 mampu menyerap sebanyak 399 orang tenaga kerja, pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja tetap 399 orang.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Pengembangan Kawasan Industri Tuban walaupun sedianya dilaksanakan oleh pihak swasta dan lebih ditujukan untuk pengembangan industri-industri besar dan menengah, namun didalam kawasan tersebut tetap disediakan ruang bagi berkembangnya kegiatan-kegiatan UKM. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pengembang sebagai bentuk pelibatan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar agar turut serta merasakan dampak positif dari adanya KIT di wilayah mereka.

Pihak pengelola KIT juga melaksanakan program Kepedulian Sosial Perusahaan (CSR) untuk merefleksikan visi perusahaan untuk menjadi kawasan industri yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kemampuan profesional. Terletak di kawasan yang tidak jauh dari permukiman penduduk, Kawasan Industri Tuban memikul tanggung jawab untuk turut membantu masyarakat di sekitar kawasan. Program CSR yang dilaksanakan oleh KIT ditujukan pada pengembangan masyarakat, baik melalui dampak langsung maupun tidak langsung. Program ini juga memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan untuk maju dan berkembang bersama masyarakat.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa pengembangan KIT dilihat dari aspek tata ruang telah sesuai dengan ketentuan rencana peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tuban. Kecamatan Jenu merupakan salah satu kecamatan yang arahan pola ruangnya memang diperuntukan bagi pengembangan kawasan industri. Berada di Zona Pengembangan Industri II yang meliputi Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Merakurak dan Kerek dengan alokasi lahan seluas 34.182,67 Ha, potensi Industri yang dapat dikembangkan di zona ini yaitu industri berat.

KIT juga merupakan salah satu kawasan yang telah terdaftar sebagai kawasan industri yang memperoleh program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang dicanangkan oleh BKPM sesuai penetapan SK. Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2017. Terdaftaranya KIT dalam program KLIK menunjukkan bahwa kawasan ini memang telah siap dalam berbagai aspek ketentuan perizinannya, dikarenakan persyaratan untuk mendapat program KLIK adalah telah terpenuhinya semua syarat perizinan yang meliputi Izin Prinsip,

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), AMDAL, dan Tata Tertib Kawasan Industri. Dengan didapatnya fasilitas program KLIK tersebut, para investor di KIT dapat langsung memulai proyek konstruksi sebelum memperoleh izin konstruksi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara paralel, investor dapat mengajukan IMB, Izin Lingkungan, dan izin lainnya yang harus diselesaikan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial.

G. Aspek Lingkungan

Sebagai salah satu upaya kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar, pihak pengelola KIT telah melaksanakan program CSR sebagai refleksi visi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Program CSR yang dilaksanakan oleh KIT ditujukan pada pengembangan masyarakat dan lingkungan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.

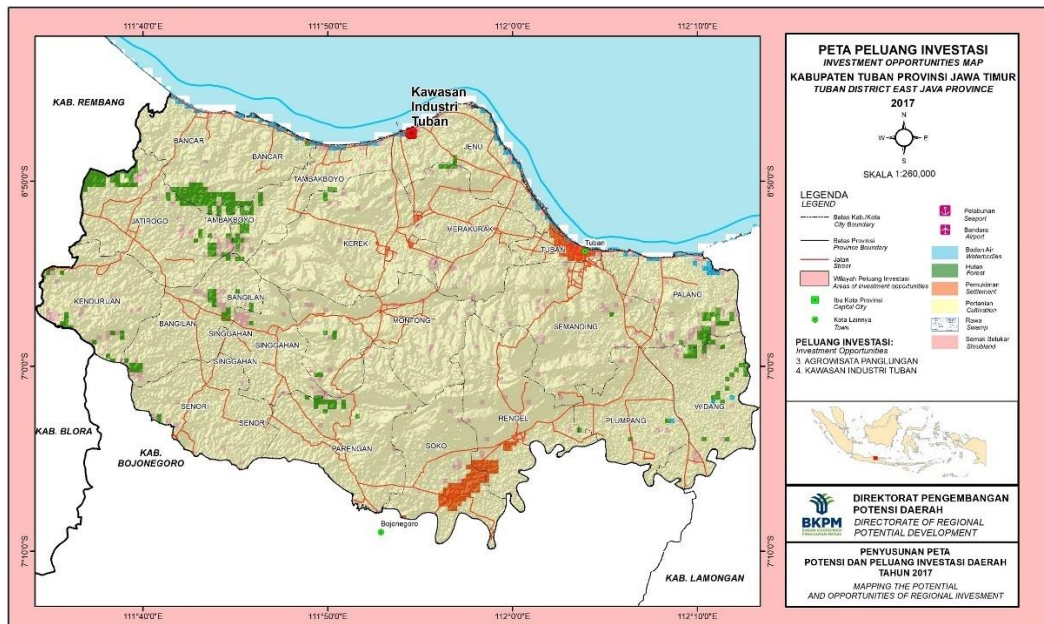
Selain itu, dalam pengelolaan KIT juga dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan agar dapat meminimalkan dampak negatif aktifitas kegiatan industri di kawasan tersebut terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sebagaimana dilaksanakan dengan dibangunnya instalasi fasilitas pengolahan limbah cair dan padat secara terpusat, penataan sistem drainase yang baik, dan pelaksanaan aturan KDB dan KLB sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Aspek Lahan

Kawasan Industri Tuban (KIT) merupakan kawasan industri terpadu yang dikembangkan oleh pihak swasta yakni PT. Kawasan Industri Gresik (KIG) yang merupakan perusahaan patungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Petrokimia Gresik (Persero). PT. KIG adalah perusahaan *developer* yang khusus menyediakan lahan industri untuk para investor lokal, nasional maupun internasional. Didalam kawasan ini ditawarkan beragam fasilitas seperti: lahan industri, pergudangan, bangunan pabrik sesuai standar, dan pusat bisnis. Kawasan ini didukung dengan fasilitas dan infrastruktur terpercaya yang memberi jaminan atas investasi penyewa.

Kawasan Industri Tuban (KIT) berdiri di atas lahan seluas 233 Ha, tepatnya berlokasi di Desa Temaji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dengan jarak ke pusat Kabupaten Tuban sekitar ± 21 km. Elevasi lahan KIT berkisar antara 2 – 6 meter di atas permukaan laut. Bentuknya berupa dataran rendah yang dekat dengan pantai. Kondisi tanahnya merupakan Mediteran merah kuning, sama seperti sebagian besar kondisi tanah pada Kecamatan Jenu. Kondisi lingkungan sekitar masih berupa lahan pertanian dan perkebunan, sedangkan kondisi permukiman sekitar umumnya masih berupa rumah sangat sederhana yang telah tumbuh padat penduduk, tepatnya berada di Desa Temaji.

Kecamatan Jenu sendiri sesuai RTRW memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan pengumpan dan kawasan industri. Faktor utama pendorong perkembangan di Kecamatan Jenu adalah adanya Jalan Raya lintas Surabaya – Semarang, yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung bagi Kecamatan Jenu yang diperuntukkan sebagai zona industri.

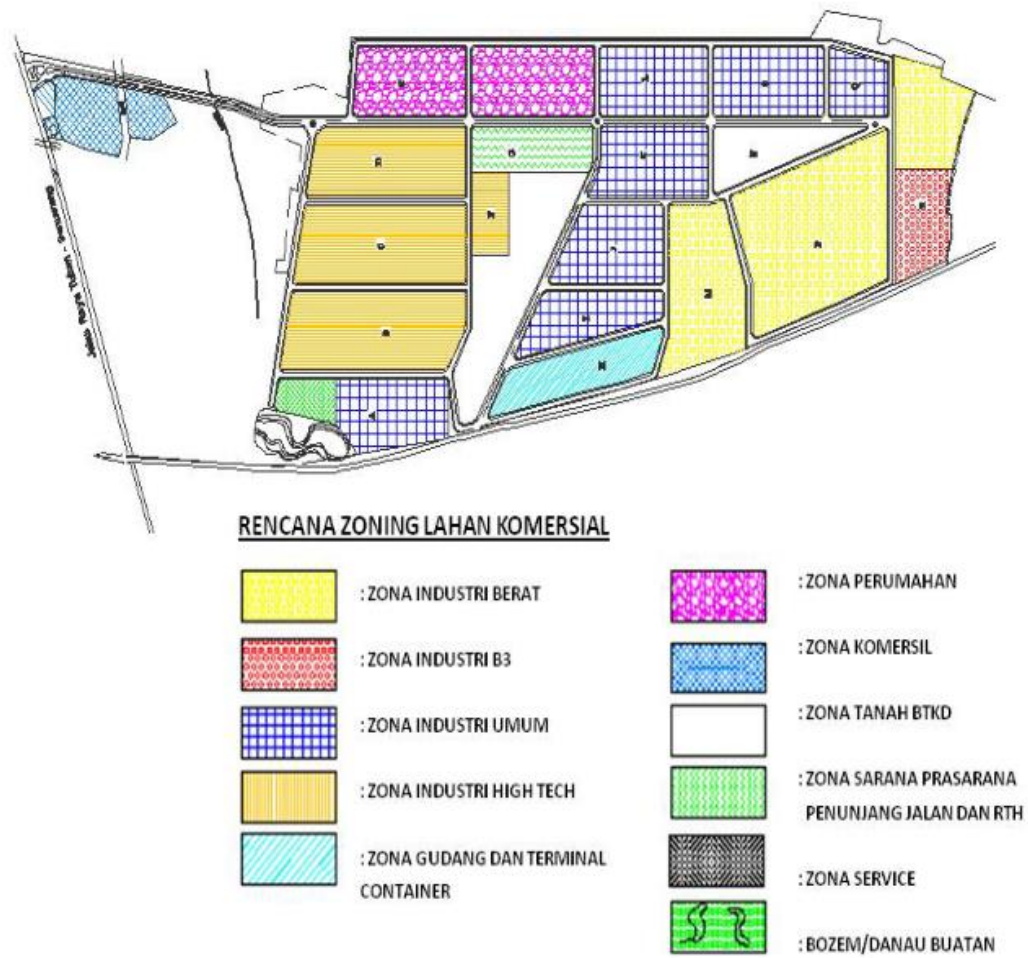


Gambar 4-25 Peta Peluang Investasi di Kabupaten Tuban Tahun 2017



Gambar 4-26 Kondisi Pemanfaatan Lahan di Sekitar KIT

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan KIT, di dalam kawasan ini dibangun beragam zona peruntukan lahan yang meliputi: zona industri berat, zona industri B3, zona industri umum, zona pergudangan dan terminal kontainer, zona perumahan, zona komersil, zona sarana prasarana umum, dan lain-lain. Zona-zona peruntukan tersebut dihubungkan oleh infrastruktur jalan utama selebar 2 x 7 meter (dua jalur) dan jalan sekunder selebar 8 meter (satu jalur). Selain itu, kawasan ini juga didukung oleh ketersediaan beragam fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti instalasi pengolahan limbah, suplay energi listrik, jaringan telekomunikasi dan internet, dll.



Gambar 4-27 Rencana Zonasi Peruntukan Lahan KIT



Gambar 4-28 Lahan Siap Bangun di Kawasan Industri Tuban

Peluang Investasi : **KAWASAN INDUSTRI TUBAN (KIT)**

Lokasi :

- Desa : Temaji
- Kecamatan : Jenu
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Tuban
- Provinsi : Provinsi Jawa Timur

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal :
- Luas : 233 Ha
 - Lahan terjual : 22,5 Ha
 - Lahan tersedia : 140 Ha
- Status : HGU
- Kuasa Lahan : PT. Kawasan Industri Gresik (KIG)

Kegiatan Investasi : - Industri
 - Pergudangan
 - Perumahan
 - Perkantoran

Pola Pemilikan Lahan : - Industri : Sewa dan jual
 - Pergudangan : Sewa dan jual
 - Gedung Pabrik : Sewa
 - Perumahan : Jual
 - Perkantoran : Sewa

Perkiraan Nilai Investasi (Rp.) : Rp. 670 Milyar

4.4.3. Peluang Investasi Kabupaten Rembang

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Rembang adalah berupa kegiatan **Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Rembang ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa sedianya memiliki banyak potensi sumber daya yang sangat mendukung bagi pembangunan daerah jika dioptimalkan pemanfaatannya. Sektor pertanian, industri dan

perdagangan merupakan 3 andalan utama penopang perekonomian daerah Kabupaten Rembang sejak lama. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam postur perekonomian Rembang pada tahun 2016, yang sumbangan utamanya berasal dari tiga lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produksi barang dan jasa, yaitu lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Ketiganya secara agregat mampu menyumbang nilai tambah mencapai 63% lebih dari total PDRB Kabupaten Rembang tahun 2016.

Namun demikian, jika berkaca pada sejarah berdirinya Kabupaten Rembang, sedianya kabupaten ini merupakan daerah yang dulunya termashur sebagai salah satu kota pusat perdagangan dan maritim di kawasan pesisir utara Jawa yang dahulu dikenal dengan nama Lasem. Dari sumber sejarah, Lasem disebut-sebut sebagai salah satu pelabuhan besar milik Majapahit. Pelabuhan tersebut berada di Desa Dasun Kecamatan Lasem yang dikenal dengan Pelabuhan Lasem, dan telah digunakan untuk kegiatan ekspor terutama ekspor kayu jati dan komoditi dagang lainnya. Kapal-kapal yang merapat di Pelabuhan Lasem diantaranya adalah kapal-kapal dari negeri Tiongkok, salah satunya kapal yang di pimpin oleh Laksamana Cheng Ho pada 1413 M.



Sumber : <http://wartarembang.com/melihat-jejak-sejarah-lasem-rembang>

Gambar 4-29 Dokumentasi Aktivitas Galangan Kapal di Pelabuhan Lasem

Pada masa VOC nama Rembang sudah mulai disebut-sebut sebagai sebuah pelabuhan dan tempat pembuatan kapal (galangan kapal) yang cukup terkenal. Banyak catatan sejarah yang senantiasa menyebutkan Rembang sebagai daerah pelabuhan, yang tentunya mengandung pengertian tentang adanya aktivitas sebuah pelabuhan yang terletak di wilayah Rembang (Pelabuhan Lasem), baik sebagai daerah kabupaten maupun kota di pesisir utara Jawa.

Pada masa kejayaannya, galangan kapal yang terdapat di Pelabuhan Lasem yang semula untuk membuat kapal perang Majapahit, mulai dikembangkan menjadi galangan kapal dagang. Pada tahun 1856-1858, ketika di bawah perusahaan Brawne en Co, galangan tersebut terkenal hingga se-Asia Tenggara. Dalam kurun waktu dua tahun, galangan itu mampu membuat 35 kapal. Pada zaman penjajahan Jepang, galangan difungsikan untuk membuat kapal pengangkut perlengkapan militer untuk dibawa ke Morotai dan Papua.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas perdagangan dan galangan kapal di Pelabuhan Lasem lambat laun semakin memudar dan bahkan berhenti beroperasi. Yang menjadi besar dan berkembang justru adalah Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya serta Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Belakangan dengan semakin tingginya aktifitas di ke dua pelabuhan internasional tersebut, menyebabkan adanya kejenuhan baik di wilayah perairan maupun wilayah daratnya. Upaya pengembangan yang telah dilakukan dipandang sudah kurang efektif karena keterbatasan daya dukung lahan dan perairan yang ada di sekitar pelabuhan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah berupaya untuk membangun simpul-simpul transportasi laut baru melalui pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di beberapa daerah sekitar, yang diarahkan untuk bisa mengurangi kejenuhan aktifitas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas.

Berkaca pada sejarah kejayaan maritim Rembang di masa lampau serta melihat kesempatan yang ada, maka sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menginisiasi upaya pembangunan pelabuhan umum di Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil survei penjajakan dan kelayakan yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan pada tahun 2008, menyebutkan bahwa kondisi laut di pantai Kecamatan Sluke yang sekarang menjadi lokasi Pelabuhan Umum Rembang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan besar atau pelabuhan utama/internasional hub.

Pada dasarnya di Kabupaten Rembang sendiri saat ini terdapat dua pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Tasik Agung dan Pelabuhan Sluke. Namun Pelabuhan Tasik Agung relatif sudah tidak berfungsi mengingat adanya keterbatasan pada kondisi fisik lingkungannya, yaitu kondisi perairan yang dangkal akibat sedimentasi Sungai Karangeneng, area darat dan area pengembangan yang terbatas, serta berada pada kawasan permukiman yang cukup padat. Saat ini kawasan Tasik Agung lebih dominan digunakan untuk kegiatan perikanan. Berbeda dengan kondisi Pelabuhan Tasik Agung, kondisi kawasan Pelabuhan Sluke memiliki ketersediaan lahan pengembangan yang luas, jauh dari pemukiman penduduk, memiliki kontur kedalaman yang cukup, tingkat sedimentasi rendah, serta didukung oleh adanya arahan pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dalam kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang (RTRW Kabupaten Rembang).



Gambar 4-30 Lokasi Pelabuhan Rembang Tasik Agung dan Sluke

Upaya pembangunan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan Rembang di Kecamatan Sluke sejauh ini sangat didukung oleh beberapa investor yang melakukan kegiatan Kabupaten rembang. Beberapa investor tertarik dalam pengembangan tersebut mengingat pelabuhan merupakan titik kunci penting dalam meningkatkan pergerakan barang dan penumpang melalui laut, yang mana masih dianggap sebagai alat transportasi yang paling efektif untuk melayani angkutan barang atau penumpang dengan jumlah besar dan jarak perjalanan jauh (*high bulk commodities, low value, non urgent, united, dan long distance*).

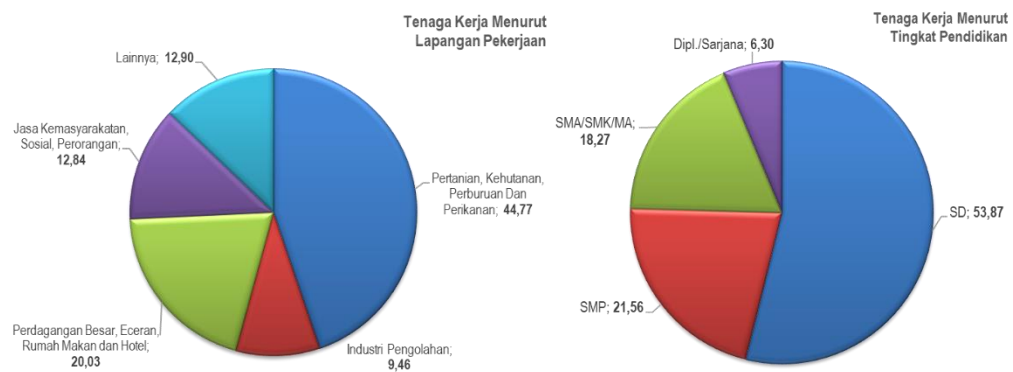


Gambar 4-31 Kondisi Pelabuhan Rembang di Kecamatan Sluke

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

Berdasarkan data tahun 2015, dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Rembang, sebanyak 66,97% merupakan angkatan kerja dan 33,03% bukan angkatan kerja. Dari seluruh angkatan kerja tersebut terdapat sejumlah 95,49% penduduk dengan status bekerja.

Keterlibatan penduduk usia produktif di Kabupaten Rembang dalam pekerjaan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tampak dari perbandingan TPAK keduanya (TPAK laki-laki 85,18% dan TPAK perempuan 49,26%). Tantangan dasar ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang adalah dari sisi kualitas SDM tenaga kerja. Sebagian besar penduduk yang bekerja, masih berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah (53,87%) dan SLTP (21,56%). Rendahnya kualitas tenaga kerja tersebut menyebabkan populasi tenaga kerja informal masih cukup tinggi (62,03%) di Kabupaten Rembang.



Gambar 4-32 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2015

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada tahun 2015 dari seluruh penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja ada sebanyak 44,70% yang bekerja di sektor pertanian, sementara yang bekerja di sektor industri sebesar 9,46%.

Gambaran proporsi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebut secara sekilas menunjukan kualitas yang memang masih kurang baik karena didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SLTP ke bawah, walaupun jika dilihat dari sisi kuantitas jumlahnya relatif cukup banyak.

C. Aspek Sarana Prasarana

Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui oleh jalur utama jaringan jalan lintas pantai utara (Jalan Raya Rembang-Semarang), Kabupaten Rembang memiliki posisi yang strategis dalam konstelasi pengembangan wilayah di Pulau Jawa bagian Utara. Kondisi ini juga dipertegas dengan posisi Kabupaten Rembang

sebagai kabupaten perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga menjadikannya kawasan perlintasan yang sangat strategis.

Sarana dan prasarana berupa jalan menuju lokasi dan dermaga sudah ada, namun prasarana penunjang lainnya sedang dan akan dibangun. Adapun panjang dermaga yang sudah terbangun saat ini yakni sepanjang 332 meter lebar 8 meter.



Gambar 4-33 Kondisi Eksisting Sarana Prasarana di Pelabuhan Rembang Sluke

Pembangunan sarana prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan pelabuhan lainnya, baik di lahan darat dan juga di perairan laut, sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Pelabuhan Rembang, pelaksanaannya direncanakan dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: Jangka Pendek (2016-2020); Jangka Menengah (2016-2025); dan Jangka Panjang (2016-2035).

D. Aspek Pasar

Aspek pasar dalam kegiatan pembangunan Pelabuhan Umum Rembang ini dapat dilihat dari rencana fungsi dan kegiatan pelabuhan serta peluang-peluang bangkitan kegiatan ekonomi (khususnya kegiatan industri dan perdagangan) yang ada di sekitar Kabupaten Rembang.

Dalam dokumen Rencana Induk Pelabuhan Rembang, Pelabuhan Umum Rembang direncanakan akan ditingkatkan status hirarkinya menjadi Pelabuhan Pengumpul (saat ini statusnya sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional) pada tahun 2020. Pelabuhan pengumpul merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang.

Kegiatan perusahaan Pelabuhan Umum Rembang direncanakan berbasis pada potensi dan kemungkinan pengembangan wilayah hinterland serta kondisi demand yang ada terkait dengan lalu lintas yang ada di Pelabuhan Rembang. Merujuk pada kebijakan yang ada, perkembangan pembangunan wilayah dan ekonomi yang direncanakan terdiri atas:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tambat;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan perbekalan kapal yang meliputi pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal barang curah kering dan general cargo;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Hal-hal tersebut diatas merupakan fungsi kegiatan primer Pelabuhan Umum Rembang. Untuk masa mendatang kecenderrungan pengembangannya dapat dilihat dari kegiatan yang ada serta komoditas potensial yang ada di wilayah hinterland Pelabuhan Umum Rembang.

Untuk kedepannya, kegiatan bongkar muat barang diperkirakan akan menjadi kegiatan utama di Pelabuhan Umum Rembang, khususnya untuk komoditas hasil tambang. Dengan

kecenderungan yang ada, maka fungsi-fungsi utama pelabuhan tersebut harus memfasilitasi kegiatan yang ada diantaranya adalah dengan menyediakan fasilitas bongkar muat, maupun fasilitas lainnya guna menunjang aktifitas utama tersebut.

Melihat kecenderungan kondisi dan aktifitas perekonomian di kawasan hinterland Pelabuhan Umum Rembang saat ini, dapat diidentifikasi peluang-peluang pasar bagi pelabuhan ini, diantaranya yakni:

- Mendukung aktifitas “Exxon Mobile” Blok Cepu;
- Mendukung aktifitas pabrik semen di Kabupaten Rembang;
- Mendukung kelancaran angkutan bahan tambang Galian C;
- Mendukung aktifitas PLTU Sluke;
- Mendukung kelancaran produk perikanan, pertanian, peternakan dan industri Kabupaten Rembang;
- Mendukung aktifitas kawasan industri di daerah hinterland;
- Sebagai pelabuhan alternatif, mengingat BOR (*Berth Occupancy Ratio*) Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak sudah cukup tinggi;
- Mendukung distribusi sumberdaya alam daerah hinterland;
- Sebagai daya ungkit tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kabupaten Rembang dan hinterlandnya.

Dengan melihat potensi dan peluang-peluang pasar sebagaimana digambarkan di atas maka kiranya pengembangan Pelabuhan Umum Rembang ini memiliki prospek pasar yang cukup bagus dan terbuka di masa mendatang.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Pada tahap konstruksi pembangunan Pelabuhan Umum Rembang keterlibatan stakeholders khususnya pelaku UKM memang diperkirakan akan kurang berperan. Akan tetapi pada tahap pasca konstruksi, terutama jika operasional pelabuhan telah berjalan secara optimal, maka dapat dipastikan keterlibatan stakeholders tersebut akan sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan bangkitan aktifitas ekonomi dari beroperasinya Pelabuhan Umum Rembang ini akan sangat tinggi terhadap seluruh struktur ekonomi Kabupaten Rembang, baik di sektor primer, sekunder, maupun tersier.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam arahan rencana struktur ruang Kecamatan Sluke yang salah satu fungsinya yakni diarahkan sebagai pusat pengembangan perhubungan laut. Selain itu dalam rencana pengembangan sistem jaringan prasarana ditetapkan pula bahwa pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi laut di Kabupaten Rembang yaitu pengembangan Pelabuhan Rembang dan Terminal Sluke di wilayah pantai Kecamatan Sluke sebagai Pelabuhan Pengumpan.

Selain kesesuaian dengan arahan kebijakan tata ruang Kabupaten Rembang, pembangunan Pelabuhan Umum Rembang juga telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen kajian dan rencana pengembangan yang komprehensif, diantaranya adalah pemenuhan ketentuan dokumen perizinan, kajian AMDAL, dan Rencana Induk pengembangan.

G. Aspek Lingkungan

Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan aspek lingkungan mengingat kajian mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan Pelabuhan Umum Rembang telah terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai kegiatan konstruksi (pra konstruksi, saat konstruksi, dan paska konstruksi) pembangunan pelabuhan ini memang telah selaras dengan ketentuan-ketentuan aspek kelestarian lingkungan.

H. Aspek Lahan

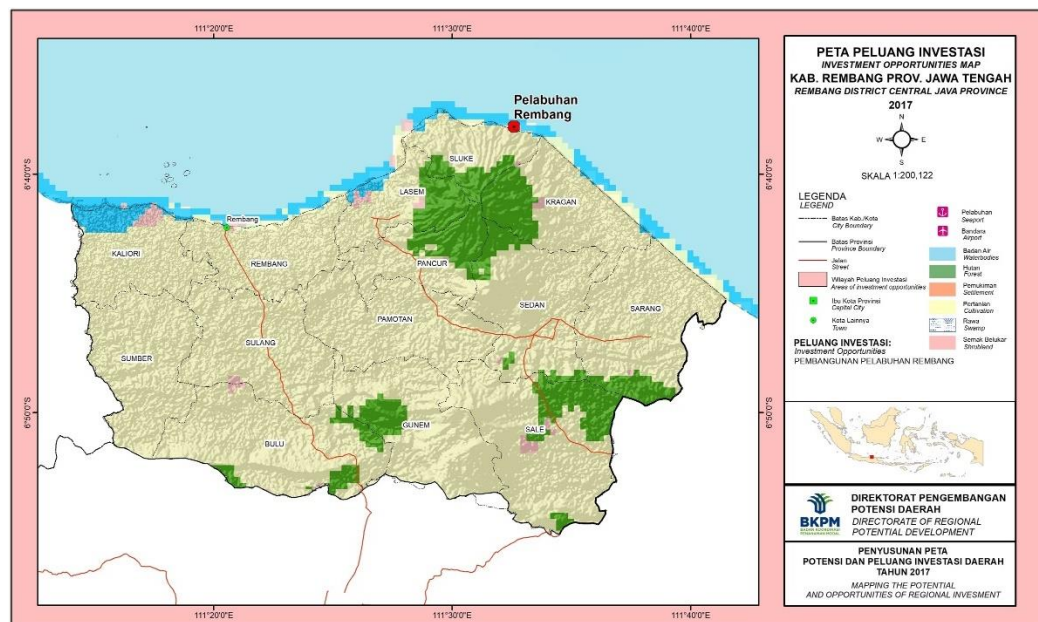
Secara geografis lokasi pembangunan Pelabuhan Umum Rembang berada pada titik koordinat 111°32'34" BT dan 6°38'7" LS, tepatnya di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Secara eksisting kawasan pelabuhan ini berada di sebelah sisi utara Jalan Raya Lintas Semarang-Rembang. Dalam konstelasi regional, pelabuhan tersebut berada di tengah antara 110 km dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan 201 km dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Saat ini sarana dan prasarana berupa jalan menuju lokasi dan dermaga sudah ada, namun prasarana penunjang lainnya sedang dan akan dibangun. Adapun panjang dermaga yang sudah terbangun saat ini yakni sepanjang 332 meter dan lebar 8 meter. Luas lahan kawasan pelabuhan ± 400 Ha, memanjang ± 8 km, dan siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga/dunia usaha. Lahan kawasan Pelabuhan Umum Rembang terbagi menjadi dua area yaitu area sisi sebelah timur yang direncanakan sebagai area dermaga umum dan

area sisi sebelah barat yang direncanakan sebagai area dermaga khusus (saat ini digunakan untuk bongkar muat komoditi batubara).



Gambar 4-34 Kedudukan Pelabuhan Umum Rembang dalam Konstelasi Regional



Gambar 4-35 Peta Peluang Investasi di Kabupaten Rembang Tahun 2017

Keunggulan lokasi yang dimiliki Pelabuhan Umum Rembang ini diantaranya:

1. Hampir tidak ada sedimentasi karena kontur pantai yang memanjang dan tidak ada sungai;
2. Lokasi Pelabuhan jauh dari pemukiman penduduk;
3. Wilayah pantai untuk kepentingan pengembangan pelabuhan disediakan sepanjang 8 km;

4. Berada pada jalan Pantura yang merupakan jalan utama yang menghubungkan kota besar di Jawa antara Surabaya - Semarang - Jakarta;
5. Berada ditengah-tengah antara 2 (dua) pelabuhan besar yaitu 110 km dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan 201 km dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
6. Bebas dari ranjau laut yang dinyatakan oleh Dinas Hidros TNI AL;
7. Berdampingan dengan Kawasan Industri Rembang (KIR).

Pelabuhan Umum Rembang direncanakan untuk melayani angkutan niaga dengan komodita dominan berupa bahan tambang, sedangkan komoditas lainnya akan dikembangkan sesuai perkembangannya dan permintaan industri yang berkembang di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Untuk mendukung kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Umum Rembang kapal rencana yang akan dilayani memiliki spesifikasi bobot maksimal 5.000 DWT dan rencana pengembangan menggunakan kapal berbobot sampai 10.000 DWT.

Tabel 4-30 Karakteristik Kapal Rencana di Pelabuhan Umum Rembang

JENIS KAPAL	MUATAN DWT (M/T)	DIMENSI (M)		DRAFT (M)
		PANJANG	LEBAR	
Kapal Barang	5.000	100,0	16,0	4,0
Kapal Barang	10.000	100,7	27,5	5,1

Sumber : Rencana Induk Pelabuhan Rembang 2016

Sesuai tahapan pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Umum Rembang, pada Tahap I Jangka Pendek (2016-2020) pembangunan dan pengembangan difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana dasar. Pada tahap ini pengembangan diarahkan di sisi barat pelabuhan, dimana pada area ini direncanakan akan lebih dominan untuk melayani komoditas batubara yang memerlukan area terpisah dengan komoditas lain. Pengembangan di sisi barat ini juga memperhatikan bahwa sampai saat ini belum terdapat kejelasan terkait status lahan dan kepastian penyerahan hak atas area darat/reklamasi di sisi timur kepada penyelenggara pelabuhan. Proses tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada periode ini, sehingga untuk sementara kegiatan bongkar muat di sisi timur akan memanfaatkan dermaga APBN.



Gambar 4-36 Kondisi Lahan Eksisting Pelabuhan Umum Rembang

Peluang Investasi : **PEMBANGUNAN PELABUHAN UMUM REMBANG**

Lokasi :

- Koordinat : 111°32'34" BT dan 6°38'7" LS
- Desa : Sendangmulyo
- Kecamatan : Sluke
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Rembang
- Provinsi : Provinsi Jawa Tengah

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal : -
- Luas : 400 Ha
- Status : HGU
- Kuasa Lahan : Kantor UPP Kelas III Rembang

- Kegiatan Investasi (Tahap I, Jangka Pendek 2016-2020) :
- Pembangunan dan pengembangan fasilitas pokok daratan (Reklamasi sisi barat pelabuhan, dermaga dan dolphin, lapangan penumpukan, gudang, bunker dan perbekalan, fasilitas pemadam kebakaran, penampungan dan pengolahan limbah, gudang B3, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan);
 - Pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang (Peningkatan jalan akses dan jalan lingkungan, gapura pintu gerbang/gate, sistem drainase, fasilitas perkantoran dan komunikasi, instalasi listrik dan air bersih, area parkir, fasilitas penunjang lainnya);
 - Pembersihan area/kawasan perairan sisi timur dari ranjau;

- Pengembangan fasilitas kaspel (SBNP) rambu navigasi perairan dan rambu suar darat;
- Penataan landscape/penghijauan (RTH).

Perkiraan Nilai : Rp. 190 Milyar
Investasi (Rp.)

4.4.4. Peluang Investasi Kabupaten Semarang

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Semarang adalah berupa kegiatan **Pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Semarang ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam konstelasi pembangunan regional Provinsi Jawa Tengah dan bahkan Nasional. Secara geografis posisi Kabupaten Semarang sangat strategis karena terletak di antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang (JOGLOSEMAR). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar *outlet-inlet* atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.

Distribusi barang/jasa antara ketiga kota besar (Yogyakarta, Solo dan Semarang), juga memberi dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Semarang. Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang juga berperan besar sebagai *hinterland* (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut (± 25 km) dan pelabuhan udara (± 23 km). Kawasan perkotaan Ungaran juga berperan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Semarang atau Kawasan Strategis KEDUNGSEPUR.

Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan terutama di bidang industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini karena disamping faktor kedudukan strategis geografis wilayahnya, juga didukung oleh potensi sumberdaya alamnya yang melimpah. Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB

kabupaten dari tahun ke tahun yaitu berturut-turut sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian.

Sektor industri di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap maupun dari nilai produksinya. Jumlah industri besar pada Tahun 2010 sebanyak 180 unit dengan tenaga kerja sebanyak 71.506 dan nilai produksinya mencapai 2,737 trilyun rupiah. Sedangkan pada Tahun 2015 jumlah industri besar mengalami kenaikan menjadi 193 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 72.387 orang dan nilai produksinya mencapai 3,196 trilyun. Sebaran industri besar mengelompok di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Pringapus dan Bergas.

Industri kecil menengah pada Tahun 2010 berjumlah 1.469 unit mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 12.369 orang dengan nilai produksi mencapai 431 milyar rupiah. Sementara pada Tahun 2015 industri kecil menengah sebanyak 1.660 unit, mampu menyerap 13.484 orang tenaga kerja dan nilai produksinya sebanyak 601 milyar rupiah. Sedangkan untuk industri tingkat rumah tangga tercatat sebanyak 9.558 unit dengan tenaga kerja 17.016 orang tersebar di seluruh kecamatan.

Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian sehingga terbentuklah sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat didalamnya.

Kabupaten Semarang dengan kondisi alam bukit dan pegunungan dengan udara sejuk dan panorama alam yang indah memberikan peluang dan kesempatan untuk lebih mengembangkan potensi di bidang pariwisata. Dengan potensi wisata yang sangat variatif yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, maupun wisata industri dan wisata minat khususnya, menjadikan Kabupaten Semarang sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan mengingat letak yang sangat dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4-31 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang

DAYA TARIK WISATA	DAYA TARIK WISATA
1. Candi Gedong songo	28. PT. Kanasritex
2. Monumen Palagan Ambarawa	29. PT. BatamTex
3. Taman Rekreasi Bukit Cinta	30. Benteng Willem H/ Pendem
4. Kolam Renang Muncul	31. Makam Gatot Subroto
5. Museum Kereta Api Ambarawa	32. Benteng William I

DAYA TARIK WISATA	DAYA TARIK WISATA
6. Taman Rekreasi Bandungan Indah	33. Makam Dr. Cipto Mangun Kusuma
7. Wana Wisata Penggaron	34. Cagar Suroloyo
8. Air Terjun Semirang	35. Candi Ngempon
9. Wana Wisata Umbul Songo	36. Candi/Situs Brawijaya
10. Pemandian Tirta Agro	37. Makam Candi Dukuh
11. T.R Kartika Wisata Kopeng	38. Makam Ki Ageng Alim
12. TM. Rekreasi Langen Tirta	39. Goa Palebur Gongso
13. Taman Rekreasi Rawa Permai	40. Air Terjun Curug
14. Agro Wisata Tlogo	41. Air Terjun Curug Lawe
15. Air Terjun Kali Pancur	42. Candi Klero
16. Goa Maria Kerep Ambarawa	43. YTC (Yoss Traditional Center)
17. Pasar Kriya	44. Kampoeng Kopi Banaran
18. Goa Maria Mustika	45. Fountain Water Resort
19. Makam Nyatnyono	46. Desa Wisata Bejalen
20. Sendang Senjoyo	47. Batik Gemawang
21. Umbul Sido Mukti	48. Curug 7 Bidadari
22. Sendang Kanoman/Kendalisodo	49. Fountain Water Park
23. Kolam Renang Bu Sri	50. Taman Kelinci
24. Pemancingan Ikan Blater	51. Bukit Ilerp Indah
25. Sri Kukus Rejo Gunung Kalong	52. Kampung Cowboy Tenganan
26. PT Coca Cola Amatil	53. Balemong
27. PT. Jamu Sido Muncul	

Sumber : RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Semarang, telah terbentuk 35 desa wisata. Diharapkan hal ini akan menambah daya tarik wisata serta meningkatkan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Kawasan Rawapening dengan *icon*-nya yakni Danau Rawapening, merupakan *landmark* Jawa Tengah dan bagian dari wilayah strategis Jratunseluna. Manfaat sosial ekonomi perairan Danau Rawapening bagi masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat di wilayah hilirnya sangat besar. Dengan memiliki multifungsi, perairan Danau Rawapening secara hidrologi berperan dalam menahan laju aliran air permukaan dan menampung aliran permukaan yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat secara nyata telah menumbuhkan ekonomi kerakyatan di sektor perikanan, pertanian, industri, jasa dan pariwisata. Beberapa kepentingan perairan Danau Rawapening yang utama adalah:

- Pasokan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan Timo, yang merupakan bagian dari interkoneksi listrik Jawa Bali;
- Irigasi pertanian bagi sawah di Kabupaten Semarang, Demak dan Grobogan;
- Pengendali banjir daerah hilir terutama di Kabupaten Demak dan Grobogan;

- d. Kegiatan perikanan darat baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan nelayan dan petani ikan;
- e. Penyedia air baku dan air untuk industri;
- f. Kegiatan sektor pertanian lahan pasang surut;
- g. Kegiatan pariwisata yaitu untuk Wisata Air maupun Agro Wisata;
- h. Kerajinan tangan yang memanfaatkan eceng gondok dan
- i. Pemanfaatan gambut sebagai bahan dasar pupuk organik/kompos dan sarana budidaya jamur.

Pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening pada dasarnya adalah sebuah konsep pengembangan kawasan wisata terpadu melalui integrasi kawasan (aglomerasi) Tlogo, Bawen dan Rawa Pening sebagai kawasan pariwisata yang terintegrasi. Total areal kawasan wisata terpadu ini sekitar ± 3.250 Ha, mencakup Tlogo 400 Ha (CMJT), Banaran 350 Ha (PTPN IX), Museum KA Ambarawa dan Stasiun KA Tuntang (PT KAI), Rawa Pening 2.500 ha (PUPR), serta Bukit Cinta (Pemkab Semarang).

POTENSI UTAMA TLOGO WENING



Gambar 4-37 Potensi Utama Kawasan Wisata Tlogo Wening



Gambar 4-38 Potensi Pendukung Kawasan Wisata Tlogo Wening

Upaya pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening secara terintegrasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut:

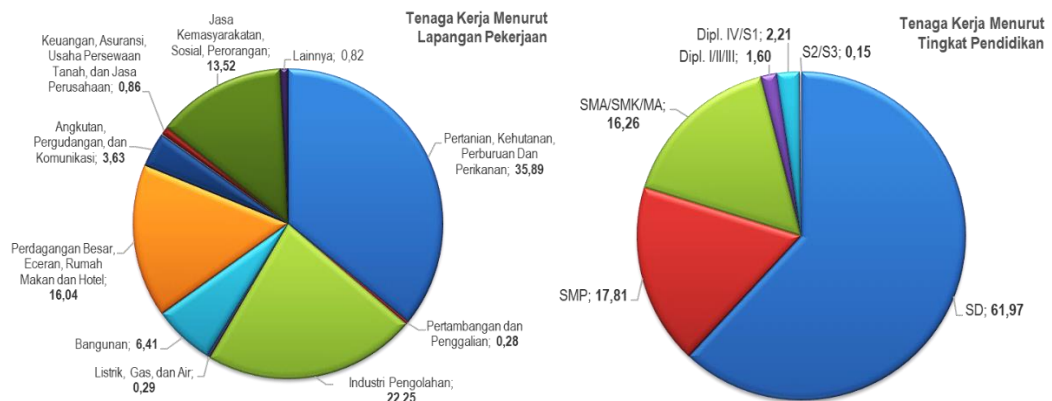
- Saat ini daya tarik wisata di kawasan Tlogo Wening dikelola beberapa kelembagaan dan kewenangan yang berbeda;
- Masing-masing daya tarik berkembang secara “*unplaned*”;
- Danau Rawa Pening sebagai daya tarik inti mengalami persoalan pertumbuhan enceng gondok tak terkendali, pendangkalan danau, pencemaran limbah serta tekanan penduduk/ekonomi;
- Belum ada *roadmap* dan *masterplan* yang jelas dalam penanganan dan pengelolaan Danau Rawa Pening.

Dengan adanya konsep pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening yang terintegrasi dan terpadu, diharapkan nantinya potensi-potensi pariwisata yang ada di kawasan ini dapat dimanfaatkan dan terkelola secara optimal, sehingga dampak positif nilai tambah (*added value*) yang dihasilkan akan semakin optimal pula.

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

Dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten terutama suplai tenaga kerja lulusan SMK/BLK dalam bidang kepariwisataan. Permasalahan yang berhubungan dengan SDM tenaga kerja dalam pengembangan pariwisata adalah pemahaman akan manfaat bidang kepariwisataan masih kurang dikarenakan latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang kepariwisataan. Disamping itu keterampilan SDM juga seringkali masih terbatas secara kualitas. Mereka

pada umumnya kurang mampu mencari peluang untuk memanfaatkan potensi kepariwisataan sebagai lahan perekonomian. Dengan di didukung SDM yang berkualitas maka akan sangat membantu dalam peningkatan produk wisata yang ada.



Gambar 4-39 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2015

Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 masih didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Selanjutnya 3 besar berturut-turut yaitu di sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor dan sektor Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dari sejumlah 961.421 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Semarang tahun 2015, proporsi terbesar tenaga kerja adalah berpendidikan terakhir SD/Sederajat yaitu sebesar 61,97 % dan selanjutnya diikuti oleh tenaga kerja yang berpendidikan terakhir SMP/Sederajat sebesar 17,81 % serta SMA/Sederajat sebesar 16,26 %.

Secara sekilas gambaran proporsi tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Semarang tersebut di atas secara relatif menunjukkan kualitas yang kurang menguntungkan karena masih didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang tingkat pendidikan yang kurang memadai. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Pemda Kabupaten Semarang untuk dapat mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut. Upaya pembinaan melalui pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan di bidang kepariwisataan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan yang ada di Kabupaten Semarang. Potensi kawasan wisata Tlogo Wening sebagai destinasi wisata unggulan sangat besar, akan tetapi akan sangat disayangkan jika SDM lokal justru tidak diberdayakan dan terserap dalam industri pariwisata yang berkembang tersebut.

C. Aspek Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan persamaan dari pelayanan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan wisata. Pelayanan menjadi sumber utama pendapatan bagi daerah tujuan wisata karena dengan adanya pengunjung bisa meningkatkan ekonomi di daerah wisata itu sendiri. Pelayanan akomodasi dalam bidang pariwisata biasanya menyediakan berbagai sarana perhotelan, penginapan, maupun pondok wisata. Tanpa adanya kegiatan pariwisata maka penyediaan penginapan atau perhotelan tidak akan berkembang karena tidak adanya pengunjung yang menjadi daya dukung pelayanan. Sebaliknya jika kegiatan pariwisata tanpa didukung dengan penyediaan perhotelan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Potensi Pariwisata di Kabupaten Semarang didukung dengan keberadaan Hotel yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Adapun banyaknya Hotel, Kamar Hotel dan Tamu yang menginap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-32 Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, Tamu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang Tahun 2015

	KLASIFIKASI HOTEL	JUMLAH HOTEL	JUMLAH KAMAR	TEMPAT TIDUR	JUMLAH TAMU	TENAGA KERJA
1	Bintang 1	3	120	203	15.283	79
2	Bintang 2	2	122	173	10.603	54
3	Bintang 3	2	107	185	20.907	61
4	Melati	211	4.024	6.004	805.464	1.327
5	Pondok Wisata	26	300	503	42.505	186
	Jumlah	244	4.673	7.068	894.762	1.707

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2017

Data tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel/penginapan di Kabupaten Semarang secara rata-rata mencapai 28,92 %. Secara spesifik tingkat hunian tersebut meliputi 22,25 % untuk hotel non bintang dan 29,79 % untuk hotel berbintang. Adapun rata-rata lama menginap tamu pada tahun yang sama di Kabupaten Semarang mencapai 1,08 hari untuk wisatawan domestik dan 2,44 hari untuk wisatawan mancanegara.

Selain hotel dan penginapan, sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Semarang juga sudah tersedia cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari cukup banyak dan tersebar nya restoran/rumah makan dan biro perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

D. Aspek Pasar

Kondisi pasar pariwisata di Kabupaten Semarang secara umum dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data yang ada, perkembangan

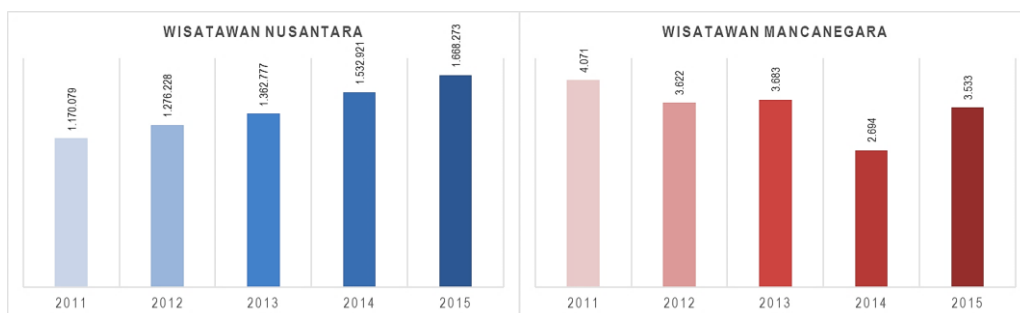
kunjungan wisatawan di beberapa tempat wisata mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4-33 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang Tahun 2015

OBYEK WISATA		JUMLAH PENGUNJUNG		
		WISNUS	WISMAN	TOTAL
	WISATA ALAM	38.988	0	38.988
1	Wana Wisata Penggaron	10.182	0	10.182
2	Air Terjun Semirang	14.680	0	14.680
3	Curug Kembar Bolodewo	5.449	0	5.449
4	Curug Tujuh Bidadari	8.677	0	8.677
	WISATA BUDAYA	857.373	1.737	859.110
1	Candi Gedong Songo	325.220	1.569	326.789
2	Museum Palagan Ambarawa	35.448	0	35.448
3	Musium Kereta Api Ambarawa	0	0	0
4	Makam Nyatnyono	162.535	0	162.535
5	Gua Maria Kerep Ambarawa	334.170	168	334.338
	WISATA BUATAN	771.912	1.796	773.708
1	Bukit Cinta Rawa Pening	32.599	0	32.599
2	Pemandian Muncul	123.484	0	123.484
3	The Fountain Water Park & Resto	44.406	0	44.406
4	Kolam Renang Tirta Argo (Siwarak)	111.007	0	111.007
5	Kolam Renang Bu Sri	11.453	0	11.453
6	Kartika Wisata Kopeng	104.052	0	104.052
7	Taman Wisata Rawa Permai	26.742	0	26.742
8	New Bandungan Indah Divaland	29.485	0	29.485
9	Wisata Argo Tlogo	39.338	674	40.012
10	Umbul Sido Mukti	53.278	0	53.278
11	Kampoeng Kopi Banaran	112.607	1.121	113.728
12	Langen Tirta	62.376	1	62.377
13	Taman Kelinci	21.085	0	21.085
	JUMLAH 2015	1.668.273	3.533	1.671.806
	2014	1.532.921	2.694	1.535.615
	2013	1.362.777	3.683	1.366.460
	2012	1.276.228	3.622	1.279.850
	2011	1.170.079	4.071	1.174.150

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2017

Jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2011 sebanyak 1.174.150 wisatawan, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.671.806 wisatawan. Peningkatan ini antara lain karena kegiatan promosi bersama dengan pelaku pariwisata seperti biro perjalanan dan pengelola obyek wisata swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik. Jumlah kunjungan wisata ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah PAD dari retribusi tempat wisata pada Tahun 2010 sebesar Rp 1.562.044.880,00 meningkat pada Tahun 2015 menjadi sebesar Rp 3.669.328.320,00 atau mengalami kenaikan sebesar 57,43%.



Gambar 4-40 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan total secara linier, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang dalam lima tahun terakhir terlihat mengalami pertumbuhan yang meningkat. Dari sebanyak 1.174.150 wisatawan pada Tahun 2011 meningkat menjadi 1.671.806 wisatawan pada Tahun 2015, artinya dalam lima tahun terjadi pertumbuhan sebesar 42,38% atau rata-rata sebesar 9,25% per tahun. Angka pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya potensi pariwisata di Kabupaten Semarang memang sangat menjanjikan.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Keterlibatan stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata tidak dapat berkembang optimal secara sendiri tanpa didukung oleh keterlibatan sektor terkait lainnya, seperti perhubungan, perdagangan, industri kecil-UKM, dan lain-lain.

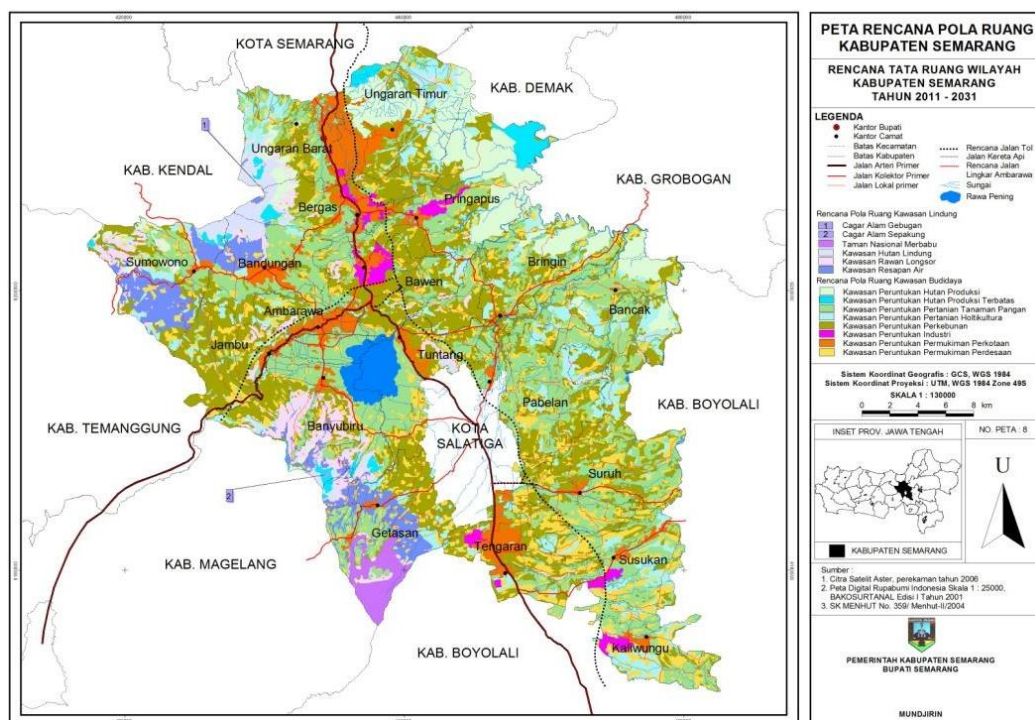
Dalam konteks peran serta masyarakat, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang umumnya dan kawasan Tlogo Wening khususnya, sejauh ini terlihat telah cukup baik. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Semarang pengelolaannya bahkan cukup banyak yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat di sekitar lokasi daya tarik wisata, baik dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Podarwis), LSM, Karang Taruna, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, masyarakat sekitar tidak hanya sekedar terlibat dalam pengelolaan semata tetapi lebih dari itu mereka turut serta terlibat dalam menghidupkan industri wisata di sekitarnya. Hal tersebut terlihat dari adanya aktifitas masyarakat yang terlibat seperti dalam penyediaan penginapan, kios/toko, warung makan/kuliner, oleh-oleh/souvenir, dan lain-lain. Peran masyarakat tersebut begitu penting karena pengembangan pariwisata sejatinya diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi daya tarik wisata.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening tentunya harus berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dari sisi aturan dan kebijakan tata ruang, pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening dapat ditinjau berdasarkan arahan rencana dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

Kawasan Wisata Tlogo Wening merupakan kawasan wisata yang melingkupi Danau Rawa Pening yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Dalam arahan struktur ruang di Kabupaten Semarang kawasan tersebut masuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 2 dengan Kecamatan Ambarawa sebagai pusat pengembangannya. Kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kecamatan Ambarawa tersebut yaitu Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen, dan Sumowono. Dalam pengembangannya SWP-2 diarahkan mempunyai fungsi sebagai kawasan industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum.

Dari sisi arahan pola ruang, Kawasan Wisata Tlogo Wening masuk dalam rencana kawasan peruntukan pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) 3 yang meliputi Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Getasan, dengan pusat pengembangannya yaitu di Kawasan Kopeng dan Ambarawa. Terdapat sejumlah 29 potensi daya tarik wisata yang ada di lingkup WPP-3 tersebut, dimana salah satunya adalah Bukit Cinta dan Wisata Agro Tlogo.



Gambar 4-41 Rencana Pola Ruang Kabupaten Semarang

Dengan melihat arahan kebijakan tata ruang Kabupaten Semarang, khususnya terkait rencana sistem perwilayahan pengembangan pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP), maka kiranya rencana pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening ini telah sesuai dan selaras dengan ketentuan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

G. Aspek Lingkungan

Konsep pembangunan yang ramah lingkungan (*sustainable development*) harus menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Pariwisata Tlogo Wening. Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada fungsi kawasan yang pada akhirnya justru akan sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga masyarakat di Kabupaten Semarang dan daerah sekitarnya secara umumnya.

Danau Rawa Pening yang luasnya 2.667 Ha dengan berbagai fungsi, antara lain, air baku untuk rumah tangga dan industri, air irigasi untuk 39.277 Ha sawah, energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jelok dan Timo Kecamatan Tuntang untuk Listrik di Jawa Tengah Bagian Timur, DIY, Solo, dan Kudus, Perikanan, dan Pariwisata. Namun, Danau Rawa Pening yang daerah tangkapan airnya (DTA) merupakan bagian hulu dari DAS Tuntang saat ini kondisinya kritis, yaitu laju sedimentasi dari 9 anak sungai yang masuk ke danau mencapai 150.000 m³/th, termasuk pertumbuhan enceng gondok yang sangat tinggi, sehingga mempercepat pendangkalan danau. Kondisi DAS Tuntang sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu daerah aliran sungai (DAS) prioritas di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 328/Menhut-II/2009.

Manfaat sosial ekonomi perairan Danau Rawapening bagi masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat di wilayah hilirnya sangat besar. Dengan memiliki multifungsi, perairan Danau Rawapening secara hidrologi berperan dalam menahan laju aliran air permukaan dan menampung aliran permukaan yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat secara nyata telah menumbuhkan ekonomi kerakyatan di sektor perikanan, pertanian, industri, jasa dan pariwisata.

Oleh karena kondisi Danau Rawapening yang semikian rupa saat ini maka upaya pengembangan Kawasan Pariwisata Tlogo Wening harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, terutama dari aspek kelestarian lingkungan sekitar kawasan. Jangan sampai hanya karena mengejar keuntungan ekonomis pariwisata semata hingga mengabaikan aspek kelestarian lingkungannya.

H. Aspek Lahan

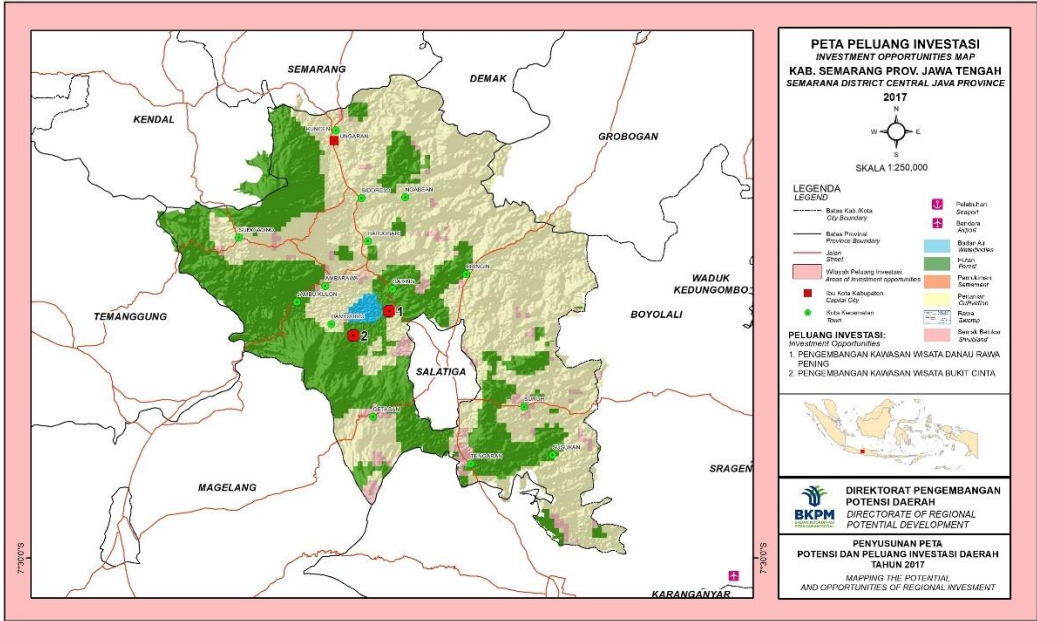
Sebagai sebuah upaya pengembangan kawasan pariwisata dalam konsep kawasan pariwisata terpadu, pengembangan Kawasan Wisata Tlogo Wening di Kabupaten Semarang melingkupi beberapa lokasi daya tarik wisata yang berada di sekitar Rawa Pening, Tlogo, dan Bawen, dengan total areal kawasan sekitar ± 3.250 Ha. Rawa pening sendiri sebagai daya tarik wisata utamanya merupakan sebuah danau alam seluas 2.670 Ha yang menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran, danau yang identik dengan legenda Baru Klinthing ini relatif dangkal dan menjadi hulu bagi Sungai Tuntang.

Agrowisata Tlogo dan Bukit Cinta adalah dua dari sekian banyak daya tarik wisata yang berada di sekitaran Rawa Pening. Kawasan Agrowisata Tlogo terletak di Desa Delik Kecamatan Tuntang, dibuka pertama kali pada tahun 1999 sebagai bagian dari Perusahaan Daerah Perkebunan Tlogo. Kawasan wisata ini bisa ditempuh dari Semarang (40 km), Yogyakarta (80 km), dan Solo (60 km). Terletak di ketinggian 430 - 675 mdpl kawasan berhawa sejuk dengan panorama perbukitan ini dikelilingi oleh berbagai daya tarik wisata seperti Danau Rawa Pening, Gunung Merbabu, Telomoyo dan Ungaran. Kawasan Tlogo didominasi oleh perkebunan kopi seluas 97 Ha, perkebunan karet 233 Ha, perkebunan cengkeh 64 Ha dan perkebunan buah-buahan tropis 20 Ha. Total luas area yang dikuasi pekebunan Tlogo mencakup 414 Ha.



Gambar 4-42 Kawasan Agrowisata Tlogo

Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti *coffee walk* (menyusuri jalan setapak di sela-sela perkebunan kopi), melihat kegiatan petani sewaktu memetik daun teh, buah kopi atau menyadap karet, bahkan wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pengolahan getah karet menjadi karet.



Gambar 4-43 Peta Peluang Investasi di Kabupaten Semarang Tahun 2017

Bukit Cinta merupakan salah satu lokasi daya tarik wisata yang berada persis di tepi Danau Rawa Pening, tepatnya di sisi sebelah barat daya kawasan Danau Rawa Pening. Terletak di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, kawasan seluas 2 hektar ini merupakan sebuah bukit kecil yang sesuai dengan namanya, dahulu merupakan tempat memadu kasih pengantin baru.

Pada mulanya Bukit Cinta berasal dari sebuah tempat tinggi/bukit yang dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sebagai gardu pemantauan di Rawa Pening. Tujuan pembangunannya untuk mengendalikan pertumbuhan eceng gondok karena adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik kolonial yang dikembangkan di Rawa Pening. Pada tahun 1975, gardu pemantauan tersebut diubah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menjadi Gardu Pemkitangan Alam Rawa Pening. Selanjutnya pada tahun 1983, tempat tersebut mulai dikenal masyarakat luas sebagai kawasan wisata dan berganti nama menjadi Bukit Cinta.



Gambar 4-44 Kawasan Wisata Bukit Cinta

Untuk menuju kawasan ini wisatawan harus melewati jalan beraspal kecil dari Jalan Lingkar Ambarawa atau jalan tembus dari Jalan Raya Salatiga-Ambarawa. Akses jalan menuju ke kawasan Bukit Cinta masih berupa jalan pedesaan yang sempit.

Panorama Danau Rawa Pening yang indah menjadi daya tarik utama Bukit Cinta. Panorama telaga dengan latar belakang perbukitan memberikan rasa tenang bagi wisatawan yang berkunjung, dan mampu menjadi obat penghilang rasa lelah bagi wisatawan yang baru melakukan perjalanan jauh. Di kawasan ini telah tersedia berbagai fasilitas yang dibangun untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan, antara lain rumah makan, WC umum, tempat ibadah, dan beberapa penginapan. Terdapat pula perahu-perahu yang dapat disewa oleh wisatawan yang ingin menikmati romantisme di atas Rawa Pening. Bagi wisatawan yang gemar olah raga air, terdapat pula wahana seperti ski air dan canoe.

Peluang Investasi : **PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TLOGO WENING**

	Agrowisata Tlogo	Bukit Cinta
Lokasi :		
- Desa	: Delik	Kebondowo
- Kecamatan	: Tuntang	Banyubiru
- Kabupaten/Kota	: Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang
- Provinsi	: Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal	:		
- Luas	:	414 Ha	45 Ha
- Status	:	Hak Pakai	Hak Pakai
- Kuasa Lahan	:	PD. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), Perusda Prov. Jawa Tengah	Pemda Kabupaten Semarang

Kegiatan Investasi	:	- Pembangunan hotel/ resort/homestay	- Pembangunan hotel/ resort/homestay
		- Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata lainnya	- Penataan kawasan daya tarik wisata
			- Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata lainnya

Perkiraan Nilai Investasi (Rp.)	:	Rp. 500 Milyar	Rp. 100 Milyar
------------------------------------	---	----------------	----------------

4.4.5. Peluang Investasi Kota Palembang

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kota Palembang adalah berupa kegiatan **Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Kemaro**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kota Palembang ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatra Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Pulau Sumatra setelah Medan. Kota ini dahulu merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya sebelum dihancurkan oleh Majapahit. Sampai sekarang bekas area Kerajaan Sriwijaya masih ada di Bukit Siguntang, di Palembang Barat.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Palembang termasuk daerah yang minim akan potensi sektor sumber daya alam. Bahkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 terbesar disumbangkan dari pajak bangunan dan industri lainnya. Namun demikian Kota Palembang mempunyai destinasi wisata yang tidak kalah bagus dan menariknya dibanding dengan kota-kota lainnya. Beberapa daya tarik wisata yang terdapat di Kota

Palembang antara lain Sungai Musi, Jembatan Ampera, Hutan Punti Kayu dan masih banyak lagi yang lainnya.

Potensi daya tarik wisata tersebut didukung lagi dengan ketersediaan sarana prasarana penunjangnya yang cukup lengkap, baik berupa akomodasi maupun aksesibilitas. Kota Palembang mempunyai satu Bandar Udara, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan memiliki dua pelabuhan laut utama, yaitu Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan 36 Ilir.



Saat ini pembangunan di Kota Palembang tengah terus menggeliat, satu diantaranya adalah dengan dibangunnya *Light Rail Transit* (LRT) yang merupakan sistem transportasi masal dengan moda kereta api ringan yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring, sepanjang 22,5 Km yang konstruksinya dimulai sejak Januari 2016.

Di Kota Palembang juga akan dibangun Sirkuit MotoGP yang rencananya dibangun di atas lahan seluas 120 hektar di Jakabaring dengan panjang lintasan mencapai 4,31 kilometer yang terdiri dari 14 tikungan dan 750 meter trek lurus dan lebar lintasan 12 meter. Daam Sirkuit MotoGP ini nantinya juga akan terdapat sembilan tribun yang mampu menampung 130 ribu penonton.

Dari aspek posisi geografis wilayahnya, kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini pada dasarnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota tepi air (*waterfront city*). Hal tersebut mengingat Kota Palembang posisinya berada persis di sekitar tepian Sungai Musi. Selain pengembangan kota tepi air, pengembangan pariwisata juga dilakukan dengan pengembangan daya tarik wisata Pulau Kemaro, Hutan Kota Puntikayu, Jembatan Ampera dan Benteng Kota Besak. Kawasan permukiman lama seperti di KM 12 dan Pasar 16 Ilir (daerah etnis India) dapat pula dikembangkan sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya (*heritage*) yang memiliki ciri khas masing-masing.

Tabel 4-34 Daya Tarik Wisata di Kota Palembang

NO	JENIS WISATA	OBYEK DAYA TARIK WISATA
1.	Wisata Alam: 5	1. Pulau Kemaro 2. Sungai Musi 3. Kambang Iwak 4. Hutan Wisata Punti Kayu 5. Pulau Kerto
2.	Wisata Sejarah dan Budaya: 43	1. Kantor Walikota (Ex.Water Leiding)

NO	JENIS WISATA	OBYEK DAYA TARIK WISATA
		2. Jembatan Ampera 3. Benteng Kuto Besak 4. Bukit Siguntang 5. Museum Balaputra Dewa 6. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 7. Museum Dr. A.K.K Gani 8. Museum Tekstil 9. Monumen Perjuangan Rakyat 10. Masjid Agung 11. Masjid Ki Merogan 12. Masjid Lawang Kidul 13. Masjid Pulau Seribu 14. Masjid Al Mahmudiyah Simpang Suro 15. Masjid Sultan Agung 16. Makam Kambang Koci 17. Makam Kawah Tekurep 18. Makam Sultan Agung 19. Makam Sabokingking 20. Makam Bagus Kuning 21. Makam CindeWelang 22. Makam Ki Gede Ing Suro 23. Makam Sultan M.Mansyur 24. MakamAriodillah 25. Rumah Limas Cek Mas 26. Rumah Limas Bayumi Wahab 27. Kawasan 1 Ilir (Rumah Temenggung Jompong, Masjid dan Makam Sultan Agung, serta pusat kerajinan rotan) 28. Kawasan Pasar 16 Ilir 29. Kawasan Tuan Kentang 30. Kawasan Sungai Lumpur 31. Kawasan Sekanak 32. Kampung Songket 33. Lr.Kampung Firma 34. Kelenteng Dwi Kwan Im 35. Kampung Kapitan 36. Kampung Arab Al-Munawar 37. Pabrik Es Assegaf 16 Ulu 38. Rumah-Rumah Adat di Dekranasda 39. Goa Jepang Jalan Ario Kemuning 40. Goa Jepang Jalan Joko 41. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) 42. Museum TPKS 43. Balai Pertemuan KBTR
3.	Wisata Buatan: 16	1. Jakabaring Sport City 2. OPI Water Fun 3. Fantasy Island 4. Amanzi Water Park 5. Danau OPI 6. Al Quran Al-Akbar

NO	JENIS WISATA	OBYEK DAYA TARIK WISATA
		7. Palembang Bird Park 8. Masjid Cheng Ho 9. PT. PUSRI 10. PT. PERTAMINA 11. Graha Songket 12. Rumah Limas KMS. HA. Aziz Hamid 13. Kawasan Kampung Ukir 14. Monumen SILK AIR (Kebun Bunga) 15. Sudirman Walk 16. Kenten Park
JUMLAH ODTW		64

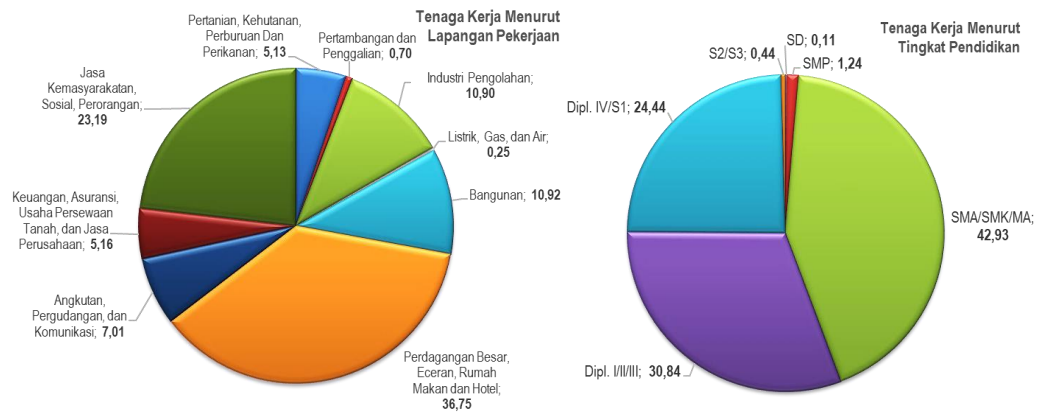
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang Tahun 2017



Gambar 4-45 Daya Tarik Wisata di Kota Palembang

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

Dalam pengembangan Kawasan Wisata Pulau Kemaro perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten terutama suplai tenaga kerja terampil dalam bidang kepariwisataan. Permasalahan yang sering muncul berhubungan dengan SDM tenaga kerja dalam pengembangan pariwisata adalah pemahaman akan manfaat bidang kepariwisataan masih kurang dikarenakan latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang kepariwisataan. Disamping itu keterampilan SDM juga seringkali masih terbatas secara kualitas. Mereka pada umumnya kurang mampu mencari peluang untuk memanfaatkan potensi kepariwisataan sebagai lahan perekonomian. Dengan di didukung SDM yang berkualitas maka akan sangat membantu dalam pengembangan pariwisata yang ada.



Gambar 4-46 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kota Palembang Tahun 2015

Mata pencaharian utama penduduk di Kota Palembang dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 masih didominasi dari sektor Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Selanjutnya 3 besar berturut-turut yaitu di sektor Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sektor Bangunan, dan sektor Industri pengolahan.

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dari sejumlah 663.306 angkatan kerja yang ada di Kota Palembang tahun 2015, proporsi terbesar tenaga kerja adalah berpendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu sebesar 42,93 % dan selanjutnya diikuti oleh tenaga kerja yang berpendidikan terakhir Dipl. I/II/III sebesar 30,84 % serta Dipl. IV/Sarjana sebesar 24,44 %.

Secara sekilas gambaran proporsi tenaga kerja yang terdapat di Kota Palembang tersebut di atas secara relatif menunjukkan kualitas yang cukup baik karena didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang tingkat pendidikan SMA/Sederajat ke atas. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi Kota Palembang untuk dapat terus meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut. Upaya pembinaan melalui pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan di bidang kepariwisataan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan yang ada di Kota Palembang. Potensi sektor pariwisata yang dimiliki Kota Palembang sangat besar, akan tetapi akan sangat disayangkan jika SDM lokal justru tidak diberdayakan dan terserap dalam industri pariwisata yang berkembang tersebut.

C. Aspek Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan persamaan dari pelayanan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan wisata. Pelayanan menjadi sumber utama pendapatan bagi daerah tujuan wisata karena dengan adanya pengunjung bisa meningkatkan ekonomi di daerah wisata itu sendiri. Pelayanan akomodasi dalam bidang pariwisata biasanya menyediakan

berbagai sarana perhotelan, penginapan, maupun pondok wisata. Tanpa adanya kegiatan pariwisata maka penyediaan penginapan atau perhotelan tidak akan berkembang karena tidak adanya pengunjung yang menjadi daya dukung pelayanan. Sebaliknya jika kegiatan pariwisata tanpa didukung dengan penyediaan akomodasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Potensi pariwisata di Kota Palembang didukung dengan keberadaan hotel dan penginapan yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kota Palembang. Adapun banyaknya Hotel, Kamar Hotel dan Tempat Tidur yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-35 Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur di Kota Palembang Tahun 2016

KECAMATAN	HOTEL BINTANG			HOTEL NON BINTANG		
	JUMLAH HOTEL	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	JUMLAH HOTEL	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR
Irir Barat II	-	-	-	-	-	-
Gandus	-	-	-	-	-	-
Seberang Ulu I	1	54	108	4	85	170
Kertapati	-	-	-	-	-	-
Seberang Ulu II	-	-	-	6	112	224
Plaju	-	-	-	-	-	-
Irir Barat I	6	750	1.500	1	14	28
Bukit Kecil	13	1.232	2.464	16	334	668
Irir Timur I	7	789	1.578	19	455	910
Kemuning	4	374	748	3	62	124
Irir Timur II	11	1.059	2.118	28	723	1.446
Kalidoni	1	16	32	2	63	126
Sako	-	-	-	-	-	-
Sematang Borang	-	-	-	-	-	-
Sukarami	4	144	288	9	215	430
Alang-alang Lebar	6	247	494	2	201	402
KOTA PALEMBANG	53	4.665	9.330	90	2.264	4.528

Sumber : Kota Palembang Dalam Angka Tahun 2017

Data tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel/penginapan di Kota Palembang secara rata-rata mencapai 51,12 %. Secara spesifik tingkat hunian tersebut meliputi 42,24 % untuk hotel non bintang dan 60,00 % untuk hotel berbintang. Adapun rata-rata lama menginap tamu pada tahun yang sama di Kota Palembang mencapai 1,60 hari untuk hotel non bintang dan 1,88 hari untuk hotel berbintang.

Selain hotel dan penginapan, sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata di Kota Palembang juga sudah tersedia cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari cukup banyak dan tersebar nya restoran/rumah makan dan biro perjalanan wisata yang ada di Kota Palembang.

D. Aspek Pasar

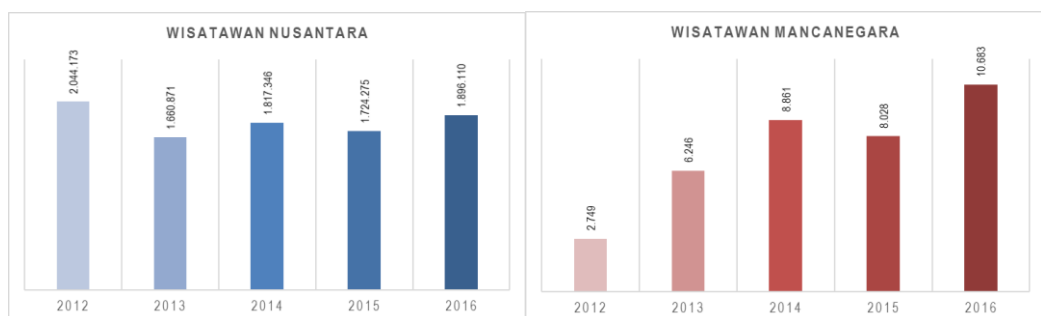
Kondisi pasar pariwisata di Kota Palembang secara umum dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data yang ada, perkembangan kunjungan wisatawan setiap bulannya mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4-36 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Palembang Tahun 2016

BULAN		JUMLAH PENGUNJUNG		
		WISNUS	WISMAN	TOTAL
1	Januari	138.852	747	139.599
2	Februari	164.044	842	164.886
3	Maret	207.005	1.320	208.325
4	April	182.203	696	182.899
5	Mei	202.919	1.111	204.030
6	Juni	115.928	462	116.390
7	Juli	170.875	939	171.814
8	Agustus	119.363	907	120.270
9	September	121.736	890	122.626
10	Oktober	136.461	991	137.452
11	November	152.908	894	153.802
12	Desember	183.816	884	184.700
	2016	1.896.110	10.683	1.906.793
	2015	1.724.275	8.028	1.732.303
	2014	1.817.346	8.861	1.826.207
	2013	1.660.871	6.246	1.667.117
	2012	2.044.173	2.749	2.046.922

Sumber : Kota Palembang Dalam Angka Tahun 2017

Secara total, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2012 sebanyak 2.046.922 wisatawan, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1.906.793 wisatawan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan signifikan jumlah wisatawan nusantara di Kota Palembang, yakni dari sejumlah 2.044.173 wisnus pada tahun 2012 menjadi 1.896.110 wisnus pada tahun 2016. Sementara di sisi lainnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara justru mengalami lonjakan positif kunjungan yang sangat signifikan, yakni dari 2.749 wisman pada tahun 2012 melonjak menjadi 10.683 wisman pada tahun 2016.



Gambar 4-47 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Palembang Tahun 2012-2016

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan total secara linier, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palembang dalam lima tahun terakhir terlihat mengalami penurunan. Dari sebanyak 2.046.922 wisatawan pada tahun 2012 menjadi 1.906.793 wisatawan dan pada tahun 2016, artinya dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sebesar -6,85% atau rata-rata sebesar -1,37% per tahun. Namun jika dilihat sisi pertumbuhan wisatawan mancanegara, pertumbuhannya justru menunjukkan angka yang sangat positif. Dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan wisman sebesar 288,61%, atau 57,72% per tahunnya. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya potensi pariwisata di Kota Palembang memang sangat menjanjikan.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Keterlibatan stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata tidak dapat berkembang optimal secara sendiri tanpa didukung oleh keterlibatan sektor terkait lainnya, seperti perhubungan, perdagangan, industri kecil-UKM, dan lain-lain.

Dalam konteks peran serta masyarakat, pengembangan kepariwisataan di Kota Palembang umumnya dan kawasan Pulau Kemaro khususnya, sejauh ini terlihat telah cukup baik. Beberapa destinasi wisata di Kota Palembang pengelolaannya bahkan ada yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat di sekitar lokasi daya tarik wisata, baik dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Podarwis), LSM, Karang Taruna, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, masyarakat sekitar tidak hanya sekedar terlibat dalam pengelolaan semata tetapi lebih dari itu mereka turut serta terlibat dalam menghidupkan industri wisata di sekitarnya. Hal tersebut terlihat dari adanya aktivitas masyarakat yang terlibat seperti dalam penyediaan penginapan, kios/toko, warung makan/kuliner, oleh-oleh/ souvenir, dan lain-lain. Peran masyarakat tersebut begitu penting karena pengembangan pariwisata sejatinya diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi daya tarik wisata.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa pengembangan Kawasan Wisata Pulau Kemaro dilihat dari aspek tata ruang telah sesuai dengan ketentuan rencana peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032. Kawasan sekitar tepian Sungai Musi merupakan kawasan yang masuk dalam Kawasan Strategis Kota Palembang berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, yang

pengembangannya diarahkan untuk pengembangan pariwisata sejarah dan budaya serta *waterfront city*.

Pulau Kemaro yang berada di Kecamatan Ilir Timur II juga merupakan salah satu objek daya tarik wisata unggulan yang ada di Kota Palembang yang diarahkan untuk pengembangan wisata sejarah dan budaya.

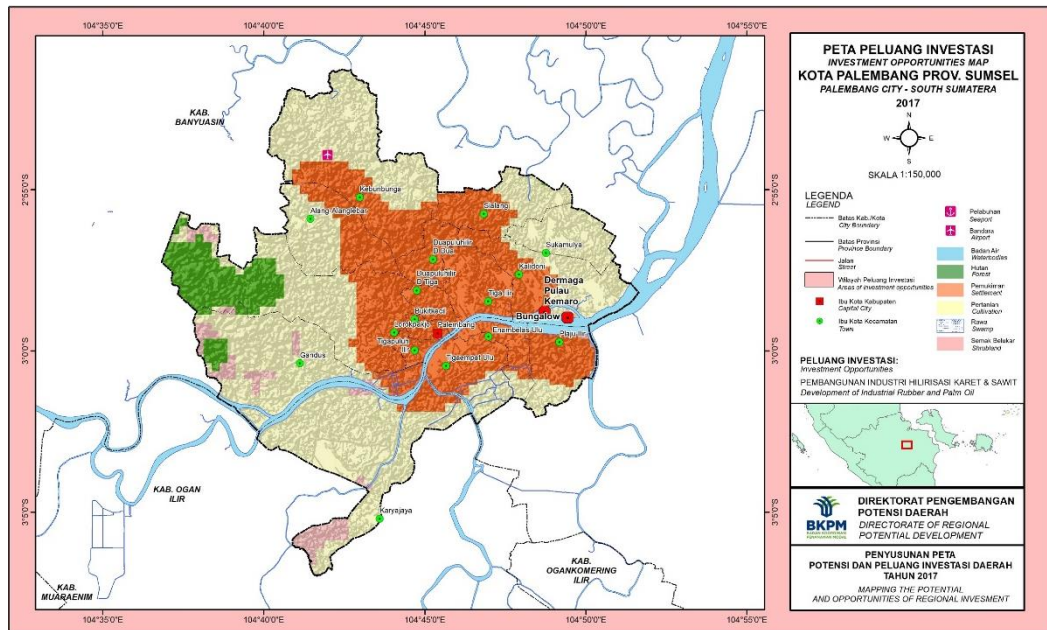
G. Aspek Lingkungan

Konsep pembangunan yang ramah lingkungan (*sustainable development*) harus menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Pulau Kemaro. Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada fungsi kawasan yang pada akhirnya justru akan sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga masyarakat di Kota Palembang.

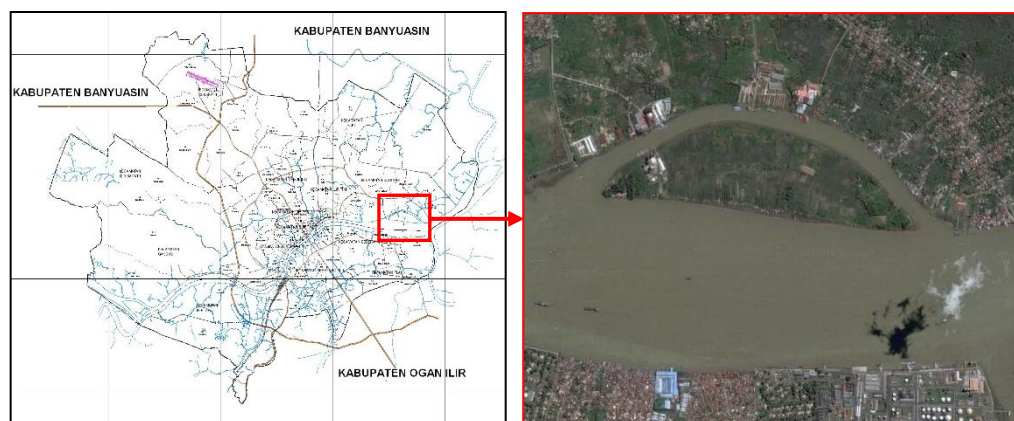
Wilayah Pulau Kemaro yang berupa delta, menyebabkan kawasan ini menjadi sangat terpengaruh terhadap kondisi pasang surut Sungai Musi, terutama pada wilayah yang belum di DAM berupa lahan rawa. Pada area ini kondisi tanah cenderung basah, terutama pada musim-musim penghujan. Bila musim penghujan tiba lahan yang berupa rawa mengalami peningkatan ketinggian air sehingga seringkali daratan yang ada tertutup oleh perairan. Mengingat rentannya kawasan Pulau Kemaro terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan sekitar, maka konsep pengembangan yang berwawasan lingkungan harus menjadi landasan utama pembangunannya.

H. Aspek Lahan

Pulau Kemaro sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palembang, sedianya merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera dan sekitar 40 km dari pusat Kota Palembang. Nama 'Pulau Kemaro' berarti pulau yang tidak pernah tergenang air. Meskipun terjadi air pasang besar, Pulau Kemaro tidak akan mengalami banjir dan apabila dilihat dari kejauhan pulau ini tampak terapung-apung di atas perairan Sungai Musi. Pulau Kemaro terletak di daerah industri yaitu di antara Pabrik Pupuk Sriwijaya dan Pertamina Plaju dan Sungai Gerong. Di tempat ini terdapat sebuah vihara cina (klenteng Hok Tjing Rio) dan juga juga kuil Buddha yang sering dikunjungi umat Buddha untuk berdoa atau berziarah. Di pulau ini juga rutin diadakan acara Cap Go Meh setiap Tahun Baru Imlek.



Gambar 4-48 Peta Peluang Investasi di Kota Palembang Tahun 2017



Gambar 4-49 Lokasi Pulau Kemaro

Pulau Kemaro dengan total luasan ± 80 Ha memiliki topografi yang berupa dataran rendah dengan ketinggian tanah 5 m dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di Pulau Kemaro berkisar antara 200-300 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 32°C . Kondisi lahan di Pulau Kemaro sekitar 80% adalah tanah persawahan sedangkan selebihnya adalah tanah alang-alang, belukar, dan ladang serta tanah rawa dengan persentase yang kecil.

Daya tarik utama Pulau Kemaro adalah Pagoda berlantai 9 yang menjulang di tengah-tengah pulau. Bangunan ini baru dibangun tahun 2006. Selain pagoda ada klenteng yang sudah dulu ada. Klenteng Hok Tjing Rio atau lebih dikenal Klenteng Kuan Im dibangun sejak tahun 1962. Di depan klenteng terdapat makam Tan Bun An (Pangeran) dan Siti Fatimah (Putri) yang berdampingan. Kisah cinta mereka berdualah yang menjadi legenda terbentuknya pulau ini.

Selain itu ditempat ini juga terdapat sebuah Pohon yang disebut sebagai "Pohon Cinta" yang dilambangkan sebagai ritus "Cinta Sejati" antara dua bangsa dan dua budaya yang berbeda pada zaman dahulu antara Siti Fatimah Putri Kerajaan Sriwijaya dan Tan Bun An Pangeran dari Negeri Cina. Konon, jika ada pasangan yang mengukir nama mereka di pohon tersebut maka hubungan mereka akan berlanjut sampai jenjang pernikahan. Untuk itulah pulau ini juga disebut sebagai Pulau Jodoh.

Gambaran kondisi rona lingkungan wilayah Pulau Kemaro dapat terlihat dari aspek penataan fungsi dan tata hijau.

1. Fasilitas Peribadatan Kelenteng Hok Ceng Bio

Penataan lingkungan dalam wilayah kelenteng cukup teratur, terdapat beberapa fungsi penunjang lain seperti dermaga, rumah penjaga yang juga berfungsi sebagai yayasan pengelola kelenteng, makam, rest area berupa taman di sekitar kelenteng.

Kondisi tata bangunan pada fasilitas peribadatan Kelenteng Hok Ceng Bio dalam kondisi cukup baik. Terdapat bangunan toilet umum sebagai fasilitas umum dalam area Kelenteng yang terletak jauh dari bangunan kelenteng dan pagoda. Tata bangunan yang ada diatur sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan ilmu *Feng Shui*, di mana bangunan yang ada selaras dengan lingkungan sekitar.

2. Fasilitas Permukiman dan Perkebunan

Wilayah yang dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman dan perkebunan oleh masyarakat yaitu wilayah yang berada pada sisi yang berbelakangan dengan lokasi kelenteng. Area ini berada di luar pagar batas wilayah kelenteng. Pemukiman yang ada di kawasan ini tumbuh tanpa adanya perencanaan. Orientasi dari pola pemukiman ini yaitu linier mengikuti pesisir tepian pulau yang berbatasan langsung dengan sungai Musi. Rumah-rumah yang ada berupa rumah panggung di atas tanah rawa, dengan muka bangunan menghadap ke Sungai Musi.

Area perkebunan berada di bagian belakang rumah, yaitu ke arah darat pulau. Perkebunan yang diusahakan penduduk yaitu kebun jagung, persawahan dan tanaman palawija lainnya.

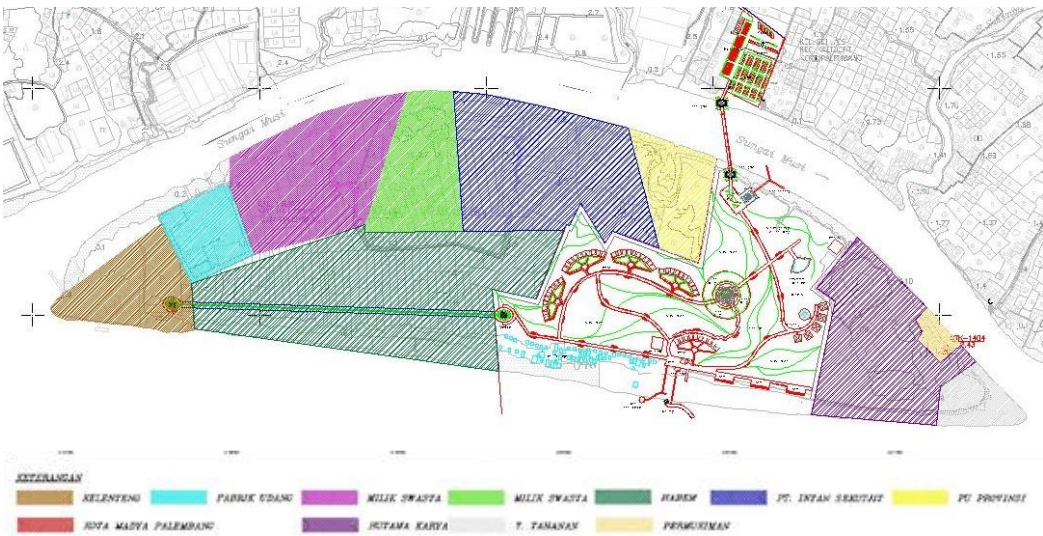




Gambar 4-50 Kondisi Eksisting Pulau Kemaro

Penataan Kawasan Pulau Kemaro berdasarkan RTRDK Kecamatan Ilir Timur II adalah pengoptimalan atau peningkatan potensi kawasan yang telah ada, baik secara fisik kawasan maupun non fisik masyarakatnya untuk kepentingan industri pariwisata (*urban regeneration* atau *urban development*), sebagai berikut:

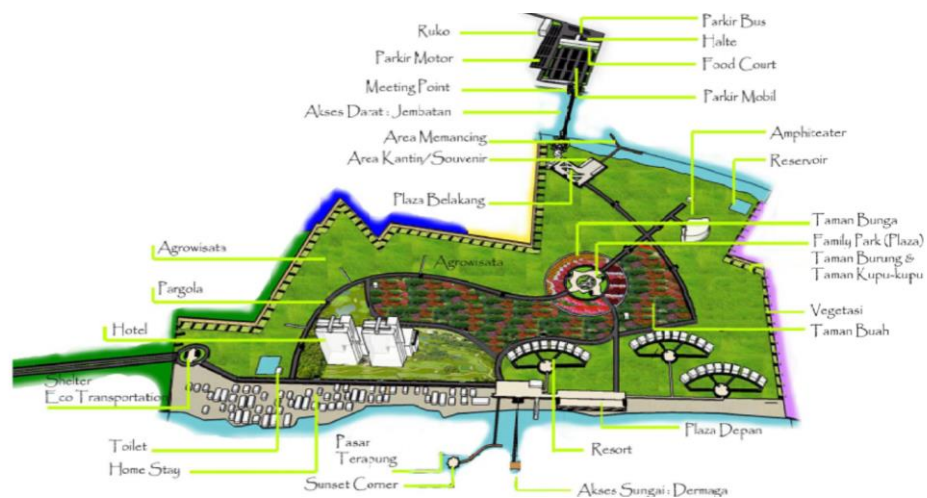
1. Lokasi Pulau Kemaro yang terletak pada jalur utama transportasi sungai, maka wisata yang dapat dikembangkan pada kawasan Pulau Kemaro memiliki orientasi yang besar ke arah Sungai Musi. Dengan demikian, *river front* menjadi pilihan utama;
2. Keberadaan Kelenteng Hok Ceng Bio sebagai sarana peribadatan umat Tridharma yang terkait dengan legenda Pulau Kemaro, maka dapat juga dikembangkan sebagai kawasan wisata historis, keagamaan, dan budaya;
3. Merencanakan ruang publik yang berorientasi ke badan Sungai Musi (air) akan dapat diciptakan semacam *marina city*;
4. Melakukan konservasi alam, maka beberapa kegiatan aktivitas wisata alam seperti kawasan wisata *Green and Blue* yang dapat terdiri dari Wisata Bunga dan Buah, kegiatan wisata pemancingan, dan kegiatan outbond lainnya.



Gambar 4-51 Peta Kepemilikan Lahan di Pulau Kemaro



Gambar 4-52 Rancangan Penataan Kawasan Pulau Kemaro



Gambar 4-53 Rancangan Penataan Kota Pusaka Pulau Kemaro

Berdasarkan Penataan dan DED Pulau Kemaro, rencana tata guna lahan (*land use*) pada kawasan Pulau Kemaro penggunaan utamanya diarahkan untuk kawasan industri wisata, dengan berdasarkan pada konsep *urban design continuous*, meliputi: Sub kawasan ritual keagamaan; Sub kawasan budaya rekreatif; Sub kawasan permukiman; Sub kawasan olah raga; Sub kawasan agro wisata bunga dan buah.

Sedangkan penggunaan ruang mikro (*space use*) untuk Pulau Kemaro dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Sub kawasan ritual keagamaan; meliputi area wisata ritual keagamaan seperti bangunan kelenteng dan pagoda, plaza umat sebagai persiapan dalam prosesi keagamaan, dan fasilitas penunjang rekreatif yang mencakup *great fountain*, mercusuar, anjungan/plasa penerima/dermaga penerima, serta *green barrier*.
2. Sub kawasan budaya rekreatif; yang meliputi area wisata umum, fasilitas anjungan dan dermaga, area mercusuar, dan teater terbuka.
3. Bangunan komersil; yang meliputi *art shop*, *open space*, *cottage*, *pedestrian*, *retail*, pusat informasi *Palembang Tourism Centre*, fasilitas restoran dan cafeteria.



Gambar 4-54 Detail Rancangan Penataan Kota Pusaka Pulau Kemaro

Peluang Investasi : **PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PULAU KEMARO**

Lokasi :

- Kelurahan : Kelurahan 1 Ilir dan Kelurahan Sei Lais
- Kecamatan : Kecamatan Ilir Barat I dan Kecamatan Kalidoni
- Kabupaten/Kota : Kota Palembang
- Provinsi : Provinsi Sumatera Selatan

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal : -
- Luas : 10 Ha
- Status : SHM
- Kuasa Lahan : Pemda Kota Palembang

- Kegiatan Investasi : - Pembangunan hotel/resort/cottage
 - Penataan kawasan daya tarik wisata
 - Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata lainnya

Perkiraan Nilai : Rp. 200 Milyar
 Investasi (Rp.)

4.4.6. Peluang Investasi Kabupaten Banyuasin

Peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Banyuasin adalah berupa kegiatan **Pembangunan Industri Pakan Ternak**. Gambaran peluang investasi yang siap ditawarkan di Kabupaten Banyuasin ini adalah sebagai berikut.

A. Aspek Potensi Dasar

Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang berada di jalur lintas timur Sumatera dengan didukung oleh sumberdaya alamnya yang melimpah menjadikan Kabupaten Banyuasin memiliki modal strategis dalam hal sektor perdagangan dan industri, maupun pengembangan sektor-sektor ekonomi baru lainnya. Kabupaten Banyuasin terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang terkandung dalam Bumi Sedulang Sedulang seperti sawit, minyak, karet serta kandungan mineral lainnya sebagai potensi sumber kekayaan alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dimasa mendatang. Disamping Sumber Daya Alam yang melimpah dan dapat ditumbuhkembangkan ada lagi potensi yang sangat menarik untuk mendapat perhatian dan perlu untuk dikembangkan yaitu objek dan

daya tarik wisata, dimulai dari danau yang sangat indah, Taman Nasional Sembilang, perkebunan karet dan sawit yang membentang luas, serta kekhasan budaya lokal.

Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyangga pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Api-Api (KEK Tanjung Api-Api), Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten/kota disekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumberdaya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dan pertambangan.

Karet, kelapa sawit dan kelapa merupakan komoditi perkebunan yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin, dibanding dengan komoditi kopi dan kakao. Hal ini terlihat dari jumlah produksi perkebunan rakyat untuk karet serta produksi Perkebunan Besar Milik Negara (PBMN) dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) Potensi perkebunan karet terutama tersebar di Kecamatan Betung, Banyuasin III, Rambutan dan Rantau Bayur. Untuk komoditas kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi hasil produksi bagi Sumatera Selatan sekitar 13%. Persebaran potensi perkebunan sawit di Kabupaten Banyuasin terutama berada di Kecamatan Pulau Rimau, Talang Kelapa, Betung dan Banyuasin III. Sementara untuk komoditas kelapa, Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi terbesar di Sumatera Selatan yaitu sekitar 62%. Potensi perkebunan kelapa tersebut tersebar di kawasan pesisir, terutama berada di Kecamatan Muara Telang, Muara Padang, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Pulau Rimau dan Rambutan.

Sektor tanaman pangan yang diproduksi oleh Kabupaten Banyuasin, antara lain: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Produksi tanaman padi di Kabupaten Banyuasin meliputi padi ladang, padi pasang surut dan padi lebak, dengan dominasi produksi yaitu untuk jenis padi pasang surut.

Produksi pada sawah dan padi ladang di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 1.458.610 ton yang dihasilkan dari 289.898 hektar luas panen. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 3.53 persen yakni dari 1.236.750 ton dengan luas panen 254.470 hektar.

Tabel 4-37 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2016

TAHUN	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
2013	212.236	207.099	943.104
2014	214.845	209.122	915.442
2015	270.988	254.470	1.236.750
2016	362.539	289.898	1.458.610

Sumber : Kabupaten Banyuasin Dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Banyuasin adalah penopang terbesar lumbung padi nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya, kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian tanaman padi masih perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi.

Produksi tanaman jagung hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuasin dengan total produksi mencapai 96.038 ton dan produksi terbesar yaitu Kecamatan Banyuasin I. Tanaman pangan lainnya yang dihasilkan di Kabupaten Banyuasin adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau yang terdapat di Kecamatan Betung, Kecamatan Tungkal Ilir, Talang Kelapa, Banyuasin I, Rambutan dan Muara Sugihan.

Tabel 4-38 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2016

TAHUN	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
2012	4.822	3.994	14.731
2013	5.689	5.151	21.917
2014	8.217	7.773	40.638
2015	16.678	15.583	104.170
2016	24.948	22.296	96.038

Sumber : Kabupaten Banyuasin Dalam Angka Tahun 2017

Pertanian hortikultura yang terdapat di Kabupaten Banyuasin meliputi tanaman buah-buahan dan sayuran. Tanaman buah-buahan diproduksi hampir di semua kecamatan. Jenis buah-buahan yang dihasilkan meliputi: mangga, jeruk, pepaya, sawo, durian, duku, nangka, jambu biji, rambutan dan pisang. Adapun komoditi tanaman sayuran yang dihasilkan di Kabupaten Banyuasin meliputi: kacang panjang, cabai, tomat, terong, timun, kangkung, bayam dan buncis.

Di sektor industri, pengembangan industri pakan ternak merupakan salah satu jenis industri yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut mengingat pakan ternak merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi suatu usaha peternakan, yaitu sekitar 70-90 % dari biaya produksi. Hasil-hasil produksi pabrikan pakan merupakan kebutuhan utama yang harus terjamin ketersediannya untuk peternak.

Sebagai gambaan, bahan utama untuk pakan ternak membutuhkan sekitar 60 % jagung, 30-40 % dedak, 10 % bungkil-bungkilan dan tepung ikan serta mineral, dimana bahan-bahan dasar yang diperlukan tersebut ada dan tersedia di Kabupaten Banyuasin.

B. Aspek SDM Tenaga Kerja

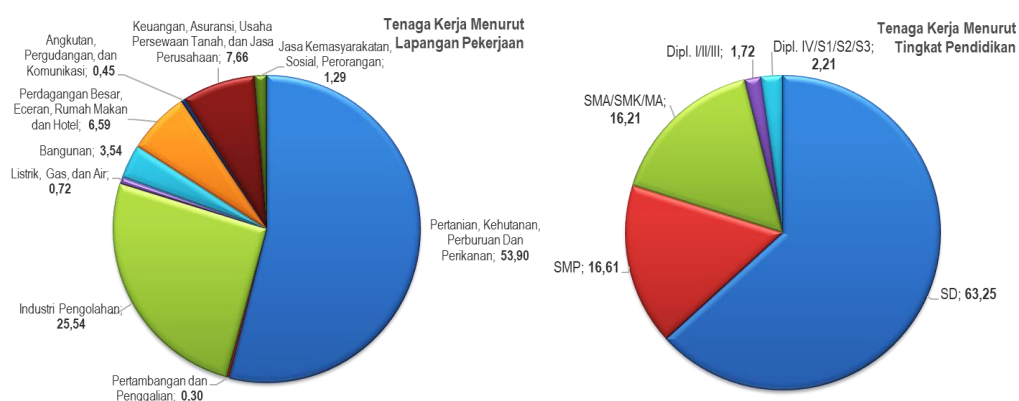
Tenaga kerja merupakan salah satu modal geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi ketenagakerjaan selalu berubah seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Dengan bertambahnya penduduk suatu wilayah maka bertambah pula jumlah tenaga kerja. Sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lapangan usaha.

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan syarat penting untuk menunjang pengembangan industri di suatu daerah. Hal ini dikarenakan sektor industri umumnya memerlukan asupan tenaga kerja yang kualitasnya relatif lebih baik dengan skill atau keterampilan khusus dan spesifik.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun 2015 sebanyak 381.520 orang. Dari angkatan kerja tersebut, jumlah orang yang bekerja sebanyak 360.305 orang dan menganggur sebanyak 21.215 orang. TPAK (Tingkat Parsitisipasi Angkatan Kerja) pada tahun 2015 di Kabupaten Banyuasin sebesar 66,77 persen. Dimana terdiri dari 84,93 untuk TPAK laki-laki dan 47,88 untuk TPAK perempuan.

Komposisi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha yang digeluti pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor primer (Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan) masih menjadi lapangan pekerjaan utama masyarakat di Kabupaten Banyuasin, dengan proporsi mencapai 53,90 %. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Kabupaten Banyuasin yang memang masih bertumpu pada sektor primer tersebut. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di sektor Industri Pengolahan komposisinya juga relatif cukup besar yakni hanya sebesar 25,54 %.

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, proporsi terbesar angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin adalah berpendidikan terakhir SD yaitu sebesar 63,25 % dan selanjutnya diikuti oleh angkatan kerja yang berpendidikan terakhir SMP/Sederajat sebesar 16,61 % dan SMA/Sederajat sebesar 16,21 %.



Gambar 4-55 Komposisi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Gambaran proporsi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang terdapat di Kabupaten Banyuasin tersebut secara sekilas menunjukkan kualitas yang memang masih kurang baik karena didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang minim, walaupun jika dilihat dari sisi kuantitas jumlahnya relatif cukup banyak.

C. Aspek Sarana Prasarana

Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang berada di jalur lintas timur Sumatera dengan didukung oleh sumberdaya alamnya yang melimpah menjadikan Kabupaten Banyuasin memiliki modal strategis dalam hal sektor perdagangan dan industri, maupun pengembangan sektor-sektor ekonomi baru lainnya.

Terlebih lagi, Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyangga pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Api-Api (KEK Tanjung Api-Api), Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten/kota disekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumberdaya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dan pertambangan.

Dengan posisi yang demikian strategis maka tidak mengherankan jika ketersediaan sarana prasarana dasar, khususnya transportasi, di Kabupaten Banyuasin relatif cukup memadai untuk menunjang kegiatan dan aktifitas ekonomi masyarakatnya. Sarana dan prasarana dasar seperti listrik dan telekomunikasi sudah terkoneksi hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Belum lagi sarana transportasi, Kabupaten Banyuasin dilalui oleh jalan nasional, provinsi dan kabupaten, serta pelabuhan di Tanjung Api-Api.

D. Aspek Pasar

Berkembangnya industri peternakan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap pakan tersebut karena industri pakan ternak memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) berhubungan dengan output pakan yang digunakan sebagai makanan ternak dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang berhubungan dengan kebutuhan akan input pakan terutama jagung. Oleh karena itu, bisnis pakan merupakan usaha yang sangat strategis.

Pangsa pakan terhadap total biaya produksi mencapai 70%, sementara itu biaya bahan baku mencapai 85-90% dari total pakan. Sedangkan pangsa biaya lainnya seperti DOC (bibit) hanya mencapai 13%. Di sisi lain, 83% produksi pakan dialokasikan untuk unggas, 7% untuk budidaya ikan, 6% untuk babi, 1% untuk pakan ternak lainnya. Dengan demikian, tingginya pangsa pakan terhadap biaya produksi pada usaha ternak di Indonesia mengindikasikan bahwa produk pakan memiliki prospek yang menjanjikan selaras dengan berkembangnya industri pakan sebagai pendukung dari pembangunan dalam dunia peternakan.

Belakangan ini perkembangan industri peternakan semakin menurun kinerjanya. Adanya krisis moneter telah menyebabkan hampir seluruh produsen skala kecil termasuk industri

pakan ternak menutup usahanya dan hanya sedikit perusahaan terintegrasi yang mampu bertahan. Terlepas dari penyediaan bahan baku pakan, *feedmill* (perusahaan pakan) merupakan faktor vital dalam usaha budi daya ternak. Namun, diduga adanya kecenderungan pertumbuhan pabrik pakan ternak yang sampai saat ini telah membentuk oligopoli ditunjukkan dengan adanya (1) proporsi produksi pakan dari pabrik pakan berskala besar yang berjumlah delapan pabrik (12%) memiliki pangsa pasar 40-60%, (2) perusahaan peternakan skala besar melakukan integrasi vertikal.

Walaupun peluang pasar industri pakan ternak di Indonesia masih relatif besar, namun yang perlu menjadi perhatian adalah struktur industri pakan di Indonesia saat ini yang dapat dikatakan merupakan oligopoli longgar dengan rata-rata nilai rasio konsentrasi pasar sebesar 41,33 persen. Sementara itu, nilai rata-rata *Minimum Efficiency Scale* sebesar 16,61 persen yang berarti hambatan masuk pasar termasuk tinggi. Nilai MES yang tinggi tersebut dapat menjadi penghalang bagi berkembangnya perusahaan baru dalam pasar industri pakan ternak di Indonesia.

Terdapat sejumlah alasan mengapa pendirian pabrik pakan ternak sangat potensial untuk dikembangkan. Alasan pertama tentu saja adalah ketersediaan pasar pakan ternak baik lokal maupun di luar daerah. Permintaan pasar terhadap pakan ternak mencapai ratusan ribu. Pakan ternak ditandai oleh permintaan pasar yang senantiasa tumbuh signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Permintaan pakan ternak tetap tinggi sekalipun kondisi dunia sedang dalam krisis, sebagai contoh, bahkan ketika wabah flu burung menyerang, secara umum peternakan unggas tidak mati.

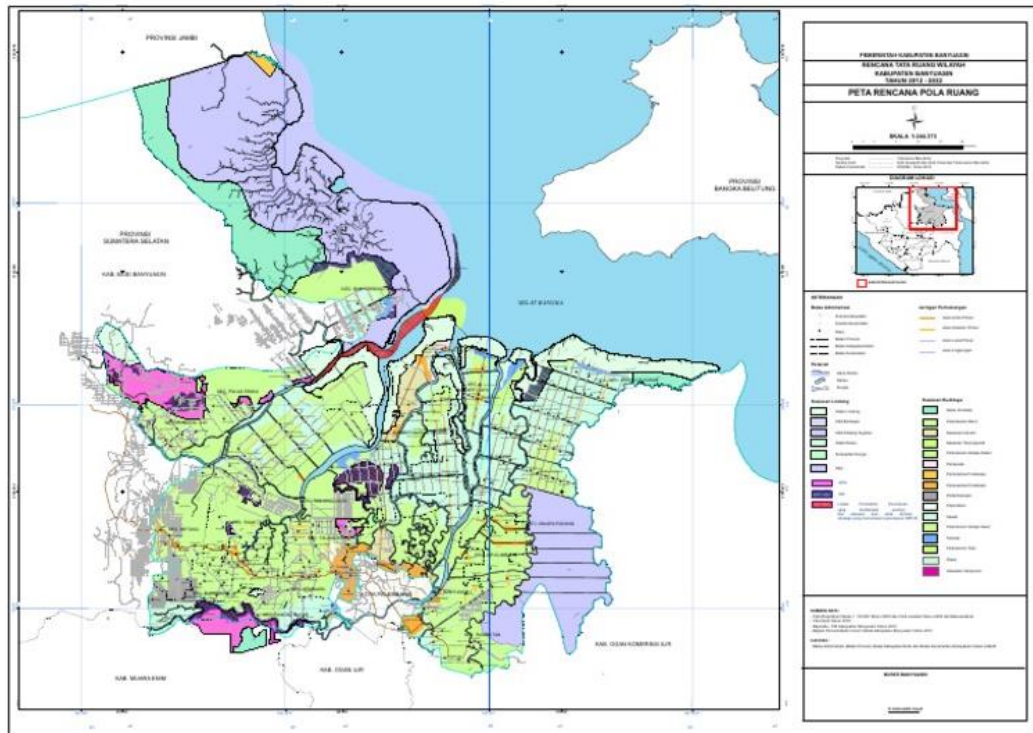
Alasan kedua yang menjadi daya tarik investasi pabrik pakan adalah ketersediaan bahan baku utama pakan berupa Jagung yang mudah dan murah sehingga biaya produksi pembuatan pakan dapat ditekan sampai pada tingkat minimal. Pakan merupakan salah satu komoditi penting yang termasuk pada subsistem agribisnis hulu. Ketersediaan pakan yang berkualitas dan murah menjadi prasyarat bagi tumbuhnya industri peternakan yang maju. Pakan yang murah akan membuat peternak mampu meningkatkan skala usaha dan keuntungan per satuan, sedangkan pakan yang berkualitas akan meningkatkan konversi pakan sehingga proses pemberian pakan menjadi lebih efisien.

E. Aspek Keterlibatan Stakeholders

Sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang cukup luas, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), pengembangan industri pakan ternak di Kabupaten Banyuasin diharapkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian di sektor hulu maupun hilir industri tersebut. Keterlibatan berbagai stakeholders terkait industri ini memang dipandang cukup besar.

F. Aspek Peraturan Perundangan

Arahan pengembangan lokasi industri pakan ternak di Kabupaten Banyuasin yakni di Kecamatan Talangkelapa, tepatnya di sekitar Desa Gasing. Dalam RTRW Kabupaten Banyuasin, arahan pengembangan Kecamatan Talangkelapa salah satunya memang sebagai kawasan pengembangan industri. Lokasi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Talangkelapa tersebut dikenal dengan sebutan Kawasan Industri Gasing.



Gambar 4-56 Rencana Pola Ruang Kabupaten Banyuasin

Sedianya Pemda Kabupaten Banyuasin tengah mengembangkan delapan kluster kawasan guna menjadi prioritas pembangunan kedepan. Pengembangan delapan kawasan menunjang pembangunan di Banyuasin tersebut, terdiri dari kawasan penyangga beras, yang terdapat tiga delta penghasil beras di Sumsel. Selanjutnya, kawasan zona ekonomi yang berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Tanjung Carat dan Pelabuhan dermaga satu pintu yang direncanakan akan dibangun di seputaran pelabuhan Tanjung Api-Api. Kawasan industri Tanjung Api-Api tersebut, akan disangga oleh Kawasan Industri Gasing di Kecamatan Talang Kelapa yang dimulai dari kawasan Talang Keramat hingga jembatan Gasing Tanjung Lago.

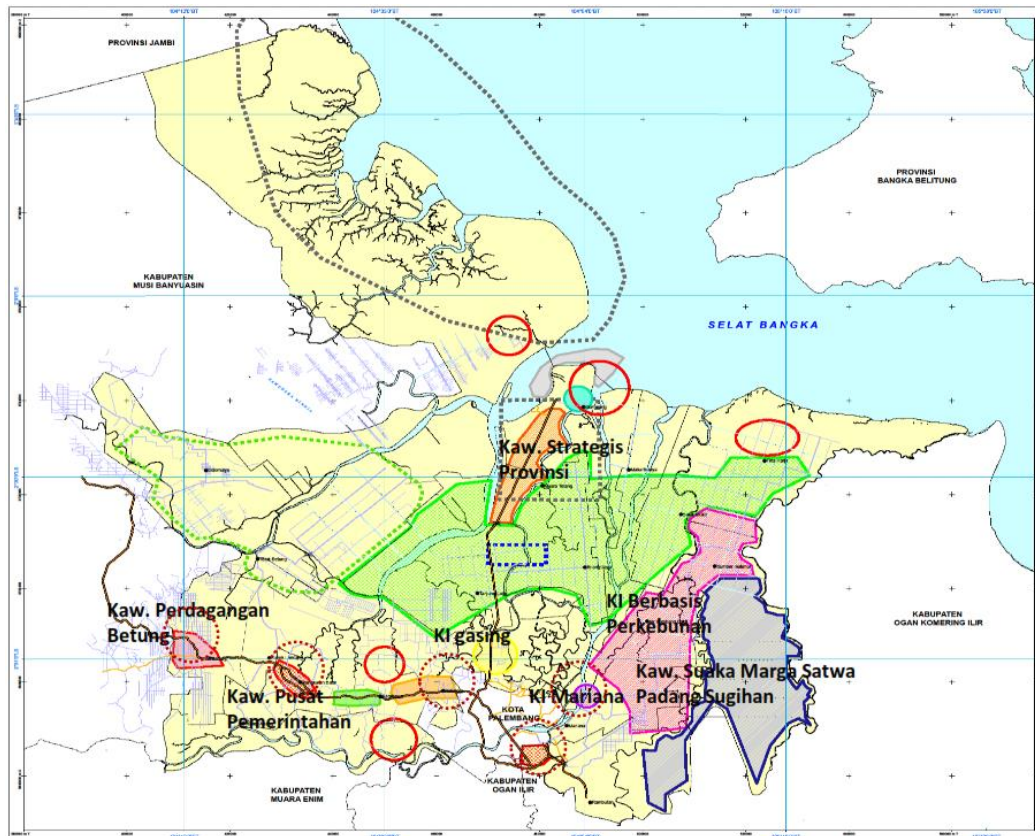
G. Aspek Lingkungan

Konsep pembangunan yang ramah lingkungan (*sustainable development*) harus menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan industri pakan ternak di Kabupaten Banyuasin.

Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada aspek lingkungan sekitar dan fungsi kawasan yang lebih luas, yang pada akhirnya justru akan sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

H. Aspek Lahan

Kawasan Industri Gasing di Kecamatan Talang Kelapa pada dasarnya merupakan kawasan industri yang dikembangkan untuk menyangga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Tanjung Api-Api sendiri merupakan nama jalan yang membentang lurus, mulai dari Simpang Asrama Haji KM 9 hingga Pelabuhan Penyeberangan Penumpang, sebelum Kawasan Sungsang. Jalan yang panjangnya sekitar 60 km ini, untuk menempuh jarak tersebut setidaknya dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam.



Gambar 4-57 Kluster Kawasan Pengembangan Prioritas di Kabupaten Banyuasin

Saat ini sepanjang jalan Tanjung Api-Api (khususnya di sekitar Gasing) telah banyak dipenuhi berbagai pabrik/perusahaan hingga kompleks pergudangan. Setidaknya ada lebih dari 20 perusahaan yang sudah eksisting. Dominannya memang bergerak di sektor

industri kelapa sawit atau CPO, sebagian ada yang bergerak di konstruksi, dan ada juga yang bergerak di sektor gas industri.

ULTIMATE (TENTATIVE) KEK TAA DAN KAWASAN INTERKONEKSINYA, 2025



Gambar 4-58 Rencana Pengembangan KEK Tanjung Api-Api

Meski KEK TAA pembangunannya belum rampung, tetapi di beberapa kawasan sekitar TAA sudah terlihat berdiri berbagai perusahaan industri. Akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut dibangun jauh dari lokasi KEK. Kebanyakan perusahaan hanya tersebar mulai dari Bandara SMB II sampai ke Kecamatan Tanjung Lago. Sementara terus ke atas mendekati pelabuhan seperti Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Anyar, belum terlihat adanya perusahaan/industri yang dibangun.

Beberapa perusahaan/industri yang terdapat di sekitar Kawasan Industri Gasing diantaranya adalah PT. Banyuasin Nusantara Sejahtera, PT. Dock Marine Mandiri, PT. Dratama Mulia, PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia, PT. Berkat Sawit Sejati, PT. Mankota Andalan Sawit, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. SBA Agro, PT. Inti Beton Sukses Pratama, PT. Mardec Musi Lestari Industri, PT. Waskita Beton, PT. Buana Batu Cemerlang PT. S.A.S dan PT. Samator Gas Industri.



Gambar 4-59 Perusahaan/Industri Eksisting di Kawasan Industri Gasing

Peluang Investasi : **PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK**

Lokasi :

- Desa : Gasing
- Kecamatan : Talang Kelapa
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Banyuasin
- Provinsi : Provinsi Sumatera Selatan

Status Lahan :

- No. SK/Tanggal :
- Luas : 549 Ha (terbagi dalam 13 bidang lahan)
- Status : SHM
- Kuasa Lahan : Masyarakat

Kegiatan Investasi : - Pembangunan Industri Pakan Ternak

Perkiraan Nilai
Investasi (Rp.) : US\$ 150 juta





BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis pada Bab 3 dan Bab 4 sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi investasi unggulan di daerah-daerah kajian didasarkan selain aspek potensi sumberdaya alam yang tersedia juga pada aspek-aspek potensi ekonomi yang lainnya seperti ketersediaan regulasi yang mendukung dalam peningkatan investasi, aksesibilitas, interaksi ekonomi sectoral melalui wilayah basis dan non-basis (melalui analisis LQ), dan potensi sumberdaya manusia pengelolanya.
2. Peluang-peluang usaha yang dianalisis dalam menentukan investasi yang akan ditawarkan kepada investor didasarkan pada 9 aspek pertimbangan, yaitu (1) aspek ketersediaan bahan baku, (2) aspek SDM yang kompeten, (3) aspek ketersediaan sarana dan prasarana, (4) aspek pasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, (5) aspek pasar dalam dan luar negeri, (6) aspek keterlibatan stakeholder UKM dan pengusaha besar, (7) aspek kesesuaian dengan peranan regulasi dan perundangan yang berlaku, (8) aspek lingkungan, dan (9) aspek ketersediaan dan status kepemilikan lahan.
3. Pertimbangan terakhir dalam kaitan peluang investasi yang ditawarkan adalah perkiraan besaran angka/ nilai investasi yang diperlukan. Besaran investasi tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan nilai investasi mulai penyusunan rencana induk pengembangan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED), penyusunan studi kelayakan dan amdal, hingga pembangunan konstruksi dan sarana prasarana infrastruktur dasar.

5.2. Saran dan Implikasi

Dari kesimpulan di atas, maka dapat disarankan adalah:

1. Salah satu masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, sehingga sering pula dikatakan masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika ada modal dan modal itu diinvestasikan secara produktif maka hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Saat ini hampir di semua negara, khususnya negara-negara berkembang membutuhkan investasi sebagai modal. Investasi tersebut merupakan suatu hal yang dipandang semakin penting bagi pembangunan suatu negara, sehingga kehadiran

investor nampaknya tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa kehadiran investor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, sosial politik, penegakan hukum, dan lain-lain.

2. Investasi atau penanaman modal sedianya memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, namun juga bagi perekonomian negara tempat investasi itu ditanamkan. Dewasa ini banyak negara-negara yang menerapkan kebijakan kemudahan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal tersebut dilakukan mengingat dampak positif kegiatan investasi akan menggerakkan kegiatan ekonomi negara, menyediakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan output yang dihasilkan, serta menghemat devisa atau bahkan menambah devisa. Terdapat beberapa gambaran mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan penduduk di dalamnya, sebagai berikut:
 - a. Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, membuka lapangan kerja, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru;
 - b. Investasi akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan); dan
 - c. Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.
3. Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi mengenai potensi-potensi dan peluang-peluang investasi yang dimiliki daerah (kabupaten/kota) yang menjadi lokus kajian. Atas dasar hal tersebut nantinya diharapkan akan memberikan kemudahan bagi publik, khususnya para calon investor, dalam mencari peluang-peluang investasi yang terbuka dan selanjutnya bisa menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada tersebut.
4. Pesatnya kemajuan dan perkembangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia akibat aktifitas masyarakat yang terus berbenah dan membangun daerahnya, serta mengelola potensi sumber daya alam dan aset manusia yang dimilikinya, merupakan indikasi kuat terkait semakin terbukanya peluang-peluang investasi di daerah. Dengan adanya peta potensi dan peluang investasi daerah ini, maka diharapkan dapat semakin meningkatkan daya tarik investasi yang ada di setiap daerah.